



Terakreditasi
No 607/AU2/P2MI-LIPI/03/2015

Vol 16 No 4 Desember 2017
ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528 - 0430

Jurnal

Penelitian Kesejahteraan Sosial

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

VOL 16 No 4 Desember 2017 : 333 - 438

Kebutuhan Layanan Asuh Remaja Berorangtua Otoriter:
Konsep Pencegahan Sikap *Bullying*
The Need for Juvenile Parenting Services with Authoritarian Parents:
The Prevention Concept of Bullying Attitude
(Ikawati)

Upaya Masyarakat Perbatasan Antarnegara dalam Mempertahankan Kesejahteraan Sosial
Effort of Between-Countries Border Society in Maintaining Social Welfare
(Elly Kuntjorowati dan Sri Prastyowati)

Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Berbasis Masyarakat Desa
The Social Service For Elderly People on Village Community Service Basis
(Irmawan)

Modal Sosial Petani Tembakau untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Social Capital of Tobacco Farmer for Social Welfare Improvement
(Fatwa Nurul Hakim dan Gunawan Wibisono)

Ketahanan Sosial dan Perubahan Ekologi Hutan:
Studi pada Masyarakat Sekitar Hutan di Kabupaten Simalungun
Social Resilience and Forest Ecology Change:
A study on around forest society in Simalungun District
(Robert Siburian)

Keluarga Kurang Mampu di Banda Aceh dan Pidie
Poor Families In Banda Aceh and Pidie
(Daud Bahransyaf)

Pendampingan Women Crisis Center 'Aisiyiah' pada Anak Korban Inses
Assistance of "Aisiyiah" Women Crisis Center to Children of Incest Victims
(Tateki Yoga Tursilarini)

Pengentasan Kemiskinan melalui Bantuan Sosial Non Tunai
Poverty Reduction through Non-Cash Social Assistance
(Soetji Andari)

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(B2P3KS)

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial	VOL 16	No 4	Hal 333 - 438	Yogyakarta Desember 2017	ISSN 1412-6451 E-ISSN 2528-0430
---	-----------	---------	------------------	-----------------------------	------------------------------------

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Terakreditasi No 607/AU2/P2MI-LIPI/03/2015
Volume 16 No 4 Desember 2017, ISSN 1412-6451, E-ISSN 2528-0430

Terbit empat kali setahun pada bulan Maret, Juni, September dan Desember

diterbitkan

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta
(SK Kuasa Pengguna Anggaran B2P3KS Yogyakarta Nomor: 05 Tahun 2017)
Keputusan Kepala Bidang Dokumentasi PDII LIPI No. 12.360/JI.3.02/SK.ISSN/2001
PDII LIPI SK. No. 0005.25280430/JI.3/SK.ISSN/2016

Visi

Penelitian sebagai landasan ilmiah pembangunan kesejahteraan sosial

Misi

Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial
Apresiasi kerjasama antarlembaga dan komunitas ilmiah
Kontribusi bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial

Penanggung Jawab: Kepala B2P3KS Yogyakarta

Reviewer

Prof. Dr. Phil Janianton Damanik, M.Si (Pembangunan Sosial) Universitas Gadjah Mada
Drs. Latiful Khuluq, MA, BSw, Ph.D (Kesejahteraan Sosial) UIN Sunan Kalijaga
Dr. Harmona Daulay, S.Sos, M.Si (Sosiologi) Universitas Sumatera Utara
Dr. Tukino (Kesejahteraan Sosial) STKS Bandung

Editor in Chief

Dr. Gunanto Surjono, SH, M.Si (Kebijakan dan Perencanaan Sosial) B2P3KS

Section Editor/Copy Editor

1. Dra. Elly Kuntjorowati, M.Si (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
2. Dra. Chatarina Rusmiyati, M.Si (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
3. Dr. Istiana Hermawati, S.Pd, M.Sos (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
4. Dr. Soetji Andari, Dra., M.Si (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
5. Tyas Eko Raharjo F. S.ST, MA (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
6. Irmawan, S.IP, M.Si (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS

Layout Editor

A.Nururrochman Hidayatulloh, S.Sos

Sekretariat

Dra. Suhartanti
Sugiyarto, SH

Jl. Kesejahteraan Sosial 1, Sonosewu, Yogyakarta
Tromol Pos 65 Kode Pos 55002, Telpon (0274) 377265 Fax. (0274) 373530
e-mail: jpkasy@yahoo.co.id
jpkasy.yogyakarta@kemsos.go.id
e-journal.kemsos.go.id/index.php/jpks

Percetakan:

Ash-Shaff

Isi di luar tanggung jawab percetakan

**Ketentuan Penulisan Naskah
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS)**

Materi dan jenis tulisan:

1. Miniaturisasi dari hasil penelitian.
2. Ulasan terhadap hasil penelitian untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan hasil implikasinya bagi perorangan, kelompok, dan masyarakat.
3. Hasil sampingan (by research) penelitian.

Topik dan Substansi Tulisan:

1. Bidang sosial, terutama bidang kesejahteraan sosial (misalnya: kemiskinan, kecacatan fisik dan mental, keterlantaran, ketunasosialan, ketunasusilaan, korban bencana, perencanaan dan pemberdayaan sosial, dan permasalahan lain yang berkaitan dengan orang dan masyarakat yang menghadapi keterbatasan sosial)
2. Deskripsi permasalahan sosial, meliputi pengungkapan fakta yang ada, prediksi permasalahan implikasinya bagi perorangan, kelompok, dan masyarakat dan konsep model dalam upaya pemecahan masalah kesejahteraan sosial berpijak pada hasil pengamatan intens dan penelitian.

Teknik Penyajian:

1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan baku.
2. Proporsi penyajian; (a) Panjang judul tidak lebih dari dua baris ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris (b) Abstrak ditulis dalam satu alinea, dalam bahasa Inggris dan Indonesia, bahasa Indonesia maksimal 250 kata, bahasa Inggris 150-200 kata, ditulis dalam besaran huruf (font) Times New Roman 10 lebih kecil dari besaran huruf batang tubuh (font Times New Roman 12) (c) kata kunci setelah abstrak ditulis minimal tiga kata, maksimal lima kata.
3. Penyajian tabel atau bagan alur (flowchart) tidak lebih 25% dari panjang tulisan. Tabel dibuat tanpa garis vertikal.
4. Pustaka Acuan yang digunakan paling lama lima tahun sejak dibuatnya artikel dan ditulis dalam font lebih kecil (Times New Roman 10) dari batang tubuh (Times New Roman 12). Pustaka acuan ditulis berdasarkan gaya penulisan APA (American Psychological Association) dengan pola: Nama Belakang Pengarang, Inisial (kecuali nama orang Indonesia), tahun penerbitan ditulis dalam kurung, Judul buku (Edisi jika edisinya lebih dari satu), tempat diterbitkan: Penerbit. Contoh: Norvig, Karen. (2013). An Introduction to Social Welfare. New York: Graw Hill.
5. Sistematika tulisan tersusun dalam: a. Judul (Indonesia dan Inggris); b. Nama penulis; c. Biodata penulis (nama lembaga, alamat lembaga dan Email); d. Abstrak (dalam bahasa Inggris dan Indonesia); e. Pendahuluan; f. Penggunaan Metode Penelitian; g. Hasil dan Pembahasan (ditulis dalam judul sesuai dengan topik dan lokasi penelitian); h. Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi (apabila diperlukan); i. Pustaka Acuan.

Panjang Tulisan:

1. Antara 10 sampai dengan 25 halaman (2.500 s.d. 6.000 kata, tidak termasuk abstrak)
2. Diketik 1,5 spasi di atas kertas kuarto (A4)
3. Menggunakan tipe huruf (font) Times New Roman 14 untuk judul, Times New Roman 12 untuk batang tubuh tulisan, dan Times New Roman 10 untuk catatan kaki (foot note), sumber di bawah tabel, dan pustaka acuan.
4. Naskah dilampiri dengan disket atau CD (Soft Copy) dari tulisan bersangkutan.
5. Redaksi berhak mengubah naskah yang masuk untuk diterbitkan, tanpa mengubah esensi materi yang disampaikan, dan mengatur urutan pemuatan naskah menurut pertimbangan aktualitas serta kesesuaian naskah dengan misi penerbitan.
6. Naskah yang dimuat diberi imbalan, sedang yang tidak dapat dimuat dikirim kembali ke alamat penulis apabila disertai perangko secukupnya.

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Volume 16 No 4 Desember 2017
ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528-0430

Daftar Isi

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Kebutuhan Layanan Asuh Remaja Berorangtua Otoriter:
Konsep Pencegahan Sikap <i>Bullying</i>
<i>The Need for Juvenile Parenting Services with Authoritarian Parents:
The Prevention Concept of Bullying Attitude</i>
Ikawati | 333 - 344 |
| 2. | Upaya Masyarakat Perbatasan Antarnegara dalam Mempertahankan Kesejahteraan Sosial
<i>Effort of Between-Countries Border Society in Maintaining Social Welfare</i>
Elly Kuntjorowati dan Sri Prastyowati | 345 - 358 |
| 3. | Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Berbasis Masyarakat Desa
<i>The Social Service For Elderly People on Village Community Service Basis</i>
Irmawan | 359 - 368 |
| 4. | Modal Sosial Petani Tembakau untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial
<i>Social Capital of Tobacco Farmer for Social Welfare Improvement</i>
Fatwa Nurul Hakim dan Gunawan Wibisono | 369 - 380 |
| 5. | Ketahanan Sosial dan Perubahan Ekologi Hutan:
Studi pada Masyarakat Sekitar Hutan di Kabupaten Simalungun
<i>Social Resilience and Forest Ecology Change:
A study on around forest society in Simalungun District</i>
Robert Siburian | 381 - 398 |
| 6. | Keluarga Kurang Mampu di Banda Aceh dan Pidie
<i>Poor Families In Banda Aceh and Pidie</i>
Daud Bahransyaf | 399 - 412 |
| 7. | Pendampingan Women Crisis Center ‘Aisyiyah’ pada Anak Korban Inses
<i>Assistance of “Aisyiyah” Women Crisis Center to Children of Incest Victims</i>
Tateki Yoga Tursilarini | 413 - 426 |
| 8. | Pengentasan Kemiskinan melalui Bantuan Sosial Non Tunai
<i>Poverty Reduction through Non-Cash Social Assistance</i>
Soetji Andari | 427 - 438 |

Editorial

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) volume 16 nomor 4 ini dibuka dengan tulisan Ikawati berjudul *Kebutuhan Layanan Asuh Remaja Berorangtua Otoriter: Konsep Pencegahan Sikap Bullying*, diikuti tulisan Elly Kuntjorowati dan Sri Prastyowati berjudul *Upaya Masyarakat Perbatasan Antarneegara dalam Mempertahankan Kesejahteraan Sosial*. Topik lain ditulis Irmawan tentang *Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Berbasis Masyarakat Desa*, sementara Fatwa Nurul Hakim dan Gunawan Wibisono membahas tentang *Modal Sosial Petani Tembakau untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial*, selanjutnya Robert Siburian membahas tentang *Ketahanan Sosial dan Perubahan Ekologi Hutan: Studi pada Masyarakat Sekitar Hutan di Kabupaten Simalungun*. Topik berikut dibahas oleh Daud Bahransyaf tentang *Keluarga Kurang Mampu Di Banda Aceh dan Pidie*, sedangkan Tateki Yoga Tursilarini menulis tentang *Pendampingan Women Crisis Center 'Aisyiyah' pada Anak Korban Inses*. Menutup volume 16, Nomor 4 Desember 2017 Soetji Andari mengajukan tulisan dengan judul *Pengentasan Kemiskinan melalui Bantuan Sosial Non Tunai*.

Redaksi

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528 - 0430

Vol 16 No 4 Desember 2017

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa ijin dan biaya.
Keywords are based from articles. Abstract may be reproduced without permission and cost.

Ikawati (B2P3KS Yogyakarta)

Kebutuhan Layanan Asuh Remaja Berorangtua Otoriter:

Konsep Pencegahan Sikap *Bullying*

The Need for Juvenile Parenting Services with Authoritarian Parents:

The Prevention Concept of Bullying Attitude

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 4 Desember 2017, hal 333 - 344

This study is aimed to determine the relationship of authoritarian parent attitudes with the teenagers' tendency of behaving bullying. The research was conducted in Yogyakarta Special Region. The subjects of the research were determined purposively by the following criteria: male or female adolescents, in the age range from 12 to 17 years old, resided in Yogyakarta, with the education background of junior high school or that of equivalent, and had complete parents. Data collection techniques were carried out through questionnaire distribution to 30 respondents and the objects of research were the authoritarian parents' attitudes and that of teenagers' tendency to behave bullying. The result of the research was measured and calculated by using product Moment program of SPS Sutrisnohadi (2000) version with the rxy value result of 0,463 with $p = 0,019$ and determination coefficient of 0,309. These results can be concluded that the contribution of authoritarian parents' attitudes toward the teenagers' tendency to behave bullying is at 30.9 percent. It means that the teenagers' tendency to behave bullying is at 30.9 percent by having authoritarian parents. Based on the research results, it is recommended to the Ministry of Social RI through the Directorate of Family Empowerment and Social Institution to improve its programs through family strengthening (such as parenting pattern / good parents' attitude) in order to build up children's potentiality as potential future

Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan sikap orangtua otoriter dengan kecenderungan remaja berperilaku *bullying*. Lokasi penelitian adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Subyek penelitian ditentukan secara *purposive* dengan kriteria berikut: remaja (baik laki-laki maupun perempuan), berusia 12-17 tahun, berdomisili di Yogyakarta, berpendidikan SMP/ sederajat, dan mempunyai orangtua lengkap. Teknik pengumpulan data melalui penyebaran *questionnaire*/angket terhadap 30 responden dan objek penelitiannya adalah sikap orangtua otoriter dan kecenderungan remaja berperilaku *bullying*. Hasil penelitian dihitung dengan menggunakan penghitungan program *product Moment* dari SPS Sutrisnohadi (2000) dengan hasil nilai r_{xy} 0,463 dengan $p = 0,019$ dan koefisien determinasi 0,309. Hasil tersebut dapat disimpulkan, bahwa sumbangan sikap orangtua otoriter terhadap kecenderungan remaja berperilaku *bullying* adalah 30,9 persen. Artinya, dengan sikap orangtua yang otoriter mempunyai kecenderungan remaja berperilaku *bullying* sebesar 30,9 persen. Berdasar hasil penelitian, direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial, untuk meningkatkan program-programnya melalui penguatan keluarga (pola asuh /sikap orangtua yang baik) dalam rangka membentuk kemampuan anak sebagai potensi generasi mendatang agar nantinya dapat menjadi sumber daya manusia

generation so that later they are able to either become smart and qualified human resources and posses good moral intelligence. It is also recommended that parents behave attentively and compassionately and do not impose their will to their children. In this way, children may develop themselves to be having morality, responsible, intelligent and qualified human resources and so that they can prevent the tendency to behave bullying attitude.

Keywords: *parents; authoritarian; adolescent; bullying*

yang cerdas dan berkualitas serta mempunyai kecerdasan moral yang baik. Direkomendasikan juga agar orangtua bersikap penuh perhatian dan kasih sayang dan tidak memaksakan kehendaknya kepada anak. Dengan demikian anak dapat berkembang menjadi sumber daya manusia yang bermoral, bertanggungjawab, cerdas dan berkualitas dan sehingga dapat mencegah anak berkecenderungan melakukan perilaku *bullying*.

Kata kunci: *orangtua; otoriter; remaja; bullying*

Elly Kuntjorowati dan Sri Prastyowati (B2P3KS Yogyakarta)
Upaya Masyarakat Perbatasan Antarneegara dalam Mempertahankan Kesejahteraan Sosial
Effort of Between-Countries Border Society in Maintaining Social Welfare
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 4 Desember 2017, hal 345 - 358

This research is aimed to describe the border community efforts between countries in West Kalimantan especially in maintaining social welfare. This study has 60 respondents taken out of people from rural communities at Jagoi, Jagoi Babang Sub-District, Bengkayang District, West Kalimantan Province, and supportive informants such as stakeholders and community leaders. This decision was carried out purposively in accordance with the needs of relevant data to this research. The data was collected through in-depth interviews, observation and documentation study on secondary data related to the research topic. The respondents were selected on the base of appropriateness to the research goal criteria. The data captured are analyzed qualitatively and are presented in percentage to gain some information which described the border society efforts in maintaining the social welfare. The results showed that the location of the village of Jagoi, Jagoi Babang Sub- District was very far away from the center of government in neither central nor local government, and it was really difficult to reach the location because it was located in the mountainous area, so that the infra-structure built up there was still very inadequate. Education and health facilities were still very

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya masyarakat perbatasan antarnegara di Kalimantan Barat dalam mempertahankan kesejahteraan sosial. Responden penelitian ini berjumlah 60 orang terdiri dari masyarakat desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, ditambah informan pendukung antara lain *stakeholder* dan tokoh masyarakat. Penentuan ini dilakukan secara purposive sesuai dengan kebutuhan data yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan studi dokumentasi terhadap data sekunder yang terkait dengan topik penelitian. Penentuan responden dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sesuai tujuan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif disajikan dalam persentase untuk memperoleh informasi yang menjelaskan tentang upaya masyarakat perbatasan dalam mempertahankan kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang sangat jauh dari pusat pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, dan sulit dijangkau karena berada di pegunungan, sehingga infrastruktur di lokasi tersebut masih sangat kurang memadai.

minimal, Human Resources capability was still at very low level, there were a lot of unemployment, index of poverty was very high, so that it was much more difficult to maintain their social welfare, and their economic activities depended much on their neighbor country of Malaysia, which in turn brought an impact on the lack of nationalism because of their expectation in earning more Ringgit rather than Rupiah.

Keywords: *inter-state border; social security of society*

Sarana pendidikan dan kesehatan masih sangat minim, SDM masih sangat rendah, banyak pengangguran, dan angka kemiskinan masih sangat tinggi, sehingga mereka lebih sulit untuk mempertahankan kesejahteraan sosialnya, kegiatan ekonomi mereka masih sangat tergantung pada negara tetangga Malaysia, yang berdampak pada minimnya nasionalisme karena lebih mengharapkan ringgit dari pada rupiah.

Kata kunci: *perbatasan antarnegara; ketahanan sosial masyarakat*

Irmawan (B2P3KS Yogyakarta)

Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Berbasis Masyarakat Desa

The Social Service For Elderly People on Village Community Service Basis

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 4 Desember 2017, hal 359 - 368

The longer life-time expectancy is one of indicators of national development success. Yogyakarta Special Region elderly people has a life-time expectancy of 74 years old and it is the highest in Indonesia. The length of life-time expectancy brings some impact on the growth of elderly people number in Yogyakarta. It is 12.6 percent of the total population there. This condition is bringing some consequences in providing social services to the elderly people so that they can live a happy and healthy life indeed. This research is aimed to comprehend the existing social service for elderly people on village community service basis. The research was conducted at Dusun Prenggan, Sidomulyo Village, Bambanglipuro Sub-District, Bantul District, in Yogyakarta Province. The subjects of this research are social organization activists, public figures as social volunteers and the objects are social service activities for elderly people. Data collection techniques used: 1) direct interviews with the board of social organizations and members and community leaders, 2) Observation of social services activities, 3) Documents review. The result of the research showed that elderly people received various social services such as feeding, providing free medical examination, involving elderly people for gymnastics, giving spiritual guidance, praying and encouraging

Usia harapan hidup tinggi merupakan salah satu dari indikator keberhasilan pembangunan nasional. Lanjut usia (lansia) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki usia harapan hidup 74 tahun dan termasuk tertinggi di Indonesia. Tingginya usia harapan hidup mengakibatkan jumlah lansia di Yogyakarta mengalami perkembangan pesat yakni 12,6 persen dari total penduduk. Kondisi tersebut membawa konsekuensi untuk memberikan pelayanan sosial bagi lansia agar mereka hidup bahagia, sejahtera lahir dan batin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelayanan sosial yang sedang berjalan bagi lansia berbasis masyarakat desa. Lokasi penelitian di Dusun Prenggan Sidomulyo Bambanglipuro Bantul Yogyakarta. Subjek penelitian adalah pengurus organisasi sosial, tokoh masyarakat sebagai relawan sosial, dan lansia, sedangkan objek penelitian adalah kegiatan pelayanan sosial bagi lanjut usia. Teknik pengumpulan data menggunakan: 1) Wawancara langsung dengan pengurus dan anggota organisasi sosial, tokoh masyarakat, dan lansia; 2) Observasi kegiatan pelayanan sosial; 3) Telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lansia memperoleh berbagai pelayanan sosial yakni pemberian makan, pemeriksaan kesehatan gratis, olahraga bagi lansia, pembinaan rohani, pengajian, kesenian tradisional (kethoprak,

them in participating in traditional arts activities (such as kethoprak, slapstick and mocopatan), conducting any small travelling, handing over Eid gifts, doing some house renovations, visiting them for any sickness reasons or mourning reasons, providing trees to plant such as bananas, papaya, and asking for their contribution in raising Social Welfare Fund for any social solidarity. Concluded from the result of the research, it is recommended some points as follow: The Ministry of Social RI is expected to provide assistance to Social Organizations (orsos), NGOs, Communities that provide social services for the elderly people and the local government, social institutions, companies (through CSR program) are expected to empower communities and families to provide social services for the elderly people.

Keywords: *social services, society's care; elderly people*

dagelan, mocopatan), rekreasi, bingkisan lebaran, perbaikan rumah, kunjungan/bantuan sakit/wafat, pemberian bibit tanaman seperti pohon pisang dan pepaya, serta meminta kontribusi iuran dana kesejahteraan sosial. Hasil penelitian merekomendasikan bagi Kementerian Sosial RI agar memberikan bantuan kepada orsos, LSM, masyarakat yang memberikan pelayanan sosial bagi lansia, sedangkan bagi pemerintah daerah, dinas sosial, perusahaan (CSR) agar memberdayakan masyarakat dan keluarga untuk memberikan pelayanan sosial bagi lansia.

Kata kunci: *pelayanan sosial; kepedulian masyarakat; lanjut usia*

Fatwa Nurul Hakim¹ dan Gunawan Wibisono² (¹B2P3KS Yogyakarta dan ²Universitas Sebelas Maret Surakarta)

Modal Sosial Petani Tembakau untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Social Capital of Tobacco Farmer for Social Welfare Improvement

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 4 Desember 2017, hal 369 - 380

This research is aimed to reveal the social capital of tobacco farmers in supporting farming activities for increasing their social welfare. The social welfare of tobacco farmers is strongly influenced by the tobacco market prices. In this case, the cigarettes industry becomes the backbone of tobacco farming which supports the livelihood of tobacco farmers. This study uses the theory of Pierre Bourdieu and James Coleman on social capital. This is a qualitative research that uses case study approach. It was conducted at Lamuk Sub-village, Legoksari Village, Tlogomulyo Sub-District, Temanggung District. Five informants of the research were selected purposively. The data were collected by using specific techniques of indepth interview. Then the data were analyzed by using interactive analysis namely omitting irrelevant data, presenting relevant data and

Penelitian ini bertujuan mengungkap modal sosial petani tembakau dalam mendukung kegiatan pertanian untuk peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan sosial masyarakat petani tembakau sangat dipengaruhi oleh harga pasar tembakau. Industri rokok menjadi tulang punggung yang menunjang penghidupan petani tembakau. Penelitian ini menggunakan teori Pierre Bourdieu dan James Coleman tentang modal sosial. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian di Dusun Lamuk, Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung. Informan penelitian dipilih secara *purposive* sebanyak lima orang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara secara mendalam, sedang analisis data dengan analisis interaktif yakni memilah data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan (verifikasi). Temuan penelitian

making conclusion (verifying). The findings of this study indicate that the Indonesian Tobacco Farmers Association (APTI) and Farmers Group function as social networking; selamatan ritual / pray for cultivating soil, taking care of tobacco plants and tasyakuran / ceremony for being grateful which function as the norm of trust; whilst labor relations system functions as reciprocity; and the activities of jimpitan sewu-selawe, mutual lending of labor, division of crops, watching the legislation of smoking prohibition, Djarum Foundation scholarship function as mutual benefit from tobacco farmers to Legoksari rural society welfare. The result of the research describes that social capital functions as important aspect in empowering the society, especially the tobacco farmers and recommends that the Government, the society empowerment activists or the Society Empowerment Institutions, Ministry of Social RI, Local Government, and Agriculture Office need to support those related to farmers empowerment policy. It is also expected that the support needed will not change the society structure and will not omit the social capital values.

Keywords: *social capital; tobacco farmer; welfare*

menunjukkan bahwa terbentuknya Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Gabungan Kelompok Tani sebagai *social networking*; ritual *selamatan ngolah tanah*, tembakau dan tasyakuran sebagai *norm of trust*; relasi sistem kerja sebagai *reciprocity*; dan kegiatan *jimpitan sewu-selawe*, saling pinjam tenaga kerja, pembagian hasil panen, mengawal RUU pelarangan merokok, beasiswa Djarum Foundation sebagai *mutual benefit*. Penelitian ini menjelaskan bahwa modal sosial berfungsi sebagai aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat terutama petani tembakau dan merekomendasikan perlunya pemerintah, praktisi pemberdayaan masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian mendukung terkait kebijakan pemberdayaan petani. Hal ini diharapkan tidak mengubah struktur dalam masyarakat dan tidak menghilangkan nilai modal sosial.

Kata kunci: modal sosial; petani tembakau; kesejahteraan

Robert Siburian (Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Ketahanan Sosial dan Perubahan Ekologi Hutan:

Studi pada Masyarakat Sekitar Hutan di Kabupaten Simalungun

Social Resilience and Forest Ecology Change:

A study on around forest society in Simalungun District

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 4 Desember 2017, hal 381 - 398

People who live around and depend on forest resources are susceptible to change of forest ecology, especially on the impact of forest degradation. Forest provides environment service and irreplaceable economic resources. This is why forest ecology change brings much impact to forest function capacity which implies to the decreasing of its function capacity in providing environment service and economic resources. The life of around forest society can continue if their social resilience is able to cope

Masyarakat yang bergantung pada sumberdaya hutan sangat rentan terhadap perubahan ekologi hutan, terutama akibat terjadinya degradasi kawasan hutan. Hutan menyediakan jasa lingkungan dan sumberdaya ekonomi yang tidak tergantikan. Oleh sebab itu, perubahan ekologi hutan sangat berdampak terhadap daya dukung hutan itu sendiri yang berimplikasi kepada menurunnya kemampuan hutan untuk menyediakan jasa lingkungan dan sumberdaya ekonomi. Kehidupan masyarakat

with the change. This research is aimed to study forest area condition in Simalungun District and that of its society's dependency level on forest resources. It used a qualitative approach and the technique of collecting data was conducted by using indepth interview, focus group discussion (FGD) and observation. The result of the research shows that the society involvement in managing forest resources has not been significant though the government has opened the scheme of doing so as an effort to improve the forest society welfare and to enhance their social resilience.

Keywords: *forest ecology; social resilience; around forest society*

sekitar hutan dapat terus berlanjut apabila ketahanan sosial yang mereka miliki dapat mengikuti terjadinya perubahan ekologi hutan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji kondisi kawasan hutan di Kabupaten Simalungun dan tingkat ketergantungan masyarakat di sekitar hutan terhadap sumberdaya hutan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*), *focus group discussion* (FGD), dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa keterlibatan masyarakat untuk mengelola sumberdaya hutan belum signifikan meskipun pemerintah sudah membuka skim sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan agar ketahanan sosial mereka turut meningkat.

Kata kunci: *ekologi hutan; ketahanan sosial; masyarakat sekitar hutan*

Daud Bahransyaf (B2P3KS Yogyakarta)
Keluarga Kurang Mampu di Banda Aceh dan Pidie
Poor Families In Banda Aceh and Pidie

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 4 Desember 2017, hal 399 - 412

Based on the research conducted randomly to 600 heads of poor category families in five sub-districts (that of Syiah Kuala, Banda Raya, Lueng Bata, Ulle Kareng and Baiturrahman Sub-District) of Banda Aceh City, and also by identifying 599 people representing poor families in five sub-districts (that of Glumpang Tiga, Mutiara, Tiro/Truseb, Tangse and Muara Tiga Sub-District) of Pidie District, it was known that there were some socio-economic fundamental changes in their income and expenditure as well as ownership of the goods. Their income and expenditure of households level in both locations concerned had already achieved more than Rp.600.000,- per month. Goods which was previously used to be a secondary need and owned only by middle and upper class society, it had turned out to be primary need for life and their livelihood. Most people possessed mobile phones and

Berdasar pada penelitian yang dilakukan secara acak/random di Kota Banda Aceh pada lima kecamatan (Syiah Kuala, Bandar Raya, Lueng Bata, Ulle Kareng dan Kecamatan Baiturrahman) terhadap 600 kepala keluarga kategori miskin, dan Kabupaten Pidie pada lima kecamatan (Glumpang Tiga, Mutiara, Tiro/Truseb, Tangse dan Kecamatan Muara Tiga), dengan mendata 599 orang yang mewakili keluarga miskin, diketahui bahwa terdapat beberapa perubahan sosial ekonomi yang mendasar dalam penghasilan dan pengeluaran serta kepemilikan barang mereka. Penghasilan dan pengeluaran rumah tangga pada kedua lokasi dimaksud lebih dari Rp.600.000,- per bulan. Barang yang dahulu merupakan kebutuhan sekunder dan dimiliki oleh kalangan masyarakat menengah ke atas telah menjadi kebutuhan primer bagi kehidupan dan penghidupan mereka.

motorcycles. Majority of respondents had each a TV of over 14" size and a refrigerator. Electricity for lighting had been utilized by most of the poor families in both two research sites. Electricity program had reached and been enjoyed by citizens in Banda Aceh City and by that of Pidie District. These empirical facts need to be observed and studied as an input to make adjustment on the aspects or criteria of families in poverty, either done by the related bodies or institutions, or by the authorities concerned in making Government Regulations or Local Government Regulations and Minister Regulations.

Keywords : *poverty; ownership; assets*

Masyarakat memiliki HP dan sepeda motor. Sebagian besar responden memiliki TV ukuran diatas 14 " dan kulkas. Listrik sebagai alat penerangan sudah dimanfaatkan oleh sebagian besar responden keluarga miskin di kedua lokasi penelitian ini. Program listrik telah menjangkau dan dinikmati oleh warga masyarakat baik di Kota Banda Aceh maupun di Kabupaten Pidie. Fakta empirik tersebut perlu dicermati dan ditelaah sebagai bahan masukan untuk melakukan penyesuaian terhadap aspek atau kriteria keluarga kurang mampu, baik oleh instansi/lembaga terkait, oleh pihak berwenang dalam pembuatan Peraturan Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun Peraturan Menteri terkait.

Kata kunci : kemiskinan; kepemilikan; aset

Tateki Yoga Tursilarini (B2P3KS Yogyakarta)
Pendampingan Women Crisis Center 'Aisyiyah' pada Anak Korban Inses
Assistance of "Aisyiyah" Women Crisis Center to Children of Incest Victims
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 4 Desember 2017, hal 413 - 426

Bodies and institutions that handle sexual violence cases, particularly incest case, still need more holistic effort in doing so by involving various bodies or institutions of children care. This study is aimed to describe the process of handling incest violence and the form of assistance for victims of incest violence. Data sources are WCC staffs, volunteers/companions, victims and victim's parents, Trauma Center Protection Home (Rumah Perlindungan Trauma Center = RPTC). Techniques of data collecting were carried out through interview and observation, descriptive qualitative data analysis on such cases and through interventions conducted by WCC Aisyiyah to the victims. The research's findings showed that there were some stages of service process as follows: Doing initial introduction; Making contact to the victims and providing contract of handling; Assessing the victims; Undertaking an intervention plan; Implementing the intervention stages; Conducting evaluation and termination.

Lembaga dan institusi yang menangani kasus kekerasan seksual khususnya inses masih memerlukan upaya menyeluruh dengan melibatkan berbagai instansi atau lembaga peduli anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penanganan kekerasan inses dan bentuk pendampingan bagi korban kekerasan (inses). Sumber data adalah pengurus, relawan atau pendamping, korban, dan orangtua korban, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC). Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, analisis data deskriptif kualitatif tentang kasus-kasus serta intervensi yang dilakukan WCC Aisyiyah terhadap korban. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan proses pelayanan sebagai berikut: pengenalan awal, melakukan kontak dan kontrak, assesmen korban, melakukan rencana intervensi, melaksanakan tahapan intervensi, evaluasi, dan terminasi. Bentuk pendampingan yang dilakukan WCC Aisyiyah meliputi hal-hal berikut: konsultasi hukum; merujuk ke

Forms of assistance undertaken by WCC Aisyiyah include these followings: legal consultations; referring to a psychologist; litigation assistance / legal assistance; approach to victims and assistance for victims; referring victims to come to the assigned shelters for trauma healing; reporting to the legal side; motivating victims; social assistance according to the needs of victims; referring the victims to attend the shelter of Social Bodies (Dinas Sosial) or RPTC to get the psychological services, religious advices, and health service; providing UEP assistance for victims for the sake of their survival effort; offering assistance in undergoing the authority's investigation (BAP), or that of visum et repertum and trial process. This research recommends several points as follows: 1) the need of top-down socialization activities on Child Protection Act No. 23/2002 to the lowest level of society's authorities (RT / RW), to families, to schools and religious leaders and to community. 2) preferences of taking side for legal authorities to violence victim children, 3) the need of assistance for victims by the time of reporting the case to the police / authorities, so that children's rights are protected as the victims of sexual violence/ incest. 4) the need of increasing the involvement of related foundation or social institutions to provide any necessary possible solution for the sexual violence/ incest victims children.

Keywords: *assistance; WCC Aisyiyah; victim children; incest*

psikolog; pendampingan litigasi atau bantuan hukum; pendekatan dan pendampingan korban; korban dirujuk ke shelter guna penyembuhan trauma; pelaporan ke pihak hukum; memberi motivasi; pendampingan sosial sesuai kebutuhan korban; merujuk korban ke shelter Dinas Sosial atau RPTC untuk mendapatkan pelayanan psikologis, agama, kesehatan; memberikan bantuan UEP untuk korban guna keberlangsungan hidup korban; pendampingan BAP, visum dan di pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan: 1) Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sampai ke level paling bawah tingkat RT/ RW, keluarga, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat. 2) Keberpihakan penegak hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan, 3) Pendampingan pada saat korban melakukan pengaduan kepada pihak berwajib atau kepolisian, sehingga anak terlindungi haknya sebagai anak yang menjadi korban kekerasan seksual (inses). 4) Peningkatan keterlibatan yayasan atau panti sosial untuk memberikan solusi meskipun bersifat sementara bagi anak hasil kekerasan seksual (inses).

Kata kunci: *pendampingan; WCC Aisyiyah; anak korban; inses*

Soetji Andari (B2P3KS Yogyakarta)

Pengentasan Kemiskinan melalui Bantuan Sosial Non Tunai

Poverty Reduction through Non-Cash Social Assistance

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 4 Desember 2017, hal 427 - 438

The Ministry of Social of the Rep. of Indonesia launched a non-cash assistance program in liaise with Joint Business Groups (KUBE) and Hope Family Program (PKH) in the context of reducing poor society effort. It was a further step and the government's

Kementerian Sosial meluncurkan program bantuan non tunai Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya pengentasan masyarakat miskin. Hal tersebut merupakan langkah lanjut dan komitmen pemerintah untuk

commitment to reduced poverty in Indonesia. The distribution of non-cash social assistance system is to prevent the one that is inappropriate in its quality and quantity. Some beneficiaries of Hope Family Program and a Through non-cash Welfare Rice Program (Rastra) attended to gather in a small shop / stall that was appointed as an electronic service provider stall (e-warong). This system is a way to prevent mala-practices of social assistance distribution and to ensure its effectiveness in reaching the target, the amount and the time allocation. This research used a qualitative approach as it was conducted to know the implementation of the non-cash social assistance in Kediri District and that of in Madiun District. The result of the research showed that it needed either legality in its implementation of e-warong, and some technical managerial assistance for the e-warong managers, and also it needed some support of internet network facility and its infra-structures.

Keyword: *alleviation; non-cash assistance; poverty*

menekan angka kemiskinan di Indonesia. Sistem penyaluran bantuan sosial non tunai bertujuan untuk mencegah distribusi yang tidak tepat secara kualitas dan kuantitas. Beberapa penerima program keluarga harapan (PKH) dan beras sejahtera (Rastra) melalui bantuan pangan non tunai (BPNT) terlihat berkumpul di salah satu warung yang ditunjuk sebagai penyedia layanan elektronik warung. Sistem tersebut mencegah penyimpangan penyaluran bantuan sosial agar tepat guna, sasaran, jumlah dan tepat waktu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, karena ingin mengetahui penyelenggaraan bantuan non tunai sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kediri dan Madiun. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan e-warong perlu ada legalitas, pengelola perlu mendapat bimbingan teknis terutama keterampilan managerial, perlu dukungan sarana dan prasarana berupa jaringan internet.

Kata kunci: bantuan non tunai; kemiskinan; pengentasan

Kebutuhan Layanan Asuh Remaja Berorangtua Otoriter: Konsep Pencegahan Sikap *Bullying*

The Need for Juvenile Parenting Services with Authoritarian Parents: The Prevention Concept of Bullying Attitude

Ikawati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jl. Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu, Yogyakarta. Telp 0274-377265.

Email: ikawati.susatyo@yahoo.com, HP. 087839561959

Diterima 19 Juni 2017, diperbaiki 1 Agustus 2017, disetujui 3 September 2017

Abstract

This study is aimed to determine the relationship of authoritarian parent attitudes with the teenagers' tendency of behaving bullying. The research was conducted in Yogyakarta Special Region. The subjects of the research were determined purposively by the following criteria: male or female adolescents, in the age range from 12 to 17 years old, resided in Yogyakarta, with the education background of junior high school or that of equivalent, and had complete parents. Data collection techniques were carried out through questionnaire distribution to 30 respondents and the objects of research were the authoritarian parents' attitudes and that of teenagers' tendency to behave bullying. The result of the research was measured and calculated by using product Moment program of SPS Sutrisnohadi (2000) version with the rxy value result of 0,463 with $p = 0,019$ and determination coefficient of 0,309. These results can be concluded that the contribution of authoritarian parents' attitudes toward the teenagers' tendency to behave bullying is at 30.9 percent. It means that the teenagers' tendency to behave bullying is at 30.9 percent by having authoritarian parents. Based on the research results, it is recommended to the Ministry of Social RI through the Directorate of Family Empowerment and Social Institution to improve its programs through family strengthening (such as parenting pattern / good parents' attitude) in order to build up children's potential as potential future generation so that later they are able to either become smart and qualified human resources and possess good moral intelligence. It is also recommended that parents behave attentively and compassionately and do not impose their will to their children. In this way, children may develop themselves to be having morality, responsible, intelligent and qualified human resources and so that they can prevent the tendency to behave bullying attitude.

Keywords: *parents; authoritarian; adolescent; bullying*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan sikap orangtua otoriter dengan kecenderungan remaja berperilaku *bullying*. Lokasi penelitian adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive* dengan kriteria berikut: remaja (baik laki-laki maupun perempuan), berusia 12-17 tahun, berdomisili di Yogyakarta, berpendidikan SMP/ sederajat, dan mempunyai orangtua lengkap. Teknik pengumpulan data melalui penyebaran *questionnaire*/ angket terhadap 30 responden dan objek penelitiannya adalah sikap orangtua otoriter dan kecenderungan remaja berperilaku *bullying*. Hasil penelitian dihitung dengan menggunakan penghitungan program *product Moment* dari SPS Sutrisnohadi (2000) dengan hasil nilai r_{xy} 0,463 dengan $p = 0,019$ dan koefisien determinasi 0,309. Hasil tersebut dapat disimpulkan, bahwa sumbangan sikap orangtua otoriter terhadap kecenderungan remaja berperilaku *bullying* adalah 30,9 persen. Artinya, dengan sikap orangtua yang otoriter mempunyai kecenderungan remaja berperilaku *bullying* sebesar 30,9 persen. Berdasar hasil penelitian, direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial, untuk meningkatkan program-programnya melalui penguatan keluarga (pola asuh / sikap orangtua yang baik) dalam rangka membentuk kemampuan anak sebagai potensi generasi mendatang agar nantinya dapat menjadi sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas serta mempunyai kecerdasan moral yang baik. Direkomendasikan juga agar orangtua bersikap penuh perhatian dan kasih sayang dan tidak memaksakan kehendaknya kepada anak. Dengan demikian anak dapat berkembang menjadi sumber daya manusia yang bermoral, bertanggungjawab, cerdas dan berkualitas dan sehingga dapat mencegah anak berkecenderungan melakukan perilaku *bullying*.

Kata kunci: *orangtua; otoriter; remaja; bullying*

A. Pendahuluan

Masa remaja adalah masa kritis, yaitu munculnya berbagai masalah yang berasal dari faktor internal dalam diri remaja dan faktor eksternal dari lingkungan sekitar. Apabila penanganan terhadap remaja tidak tepat maka akan menimbulkan perilaku menyimpang, yang dapat menjadi perilaku yang mengganggu (Ekowarni, 2005). Perilaku menyimpang dapat ditunjukkan dengan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan remaja.

Menurut Berkowitz (dalam Sukarman, 2010), kekerasan merupakan bentuk-bentuk perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun mental. Artinya kekerasan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk menghalang-halangi atau menghambat orang lain dalam melakukan kegiatan tertentu. Bentuk tindakan kekerasan dapat berupa pemukulan, penghasutan, pelemparan, pengrusakan benda atau barang. Kekerasan dalam bentuk verbal dapat berupa memfitnah, mencaci-maki, melontarkan kata-kata kotor, dan memanggil orang lain dengan sebutan binatang.

Banyak penelitian menunjukkan remaja yang mengalami tindakan kekerasan fisik akan mengembangkan perilaku agresif, di antaranya tindakan kriminal, kejahatan dan masalah kesehatan mental pada saat dewasa nanti (Patnani, dkk, 2002). Kasus *bullying* yang dilakukan remaja beberapa tahun terakhir meningkat, baik yang dilakukan sendiri maupun kelompok. Survei yang dilakukan Juwita (2008), dengan melibatkan 1500 responden di sembilan SD, tujuh SMP, dan 10 SMA di Yogyakarta, Surabaya dan Jakarta, menemukan, bahwa *bullying* terjadi di setiap sekolah responden. Dari ketiga kota yang diteliti, Yogyakarta memiliki gambaran *bullying* tertinggi. Survei lain yang dilakukan oleh Amy Huneck (dalam Detik News, 2007) menemukan, bahwa di sebuah SD di Indonesia, ada sejumlah 45 persen siswa menerima perlakuan *bullying* ketika berada di dalam kelas, sedangkan 43 persen lainnya pada saat istirahat. Penelitian yang dilakukan Argiati (2010) juga menemukan, bahwa

78 dari 113 siswa yang berasal dari satu SMA Swasta dan satu SMA Negeri di Kota Yogyakarta (69,3 persen) pernah mengalami *bullying* di sekolah baik dari teman, guru, maupun orangtua. Pelaku *bullying* paling tinggi presentasi adalah teman ada 71,68 persen.

Hasil penelitian dari KPAI tahun 2012 juga menyebutkan, bahwa 87,6 persen siswa mengaku pernah mengalami kekerasan di lingkungan sekolah dalam berbagai bentuk, kekerasan tersebut dilakukan oleh guru, teman satu kelas maupun teman lain kelas (Badriyah, 2012). Penelitian Rahendra (dalam Mahmudi, 2012) menemukan bahwa ada 60 persen siswa SMP Negeri X Jakarta terindikasi merupakan pelaku dan korban *bullying*. Tribun tanggal 5 Agustus 2012 (Suhendi, 2012) memberitakan mengenai kasus *bullying* terjadi di SMA Don Bosco Jakarta, yaitu siswa baru dianiaya oleh kakak kelasnya ada bekas sulutan rokok dan memar di tubuh korban. Novianti (2013) lebih lanjut menemukan bahwa *bullying* dalam bentuk pemaksaan merupakan kasus yang sering dijumpai di sekolah tersebut. Kumara, dkk (2013), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 739 siswa SMA Negeri di Yogyakarta yang menjadi subyek, terdapat 496 hasil *bullying* (67 persen) terjadi di sekolah.

Tingginya intensitas perilaku *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah ternyata tidak hanya pada sekolah yang berada di kota besar, tetapi di kota kecilpun juga terjadi. Hasil temuan Mahmudi (2012) di Karesidenan Madiun menunjukkan, bahwa ada indikasi perilaku *bullying* terjadi di beberapa sekolah yang ada di daerah tersebut. *Bullying* sendiri merupakan serangan fisik, verbal atau psikologis atau intimidasi yang mengakibatkan rasa takut, stress, kerugian atau membahayakan bagi korban (Krahe, 2005). *Bullying* ini merupakan sub kategori perilaku agresif yang buruk karena dilakukan secara langsung, berulang-ulang, ditujukan kepada korban, khusus yang tidak mampu mempertahankan dirinya secara efektif (Lee, 2009). Menurut pakar lain, *Bullying* merupakan serangan fisik, verbal atau

psikologis atau intimidasi yang mengakibatkan rasa takut, stress, kerugian atau membahayakan bagi korban (Olweus dalam Wahyuni, 2010).

Bullying dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, diantaranya (1) *bullying* fisik, seperti mendorong, meninju, menampar, menendang, menjambak, merebut barang dan merusak kepunyaan orang lain; (2) *bullying* verbal, seperti menghina, menyindir, memanggil dengan nama julukan keluarga dan kecacatan, membentak, mengancam dan menggoda orang lain hingga marah; dan (3) *bullying* sosial atau relasional yaitu menyebar berita bohong, menyebarkan gosip, menolak memasukkan orang lain dalam kelompok, menolak berbicara dengan orang lain, secara sengaja mengisolasi seseorang dan mendorong orang lain untuk mengasingkan seseorang secara sosial (Pontzer, 2010).

Bullying menurut Sejiwa (2008) ada tiga macam yakni. Pertama, *bullying* fisik, seperti menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, meminta sesuatu dengan paksa, melempar dengan barang, menghukum dengan berlari keliling lapangan, menghukum dengan cara *push-up*, dan menolak. Kedua, *bullying* verbal antara lain, memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan di depan umum, menuduh, menyoraki, menebarkan gosip, memfitnah, menolak. Ketiga, *bullying* mental atau psikologis antara lain memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan di depan umum, mendiamkan, mengucilkan, meneror lewat pesan pendek di telepon genggam atau e-mail, memandang dengan pandangan merendahkan, memelototi dan mencibir.

Coloroso (2007) mengemukakan, bahwa terdapat empat bentuk perilaku *bullying* yaitu fisik, verbal, relasional dan elektronik. Perilaku *bullying* secara fisik merupakan bentuk yang paling umum dilakukan, seperti ejekan dan cemoohan. Perilaku *bullying* secara relasional dan elektronik merupakan bentuk perilaku *bullying* yang paling sulit dideteksi, namun memiliki dampak yang paling serius, karena mampu melemahkan harga diri siswa secara perlahan.

Secara umum perilaku *bullying* merupakan perilaku agresif yang setidaknya melibatkan tiga unsur, yaitu: (1) perilaku yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti seseorang dengan target yang spesifik, (2) perilaku agresif tersebut terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama, dan (3) adanya ketidakseimbangan, kekuatan antara pelaku dan korban (Olweus, dalam Wahyuni, 2010). Olweus lebih lanjut menemukan pada perilaku agresif korban berusaha untuk menghindari sedangkan pada *bullying* korban tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau menghindari (Wahyuni, 2010).

Berbagai penelitian telah menunjukkan, bahwa *bullying* memiliki dampak negatif terhadap semua pihak yang terlibat di dalamnya dan mempengaruhi situasi belajar di sekolah (Wong, 2004). Gambaran dari dampak tersebut menunjukkan perlunya penanganan *bullying*. Jika tidak ditangani seawal mungkin akan berlanjut menjadi tindak kekerasan yang serius, sementara itu kebutuhan akan rasa aman di sekolah adalah hal yang mendasar bagi para siswa untuk dapat berkembang secara wajar dan optimal.

Keluarga merupakan tempat pendidikan moral pertama kali bagi anak. Perilaku serta kepribadian anak sangat ditentukan pada bentuk pola pengasuhan yang diterapkan orangtua. Pola asuh adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa terhadap anak yang membutuhkan bimbingan (Darling dalam Sukarman, 2010). Menurut Gunarsa (2007), pola asuh merupakan gaya pendidikan orangtua terhadap anak atau perlakuan/sikap terhadap anak dalam rangka memenuhi kebutuhan memberi perlindungan dan mendidik anak untuk mematuhi norma-norma atau nilai-nilai dalam masyarakat. Pola asuh orangtua adalah pola perilaku yang diterapkan pada anak dan bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Hurlock (1999) berpendapat, bahwa timbulnya berbagai macam permasalahan kekerasan pada remaja dapat disebabkan karena pemberian pola asuh orangtua yang otoriter. Pola asuh otoriter ini menuntut remaja untuk mengikuti dan mematuhi semua

kehendak dan keinginan orangtua, sehingga mengakibatkan remaja cenderung melakukan kekerasan di luar lingkungan keluarga.

Faktor keluarga diindikasikan juga dapat mempengaruhi perilaku *bullying* siswa sekolah, karena keluarga merupakan predisposisi seorang anak melakukan *bullying*. Sikap dan emosi yang negatif dari orangtua dan bentuk pola asuh yang kurang memberikan kehangatan serta kurangnya keterlibatan langsung orangtua dalam pengasuhan dapat menyebabkan seorang anak berperilaku agresif (Pearce, 2002). Keluarga yang menggunakan perilaku agresif sebagai cara untuk mendisiplinkan anak akan terbentuk sebuah pemaknaan, bahwa perilaku agresif adalah perilaku yang wajar dan bisa diterima dalam sosialisasi dan interaksi dengan orang lain (O'Connel dalam Aryudho Widyatno, 2010).

Menurut Olweus (2008), orangtua merupakan *role model* pertama bagi anak, orangtua yang terbiasa mengekspresikan kemarahan secara fisik akan menghasilkan anak-anak yang cenderung agresif. Olweus lebih lanjut (dalam Wahyuni, 2010) menyatakan ada beberapa karakteristik keluarga yang dapat mempengaruhi perilaku *bullying* yaitu: (1) kurangnya kehangatan dan kasih sayang, (2) kegagalan untuk menetapkan batas yang jelas terhadap perilaku agresif, (3) sangat sedikit cinta dan perhatian serta memberikan kebebasan yang berlebihan, dan (4) menggunakan hukuman fisik dan kekerasan emosional.

Menurut Coloroso (2007), ada dua model pengasuhan dalam keluarga yang dapat memunculkan perilaku *bullying*, yaitu: (1) keluarga yang mempunyai hubungan bersifat diktator, artinya memiliki perintah serta kendali yang ketat terhadap segala aktivitas anak, bahkan tidak jarang orangtua menggunakan bentuk hukuman melalui kekerasan untuk mendisiplinkan anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga seperti ini akan cenderung bersifat agresif serta memaksa orang lain di sekitarnya untuk melakukan seperti apa yang dia mau; (2) keluarga cenderung permisif, model ini memberikan kelonggaran disiplin terhadap anak, memberikan

serta menetapkan peraturan yang sedikit dan cenderung untuk melindungi anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga seperti ini tidak memiliki kemampuan untuk membela dirinya. Kondisi ini semakin memberikan penguatan kepada pelaku *bullying* untuk menindas anak yang tidak memiliki kemampuan dalam membela diri.

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang signifikan, bahwa keotoriteran pola asuh yang diterapkan orangtua akan cenderung memunculkan perilaku agresif. Palmer dan Hollim (2001) menemukan anak dengan pola asuh otoriter cenderung memiliki hubungan positif signifikan dengan perilaku kenakalan remaja, dibandingkan dengan pola asuh yang lain. Wahyuni (2010) dalam penelitiannya menemukan, bahwa persepsi remaja terhadap pola asuh otoriter dalam mendidik anak akan meningkatkan kecenderungan seseorang melakukan perilaku *bullying*. Pontzer (2010) menemukan, bahwa pola asuh yang keras, mengabaikan, ketidakhadiran, penolakan, kurang kasih sayang yang positif dan tidak diajarkan untuk menunjukkan perilaku yang tepat berkaitan dengan perilaku *bullying*. Orangtua yang berinteraksi dengan anaknya secara bermusuhan, dingin, acuh tak acuh, tidak konsisten dan mengecewakan anaknya akan mendorong anak mereka untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang sama. Anak memperlakukan orang lain dengan buruk sehingga meningkatkan kecenderungan *bullying* pada anak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *bullying* antara lain faktor keluarga terutama interaksi keluarga. Perkembangan psikososial anak sangat berperan penting terutama pola asuh yang diterapkan oleh orangtua terhadap anak melalui sikap orangtuanya, dan ketika anak mencapai usia remaja maka anak akan memiliki persepsi tersendiri terhadap pola asuh atau sikap orangtuanya tersebut. Anak pertama kali berinteraksi dengan orang di sekitarnya terutama orangtuanya. Terbentuknya sikap anak terhadap orangtuanya, merupakan hasil interaksi yang terus-menerus antara anak dengan orangtua.

Menurut Bandura (Edi Koeswara, 1988), terbentuknya sikap tersebut di atas terjadi melalui empat tahapan yaitu (1) proses perhatian, yaitu proses ketertarikan individu untuk mengamati/memperhatikan baik itu bersifat positif maupun negatif pada suatu yang diamati akan menimbulkan respon baik itu perasaan/sikap yang positif maupun negatif; (2) proses *retensi*, yaitu proses penyimpanan hasil pengamatan tentang yang diamati ke dalam ingatannya; (3) proses reproduksi, yaitu proses menghasilkan tingkah laku hasil pengamatan yang telah disimpan dalam ingatannya, namun reproduksi ini dapat terjadi tergantung dari proses yang keempat yaitu motivasi individu; (4) motivasi individu, yaitu hasil pengamatan yang telah disimpan dalam ingatannya akan dihasilkan kembali atau tidak tergantung *reinforcement* dengan *reward* (hadiah). Bila dikaitkan dengan sikap orangtua terhadap anak, maka interaksi anak dan orangtua saling mempengaruhi satu sama lain dan masing-masing saling memberikan stimulus dan respon, yang akan terbentuk gambaran tertentu pada masing-masing yaitu anak dan orangtua. Gambaran tersebut akan terbentuk sikap tertentu baik pada anak maupun orangtua.

Menurut Hurlock (1990), ada beberapa pola asuh orangtua pada anak yang dapat dilihat dari sikap orangtua yang khas antara lain: (1) sikap orangtua yang melindungi anak secara berlebihan, hal ini berakibat anak mempunyai ketergantungan yang berlebihan pada semua orang, bukan pada orangtua saja; (2) permisivitas, yaitu sikap orangtua yang membiarkan anak berbuat sesuka hatinya, kondisi ini berakibat anak menjadi tidak terkontrol/terkendali serta tidak tahu apa yang baik dan buruk; (3) sikap orangtua memanjakan, kondisi ini akan mengembangkan anak ke arah sadis, perhatian yang berlebihan dan penyesuaian diri yang buruk; (4) sikap orangtua penolakan, yaitu sikap orangtua yang menimbulkan rasa bermusuhan, rasa dendam, perasaan tidak percaya, frustrasi, dan gugup; (5) sikap orangtua penerimaan, yaitu sikap yang ditandai oleh perhatian yang besar dan kasih sayang pada anak, kondisi

ini dapat mengembangkan anak dapat bersosialisasi dengan baik, kerjasama baik, ramah dan periang; (6) sikap orangtua dominasi, yaitu anak didominasi salah satu atau kedua orangtuanya, maka anak cenderung berkembang rasa rendah diri, sangat sensitif, mudah terpengaruh orang lain dan anak cenderung patuh; (7) sikap orangtua yang tunduk kepada anaknya, yaitu sikap yang membiarkan anak memerintah orangtua, maka anak akan berkembang menjadi anak yang selalu menentang semua wewenang, memberontak, dan tidak patuh; (8) sikap orangtua favoritisme, yaitu sikap yang memperlakukan anak satu dengan anak yang lain berbeda, maka anak akan berkembang menjadi anak yang agresif, karena anak akan selalu cenderung melakukan tujuannya dengan segala cara; (9) sikap orangtua yang ambisi, yaitu orangtua yang mempunyai ambisi yang berlebihan kepada anaknya, kondisi ini akan mengembangkan anak menjadi pasif, frustrasi, serta sikap bermusuhan.

Sikap orangtua di atas mempunyai pengaruh yang kuat tidak hanya hubungan keluarga, tetapi juga terhadap sikap dan perilaku anak. Hurlock lebih lanjut menjelaskan (1990), bahwa sebagian besar dari anak-anak yang berhasil dalam perkembangannya memiliki orangtua yang bersikap baik terhadap anaknya. Sebaliknya anak kurang berhasil dalam perkembangannya atau mengalami hambatan dalam perkembangannya, biasanya merupakan produk dari hubungan yang kurang baik. Peranan orangtua sangat dibutuhkan jika sikap orangtua terhadap anak tercipta komunikatif, hangat, penuh rasa cinta dan harmonis, maka dalam diri anak akan terbentuk rasa aman dan anak akan mampu bereksplorasi dengan penuh tanggungjawab terhadap pengenalan dan penyesuaian norma yang berlaku dalam lingkungan. Sikap orangtua seperti ini mampu menanamkan dasar yang fundamental dari suatu kepribadian yang baik, dan bertanggungjawab, seperti hangat, komunikatif, cinta kasih, menyenangkan, dan penuh pengertian serta perhatian, maka anak akan mengembangkan perilakunya ke arah positif. Sebaliknya, bila sikap orangtua

kepada anak tercipta hubungan yang kurang baik, maka timbul ketegangan, pengalaman yang tidak menyenangkan yang diperoleh anak dirumah. Kondisi ini membawa anak dalam lingkungannya seperti sekolah, teman sebaya dan masyarakat bertindak agresif, apatis, dan perilaku menyimpang lain.

Pola asuh memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perkembangan anak, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Banyak penelitian menemukan, bahwa pola asuh otoriter dapat mempengaruhi kecenderungan berperilaku *bullying* pada remaja, karena pola asuh orangtua dan perlakuan keluarga lainnya memiliki hubungan dengan perilaku anak (Georgio dan Stavrinides, 2008). Xin Ma dalam penelitiannya (2001) menemukan bahwa pola asuh otoriter, bermusuhan dan menolak berakibat dengan rendahnya kemampuan memecahkan masalah dan kecenderungan perilaku *bullying*. Baldry dan Farrington (2000) juga menemukan, bahwa pola asuh otoriter dan ketidakcocokan antara anak dengan orangtua memiliki korelasi dengan perilaku *bullying* pada remaja.

Melihat hasil temuan-temuan penelitian di atas, dapat disimpulkan, bahwa orangtua otoriter yaitu orangtua yang tidak mau memahami dan tidak peduli terhadap keinginan dan perasaan anaknya, serta cenderung mengutamakan kehendaknya tanpa mau mendengarkan pendapat anaknya. Pola interaksi seperti ini akan berakibat anak dan remaja cenderung melakukan *bullying*, karena meniru dan mencontoh perilaku orangtua yaitu tidak memahami orang lain, tidak peduli terhadap keinginan dan perasaan orang lain.

Berdasar hal tersebut, maka penelitian tentang sikap orangtua otoriter mempunyai kecenderungan remaja berperilaku *bullying* dilakukan. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian adalah: apakah sikap orangtua otoriter mempunyai kecenderungan remaja berperilaku *bullying* ? Tujuan penelitiannya adalah menemukan hubungan sikap orangtua otoriter dan kecenderungan remaja berperilaku *bullying*.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah korelasional, karena ingin mengetahui hubungan antara sikap orangtua otoriter dan kecenderungan remaja berperilaku *bullying*. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, dengan pertimbangan Yogyakarta sebagai kota yang paling banyak terjadi kasus *bullying* (Juwita, 2008). Sasaran subyek penelitian ditentukan berdasarkan *purposive*, yaitu remaja baik laki-laki maupun perempuan berdomisili di Yogyakarta, berstatus pelajar SMP atau sederajat, dengan rentang usia antara 12-17 tahun, dan masih mempunyai kedua orangtua. Berdasar teknik tersebut ditentukan 30 responden. Obyek penelitiannya adalah sikap otoriter orangtua dan kecenderungan remaja berperilaku *bullying*.

Teknik pengumpulan data digunakan angket kepada remaja untuk mengungkap sikap orangtua otoriter yang dilihat dari persepsi dan kecenderungan perilaku *bullying* pada remaja. Teknik analisis data digunakan adalah *product moment* dari Pearson, karena untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (x) yaitu sikap orangtua otoriter dan variabel terikat (y), yaitu kecenderungan remaja berperilaku *bullying*.

C. Sikap Orangtua Otoriter dan Kecenderungan Remaja Berperilaku Bullying

Berdasarkan analisis statistik program *product moment* (SPS Sutrisnohadi, 2000), hasil nilai $r_{xy}=0,463$ dengan $p=0,019$ berarti $p<0,05$, kesimpulannya ada hubungan antara variabel bebas (x) yaitu sikap orangtua otoriter dan variabel terikat (y), yaitu kecenderungan remaja berperilaku *bullying*. Besarnya koefisien determinasi diperoleh 0,309. Hasil tersebut dapat disimpulkan, bahwa sumbangan sikap orangtua otoriter terhadap kecenderungan remaja berperilaku *bullying* adalah 30,9 persen. Artinya, dengan sikap orangtua yang otoriter mempunyai kecenderungan remaja berperilaku *bullying* sebesar 30,9 persen. Analisis tersebut didukung data yang ditemukan di lapangan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Hubungan Persepsi Remaja tentang Sikap Otoriter Orangtua dan Kecenderungan Remaja Berperilaku *Bullying*

No	Persepsi Remaja Tentang Sikap Otoriter Orangtua	Kecenderungan Remaja Berperilaku <i>Bullying</i>
1	Penentuan aktivitas dalam keluarga: Ditentukan anak (12org/40 persen) Ditentukan keluarga (8org/26,67 persen) Ditentukan orangtua (10org/33,33 persen)	Remaja memaksa teman untuk mematuhi perintahnya: Tidak pernah (10 org/33,33 persen) Kadang-kadang (9org/30 persen) Sering (11 org/36,67 persen)
2	Keputusan orangtua berlaku mutlak Tidak berlaku mutlak (9org/30 persen) Kadang-kadang (12 org/40 persen) Berlaku Mutlak (9org/30 persen)	Remaja mengancam temannya dengan memukul bila tidak membantu mengerjakan tugas sekolah: Tidak pernah (10org/33,33 persen) Kadang-kadang (11org/26,67 persen) Sering (9org/30 persen)
3	Pemberian hukuman orangtua tanpa diberi kesempatan untuk mengemukakan alasan: Diberi kesempatan (9org/30 persen) Kadang-kadang (11org/36,67 persen) Tidak diberi kesempatan (10org/33,33 persen)	Remaja menyindir dengan kata-kata yang menyakitkan bila temannya tidak mau menuruti kemauannya: Tidak pernah (10org/33,33 persen) Kadang-kadang (11org/36,67 persen) Sering (9org/30 persen)
4	Penerimaan orangtua tentang pendapat remaja yang benar: Dapat menerima (12org/40 persen) Kadang-kadang (8org/26,67 persen) Tidak dapat menerima (10org/33,33 persen)	Remaja melampiaskan kemarahan pada teman yang tidak mau menuruti kemauannya: Tidak pernah (10org/33,33 persen) Kadang-kadang (11org/36,67 persen) Sering (9org/30 persen)
5	Hukuman yang diterima bila anak membuat kesalahan: Tidak menghukum (8org/26,67 persen) Kadang-kadang (12org/40 persen) Sering menghukum (10org/33,33 persen)	Remaja mengajak teman lain untuk membenci teman yang tidak mau menuruti kemauannya: Tidak pernah (9org/30 persen) Kadang-kadang (11org/36,67 persen) Sering (10org/33,33 persen)
6	Keharusan patuh terhadap keputusan orangtua: Tidak patuh (9org/30 persen) Kadang-kadang (9org/30 persen) Harus patuh (12org/40 persen)	Remaja meminta dengan paksa uang saku teman-temannya: Tidak pernah (12org/40 persen) Kadang-kadang (8org/26,67 persen) Sering (10org/33,33 persen)

Sumber: Angket 30 responden

Keterangan :

Tidak Pernah : Jawaban responden, apabila remaja tidak pernah sama sekali melakukan pernyataan tersebut.

Kadang-kadang : Jawaban responden, apabila remaja melakukan pernyataan tersebut minimal satu kali dalam seminggu

Sering : Jawaban responden, apabila remaja melakukan pernyataan tersebut setiap hari

Tabel satu menunjukkan persepsi remaja tentang sikap orangtua otoriter yang dapat dilihat dalam: Pertama, pernyataan tentang penentuan aktivitas dalam keluarga: dari 30 responden yang ditentukan anak, ada 12 orang atau 40 persen; ditentukan keluarga, ada 8 orang (26,67 persen) dan ditentukan orangtua, ada 10 orang (33,33 persen). Data tersebut dapat dimaknai, bahwa ada 33,33 persen, orangtua menentukan segala aktivitas dalam keluarga. Pola asuh adalah pola perilaku yang diterapkan orangtua kepada anak dan bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu

(Gunarso, 2007). Pola asuh di atas menuntut anak/remaja untuk mengikuti dan mematuhi semua kehendak dan keinginan orang tua, sehingga mengakibatkan anak/remaja cenderung melakukan hal yang sama di luar lingkungan keluarga seperti yang telah diajarkan oleh keluarga (Hurlock, 1999). Berdasar temuan Baldry dan Farrington (2000) menyebutkan, bahwa apabila terjadi ketidakcocokan antara anak dan orangtua, maka mengakibatkan anak cenderung melakukan *bullying*. Apabila dikaitkan dengan data di atas yaitu segala aktivitas keluarga diten-

tukan oleh orangtua yang mungkin tidak cocok dengan keinginan keduanya yaitu orangtua dan anak, berakibat anak cenderung melakukan *bullying*. Coloroso (2007) menemukan bahwa pengasuhan keluarga yang dapat memunculkan perilaku *bullying* salah satunya adalah keluarga yang mempunyai hubungan yang bersifat diktator atau otoriter. Hal ini terlihat pada tabel satu tentang kecenderungan remaja berperilaku *bullying*. Kondisi ini akan dikembangkan remaja di lingkungannya, seperti remaja memaksa temannya untuk mematuhi perintahnya, terlihat ada 11 orang (36,67 persen);

Kedua, pernyataan tentang keputusan orangtua berlaku mutlak, dari 30 responden yang menyatakan keputusan orangtua tidak berlaku mutlak ada sembilan orang (30 persen), ada 12 orang (40 persen) yang menyatakan kadang berlaku mutlak, sedangkan sembilan orang (30 persen) menyatakan berlaku mutlak. Temuan lapangan tersebut dapat disimpulkan, bahwa sebanyak 30 persen remaja menyatakan bahwa keputusan orangtua berlaku mutlak. Timbulnya berbagai macam kekerasan yang dilakukan oleh remaja disebabkan oleh pemberian pola asuh orangtua otoriter yang menuntut remaja mengikuti dan mematuhi semua kehendak orangtua. Hal ini dapat menyebabkan remaja berkecenderungan melakukan hal yang sama di lingkungan teman sebaya (Hurlock, 1999).

Menurut pendapat Pearce (2002), sikap dan emosi yang negatif orangtua, bentuk pola asuh yang kurang memberikan kehangatan serta kurang adanya keterlibatan langsung orangtua dalam pengasuhan menyebabkan anak dan remaja berperilaku agresif. Pola asuh tersebut apabila dikaitkan dengan kecenderungan remaja berperilaku *bullying*, kondisi ini akan dikembangkan remaja dalam kehidupannya. Hal ini terlihat pada tabel satu, dimana remaja akan mengancam temannya dengan memukul bila tidak membantu mengerjakan tugas sekolah, ada sebesar sembilan orang (30 persen);

Ketiga, pernyataan tentang pemberian hukuman orangtua tanpa diberi kesempatan untuk

mengemukakan alasan, dari 30 responden yang menyatakan diberi kesempatan mengemukakan alasan, ada sembilan orang (30 persen), ada 16 orang (33,67 persen) menyatakan kadang diberi kesempatan, sedang yang menyatakan tidak diberi kesempatan mengemukakan alasan ada 10 orang (33,33 persen). Temuan tersebut dapat diartikan, bahwa ada 33,33 persen, remaja mendapatkan hukuman dari orangtua tanpa diberi kesempatan untuk mengemukakan alasan. Menurut Patnani, dkk. (2002), bentuk tindak kekerasan fisik yang dilakukan orangtua kepada anak akan mengembangkan perilaku agresif diantaranya kenakalan, kriminal, kejahatan dan masalah kesehatan mental pada saat dewasa nanti.

Olweus (2008) memperkuat data temuan tersebut yaitu orangtua merupakan *role model* pertama bagi anak. Orangtua yang terbiasa mengekspresikan kemarahan secara fisik akan menghasilkan anak-anak yang cenderung agresif. Dikaitkan dengan kecenderungan remaja berperilaku *bullying* yaitu remaja menyindir dengan kata-kata yang menyakitkan bila temannya tidak mau menuruti kemauannya ada sembilan orang (30 persen).

Keempat, pernyataan tentang penerimaan orangtua tentang pendapat remaja yang benar, dari 30 responden yang mengatakan dapat menerima sebanyak 12 orang (40 persen), yang mengatakan kadang-kadang menerima ada 8 orang (26,67 persen), dan yang mengatakan tidak dapat menerima pendapat remaja yang benar ada 10 orang (33,33 persen). Data tersebut berarti, bahwa ada 33,33 persen pendapat remaja yang benar tidak dapat diterima oleh orangtua.

Menurut pendapat Olweus (2008), terjadinya *bullying* disebabkan kurangnya kehangatan atau kasih sayang orangtua, tidak ada perhatian atau kepedulian terutama pengakuan pendapat remaja. Bila dikaitkan dengan kecenderungan remaja berperilaku *bullying*, kondisi ini akan dikembangkan remaja yaitu melampiaskan kemarahan pada teman yang tidak mau menuruti kemauannya, sebagaimana terlihat dari data

lapangan yang menunjukkan ada sembilan orang (30 persen) bersikap demikian.

Kelima, pernyataan tentang hukuman yang diterima bila anak membuat kesalahan, dari 30 responden yang mengatakan tidak menghukum ada delapan orang (26,67 persen), yang mengatakan kadang-kadang dihukum ada 12 orang (40 persen) dan yang mengatakan selalu dihukum ada 13 orang (43,33 persen). Data tersebut dapat disimpulkan, bahwa ada 33,33 persen orangtua selalu menghukum apabila remaja membuat kesalahan. Pendapat Olweus (2008), memperkuat hasil temuan di lapangan yaitu terjadinya *bullying* salah satunya disebabkan orangtua selalu menggunakan hukuman fisik dan kekerasan emosional. Pendapat tersebut diperkuat oleh Pontzer (2010) yang menyatakan, bahwa pola asuh yang keras, mengabaikan ketidakhadiran, penolakan, kurang kasih sayang sangat berkaitan dengan perilaku *bullying*. Data tersebut bila dikaitkan dengan kecenderungan remaja berperilaku *bullying*, kondisi ini akan dikembangkan remaja yaitu remaja mengajak teman lain untuk membenci teman yang tidak mau menuruti kemauannya ada sebesar 10 orang (33,33 persen).

Keenam, pernyataan tentang keharusan patuh terhadap keputusan orangtua, remaja yang mengatakan tidak patuh ada sembilan orang (30 persen); kadang patuh ada sembilan orang (30 persen) dan harus patuh pada orangtua ada 12 orang (40 persen). Data tersebut dapat disimpulkan, bahwa ada 40 persen remaja harus patuh terhadap segala keputusan orangtua. Hasil tersebut sesuai dengan pendapat dari Wahyuni (2010) yang menemukan bahwa pola asuh otoriter dalam mendidik anak akan meningkatkan kecenderungan seseorang melakukan perilaku *bullying*. Palmer dan Hollin (2001), menemukan bahwa pola asuh otoriter cenderung memiliki hubungan yang positif signifikan dengan perilaku kenakalan remaja, dibandingkan dengan pola asuh lainnya. Bila dikaitkan dengan kecenderungan remaja berperilaku *bullying*, kondisi tersebut akan dikembangkan remaja di lingkungannya seperti remaja meminta dengan paksa

uang saku teman-temannya ada sebesar 10 orang (33,33 persen).

Ada hubungan persepsi remaja tentang sikap otoriter orangtua dan kecenderungan remaja berperilaku *bullying* sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini. Apabila hal ini dikaitkan dengan teori sikap dari Bandura (Edi Koeswara, 1988) yang antara lain menyebutkan, bahwa terbentuknya sikap anak terhadap orangtua merupakan hasil interaksi yang terus menerus antara anak dengan orangtua, terjadi dalam empat tahapan yakni. Pertama proses perhatian adanya respon baik positif maupun negatif terhadap sesuatu yang diamati dalam hal ini adalah pemberian pola asuh orangtua; Kedua proses *retensi*, yaitu adanya penyimpanan pada anak tentang hasil yang telah diamati ke dalam ingatannya, dalam hal ini pola asuh yang diberikan oleh orangtua; Ketiga proses *reproduksi*, yaitu proses menghasilkan tingkah laku hasil pengamatannya (pola asuh orangtua) yang telah disimpan dalam ingatan, proses ini tidak akan muncul apabila tidak ada proses keempat yakni *motivasi* berupa dorongan yang kuat dari dalam seseorang memunculkan apa yang sudah disimpan dalam ingatan tersebut dan muncul di kehidupan sehari-hari.

D. Penutup

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa sumbangan sikap orangtua otoriter terhadap kecenderungan remaja berperilaku *bullying* adalah 30,9 persen. Artinya, sikap orangtua yang otoriter mempunyai kecenderungan remaja berperilaku *bullying* sebesar 30,9 persen.

Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial, untuk meningkatkan program-programnya melalui penguatan keluarga (pola asuh/sikap orangtua yang baik) dalam rangka membentuk anak sebagai potensi generasi mendatang agar nantinya dapat menjadi sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas serta mempunyai kecerdasan moral yang baik. Kepada Orangtua hendaknya jangan menerapkan pola asuh

otoriter. Sikap otoriter tersebut mempunyai ciri antara lain: (1) Orangtua menentukan apa yang perlu diperbuat oleh anak, tanpa memberikan penjelasan tentang alasannya; (2) Apabila anak telah melanggar ketentuan yang telah digariskan, anak tidak diberi kesempatan memberi alasan sebelum hukuman diterima anak; (3) Pada umumnya hukuman berbentuk fisik atau badan; (4) Orangtua tidak atau jarang memberi hadiah baik berbentuk kata-kata maupun bentuk lain, apabila anak berbuat sesuai dengan harapan orangtua. Pola asuh yang mendasarkan pada aturan-aturan kaku dalam mengasuh anak, maka anak harus menerima aturan-aturan orangtua tanpa diberi penjelasan mengapa aturan-aturan diberikan. Anak dari orangtua otoriter seringkali merasakan bahwa perilaku dan aturan yang diberikan pada dirinya tidak sesuai dengan keinginan tetapi anak tidak berani menolak. Akibatnya terjadi penyelewengan di luar rumah atau justru anak tersebut represif, sehingga dapat mengganggu keseimbangan mentalnya. Pola asuh tersebut dapat menyebabkan perilaku agresif/kekerasan/*bullying* di luar keluarganya sebagai pelampiasan rasa kecewa, anak pasif, cenderung menurut, diam, rasa ingin tahu serta daya kreatif mereka terhambat.

Disarankan orangtua hendaknya dalam menasehati anak harus memberikan penjelasan, alasan perlunya hal tersebut dilaksanakan; anak diberi kesempatan untuk memberi alasan mengapa ketentuan itu dilanggar sebelum menerima hukuman; hukuman diberikan berkaitan dengan perbuatannya, berat ringan hukuman tergantung kepada pelanggaran; hadiah atau pujian diberikan oleh orangtua untuk tidak ada pelanggaran. Orangtua agar tidak bersikap memaksakan kehendak kepada anak, agar anak dapat berkembang menjadi sumber daya manusia yang bermoral, bertanggungjawab, cerdas dan berkualitas sehingga dapat mencegah anak cenderung melakukan perilaku *bullying*.

Ucapan Terima Kasih

Kepada responden dan berbagai pihak yang terlibat pada penelitian tentang 'Kebutuhan Layanan Asuh Remaja Berorangtua Otoriter: Konsep Pencegahan Sikap *Bullying*' di Kota Yogyakarta disampaikan terima kasih.

Pustaka Acuan

- Argiati, S.B. (2010). *Studi Kasus Perilaku Bullying di SMA Kota Yogyakarta*. Journal penelitian Bappeda kota Yogyakarta.5(7),54-62.
- Aryudha Widyatno. (2016). *Peran Iklim Sekolah dan Keotoriteran Pola Asuh Orangtua terhadap Perilaku Bullying Siswa di Sekolah Menengah Pertama*. Yogyakarta: Program Magister Psikologi UGM.
- Badriyah. (2012). *Kekerasan di Sekolah Pernah Dialami 87,6 Persen Siswa*. [http://edukasi.kompas.com/read/2012/07/30/22410037/kekerasan di sekolah-pernah dialami87,6 persen siswa](http://edukasi.kompas.com/read/2012/07/30/22410037/kekerasan%20di%20sekolah%20pernah%20dialami87,6%20persen%20siswa).
- Baldry, A.C dan Farrington, D.P. (2000). *Bullies and Delinquents: Personal Characteristic and parental Styles*. Journal of Community & Applied Social Psychology. 10, 17-31.
- Coloroso, B. (2007). *Stop Bullying : Memutus Rantai Kekerasan Anak dari PraSekolah Hingga SMU*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- DetikNews. (2007). *Banyak Guru Anggap Bullying Bukan Masalah Serius*. Surat Kabar(29April2007). <http://www.detiknews.com/indexfr.php?url=http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/04/tgl/29/time/040220/idnews/773882/idkanal/10>.
- Edi Koeswara. (1988). *Agresi Manusia*. Bandung: Eresco.
- Ekowarni,E. (2005). *Psikologi Perkembangan Anak*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Georgiou, S.N. (2008). *Parental Style and Child Bullying and Victimization Experiences at School*. Sosial Psychology Education, 11, 213-227.
- Georgiou, S. & Stavrinides, P. (2008). *Bullies, Victims and Bully-Victims: Psychosocial Profiles and Attribution Styles*. School Psychology International, 29, 574-589.
- Gunarsa, S.D. (2007). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Hurlock, E.B. (1990). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Juwita, R. (2008). *Bullying di Sekolah : Jogja tertinggi !!!*. <http://www.surya.co.id/2009/05/07/tindak-kekerasan-di-sekolah-cukup-tinggi.html>.
- Krahe, B. (2005). *Perilaku Agresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kumara,A., Pratama,M.J., Aryuni,M., Poeh, R.A. & Syah Putri,W.H. (2013). *Laporan Studi Pendahuluan: Perilaku Bullying pada Siswa Kelas XI SMA Negeri di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Laible, D. Eye, J. Dan Carlo, G., (2008). *Dimensions of Conscience in mid-Adolescence: Links with Sosial Behavior, Parenting, and temperament*. Journal of Youth Adolescence, 37, 875-887.
- Lee, S.S. (2009). *School Bullying in Korea and Cristian Educational Approach*. Asia Pasifif Education, 4 (1), 75-83.
- Mahmudi. (2012). *Perilaku Bullying dalam Perspektif Bimbingan dalam Konseling Islam*. Jurnal Counselia, 2(2).
- Novianti, K.. (2013). *Pengembangan Model Bimbingan Berbasis Nilai Karakter Lokal Jawa untuk Meningkatkan Kesadaran Diri*. Jurnal Prodi BK, 03(1).
- Olweus, D. (2008). *Bullying at School: What we know and what we can do*. Oxford: Blackwell
- Palmer, E., & Hollin, C. (2001). *Sociomoral Reasoning, Perceptions of Parenting and Self-Reported Delinquency, In Adolescent Applied* . Cognitive Psychology, 15, 85-100.
- Patnani, M., Ekowarni.E, dan Bhinety,M. (2002). *Kekerasan Fisik terhadap Anak dan Strategi Coping yang Dikembangkan Anak*. Indigenous, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi.
- Pearce, J. (2002). *What Can Be Done about the Bully In M. Elliot, Bullying: Apractical guide to Coping For School (3Rd.ed.)*. Great Britain : Person Education Limited.
- Pontzer, D. (2010). *Atheoretical Test of Bullying behavior: Parenting, Personality, and the Bully/Victim Relationship*. Journal of Family Violence, 25, 259-273.
- Santrock, J.W. (2002). *Perkembangan Masa Hidup (Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- Sejiwa. (2008). *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta : Grasindo.
- Suhendi,A. (2012). *Bullying di Don Bosco Jakarta Jadi Pembelajaran Dunia Pendidikan*. Jakarta: Tribun, 5 Agustus 2012.
- Sukarman, (2010). *Persepsi terhadap Kekerasan Ditinjau dari Pola Asuh Otoriter dan Religiusitas pada Remaja Lombok Tengah*. Yogyakarta: Program Magister Psikologi Fakultas Psikologi UGM.
- Sutrisno Hadi. (2000). *Program SPS*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Wahyuni, S. (2010). *Hubungan antara Persepsi terhadap Pola asuh Otoriter Orangtua dan Kemampuan Berempati dengan Kecenderungan Berperilaku Bullying pada Remaja*. Yogyakarta: UGM.
- Wong, D.S.W. (2004). *School Bullying and Tackling Strategies in Hongkong*. International Journal of Offender Therapy and Comarative Criminolgy, 48, 537-553.
- Xin Ma. (2001). *Bullying and Being Bullied: To What Extent are Buliies also Victims?*. American Educational Research Journal.38 (2), 351-370.

Upaya Masyarakat Perbatasan Antarneegara dalam Mempertahankan Kesejahteraan Sosial

Effort of Between-Countries Border Society in Maintaining Social Welfare

Elly Kuntjorowati dan Sri Prastyowati

Balai Besar Penelitian dan pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jl. Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu Yogyakarta, (0274 377265)

Email: Elly Kuntjorowati@gmail.com, HP. 087838724537

Diterima 12 Juli 2017, diperbaiki 8 Agustus 2017, disetujui 10 Desember 2017

Abstract

This research is aimed to describe the border community efforts between countries in West Kalimantan especially in maintaining social welfare. This study has 60 respondents taken out of people from rural communities at Jagoi, Jagoi Babang Sub-District, Bengkayang District, West Kalimantan Province, and supportive informants such as stakeholders and community leaders. This decision was carried out purposively in accordance with the needs of relevant data to this research. The data was collected through in-depth interviews, observation and documentation study on secondary data related to the research topic. The respondents were selected on the base of appropriateness to the research goal criteria. The data captured are analyzed qualitatively and are presented in percentage to gain some information which described the border society efforts in maintaining the social welfare. The results showed that the location of the village of Jagoi, Jagoi Babang Sub- District was very far away from the center of government in neither central nor local government, and it was really difficult to reach the location because it was located in the mountainous area, so that the infra-structure built up there was still very inadequate. Education and health facilities were still very minimal, Human Resources capability was still at very low level, there were a lot of unemployment, index of poverty was very high, so that it was much more difficult to maintain their social welfare, and their economic activities depended much on their neighbor country of Malaysia, which in turn brought an impact on the lack of nationalism because of their expectation in earning more Ringgit rather than Rupiah.

Keywords: *inter-state border; social security of society*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya masyarakat perbatasan antarnegara di Kalimantan Barat dalam mempertahankan kesejahteraan sosial. Responden penelitian ini berjumlah 60 orang terdiri dari masyarakat desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, ditambah informan pendukung antara lain *stakeholder* dan tokoh masyarakat. Penentuan ini dilakukan secara purposive sesuai dengan kebutuhan data yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan studi dokumentasi terhadap data sekunder yang terkait dengan topik penelitian. Penentuan responden dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sesuai tujuan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif disajikan dalam persentase untuk memperoleh informasi yang menjelaskan tentang upaya masyarakat perbatasan dalam mempertahankan kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang sangat jauh dari pusat pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, dan sulit dijangkau karena berada di pegunungan, sehingga infrastruktur di lokasi tersebut masih sangat kurang memadai. Sarana pendidikan dan kesehatan masih sangat minim, SDM masih sangat rendah, banyak pengangguran, dan angka kemiskinan masih sangat tinggi, sehingga mereka lebih sulit untuk mempertahankan kesejahteraan sosialnya, kegiatan ekonomi mereka masih sangat tergantung pada negara tetangga Malaysia, yang berdampak pada minimnya nasionalisme karena lebih mengharapkan ringgit dari pada rupiah.

Kata kunci: *perbatasan antarnegara; ketahanan sosial masyarakat*

A. Pendahuluan

Wilayah perbatasan Indonesia dengan pulau yang berada di luar berjumlah 92, merupakan kawasan tertinggal dengan sarana prasarana sosial dan ekonomi yang sangat terbatas. Di masa lalu, kawasan perbatasan dipandang sebagai wilayah yang perlu diawasi secara ketat karena menjadi tempat persembunyian para pemberontak. Akibatnya, di sejumlah daerah kawasan perbatasan tidak tersentuh pembangunan. Beberapa isu hingga kini masih menjadi permasalahan diantaranya ideologi budaya asing, potensi kejahatan lintas negara (*transnational crimes*), pembalakan liar (*illegal logging*), penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, perdagangan manusia (*human trafficking*), terutama perempuan dan anak-anak, imigran gelap (*illegal immigrants*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), peredaran narkoba, jalan masuk para teroris serta perompak, dan konflik sosial budaya.

Masyarakat di kawasan itu umumnya miskin dan kehidupan di kawasan perbatasan dapat dikatakan tidak layak, dan lebih berorientasi ke negara tetangga. Infra struktur seperti akses jalan, komunikasi dan listrik sangat terbatas. Luasnya permasalahan sosial yang dihadapi kawasan perbatasan dapat dilihat dari luasnya perbatasan darat Indonesia Malaysia yakni seluas 3050 km² (Moeldoko, 2012)

Kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat perbatasan dan negara tetangga dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat setempat seperti adanya ketergantungan ekonomi, karena negara tetangga Malaysia membangun pusat-pusat pertumbuhan dan koridor perbatasan melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan. Di era globalisasi terjadi percepatan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, mempercepat masuknya budaya asing di Indonesia. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ini telah memberikan keuntungan baik pemerintah maupun masyarakat negara tetangga.

Pada umumnya wilayah perbatasan masuk dalam kriteria desa miskin, dengan pertumbuhan cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan desa di sekitarnya. Karakteristik dan ciri khas masing-masing dipengaruhi kultur budaya etnis, kearifan lokal dan potensi alam yang ada di kawasan tersebut. Karakteristik tersebut berupa fisik, terutama garis batas darat yang tidak jelas dan tegas. Pilar batas di sepanjang garis batas masih sangat terbatas dan kondisinya darurat. Sebagian besar kawasan perbatasan di darat berada di pedalaman dengan kondisi alam berupa hutan yang sulit dijangkau dan perlu dilindungi. Karakteristik infrastruktur pelayanan masyarakat, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perhubungan, komunikasi dan informasi serta permukiman masih sangat terbatas. Penyebaran penduduk di wilayah perbatasan umumnya jarang dan tidak merata, bahkan di pulau-pulau terluar ada yang tidak berpenghuni dan terpencil. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia diperlihatkan dengan rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Beberapa faktor penyebab lambatnya pertumbuhan desa-desa di daerah perbatasan diantaranya: belum ditemukannya secara mendalam dan menyeluruh mengenai potensi sosial ekonomi masyarakat di daerah perbatasan yang merupakan faktor pendukung ketahanan masyarakat perbatasan, lemahnya kemampuan pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan dibanding jumlah penduduk yang harus dilayani, dan kurang terdistribusi secara merata pelayanan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan (Listiyah Miniarti. 2000).

Mengamati kompleksnya permasalahan masyarakat wilayah perbatasan serta sulitnya mempertahankan kesejahteraan sosialnya, maka permasalahan penelitian yang diajukan pada penelitian ini adalah: bagaimana upaya masyarakat perbatasan dalam mempertahankan kesejahteraan sosial dan faktor pendukung serta penghambat dalam mempertahankan kesejahteraan sosial. Tujuan penelitian ini adalah diketahui upaya masyarakat perbatasan dalam mempertahankan

kesejahteraan sosial dan diketahui faktor pendukung serta penghambat dalam mempertahankan kesejahteraan sosial.

Manfaat penelitian adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan terutama dalam hal pembangunan dan program pelayanan sosial di kawasan perbatasan serta referensi bagi peneliti yang berminat pada kawasan perbatasan.

Karakteristik Wilayah Perbatasan Darat Antarneegara

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pasal 1 menyebutkan, bahwa batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Perbatasan sebuah negara (*state's border*) dapat dipandang dalam konsep batas negara sebagai sebuah ruang geografis (*geographical space*) dan atau batas negara sebagai ruang sosial budaya (*sosial culture space*).

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, dan menjaga keamanan serta keutuhan wilayah. Perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, dan hukum nasional serta internasional (Moeldoko, 2012).

Kawasan perbatasan darat Indonesia berada di tiga pulau, yaitu Pulau Kalimantan, Papua, dan Pulau Timor, serta tersebar di empat provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan NTT. Setiap kawasan perbatasan memiliki kondisi yang berbeda satu sama lain. Kawasan perbatasan di Kalimantan berbatasan dengan Negara Malaysia yang masyarakatnya lebih sejahtera. Kawasan perbatasan di Papua masyarakatnya relatif setara dengan masyarakat PNG, sementara dengan Timor Leste kawasan perbatasan Indonesia masih relatif lebih baik dari segi infrastruktur maupun tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Pulau Kalimantan memiliki kawasan perbatasan dengan Malaysia di delapan kabupaten yang berada di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Wilayah Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak sepanjang 847,3 kilometer yang melintasi 98 desa dalam 14 kecamatan di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, dan Bengkayang. Wilayah Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan wilayah Sabah sepanjang 1.035 kilometer yang melintasi 256 desa dalam 9 kecamatan dan 3 kabupaten yaitu di Nunukan, Kutai Barat, dan Malinau. Dari lima kabupaten di Kalimantan Barat dan tiga kabupaten di Kalimantan Timur, hanya terdapat tiga pintu perbatasan (*border gate*) resmi, yaitu di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, serta Kabupaten Nunukan di Kalimantan Timur. Kabupaten Sanggau dan Nunukan memiliki fasilitas *Custom, Imigration, Quarantine, and Security (CIQS)* dengan kondisi yang relatif baik, sedangkan fasilitas CIQS di tempat lain masih sederhana serta belum didukung oleh aksesibilitas yang baik karena kondisi jalan yang buruk.

Potensi sumber daya alam kawasan perbatasan di Kalimantan cukup besar dan bernilai ekonomi sangat tinggi, terdiri dari hutan produksi (konversi), hutan lindung, dan danau alam yang dapat dikembangkan menjadi daerah wisata alam (ekowisata) serta sumberdaya laut yang ada di sepanjang perbatasan laut Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Beberapa sumber daya alam tersebut saat ini berstatus taman nasional dan hutan lindung yang perlu dijaga kelestariannya seperti Cagar Alam Gunung Nyiut, Taman Nasional Bentuang Kerimun, Suaka Margasatwa Danau Sentarum di Kalimantan Barat, serta Taman Nasional Kayan Mentarang di Kalimantan Timur.

Secara garis besar permasalahan kawasan perbatasan dapat dikelompokkan pada tiga aspek berikut. Pertama, aspek sosial ekonomi wilayah perbatasan merupakan daerah yang kurang berkembang (terbelakang), hal tersebut

disebabkan lokasi yang relatif terisolasi atau terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (banyaknya jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal), serta langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan yang diterima oleh masyarakat di daerah perbatasan (*blank spots*). Kedua, aspek pertahanan keamanan kawasan perbatasan merupakan teritorial yang luas dengan pola penyebaran penduduk tidak merata. Hal itu menyebabkan pengendalian oleh pemerintah sulit dilakukan. Ketiga, pengaruh negara tetangga pada aspek sosial ekonomi di kawasan perbatasan dapat mengundang kerawanan baik di bidang ekonomi maupun politik (Djaka Marwasta. 2016).

Karakteristik kawasan perbatasan ada tujuh macam yaitu karakteristik fisik garis batas di darat dan laut belum jelas dan pasti, pilar batas di sepanjang garis batas masih sangat terbatas dan kondisinya darurat, garis batas di laut ditentukan oleh keberadaan pulau-pulau terluar yang terpencil. Sebagian besar kawasan perbatasan di darat berada di pedalaman dengan kondisi alam berupa hutan yang sulit dijangkau dan perlu dilindungi. Karakteristik infrastruktur pelayanan masyarakat, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perhubungan, komunikasi dan informasi serta permukiman masih sangat terbatas, jumlah Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) masih terbatas. Karakteristik penduduk, penyebaran penduduk di wilayah perbatasan umumnya jarang dan tidak merata bahkan di pulau-pulau terluar ada yang tidak berpenghuni dan terpencil. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia diperlihatkan dengan rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk rendah akibat tingginya angka kematian. Arus mobilitas tenaga kerja dan penduduk keluar-masuk cukup tinggi.

Secara etnis, penduduk yang berada di perbatasan memiliki hubungan keluarga dengan saudara di negara tetangga. Karakteristik ekonomi,

tingginya perbedaan harga jual produk-produk lokal jika dibanding dengan negara tetangga, rendahnya nilai kurs rupiah terhadap kurs negara tetangga, keberadaan produk-produk yang berasal dari sumberdaya alam belum memiliki nilai tambah karena merupakan produk mentah. Perekonomian masyarakat sebagian besar adalah miskin dan umumnya mata pencaharian adalah petani dan nelayan tradisional. Transaksi perdagangan dilakukan secara tradisional. Hasil usaha yang diperoleh sebagian besar dikonsumsi sendiri. Karakteristik sumberdaya alam, potensi sumberdaya alam di wilayah perbatasan meliputi potensi pertambangan, kehutanan, perkebunan/pertanian, perikanan, dan sumberdaya air (daerah tangkapan air).

Setiap wilayah perbatasan negara Indonesia memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing yang dipengaruhi kultur budaya etnis, kearifan lokal dan potensi alam yang ada di kawasan tersebut. Wilayah perbatasan di Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Provinsi Kalimantan Barat berbatasan dengan Serawak (Malaysia). Luas Desa Jagoi seluruhnya sekitar 2.500 Ha, terdiri dari hunian, ladang, kebun, dan hutan. Wilayah Desa Jagoi ini sebagian besar merupakan daerah berbukit, karena itu areal ladang dan kebun relatif cukup luas. Sebelum tahun 1997 Desa Jagoi ini merupakan salah satu desa bagian dari wilayah Kecamatan Seluas. Setelah ada pemekaran baru, yakni pembentukan Kecamatan Jagoi Babang, maka desa ini menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Jagoi Babang.

Dari Kabupaten Bengkayang menuju Kecamatan Jagoi Babang diperlukan waktu tempuh kurang lebih tiga hingga empat jam dengan kendaraan roda empat kecepatan sedang. Kondisi jalan berkelok, bergelombang, dan naik turun mengharuskan kendaraan melaju dengan kecepatan sedang. Sepanjang perjalanan dari Bengkayang menuju Jagoi Babang terlihat hamparan hutan yang sangat luas ditumbuhi aneka tanaman sebagai potensi alam, antara lain kelapa sawit, sahang (merica), ketela pohon (singkong), kelapa, sayuran, dan tanaman hutan lain, serta

sedikit dijumpai tanaman padi, perkebunan karet (dominan), sawit, dan cacao. Selain hutan yang ditumbuhi aneka tanaman, air yang melimpah menjadi potensi alam di Jagoi Babang. Keterediaan sumber air yang melimpah telah diolah menjadi sumber air bersih yang banyak dimanfaatkan oleh warga Jagoi Babang, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkan sumber air bersih.

Ketahanan Sosial Masyarakat

Ada dua pandangan tentang ketahanan sosial. Pandangan pertama menyatakan, bahwa ketahanan sosial merupakan bagian integral dari ketahanan nasional, selain ketahanan ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan sosial seperti halnya ketahanan ekonomi, politik, budaya, dan militer merupakan unsur pembentuk ketahanan nasional. Pandangan lain menyebutkan, bahwa ketahanan sosial merupakan kemampuan komunitas (*local/ grassroot community*) dalam memprediksi, mengantisipasi, dan mengatasi perubahan sosial yang terjadi, sehingga masyarakat tetap dapat koeksistensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua pandangan tersebut bukanlah pandangan dikotomis, namun dapat dipadukan menjadi pemahaman yang lebih komprehensif.

Ketahanan sosial suatu komunitas sering dikaitkan dengan kemampuannya dalam mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang mengelilinginya. Ketahanan sosial juga menggambarkan kemampuan bertahan di tingkat sistem lokal dari arus globalisasi dan desentralisasi. Ketahanan sosial menunjukkan adanya kemampuan komunitas untuk menghindari dan atau mengelola konflik, mencari berbagai solusi, seiring dengan perkembangan komunitas itu sendiri. Ketahanan sosial mencakup kemampuan internal untuk menggalang konsensus dan mengatur sumber daya dan faktor eksternal yang dapat menjadi sumber ancaman, namun dapat diubah menjadi peluang. Jadi, ketahanan sosial merupakan produk interaksi dinamis antara faktor eksogen dengan endogen, sehingga kemam-

puan tersebut menunjukkan adanya aspek dinamika dan keseimbangan (*community homeostatic and dynamic*). Kemampuan di sini bukan hanya sekedar kemampuan bertahan, tetapi di dalamnya ada unsur dinamik yaitu kemampuan untuk segera kembali kepada kondisi semua atau justru lebih baik lagi. Ketahanan sosial juga mengandung kemampuan untuk mengelola sumber daya, perbedaan, kepentingan, dan konflik. Ketahanan sosial mengandung arti kemampuan untuk mengubah ancaman dan tantangan menjadi peluang dan kesempatan. Berdasar uraian tersebut, maka ketahanan sosial bukanlah suatu *finish product*, tetapi sebagai proses dan dinamika masyarakat (Kemensos RI, 2008).

Pendapat lain mengatakan bahwa ketahanan sosial masyarakat adalah kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya. Pengertian secara lebih lengkap adalah suatu kondisi kehidupan dinamis masyarakat yang ditandai oleh terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar, optimalnya pelaksanaan peranan dan tugas-tugas kehidupan pada setiap individu maupun kelompok, serta terselesaikannya masalah sosial melalui gerakan sosial yang dilandasi oleh nilai kebersamaan dan kesetiakawanan sosial (Suradi, 2005). Ketahanan sosial masyarakat sangat erat kaitannya dengan ketahanan ekonomi, karena dua dimensi tersebut saling berkaitan dan tidak mungkin dipisahkan, sehingga tidak ada ketahanan sosial masyarakat tanpa ketahanan ekonomi, begitu pula sebaliknya.

Pusat Kajian Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat Departemen Sosial RI (Muttaqin dkk, 2005), mendefinisikan ketahanan sosial masyarakat terdiri dari empat aspek yaitu: (1) Perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, miskin dan PMKS. (2) Partisipasi dalam organisasi sosial. (3) Pengendalian terhadap konflik sosial, dan (4) Kearifan lokal dalam memelihara potensi alam dan potensi sosial. Keempat variabel tersebut merupakan indikator upaya ketahanan sosial masyarakat.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif yang akan mendeskripsikan mengenai karakteristik masyarakat perbatasan seperti kondisi wilayah, budaya, tingkat pendidikan, pekerjaan, sumber daya alam, fasilitas kesehatan, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan keterampilan. Informan penelitian terdiri dari aparat desa dan masyarakat perbatasan sebanyak 60 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi yang obyektif dan mendalam tentang karakteristik masyarakat perbatasan.

Analisa data dengan menggunakan analisa kualitatif dalam bentuk uraian dan persentase sesuai dengan tujuan penelitian yaitu: (1) Upaya yang dilakukan masyarakat perbatasan dalam mempertahankan kesejahteraan sosialnya, dan (2) Potensi dan sumber kesejahteraan yang dimanfaatkan.

C. Kondisi Masyarakat Perbatasan dan Kesejahteranya

Desa Jagoi terdiri dari tiga dusun yakni Sei Take, Risau dan Jagoi. Dari tiga dusun tersebut yang terpadat adalah Dusun Risau. Sedangkan dusun yang terdekat dengan perbatasan Indonesia dan Malaysia adalah Dusun Jagoi. Batas Desa Jagoi sebelah Timur dengan Serawak (Malaysia), sebelah Barat dengan Kecamatan Seluas, sebelah Utara Desa Sekida, sebelah Selatan Kecamatan Siding. Luas Desa Jagoi seluruhnya sekitar 2.500 Ha, terdiri dari hunian, ladang, kebun, dan hutan. Wilayah Desa Jagoi ini sebagian besar merupakan daerah perbukitan, dan karena itu areal ladang dan kebun relatif cukup luas. Secara geografis Desa Jagoi ini merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia (Serawak). Oleh karena itu, di desa ini terdapat "*border*", meskipun belum tertata secara rapi sebagaimana yang ada wilayah lain (misalnya di Entikong - Sanggau) (BPS Kecamatan Jagoi Babang, 2014).

Jumlah penduduk Desa Jagoi seluruhnya 1846 jiwa, terdiri dari 1052 laki-laki dan 794

perempuan, dengan jumlah seluruhnya 333 KK. Penduduk Desa Jagoi terdiri dari mayoritas penduduk asli (suku Dayak Bedayuh) dan suku pendatang (suku Dayak lainnya, Melayu, Jawa, Bugis, dan suku-suku lainnya). Suku Bedayuh ini pada mulanya berasal dari wilayah Malaysia; dan oleh karena itu jumlah terbanyak suku ini berada di Malaysia. Terkait dengan kondisi tersebut, antara suku Bedayuh perbatasan dengan suku Bedayuh di Malaysia sebagian besar mempunyai hubungan kekeluargaan. Hingga kini mereka masih sering berkunjung, baik untuk urusan ekonomi maupun urusan hubungan kekerabatan. Untuk keperluan ini pemerintah desa/kecamatan setempat memfasilitasi dengan dokumen berupa Pas Lintas Batas (PLB) yang bisa digunakan masuk wilayah Malaysia sampai pada jarak/batas tertentu dan dengan waktu yang terbatas (BPS Kecamatan Jagoi Babang, 2014).

Hasil wawancara dan observasi di lapangan, budaya penduduk Jagoi yang positif dan masih dijunjung dengan baik adalah penghormatan terhadap milik orang lain. Bagi masyarakat Dayak, pantang merebut/ merubah batas tanah milik orang lain tanpa persetujuan pemilik, demikian pula dengan tanaman padi biar segelintirpun pantang mereka untuk mengambilnya, karena hal ini akan membawa keburukan bagi kehidupan keluarga dan keturunannya. Mereka juga tidak mudah digerakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu (misalnya protes atau demo) tanpa mengetahui keuntungan yang bisa mereka peroleh. Sikap protes terhadap orang-orang atau pemimpin desa yang mereka anggap kurang memperhatikan kepentingan masyarakat, hanya dalam bentuk sikap tidak suka, masa bodoh, tidak mempedulikan perintah atau kebijakannya dan berbagai sikap apriori lainnya. Sikap positif lainnya adalah sikap terbuka masyarakat Jagoi untuk menerima penduduk pendatang dan menerima perubahan. Mereka mudah menerima perubahan, terutama bila disertai bukti nyata yang memberikan keuntungan dan kemajuan bagi mereka.

Kebiasaan negatif yang masih hidup hingga kini adalah kebiasaan minum-minuman keras (baik untuk alasan kesehatan ataupun mabuk-mabukan), dan berjudi (baik judi lokal maupun judi buntut dari negara tetangga). Di beberapa tempat tertentu (umumnya warung kopi dan minuman lainnya) ketika hari mulai menjelang malam sampai larut malam banyak berkumpul warga untuk bermain judi. Masuknya agama baru, utamanya Agama Katolik dan Kristen Protestan, tampaknya belum mampu merubah kebiasaan negatif tersebut. Perubahan yang tampak menurut tokoh setempat, adalah dalam hal kegiatan sosial keagamaan dan dalam hal adat pernikahan sudah dilakukan dan dicatat melalui Gereja. Hal yang unik pada penduduk asli adalah tidak adanya kebiasaan menyelenggarakan pesta pernikahan. Pesta yang terjadi hanya berupa pesta adat tiap tahun, yang mereka sebut “*Gawe*”. Pesta ini dilakukan pada pertama membuka ladang, yakni sekitar bulan enam (bulan Juni).

Sumber daya alam yang cukup besar di Desa Jagoi adalah tanah ladang kebun dan hutan. Hasil utama kebun di Desa Jagoi adalah karet, kelapa sawit, dan sahang/lada. Untuk perkebunan kelapa sawit saat ini ada yang dikelola warga secara perorangan (sebagian baru mulai tanam), dan ada yang dikelola perusahaan (sudah mulai panen). Ada beberapa perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Jagoi seperti PT DJI, PT Led Lestari, PT WKN, dan PT CERIA Prima. Perusahaan-perusahaan ini ada yang menggunakan sebagian tanah penduduk maupun tanah hutan. Hingga kini belum ada kesepakatan tentang persentase keuntungan yang bisa diberikan kepada desa untuk kesejahteraan penduduk. Tidak seperti di daerah lain misalnya di Jawa Tengah (pengalaman peneliti di Kabupaten Rembang), pada desa-desa pinggiran hutan dibentuk Lembaga Masyarakat Daerah Hutan (LMDH) yang bertugas mengatur penggunaan tanah hutan oleh penduduk, termasuk kesepakatan dengan pengelola hutan (dalam hal ini PT Perhutani) untuk berbagi hasil dari penjualan hasil hutan

(kayu jati) untuk desa setempat yakni sekitar dua persen dari hasil penjualan.

Bagi penduduk Desa Jagoi, keberadaan perusahaan-perusahaan kelapa sawit tersebut hingga kini belum memberikan kontribusi bagi kesejahteraan penduduk sekitar. Apalagi bagi perusahaan yang menggunakan sebagian tanah penduduk belum ada kejelasan tentang pembagian hasil yang diperoleh para pemilik tanah.

Sumber daya alam yang saat ini memberikan manfaat dan telah dikelola dengan baik adalah sumber air bersih bagi penduduk, yang dialirkan melalui pipa-pipa ke rumah penduduk. Sumber daya alam lain seperti hasil sungai berupa pasir sudah mulai digali oleh sebagian penduduk, namun jumlahnya masih terlalu kecil dan merupakan kegiatan tambahan.

Fasilitas Kesehatan

Pembangunan sarana kesehatan dimaksudkan agar kesehatan masyarakat lebih baik. Di Kecamatan Jagoi Babang telah ada satu puskesmas dan untuk menjangkau ke desa-desa terpencil telah ada tiga polindes dan dua Puskesmas keliling. Tenaga medis yang tersedia terdapat seorang dokter, dua orang bidan, dan empat orang mantri kesehatan. Program layanan jaminan kesehatan yang berasal dari pemerintah yaitu Jamkesmas dan Jamkesda bahkan BPJS kesehatan sudah mulai dimanfaatkan oleh warga masyarakat Kecamatan Jagoi Babang. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh program layanan kesehatan. Belum terjangkaunya program layanan kesehatan antara lain disebabkan oleh ketidak tahuan tentang program, proses pelayanan yang dirasa sulit dimengerti, serta jauhnya jarak antara tempat tinggal.

Umur Responden

Umur sangat berkaitan dengan produktivitas seseorang dalam hal kegiatan ekonomi, baik di pemerintahan, perusahaan swasta ataupun usaha sendiri, karena produktivitas adalah sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu

kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini (Husein Umar, 2000). Diduga, hubungan antara umur dan kinerja merupakan hal yang makin penting karena ada keyakinan umur seseorang makin tua kinerjanya akan semakin merosot.

Mengenai umur responden secara lebih jelas dapat diketahui pada tabel berikut.

Tabel 1. Umur Responden

No	Usia Responden	f	%
1	20-21	1	2
2	30-39	14	23
3	40-49	26	44
4	>60	11	18
Jumlah		60	100

Sumber: Data Primer 2016 Diolah

Dari data tersebut dapat diketahui, bahwa sebagian besar responden sejumlah 44 persen berusia 40 hingga 49 tahun, dan peringkat kedua terbanyak adalah mereka yang berusia 30 hingga 39 tahun yakni 23 persen, usia tersebut merupakan usia kerja. Jumlah penduduk dengan usia kerja merupakan modal pembangunan apabila dibina dengan baik. Pembinaan yang baik akan menghasilkan mutu angkatan kerja yang baik. Mutu angkatan kerja yang baik tercermin dari SDM yang baik di antaranya adalah tingkat pendidikan dan keterampilan yang baik. Apabila jumlah penduduk besar dengan kualitas penduduk rendah maka menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi, karena SDM yang rendah dengan tingkat keterampilan rendah akan menempati posisi rendah pula. Persaingan tenaga kerja yang siap pakai menjadikan mereka tidak punya posisi tawar.

Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga

Wilayah perbatasan yang menjadi lokus penelitian merupakan daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten. Daerah yang jauh dari pusat pemerintahan pada umumnya kurang dalam hal fasilitas, baik kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktural yang kurang memadai.

Keterpencilan menjadi alasan lebih sedikitnya pengembalian kebijakan untuk menangani berbagai permasalahan yang ada di kawasan tersebut. Pendidikan menjadi kebutuhan bagi setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali yang berada di wilayah perbatasan. Belum semua warga negara memperoleh hak layanan pendidikan seperti yang terjadi di wilayah perbatasan. Sebagian besar masyarakat di wilayah perbatasan belum memperoleh hak layanan pendidikan dengan baik.

Pendidikan merupakan kebutuhan wajib bagi pembangunan sumber daya manusia namun kawasan perbatasan masih minim dalam fasilitas tersebut. Minimnya fasilitas akan diimbangi rendahnya minat untuk menempuh pendidikan secara formal. Hasil kajian mengenai pendidikan responden di wilayah Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. Pendidikan Terakhir Kepala Keluarga

No	Pendidikan Terakhir	f	%
1	Tidak Sekolah	4	7
2	Belum/Tidak tamat SD	17	28
3	SD/MI	27	45
4	SMP/MTs	6	10
5	SMA/SMK/MA	5	8
6	Diploma III/sarjana Muda	1	2
Jumlah		60	100

Sumber: Data Primer 2016 Diolah

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa subyek penelitian warga wilayah Kecamatan Jagoi Babang sebagian besar berpendidikan Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat, yakni sebesar 45 persen atau 27 orang. Secara berturut-turut diikuti responden yang belum/tidak tamat SD atau sederajat sebesar 28 persen atau sebanyak 17 orang, tamat SMP/MTs/Sederajat sebanyak 6 orang atau 10 persen, tamat SMA atau SMK atau MA atau sederajat sebanyak 5 orang atau 8 persen, tamat Diploma III/Sarjana Muda sebanyak satu orang atau 1.67 persen, dan tidak sekolah sebanyak 4 orang atau 7 persen.

Dari data tersebut diketahui pula, bahwa kesadaran masyarakat Desa Jagoi untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan masih sangat rendah. Melihat kondisi wilayah perbatasan yang berada di pedalaman dengan kondisi alam berupa hutan yang sulit dijangkau, berimbas pula pada minimnya fasilitas pendidikan di desa tersebut.

Pendidikan merupakan modal dasar pembangunan manusia. PBB terkait pentingnya pendidikan bagi manusia, menuangkannya dalam delapan tujuan pada butir ke dua yaitu mencapai pendidikan dasar universal (UN, 2011). Indeks pendidikan menjadi salah satu poin dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Upaya meningkatkan IPM di suatu wilayah harus diikuti dengan meningkatnya Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Kemampuan Daya Beli. Pendidikan yang semakin tinggi maka IPM sebuah daerah akan semakin tinggi pula. Opini publik juga menyebutkan, bahwa kemiskinan bisa menutup akses kemajuan seseorang termasuk salah satunya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masa depannya (Wahid, 2008).

Korelasi antara pendidikan dan kemiskinan sudah lama menjadi isu sentral di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Di Indonesia permasalahan terletak pada ketidakadilan dalam memperoleh akses pendidikan antara si kaya dan si miskin. Biaya yang harus dikeluarkan untuk sekolah bagi si kaya dan si miskin relatif sama tanpa melihat latar belakang ekonomi keluarga. Terlihat pula bahwa pemerintah daerah perbatasan lebih sulit memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin, yang merupakan salah satu indikator ketahanan sosial masyarakat.

Hal ini tentu berbanding terbalik dengan SDM negara tetangga yaitu Malaysia, sehingga banyak tenaga kerja Indonesia yang berhijrah ke Malaysia menjadi TKI yang tidak mesyaratkan pendidikan tinggi dan dibayar dengan honor murah.

Mata Pencarian Penduduk

Hasil pengamatan mengungkapkan, bahwa di Kecamatan Jagoi Babang sudah banyak terlihat pertokoan sembako serta perabotan rumah tangga. Berdasar pengamatan di lapangan, bahwa sembako dan sebagian besar peralatan rumah tangga berasal dari Malaysia. Selain menyediakan barang-barang dari Malaysia, toko tersebut juga menjadi tempat penukaran uang rupiah menjadi ringgit. Toko yang ada di Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang sebagian besar dikelola oleh warga Malaysia. Tersedianya barang-barang dari Malaysia, tingginya minat warga masyarakat terhadap produk Malaysia dan mudahnya mendapat uang ringgit menjadi faktor pendorong bagi warga masyarakat Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang lebih memilih barang-barang Malaysia daripada dari Indonesia.

Kecamatan Jagoi Babang belum memiliki pasar sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat Jagoi Babang lebih memilih memanfaatkan pasar di wilayah Malaysia ketimbang pasar di wilayah Indonesia. Kegiatan perekonomian di wilayah Indonesia dilakukan masyarakat Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan menempuh beberapa desa dengan jarak dan waktu lebih jauh dan lebih lama, sementara daya beli masyarakat setempat belum memadai. Akan lebih menguntungkan bagi masyarakat jika hasil pertanian dan kerajinan tangan masyarakat Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang dipasarkan di wilayah perbatasan dengan jarak dan waktu tempuh lebih cepat serta lebih dekat. Kondisi ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya warga masyarakat Jagoi Babang yang membawa sayur-mayur untuk dijual di Pasar Sirikin, sebuah pasar di perbatasan.

Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat diketahui, bahwa di perbatasan Desa Jagoi belum tersedia sarana kegiatan ekonomi yang memadai, sebagaimana disampaikan oleh salah satu warga: "Di Desa Jagoi belum ada pasar tradisional yang mampu menampung penjual dari desa setempat." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur berupa

pasar tradisional bagi warga masyarakat kurang diperhatikan dikarenakan lokasi jauh dan sulit dijangkau. Warga perbatasan darat antarnegara mengalami kendala dalam mempertahankan kesejahteraan ekonominya, mereka berharap ada pembeli dari negara tetangga agar bisa mempertahankan hidupnya.

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Jagoi Babang dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 3. Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	f	%
1	Usaha sendiri	74	24
2	Buruh tetap/tidak tetap	9	3
3	Karyawan/pegawai tetap	14	5
4	Buruh pertanian tidak tetap	22	7
5	Buruh non pertanian tidak tetap	29	10
6	Tidak bekerja	118	39
7	Lain-lain	37	12
Jumlah		303	100

Sumber: Data Primer, 2016, Diolah

Data pada tabel dapat diketahui bahwa sebagian besar responden beserta seluruh keluarga berjumlah 118 orang (39 persen) tidak bekerja. Hal ini menunjukkan, bahwa pekerjaan sangat berkaitan dengan SDM berupa tingkat pendidikan dan keterampilan seseorang. Makin tinggi SDM seseorang maka makin tinggi pula pekerjaan yang ditekuni. Data pada tabel tiga relevan dengan data tabel satu yang menunjukkan, bahwa tingkat pendidikan sebagian besar responden hanya tamat SD dan sebagian besar lain tidak tamat SD.

Banyak penduduk yang tidak bekerja berimbas pada tingginya angka kemiskinan di Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Penduduk tidak bekerja dapat juga disebut dengan pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin

mendapat pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja (BPS: 2010).

Data pada tabel tiga juga menunjukkan, bahwa mayoritas kedua (24 persen) penduduk memiliki usaha sendiri. Mereka kebanyakan adalah pemilik toko dan harus bersaing dengan pendatang orang Malaysia, karena produk yang mereka jual merupakan produk negara tetangga Malaysia.

Menurut Sumarsono (2009: 2-3), tenaga kerja atau SDM adalah manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Orang dalam usia kerja, dengan kata lain dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau *manpower*. Secara singkat tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (*working age population*).

Masyarakat perbatasan lebih sulit mempertahankan kesejahteraan sosial karena ketahanan sosial erat berkaitan dengan ketahanan ekonomi. Dua dimensi tersebut saling berkaitan dan tidak mungkin dipisahkan, sehingga tidak ada ketahanan sosial masyarakat tanpa ketahanan ekonomi begitu pula sebaliknya.

Kearifan lokal sebagai salah satu indikator ketahanan sosial masyarakat dapat diketahui dari adanya upaya pemerintah daerah setempat dengan memfasilitasi dokumen berupa pas lintas batas (PLB) yang bisa digunakan masuk wilayah Malaysia sampai pada jarak atau batas tertentu dan dengan waktu yang terbatas (BPS Kecamatan Jagoi Babang, 2014).

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk Kecamatan Jagoi Babang belum terdata secara baik. Data PMKS yang ada diperoleh dari Dinas Sosial Tenaga kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Bengkayang. Informasi yang diperoleh dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang menunjukkan, bahwa dari 24 PMKS yang terdata baru teridentifikasi enam jenis PMKS. Aparat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang mengungkapkan, bahwa hal ini terjadi antara lain karena kurang maksimalnya fungsi tenaga sosial fungsional yang bertugas baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Petugas sosial fungsional di tingkat kecamatan (TKSK) hanya satu orang bertugas sebagai pengumpul data serta mediator dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Hingga saat ini belum mampu melaksanakan tugas secara baik. Jauhnya jarak antara kabupaten dengan kecamatan, serta rendahnya honor (Rp 500.000,-) setiap bulan menjadi alasan bagi TKSK kurang peduli dalam melakukan pendataan. Menurut penuturan aparat Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang, komunikasi yang kurang intensif antara TKSK dengan Dinas Sosial menjadi musabab lemahnya kinerja TKSK dalam melaksanakan tugasnya. Tabel berikut menjelaskan tentang jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kecamatan Jagoi Babang.

Tabel 4. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

No	Jenis Permasalahan Sosial	f	%
1	Penduduk Miskin	573	60,77
2	Rumah Tidak Layak Huni	270	28,63
3	Lanjut Usia Terlantar	73	7,74
4	Orang dengan Kecacatan	25	2,66
5	Anak Berhadapan dengan Hukum	1	0,10
6	Rawan Bencana Sosial	1	0,10
Jumlah		943	100

Sumber: Data Primer 2016, Diolah

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial terbesar adalah kemiskinan dengan jumlah 60,76 persen, kemudian disusul rumah tidak layak huni dengan jumlah 28,63 persen. Keterbelakangan pembangunan (*under-development*) khususnya di dae-

rah perbatasan antarnegara mencakup masalah kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan adalah sebuah kondisi kehilangan (*deprivation*) terhadap sumber pemenuh kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Mereka yang berada dalam kategori miskin, hidupnya serba kekurangan, sedang kesenjangan adalah sebuah kondisi di mana di dalamnya terjadi ketimpangan akses pada sumber ekonomi (*economic resources*) (Usman, 2004).

Tingginya angka kemiskinan di Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang yang merupakan daerah perbatasan antarnegara disebabkan lokasinya yang sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman perbukitan, pegunungan, kepulauan, pesisir dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis yang sulit dijangkau oleh jaringan transportasi dan media komunikasi. Sumber daya manusia masyarakat di daerah perbatasan mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan relatif rendah.

Penyebab kemiskinan lain dikarenakan tidak jelasnya penggunaan dan pembagian hasil dari tanah penduduk yang dipergunakan oleh perusahaan kelapa sawit, tidak ada organisasi sosial atau pemangku adat yang berfungsi sebagai mediator antara pengusaha dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini agar kesejahteraan masyarakat perbatasan meningkatkan.

Belum dimilikinya hak paten pada pembuat tikar dari rotan yang merupakan andalan keterampilan penduduk setempat, membuka kecenderungan pengambilalihan hak cipta anyaman bidai sebagai kekayaan budaya Indonesia menjadi kekayaan budaya negara tetangga (Malaysia).

Faktor Pendukung

Peran pemerintah daerah terutama di era otonomi daerah, mengimplikasikan pembangunan kawasan perbatasan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelolanya, sehingga permasalahan perbatasan dapat diselesaikan secara efektif karena pembangunan perbatasan juga merupakan pembangunan daerah. Fasilitas

kesehatan yang disediakan Dinas Kesehatan cukup maksimal, selain ada sebuah Puskesmas, ada tiga poliklinik desa (polindes) dan Puskesmas keliling yang dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat perbatasan menjangkau fasilitas kesehatan.

Hampir seluruh wilayah perbatasan darat di Kecamatan Jagoi Babang merupakan hutan tropis dan daerah konservasi. Sumber daya alam berupa hutan tropis, tanah ladang, kebun kelapa sawit, lada dan hutan cukup besar, diharapkan dapat dilindungi, dibudidayakan bagi kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat perbatasan.

Kearifan lokal yang memfasilitasi masyarakat perbatasan berupa dokumen pas lintas batas (PLB) yang bisa digunakan masuk wilayah Malaysia sampai pada jarak atau batas tertentu dan dengan waktu yang terbatas, mendukung kegiatan ekonomi masyarakat perbatasan untuk menjual hasil produksinya baik berupa tikar anyaman rotan, kelapa sawit, lada, ataupun membeli barang keperluan sehari-hari seperti sembako dan gas.

Faktor Penghambat

Kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan yang miskin infrastruktur dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik menyebabkan investor swasta tidak tertarik untuk masuk ke daerah ini. Kondisi demikian pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur negara tetangga yang lebih baik. Hal tersebut menyebabkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya berorientasi ke negara tetangga Malaysia. Secara jangka panjang adanya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga tersebut berpotensi mengundang kerawanan di bidang sosial ekonomi dan politik. Kondisi demikian menyebabkan masyarakat perbatasan merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Minimnya pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara pada daerah perbatasan menjadikan minimnya rasa nasionalisme dan merasa bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Minimnya rasa nasionalisme pada masyarakat perbatasan mengakibatkan mereka ingin menjadi warga negara tetangga dengan cara memindahkan patok tapal batas.

D. Penutup

Kesimpulan: Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa masyarakat perbatasan antarnegara lebih sulit untuk mempertahankan kesejahteraan sosialnya karena dilihat dari segi geografis lokasi mereka di pedalaman dan sangat jauh dari pusat pemerintahan, baik di daerah maupun di pusat. Dari segi usia penduduk, sebagian besar merupakan usia produktif untuk bekerja, namun sebagian besar dari mereka tidak bekerja atau pengangguran, dan SDM merekapun sangat rendah karena sebagian besar penduduk merupakan kepala keluarga berpendidikan SD. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat perbatasan berdampak pada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, namun dalam rangka mempertahankan kesejahteraan sosialnya, upaya yang mereka lakukan di bidang ekonomi antara lain menjual hasil produksi berupa tikar anyaman rotan, lada, kelapa sawit ke negara tetangga Malaysia. Begitu pula sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka belanja barang produksi Malaysia yang jauh lebih mudah didapat dan harganya jauh lebih murah jika dibanding dengan barang dari Indonesia. Sulitnya masyarakat perbatasan mempertahankan ketahanan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional menyebabkan mereka ingin menjadi warga Negara Malaysia, karena merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah Indonesia.

Saran: diperlukan peranserta seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah dalam membangun kawasan perbatasan darat antarnegara seperti Kecamatan Jagoi Babang, serta peranserta dunia usaha agar berinvestasi di kawasan tersebut, mengingat sumber daya alam yang dimiliki begitu besar. Diperlukan pemberdayaan ekonomi untuk mempercepat pembangunan sosial agar masyarakat perbatasan berdaulat, sejahtera dan berdaya saing. Jadi tidak hanya

pendekatan keamanan, namun perlu diimbangi dengan pendekatan ekonomi dan kesejahteraan sehingga masyarakat bisa mempertahankan kesejahteraan dan sekaligus ketahanan nasional masyarakat setempat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu kelancaran penelitian ini hingga selesai. Pertama kepada Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagai pemberi donor penelitian ini. Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang, dan juga kepada seluruh responden terutama tokoh masyarakat setempat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.

Pustaka Acuan

- BPS. (2010). *Keadaan Angkatan Kerja di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2009*. Pontianak: Badan Pusat Statistik.
- Djaka Marwasta. (2016). *Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan*. Yogyakarta: *Indonesian Journal of Community Engagement*.
- Husein Umar. (2000). *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kemensos RI. (2008). *Ketahanan Sosial Masyarakat, Kewaspadaan Nasional Dan Ketahanan Nasional*. Jakarta : Kemensos RI.

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara. (2011). *Buku Utama Prinsip Dasar, Arah Kebijakan, Strategi Dan Program Pembangunan*.
- Listiyah Miniarti. (2000). *Peranan Potensi Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi dalam Pengembangan Wilayah Perbatasan di Kabupaten Gunung Kidul Provinsi D.I. Yogyakarta*. Yogyakarta: Fak Geografi UGM.
- Moeldoko. (2012). *Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan.: Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia*. Jurnal Pertahanan Edisi ke 1 2012. Jakarta.: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Muttaqin. Et. All. (2005). *Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat. Implementasi Pemberdayaan Pranata Sosial*. Jakarta : Pusbang Tansosmas Balatbang Sosial. Departemen Sosial.
- Sumarsono, Sonny. (2009). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suradi. (2008). *Peran Kapital Sosial dalam Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat*. Jakarta : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11. No 2.
- UN. (2011). *The Millennium Development Goals Report*. New York.
- Usman Soenyoto, (2004). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Wahid, A. (2008). *Pendidikan Versus Kemiskinan 2*. <https://abdulwahidilyas.wordpress.com/2010/08/26/pendidikan-vs-kemiskinan>.

Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Berbasis Masyarakat Desa

The Social Service For Elderly People on Village Community Service Basis

Irmawan

B2P3KS Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta

E-mail: sirmawan@yahoo.co.id HP. 08562804754

Diterima 13 September 2017, diperbaiki 5 Oktober 2017, disetujui 11 Desember 2017

Abstract

The longer life-time expectancy is one of indicators of national development success. Yogyakarta Special Region elderly people has a life-time expectancy of 74 years old and it is the highest in Indonesia. The length of life-time expectancy brings some impact on the growth of elderly people number in Yogyakarta. It is 12.6 percent of the total population there. This condition is bringing some consequences in providing social services to the elderly people so that they can live a happy and healthy life indeed. This research is aimed to comprehend the existing social service for elderly people on village community service basis. The research was conducted at Dusun Prenggan, Sidomulyo Village, Bambanglipuro Sub-District, Bantul District, in Yogyakarta Province. The subjects of this research are social organization activists, public figures as social volunteers and the objects are social service activities for elderly people. Data collection techniques used: 1) direct interviews with the board of social organizations and members and community leaders, 2) Observation of social services activities, 3) Documents review. The result of the research showed that elderly people received various social services such as feeding, providing free medical examination, involving elderly people for gymnastics, giving spiritual guidance, praying and encouraging them in participating in traditional arts activities (such as kethoprak, slapstick and mocopatan), conducting any small travelling, handing over Eid gifts, doing some house renovations, visiting them for any sickness reasons or mourning reasons, providing trees to plant such as bananas, papaya, and asking for their contribution in raising Social Welfare Fund for any social solidarity. Concluded from the result of the research, it is recommended some points as follow: The Ministry of Social RI is expected to provide assistance to Social Organizations (orsos), NGOs, Communities that provide social services for the elderly people and the local government, social institutions, companies (through CSR program) are expected to empower communities and families to provide social services for the elderly people.

Keywords: *social services, society's care; elderly people*

Abstrak

Usia harapan hidup tinggi merupakan salah satu dari indikator keberhasilan pembangunan nasional. Lanjut usia (lansia) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki usia harapan hidup 74 tahun dan termasuk tertinggi di Indonesia. Tingginya usia harapan hidup mengakibatkan jumlah lansia di Yogyakarta mengalami perkembangan pesat yakni 12,6 persen dari total penduduk. Kondisi tersebut membawa konsekuensi untuk memberikan pelayanan sosial bagi lansia agar mereka hidup bahagia, sejahtera lahir dan batin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelayanan sosial yang sedang berjalan bagi lansia berbasis masyarakat desa. Lokasi penelitian di Dusun Prenggan Sidomulyo Bambanglipuro Bantul Yogyakarta. Subjek penelitian adalah pengurus organisasi sosial, tokoh masyarakat sebagai relawan sosial, dan lansia, sedangkan objek penelitian adalah kegiatan pelayanan sosial bagi lanjut usia. Teknik pengumpulan data menggunakan: 1) Wawancara langsung dengan pengurus dan anggota organisasi sosial, tokoh masyarakat, dan lansia; 2) Observasi kegiatan pelayanan sosial; 3) Telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lansia memperoleh berbagai pelayanan sosial yakni pemberian makan, pemeriksaan kesehatan gratis, olahraga bagi lansia, pembinaan rohani, pengajian, kesenian tradisional (kethoprak, dagelan, mocopatan), rekreasi, bingkisan lebaran, perbaikan rumah, kunjungan/bantuan sakit/wafat, pemberian bibit tanaman seperti pohon pisang dan pepaya, serta meminta kontribusi iuran dana kesejahteraan sosial. Hasil penelitian merekomendasikan bagi Kementerian Sosial RI agar memberikan bantuan kepada orsos, LSM, masyarakat yang memberikan pelayanan sosial bagi lansia, sedangkan bagi pemerintah daerah, dinas sosial, perusahaan (CSR) agar memberdayakan masyarakat dan keluarga untuk memberikan pelayanan sosial bagi lansia.

Kata kunci: *pelayanan sosial; kepedulian masyarakat; lanjut usia*

A. Pendahuluan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana menyatakan, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan usia harapan hidup penduduk paling tinggi di Indonesia. Hal itu terlihat dalam data *life expectation* (harapan hidup) manusia Indonesia yang dilansir Bappenas, yang membenarkan pernyataan Kepala Bappenas, bahwa “Umur harapan hidup penduduk Yogyakarta adalah paling tinggi se-Indonesia” (Megapolitan.kompas.com. 2017). Hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, menunjukkan usia harapan hidup orang Yogyakarta adalah 74,2 tahun. Berturut-turut provinsi dengan harapan hidup tinggi yakni Kalimantan Timur 72,9 tahun, Jawa Tengah 72,7 tahun, dan DKI Jakarta 71,4 tahun. Pada tahun 2035 diproyeksikan usia harapan hidup Yogyakarta mencapai 75,5 tahun, masih tertinggi dibanding provinsi lain, yakni Kalimantan Timur 75,4 tahun, Jawa Tengah 75,3 tahun, dan Jawa Barat 74,4 tahun (Kompas.com).

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ditunjukkan dari semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk. Kondisi ini mengakibatkan jumlah penduduk lansia juga akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Penduduk lansia (usia 60 ke atas) tumbuh dengan sangat cepat bahkan tercepat dibanding dengan kelompok usia lain. Menurut WHO, diperkirakan penduduk lansia Indonesia tahun 2020 mencapai angka 11,34 persen atau tercatat 28,8 juta orang. Jumlah balita hanya tersisa 6,9 persen, hal ini menyebabkan jumlah penduduk lansia di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Implikasinya, pertama, penduduk lansia di Indonesia akan tumbuh berlipat ganda pada dekade mendatang. Kedua, secara absolut jumlah penduduk lansia di Indonesia lebih besar dibanding dengan negara-negara yang telah mengalami problem penduduk, seperti Jepang, Korea Selatan, terlebih Singapura dan Hongkong. Ketiga, jika dilihat per provinsi, ternyata beberapa provinsi telah mengalami proses penuaan penduduk dibanding dengan yang terjadi secara nasional. Penyebaran jumlah

penduduk Indonesia tidak merata karena sebagian besar menetap di Pulau Jawa. Yogyakarta termasuk berpenduduk padat, memiliki angka harapan hidup tertinggi di Indonesia yaitu 74,2 tahun, sehingga jumlah lansia di Yogyakarta juga semakin bertambah.

Masalah lain yang muncul adalah berubahnya struktur keluarga dari keluarga luas (*extended family*) menjadi keluarga inti (*nuclear family*). Pergeseran ini terkait dengan perubahan perilaku sosial budaya masyarakat, yaitu anak yang telah berkeluarga akan memisahkan diri dengan orang tua. Hal ini menyebabkan struktur keluarga berubah secara signifikan menjadi keluarga baru dengan jumlah anggota yang cenderung semakin kecil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan jumlah rumah tangga di Indonesia telah melebihi jumlah pertumbuhan penduduknya. Perubahan ini tentu akan berpengaruh terhadap perawatan yang ditawarkan anak kepada orang tua.

Yogyakarta dengan jumlah lansia banyak akan berdampak negatif, apabila tidak diikuti dengan penyediaan pelayanan sosial secara baik. Kondisi tersebut mendorong warga masyarakat untuk memberi pelayanan sosial bagi lansia sesuai dengan kearifan lokal budaya jawa. Pepatah “*mikul duwur mendem jero*” mengandung makna, bahwa sebagai seorang anak atau generasi muda harus mengangkat derajat orang tua dengan menjadi seseorang yang bermanfaat, hidup sukses, sejahtera, sehingga dapat mengangkat harkat martabat keluarga dan berusaha menghapus kesalahan, kekurangan orangtua. Salah satu desa di Kabupaten Bantul yang sangat peduli terhadap lansia adalah Dusun Prenggan Kecamatan Bambanglipura Kabupaten Bantul, terdapat Paguyuban Pusaka Wahyu Teratai yang memberikan pelayanan bagi lansia.

Pusaka Wahyu Teratai adalah organisasi sosial yang memberi pelayanan bagi lansia agar dapat hidup sejahtera lahir batin. Menurut Bapak Sugino, A.Md. sebagai ketua menyatakan, bahwa Pusat Santunan dalam Keluarga (Pusaka) adalah pemberian bantuan dan pelayanan di dalam keluarga lansia (bukan di panti). Wahyu

dimaksudkan sebagai anugrah bagi lansia karena mendapat bantuan dan perhatian dari pemerintah (Kemensos RI), dan pelayanan sosial dari warga masyarakat setempat. Teratai dari Yayasan Kesejahteraan Sosial Teratai (YKST). Awalnya pada bulan Maret 2008 diadakan musyawarah warga Dusun Prenggan dengan tokoh masyarakat, dan pemerintah Desa Sidomulyo untuk membentuk organisasi sosial yang memberi pelayanan khusus bagi lansia kurang mampu. Pemrakarsa program dari Yayasan Kesejahteraan Sosial Teratai, pendamping dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Sebagian besar pengurus bukan berlatar belakang bidang sosial, namun kesanggupan dan semangat kepedulian menggugah mereka untuk memberi pelayanan kepada para lansia. Kegiatan selanjutnya adalah dilakukan pendataan warga lansia di Dusun Prenggan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. Permasalahan sosial lanjut usia termasuk dominan karena jumlahnya banyak dan perlu penanganan segera. Masalah sosial lain di Desa Sidomulyo adalah tuna daksa ada enam orang, tuna netra ada delapan orang, tuna rungu dan wicara ada enam orang, cacat mental ada enam orang, cacat ganda (fisik dan mental) ada tiga orang, tuna lainnya ada tiga orang, sehingga jumlah disabilitas sebanyak 32 orang.

Setelah dilakukan pendataan diperoleh 84 lansia yang menjadi binaan dengan kegiatan meliputi: pelayanan jasmani berupa pemberian makan, olah raga berupa senam lansia, pemeriksaan kesehatan, pembinaan rohani melalui pengajian, kegiatan sosial, kesenian dan rekreasi serta kegiatan ekonomi. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana bentuk kegiatan pelayanan sosial bagi lanjut usia berbasis masyarakat desa? Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pelayanan sosial bagi lanjut usia berbasis masyarakat desa. Manfaat penelitian untuk memberi masukan bagi Kementerian Sosial RI serta lembaga terkait dalam menyusun kebijakan dan program pelayanan sosial bagi lanjut usia.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian tentang pelayanan sosial bagi lanjut usia berbasis masyarakat desa merupakan penelitian deskriptif. Menurut pendapat Jacop Vredenburg dalam bukunya *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, disebutkan bahwa penelitian deskriptif adalah penataan dan deskriptif secara sistematis dari sejumlah gejala di dalam suatu universum secara sempurna. Penataan dan deskripsi dari sejumlah gejala merupakan lukisan atau uraian dari realitas sosial yang kompleks, sehingga akan tampak klasifikasi tertentu untuk menyederhanakan realitas sosial tersebut dalam rangka analisa lebih lanjut. Dari penelitian deskriptif akan dimanfaatkan, diciptakan konsep-konsep ilmiah, sekaligus berfungsi mengklasifikasikan gejala-gejala sosial yang ada, untuk keperluan analisa lebih lanjut.¹

Lokasi penelitian di Dusun Prenggan Desa Sidomulya Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul Yogyakarta. Waktu pelaksanaan penelitian bulan Juni sampai dengan Agustus 2016. Teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung kepada pengurus organisasi sosial, para lansia dan tokoh masyarakat selaku informan. Observasi dilakukan untuk melihat kegiatan pelayanan lanjut usia, dan studi dokumentasi dengan memanfaatkan catatan pengurus, foto kegiatan, pamflet, dan profil. Analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif dan kualitatif disesuaikan dengan jenis data, sehingga dapat menggambarkan jenis pelayanan sosial bagi lanjut usia. Analisa data menurut Patton, 1980 (dalam Lexy J. Moleong 2002: 103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Menurut Taylor (1975:79) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci data secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (*ide*). Dalam penelitian ini analisa data secara deskriptif kuantitatif untuk menjelaskan tabel dalam bentuk persentase sedangkan analisa deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan pelayanan sosial bagi lanjut usia yang dilakukan oleh pengurus

organisasi Pusaka Wahyu Teratai dan warga masyarakat

C. Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Pengurus organisasi Pusaka Wahyu Teratai memberikan pelayanan sosial bagi lansia di desa dan melakukan pendataan untuk pelayanan sosial kepada 84 lansia dengan kegiatan sebagai berikut.

Pelayanan olah raga, merupakan kegiatan untuk menjaga kesehatan jasmani seperti jalan sehat dan senam lansia. Kegiatan ini dilakukan dengan cara berolah raga sesuai dengan kondisi fisik masing-masing. Senam lansia dan jalan sehat diadakan secara rutin setiap hari minggu pagi. Jalan sehat dilakukan berkeliling desa dengan diisi kegiatan permainan tradisional untuk menambah keakraban dan keceriaan. Kegiatan tersebut dilakukan guna mengurangi kejenuhan dan menghilangkan stres. Kegiatan olah raga diyakini dapat membuat jiwa dan raga lebih sehat, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sebagaimana motto "*Mens sana in corpore sano*" sebuah kutipan populer dalam dunia kesehatan dan olah raga. Pendapat tersebut dilontarkan oleh seorang pujangga Romawi, Decimus Iunius Juvenalis, yaitu Satire X, *Mens sana in corpore sano* yang ditafsirkan menjadi 'dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat'. (Sumber diunduh: 8-2-2017 <https://semangatis.me/2009/06/18/mens-sana-in-corpore-sano/>).

Pelayanan kesehatan gratis, dilakukan masyarakat bekerja sama dengan dokter dan perawat dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah, berat badan, pemberian obat bagi lansia yang sakit ringan seperti pusing, batuk, maag, rematik, dan *masuk angin*. Dokter dan perawat merupakan tenaga medis berdomisili di Desa Prenggan yang memiliki kepedulian sosial terhadap lingkungan. Pelayanan kesehatan dilakukan setiap hari minggu di rumah kepala dukuh yang juga sebagai ketua organisasi Pusaka Wahyu Teratai. Pemeriksaan kesehatan bagi lansia tidak mampu tidak dipungut biaya atau gratis, se-

hingga mereka dapat memeriksakan kesehatannya seperti: pengecekan tensi darah, rematik, *masuk-angin* sesuai dengan jadwal pemeriksaan yang telah ditentukan. Jumlah lansia yang berobat setiap hari minggu sekitar 80 orang.

Pelayanan makanan bergizi, dengan menyediakan sarapan bubur dan pemberian paket *punjungan nasi rantang* atau hantaran. Pelayanan tersebut bertujuan untuk memperbaiki gizi lansia agar tubuh tetap sehat. Menu makanan disesuaikan kebutuhan lansia ada sayuran (bayam, wortel, kecambah), protein (telur, ikan, daging), dan vitamin (jeruk, pisang, mangga). Biaya untuk menyediakan nasi bubur dan nasi rantang menggunakan dana bantuan dari Yayasan Kesejahteraan Sosial Teratai.

Penyediaan makanan berupa nasi bubur dan *punjungan nasi rantang* dilakukan oleh ibu-ibu warga setempat sebanyak 18 orang. Kegiatan memasak dilakukan setiap malam minggu secara bersama-sama, memasak nasi (*adang*) memakai kayu bakar yang mudah didapat di pekarangan rumah, agar nasi lebih enak sekaligus hemat bahan bakar tanpa gas dan minyak. Keesokan harinya makanan sudah siap dan disajikan untuk sarapan pagi (nasi, bubur). Setelah kegiatan selesai dilanjutkan dengan *punjungan nasi rantang* sejumlah 84 paket untuk lansia dengan cara diantar ke rumah-rumah oleh ibu-ibu. Menu *punjungan rantang* terdiri nasi, sayur (lodeh, asem, brambang salam, soto), lauk-pauk (tempe, tahu, telur, ikan, ayam), buah (pisang, jeruk, pepaya, semangka) dan krupuk.

Pelayanan rohani, diisi dengan kegiatan pengajian yang diadakan setiap hari minggu legi tiap 35 hari sekali (jawa: *selapanan*) dengan mengundang ustadz/kyai Zuhri dari Sewon Bantul. Kegiatan tersebut bertujuan agar para lansia dapat menjalani sisa hidupnya dengan sabar, selalu bersyukur, damai, sejahtera lahir dan batin. Kegiatan pengajian sekaligus untuk menjaga kesehatan jiwa, menambah ilmu dan wawasan, juga menjalankan kewajiban sebagai umat Islam. Hal itu sesuai dengan pepatah yang menyatakan mencari ilmu itu wajib hukumnya

dari lahir sampai wafat, berdasarkan sabda Rasulullah SAW: **اطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ** “Tuntutlah ilmu sejak dari buaian sampai liang lahat”. Hadits tersebut menjadi dasar dari ungkapan “*Long life education*” atau pendidikan seumur hidup. Kehidupan di dunia ini tidak sepi dari kegiatan belajar sejak mulai lahir sampai hidup berakhir, termasuk juga bagi lansia. (https://www.facebook.com/permalink.php?id...story_fb_id.. Sumber diunduh: 15-2-2017).

Pengajian juga merupakan wahana untuk bersilaturahmi bagi para lansia. Orang yang suka mengunjungi sanak saudaranya serta menjalin silaturahmi akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang artinya: “Barangsiapa yang senang diluaskan rizqinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi”. Kegiatan keagamaan (pengajian) sangat berguna bagi para lansia dalam menjalani masa tuanya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Emile Durkheim, agama merupakan sumber penguatan. Agama telah memberi sumbangan besar dalam internalisasi norma-norma masyarakat yang menimbulkan kesadaran sosial dan motivasi kepedulian terhadap sesama². Hal tersebut sudah dinyatakan dengan tegas dalam Al-Qur'an: “Dan beribadahlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Berbuat baiklah kepada dua orangtua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan suka membangga-banggaan diri”. (QS. an-Nisa'/4: 36).

Agama memiliki fungsi sebagai *social support system* karena mampu memberi dukungan terhadap anggota kelompok yang mengalami masalah (musibah). Hal ini didorong oleh solidaritas mekanik berupa kesamaan agama. Setiap anggota (jamaah) akan memberi bantuan moril dan materiil kepada anggota kelompoknya yang mengalami masalah. Agama sebagai sis-

tem penyembuhan alami (*coping mechanisms*) melalui permohonan (doa) penyembuhan, usaha yang tekun, sabar, dan tabah menghadapi ujian hidup (tawakal), serta pengharapan kepada Tuhan YME.

Pelayanan penumbuhan rasa kesetiakawanan sosial. Menurut Pror. Dr. Haryati Soebadio kesetiakawanan sosial adalah solidaritas, tenggang rasa, mampu menempatkan diri dalam tempat, situasi dan kesulitan orang lain, tidak bersikap mentang-mentang, sanggup merasakan dan menunjukkan toleransi terhadap keadaan orang lain serta bersedia mengulurkan tangan bila diperlukan (1991: 10). Kesetiakawanan sosial dapat diwujudkan dengan melakukan kunjungan waktu sakit, melayat ataupun bantuan duka. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara anggota Pusaka Wahyu Teratai diwajibkan mengumpulkan iuran kesejahteraan sosial (IKS) setiap pertemuan dengan memberi dana sebesar Rp. 1.000,-. Menurut pengelola dana IKS, bahwa iuran dimulai sejak Januari 2010 hingga akhir tahun 2013 jumlah dana yang telah terkumpul sekitar Rp. 2 juta dan disimpan di koperasi petani Dusun Prenggan.

Dana IKS tersebut dimanfaatkan apabila ada anggota lanjut usia yang mengalami sakit atau meninggal dunia, dengan memberi santunan dana sakit atau dana duka. Kegiatan sosial di perdesaan masih berjalan sesuai tradisi misalnya apabila ada warga yang sakit, maka tetangga banyak yang berkunjung serta memberikan bantuan dana dan doa. Apabila ada warga yang meninggal dunia akan diumumkan ke desa-desa tetangga melalui masjid ataupun musholla, sehingga yang datang melayat sangat banyak dan mereka juga memberi dana ataupun doa. Tradisi sosial lain yang masih berlaku di desa adalah apabila ada kematian maka diadakan “tahlilan” (majelis doa bersama) selama tiga sampai tujuh hari sebagai perwujudan bakti kepada orang tua atau leluhur. Sejalan dengan peribahasa Jawa istilah *mikul duwur mendem jero* yang artinya sebagai generasi muda diwajibkan untuk mengangkat nama baik orang tua dan berusaha menghapus kelemahan,

kesalahan orang tua agar menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama.

Pelayanan ekonomi bagi lansia ditujukan agar mereka memiliki kegiatan positif, tidak hanya berdiam diri di rumah yang dapat menyebabkan stress, karena merasa sudah tidak berguna lagi bagi keluarga dan lingkungannya. Waktu yang ada bisa diisi dengan memberi kesibukan yang sesuai dengan kondisi fisik lansia yang mulai lemah agar tetap memiliki semangat hidup dan semangat bekerja.

Pengurus memberi motivasi kepada lansia yang masih mampu bekerja untuk bertani di sawah atau lahan pekarangan dengan menanam pohon pisang raja, pisang ambon, pisang kepok, serta pepaya guna membantu memenuhi kebutuhan hidup atau ditabung. Caranya setiap kali tanaman pisang berbuah dan laku dijual, sebagian penghasilan disisihkan Rp.10.000,- untuk ditabung secara kelompok. Lansia yang melaksanakan kegiatan ini rerata berusia di bawah 70 tahun ada sebanyak 51 orang atau 61 persen. Lansia juga pernah mendapat bantuan ternak kambing etawa (kambing jawa) sebanyak lima ekor, namun karena tidak dapat memelihara dengan baik akibat kurang *pakan*, maka kelima kambing tersebut akhirnya dijual dan hasilnya untuk membeli seekor sapi yang dipelihara secara kelompok. Hal tersebut dinyatakan oleh salah seorang lanjut usia sebagai berikut.

“Untuk memelihara kambing, setiap hari saya harus mencari rumput atau dedaunan (Jawa: *ramban*), bila musim hujan kondisi badan sering sakit, encok, *masuk angin*, sehingga tidak dapat mengurus kambing dengan baik. Akhirnya kambing menjadi kurus dan sakit. Agar tidak rugi maka semua anggota sepakat, bantuan kambing dijual dan dibelikan seekor sapi dan dipelihara secara gotong royong.”

Berdasar pengalaman tersebut maka pemberdayaan ekonomi bagi lansia lebih difokuskan pada menanam pohon pisang dan pepaya yang lebih mudah merawat dan menjual hasilnya.

Kegiatan kesenian, bertujuan untuk menumbuhkan semangat hidup para lansia agar tidak

jenuh menjalani aktivitas keseharian. Kegiatan kesenian tradisional untuk menghibur diri sendiri dan teman-teman sekaligus untuk melestarikan kesenian daerah, seperti jatilan, kethoprak, dagelan mataram (jawa: *guyon maton*), *tembang jawa*, *geguritan*. Para lansia yang menjadi anggota kethoprak mataram serta jatilan berjumlah 30 orang, pemain *dagelan mataram* (pelawak) lima orang dan 20 orang menjadi anggota *macapatan*, *geguritan* dan *tembang jawa*. Hal tersebut dilakukan agar budaya jawa menjadi jatidiri warga masyarakat perdesaan. Seperti pepatah jawa “*desa mowo cara, kuto mowo toto*” yang artinya setiap desa memiliki karakteristik etika sopan santun bagi warga desa, juga setiap kota dan negara memiliki peraturan yang harus ditaati. DIY memiliki dana keistimewaan yang dapat mendukung kegiatan kesenian tradisional. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah DIY.

Seniman teater, Butet Kartarejasa, menilai banyak potensi kesenian dan kebudayaan di DIY yang belum dikembangkan secara optimal. Menurutya, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasi kelompok kesenian yang ada agar dapat berkembang dan lebih maju. Anak dari Bagong Kussudiardjo koreografer dan pelukis senior Indonesia ini menyebut, pemerintah bisa memanfaatkan dana keistimewaan (danais) untuk membiayai infrastruktur yang diperuntukkan bagi pengembangan kesenian di masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Butet bahwa “Pemanfaatan dana keistimewaan untuk infrastruktur seni pertunjukan, dia berharap di Jogja kelak setiap kecamatan punya gedung pertunjukan secara bertahap. Tahun ini tiga kecamatan, tahun berikutnya tiga kecamatan dan seterusnya.”

Pembangunan gedung seni pertunjukan tidak harus mewah yang penting adalah kelompok seni yang ada di masyarakat bisa mempunyai tempat untuk berlatih sekaligus untuk pementasan. DIY yang kaya dengan aneka kesenian tradisional patut mendapat perhatian dari pemerintah agar kesenian itu tidak punah ditelan zaman. Gedung seni pertunjukan itu juga dapat

dimanfaatkan sebagai wahana apresiasi dan edukasi masyarakat melalui seni. Yogyakarta itu unik, tidak ada wilayah lain seperti Yogyakarta yang masyarakatnya penuh inisiatif memiliki kepekaan seni dan kesenian itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Hampir disetiap kecamatan mempunyai kesenian jathilan, karawitan, atau wayang orang, semuanya bisa berlatih atau pentas di gedung kesenian. (<http://www.sorotbantul.com/berita-bantul-3870-hidupkan-kesenian-dimasyarakat-dengan-dana.html>. Sumber diunduh: 15-2-2017)

Kegiatan rekreasi bertujuan menambah wawasan bagi lansia agar tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan. Rekreasi antara lain dilakukan di Candi Prambanan dan Situs Tamansari Yogyakarta dengan menggunakan transportasi bus wisata. Rekreasi dipilih lokasi yang dekat, agar para lansia tidak terlalu lelah karena lokasi tidak terlalu jauh. Tujuan rekreasi ke Candi Prambanan dan Tamansari selain untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah sekaligus untuk mengingatkan bahwa bangsa kita memiliki warisan budaya yang patut dibanggakan. Candi Prambanan salah satu tempat tujuan wisata yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia, kita patut bersyukur memiliki peradaban yang agung dan langka (*kuno*).

Bagi lanjut usia dengan rekreasi ke Candi Prambanan dapat menceritakan tentang dongeng Bandung Bondowoso dan Rara Jonggrang kepada generasi muda (anak, cucunya) agar generasi muda mencintai dan menghargai budaya warisan leluhurnya. Hasil wawancara terhadap salah seorang lanjut usia menyatakan bahwa "*Kulo bingah sanget saget ningali Candi Prambanan, kados pundi riyen para leluhur anggenipun mbangun candi engkang endah puniko*". Artinya "Saya senang sekali dapat melihat Candi Prambanan, bagaimana dahulu para leluhur membangun candi yang megah ini". Berkunjung ke Candi Prambanan merupakan salah satu sarana untuk rekreasi bagi lansia. Hikmat dari kegiatan rekreasi selain memberi hiburan, sarana memupuk tali persaudaraan, juga sebagai bentuk

kekaguman pada peninggalan leluhur sehingga akan menghargai warisan budaya tersebut.

Bantuan dan sumbangan yang diterima organisasi Pusaka Wahyu Teratai meliputi: 1) Sumbangan Kemensos RI melalui Y KST sebesar Rp. 30 juta/tahun (dimulai sejak tahun 2011-2015); 2) Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebesar Rp. 3,5 juta (tahun 2010); 3) Bedah Rumah untuk lanjut usia, bantuan pakaian untuk bingkisan lebaran, bantuan makanan baik lembaga pemerintah maupun swasta. Bantuan tersebut diserahkan pada saat acara Peringatan Hari Ulang Tahun Lanjut Usia (Halun) tahun 2015 di Kebun Binatang Gembira-loka Yogyakarta, yang dihadiri Ibu Hj. Dra. Inten Soeweno selaku Ketua Pembina YKST dan para purnakaryawan serta warga lanjut usia di sekitar wilayah Yogyakarta.

Pelayanan sosial bagi para lansia di Dusun Prenggan sudah berjalan lebih dari delapan tahun (satu windu) karena Pusaka Wahyu Teratai sebagai salah satu bentuk organisasi sosial diresmikan pada tanggal 25 Juni 2008 oleh Ibu Hj. Dra. Inten Soeweno selaku Ketua Pembina YKST. Susunan pengurus terdiri dari, Penanggungjawab (Pembina) Edi Murjito, S.Pd (Lurah Desa Sidomulyo), penasehat Saryanto, S.Sn (Dukuh Prenggan) dan Sumarlan, SH (KUA Bambanglipuro), Ketua yaitu Sugino, A.Md; Bendahara Sudarto, S.T.P; Sekretaris Totok Handriyo.

Pelayanan sosial tersebut dapat terlaksana didasari oleh semangat juang dan kerelaan mengabdikan sebagai relawan sosial serta adanya modal sosial (*social capital*) yang baik. Menurut James Coleman *social capital* adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Modal sosial adalah bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi. Modal sosial didefinisikan sebagai kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat. Modal sosial diartikan sebagai serangkaian nilai

(norma) informal yang dimiliki bersama dalam suatu kelompok yang memungkinkan terjalannya kerjasama³. Kondisi tersebut dapat mendukung orsos dalam memberi pelayanan sosial bagi para lanjut usia dengan menjalin kerjasama, seperti Kementarian Sosial RI (YKST), Pemerintah Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Bantul, perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat (Kuliah Kerja Nyata) dan perusahaan dengan program CSRnya.

Pada awal berdiri jumlah lansia yang tergabung di Pusaka Wahyu Teratai berjumlah 84 orang, dalam perjalanan waktu berkurang tiga orang karena meninggal dan masih ada 81 orang. Jumlah lansia perempuan lebih banyak daripada laki-laki, yakni 47 perempuan dan 34 laki-laki. Kenyataan tersebut menunjukkan, bahwa daya tahan hidup kaum perempuan lebih baik dari pada kaum lelaki. Hal tersebut dikarenakan kaum perempuan sudah terbiasa hidup mandiri, bahkan lebih banyak melayani suami dan anak-anak, aktivitas kerja keseharian dapat melatih kekuatan jasmani (seperti olah raga) dan membuat organ tubuh (jantung, paru-paru, tangan dan kaki) lebih sehat. Kaum lelaki cenderung berkurang aktivitas kerja (karena sudah pensiun, tidak bekerja, lebih banyak diam di rumah) menyebabkan jasmani kurang bergerak, sehingga organ tubuh mengalami masalah dan akhirnya menderita sakit. Kurang bergaul atau tidak memiliki aktivitas di lingkungan sehingga kebutuhan rohani mengalami kemunduran. Timbul rasa tidak berguna, hidup terasa sepi sehingga diperlukan pembinaan rohani dengan ikut pengajian di lingkungan. Berikut disajikan data tentang kategori umur lanjut usia.

Tabel 1. Klasifikasi Usia Lansia

No	Usia (tahun)	f (orang)	%
1	60 - 69	55	55
2	70 - 79	33	33
3	80 - 89	9	9
4	90 - 99	3	3
Total		100	100

Sumber: Data Primer 2016

Berdasar tabel tersebut dapat diketahui, mayoritas lansia sebanyak 55 orang (55 persen) berumur antara 60 hingga 69 tahun. Kelompok umur 70-79 sudah mulai berkurang menjadi 33 orang (33 persen) dan yang paling sedikit umur antara 90 hingga 99 tahun hanya tiga orang (3 persen). Data tersebut menunjukkan, bahwa jumlah lansia yang berumur panjang jumlahnya semakin sedikit. Perlu disadari oleh anggota keluarga dan warga masyarakat, bahwa para lanjut usia semakin berusia banyak, ada kecenderungan sifatnya akan kembali pada kondisi seperti masa anak-anak dan mengalami penurunan daya ingan atau pikun. Hal tersebut tentu membutuhkan pelayanan sosial dan perawatan yang serius dan insentif terutama dari keluarga dan lingkungan masyarakat. Kondisi lanjut usia di Kabupaten Bantul dibanding dengan kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Klasifikasi Angkatan Kerja Lansia Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di DIY

Kab/Kota	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	L + P (%)
Bantul	30,0	31,0	30,5
Gunungkidul	23,1	26,0	24,6
Sleman	18,8	17,0	17,9
Yogyakarta	14,5	14,9	14,7
Kulonprogo	13,6	11,1	12,4
Total	100,0	100,0	100,0
(N)	134	129	263

Sumber: Sensus Penduduk 2010 yang diolah

Berdasar data tersebut dapat diketahui, bahwa persebaran tenaga kerja lansia menurut kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan proporsi angkatan kerja lanjut usia yang terbesar berada di Kabupaten Bantul mencapai 30,5 persen. Kedua di Kabupaten Gunung Kidul mencapai 24,6 persen. Apabila proporsi angkatan kerja penduduk lansia di kedua wilayah tersebut digabungkan, besarnya mencapai 55,1 persen lebih dari separuh total angkatan kerja lansia di DIY. Ditinjau dari jenis kelamin, jumlah lansia perempuan di Kabupaten Bantul dan

Kabupaten Gunungkidul lebih banyak dari pada lansia laki-laki. Berkait upaya pemberdayaan yang dilakukan, seyogyanya diutamakan bagi lansia yang berada di wilayah Kabupaten Bantul, urutan berikut di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan terakhir di Kabupaten Kulonprogo.

Kesejahteraan masyarakat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Setiap tahun sejak 1990 Laporan Pembangunan manusia (Human Development Report) telah menerbitkan indeks pembangunan manusia (Human Development Index-HDI) yang mengartikan definisi kesejahteraan secara lebih luas dari pada sekadar pendapatan domestik bruto (PDB). HDI memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia: a) panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup); b) terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan, dan tinggi); serta c) memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/PPP dan penghasilan) (UNDP, 2004). Berdasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Yogyakarta menempati posisi tinggi yakni peringkat empat dalam skala nasional dengan nilai IPM mencapai 75,2 tahun 2009. Berdasar kriteria yang telah dibuat oleh UNDP, IPM Yogyakarta masuk dalam kategori menengah. IPM Yogyakarta berdasarkan kabupaten/kota diketahui yang paling tinggi peringkatnya adalah Kota Yogyakarta dan menempati peringkat pertama secara nasional dengan IPM 79,3. Kabupaten Sleman berada pada peringkat 14 dengan IPM 77,7. Tiga wilayah lain berada di peringkat di atas 100, yaitu Kulonprogo peringkat 106, Bantul peringkat 107, dan paling rendah Gunung Kidul pada peringkat 283. Tantangan ke depan agar Pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan IPM bagi daerah yang masih rendah sehingga disparitas antarwilayah dapat dikurangi. Pelayanan sosial bagi lanjut usia di Kabupaten Bantul termasuk Dusun Prenggan Sidomulyo Bambanglipuro Bantul dilakukan guna memperbaiki peringkat

IPM sekaligus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

D. Penutup

Kesimpulan: Yogyakarta memiliki usia harapan hidup tertinggi di Indonesia yakni rerata 74 tahun, dikarenakan memiliki budaya lokal, kearifan lokal yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berupa adat-istiadat Jawa, kesenian tradisional, tatakrama, sopan-santun, sikap gotong royong, masyarakatnya lebih mengutamakan kepentingan keluarga, masyarakat di atas kepentingan individu, guna menciptakan suasana tentram, damai, sejahtera (Yogya Berhati Nyaman). Jumlah lansia yang semakin bertambah membutuhkan adanya pelayanan sosial yang baik. Pelayanan sosial dapat diperoleh melalui kegiatan desa peduli lanjut usia, organisasi sosial peduli lansia dengan melibatkan warga masyarakat sebagai bentuk pelayanan sosial berbasis masyarakat. Kepedulian terhadap lansia dapat dilakukan dengan baik karena ada bantuan dana dari pemerintah (Kementerian Sosial RI) melalui Yayasan Kesejahteraan Sosial Teratai, perhatian dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Sosial Kabupaten Bantul, perguruan tinggi dan perusahaan melalui program CSR.

Lansia memperoleh pelayanan sosial berupa pemberian makan (*punjungan* nasi rantang, bubur), pemeriksaan kesehatan gratis, olahraga senam lansia, pembinaan rohani dengan pengajian, kesenian tradisional (kethoprak, dagelan, mocapatan), rekreasi, bingkisan lebaran, perbaikan rumah, kunjungan, pemberian bantuan bagi yang sakit dan wafat, pemberian bibit tanaman pisang, pepaya, dan iuran dana kesejahteraan sosial guna menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial.

Rekomendasi: Kepada Kementerian Sosial RI melalui Yayasan Kesejahteraan Sosial Teratai diharapkan dapat membentuk organisasi sosial berbasis masyarakat yang memberikan pelayanan sosial bagi para lansia di tingkat perdesaan dan perkotaan, dengan cara memberikan bantuan

dana sebesar Rp. 50 juta pertahun untuk satu kelompok yang beranggotakan minimal 50 orang. Kegiatan peduli lansia tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan, terutama bagi lansia. Bantuan dana secara kelompok diharapkan dapat memberdayakan warga masyarakat agar peduli dan rela berkorban untuk kesejahteraan lansia.

Kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan lembaga terkait (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, lembaga Agama, Dinas Pendidikan) serta dunia usaha dapat memberikan dukungan dana untuk kegiatan pelayanan sosial bagi lansia.

Kepada keluarga lansia, warga masyarakat, dan relawan sosial diharapkan dapat menyumbangkan tenaga, pikiran, harta dan benda untuk mendukung kegiatan peduli lansia sebagai wujud kesetiakawanan sosial. Kepada generasi muda diharapkan dapat menjaga adat budaya, kearifan lokal, seperti “*Mikul Duwur Mendem Jero*”, selalu berbakti kepada orangtua, serta menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Kepada Bapak Benny Setia Nugraha, M.Si selaku Kepala B2P3KS Yogyakarta, kami menghaturkan banyak terimakasih yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian (study kasus) tentang Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Berbasis Masyarakat Desa. Kepada Pengurus Organisasi Sosial Pusaka Wahyu Teratai dan para lanjut usia kami menghaturkan banyak terimakasih atas kerjasama dan informasi guna menyusun laporan penelitian sebagai karya tulis ilmiah. Kepada Bapak Drs. Rustandi selaku mantan kepala B2P3KS Yogyakarta dan Pengurus Kapesos Yogyakarta, kami sampaikan terimakasih yang setulusnya yang telah memotivasi untuk melakukan penelitian ini, dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan sosial bagi para lanjut usia.

Pustaka Acuan

- Fukuyama Francis. (1995). *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Diterjemahkan Indonesia. 2002. Yogyakarta: Penerbit Qalam
- Jacob Vredenberg. (1983). *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Johson, Doyle Paul. (1988). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (terj. Robert M.Z Lawang). Jakarta : PT Gramedia.
- Manasse Malo, Dr. dkk. (1985). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Penerbit Karunika Universitas Terbuka.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodology Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Profil Orsos Pusaka Wahyu Teratai dan foto dokumentasi kegiatan.
- Soebadio Haryati. (1991). *Kesetiakawanan Sosial sebagai Modal Dasar Pembangunan*. Jakarta: Kertas Kerja.
- <https://semangatis.me/2009/06/18/mens-sana-in-corpore-sano/>.(diunduh:8-2-2017)
- <https://cintakajiansunnah.wordpress.com/.../dalil-dalil-alquran-tenta>.(diunduh:8-2-2017)
- <http://megapolitan.kompas.com/.../Harapan.Hidup.Warga.Yogyakarta.Pal>.(diunduh:8-2-2017)
- https://www.facebook.com/permalink.php?id...story_fb_id.. Sumber diunduh: 15-2-2017)
- <http://www.sorotbantul.com/berita-bantul-3870-hidupkan-kesenian-di-masyarakat-dengan-dana.html>. (diunduh: 15-2-2017)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Rara_Jonggrang. (Sumber diunduh: 15-2-2017).

Footnote

1. Jacob Vredenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta. 1983, hal 34.
2. Doyle Paul Johnson. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. (terjemahan) Robert M.Z Lawang. Jakarta : PT Gramedia. (1988: 195-196).
3. Francis Fukuyama, “*Trust : Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*” diterjemahkan bahasa Indonesia Tahun 2002. Yogyakarta. Penerbit Qalam. (1995 : 12)

Modal Sosial Petani Tembakau untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Social Capital of Tobacco Farmer for Social Welfare Improvement

Fatwa Nurul Hakim¹ dan Gunawan Wibisono²

¹Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial,
Jalan Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Bantul Yogyakarta, Indonesia. Email: hakim.fatwa@yahoo.com

²Universitas Sebelas Maret, Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan Surakarta, Indonesia.
Email: wibisonognwn@gmail.com

Diterima 16 Juni 2017, diperbaiki 12 Juli 2017, disetujui 5 Desember 2017

Abstract

This research is aimed to reveal the social capital of tobacco farmers in supporting farming activities for increasing their social welfare. The social welfare of tobacco farmers is strongly influenced by the tobacco market prices. In this case, the cigarettes industry becomes the backbone of tobacco farming which supports the livelihood of tobacco farmers. This study uses the theory of Pierre Bourdieu and James Coleman on social capital. This is a qualitative research that uses case study approach. It was conducted at Lamuk Sub-village, Legoksari Village, Tlogomulyo Sub-District, Temanggung District. Five informants of the research were selected purposively. The data were collected by using specific techniques of indepth interview. Then the data were analyzed by using interactive analysis namely omitting irrelevant data, presenting relevant data and making conclusion (verifying). The findings of this study indicate that the Indonesian Tobacco Farmers Association (APTI) and Farmers Group function as social networking; selamatan ritual / pray for cultivating soil, taking care of tobacco plants and tasyakuran / ceremony for being grateful which function as the norm of trust; whilst labor relations system functions as reciprocity; and the activities of jimpitan sewu-selawe, mutual lending of labor; division of crops, watching the legislation of smoking prohibition, Djarum Foundation scholarship function as mutual benefit from tobacco farmers to Legoksari rural society welfare. The result of the research describes that social capital functions as important aspect in empowering the society, especially the tobacco farmers and recommends that the Government, the society empowerment activists or the Society Empowerment Institutions, Ministry of Social RI, Local Government, and Agriculture Office need to support those related to farmers empowerment policy. It is also expected that the support needed will not change the society structure and will not omit the social capital values.

Keywords: *social capital; tobacco farmer; welfare*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengungkap modal sosial petani tembakau dalam mendukung kegiatan pertanian untuk peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan sosial masyarakat petani tembakau sangat dipengaruhi oleh harga pasar tembakau. Industri rokok menjadi tulang punggung yang menunjang penghidupan petani tembakau. Penelitian ini menggunakan teori Pierre Bourdieu dan James Coleman tentang modal sosial. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian di Dusun Lamuk, Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung. Informan penelitian dipilih secara *purposive* sebanyak lima orang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara secara mendalam, sedang analisis data dengan analisis interaktif yakni memilah data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan (verifikasi). Temuan penelitian menunjukkan bahwa terbentuknya Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Gabungan Kelompok Tani sebagai *social networking*; ritual *selamatan ngolah tanah*, tembakau dan tasyakuran sebagai *norm of trust*; relasi sistem kerja sebagai *reciprocity*; dan kegiatan *jimpitan sewu-selawe*, saling pinjam tenaga kerja, pembagian hasil panen, mengawal RUU pelarangan merokok, beasiswa Djarum Foundation sebagai *mutual benefit*. Penelitian ini menjelaskan bahwa modal sosial berfungsi sebagai aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat terutama petani tembakau dan merekomendasikan perlunya pemerintah, praktisi pemberdayaan masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian mendukung terkait kebijakan pemberdayaan petani. Hal ini diharapkan tidak mengubah struktur dalam masyarakat dan tidak menghilangkan nilai modal sosial.

Kata kunci: modal sosial; petani tembakau; kesejahteraan

A. Pendahuluan

Daun tembakau diklaim sebagai “emas hijau” karena keberadaannya memberi dampak bagi tiga sektor sekaligus, yakni pertanian, tenaga kerja dan industri, sehingga penerimaan negara lewat cukai meningkat. Klaim ini menjadi dasar pokok pemerintah untuk tidak meratifikasi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau atau traktat yang berlaku secara internasional tentang pengendalian produk tembakau yang dibuat oleh negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (www.kompak.co).

Di Indonesia tembakau bukan tanaman pokok karena tidak tumbuh dan dibudidayakan di semua daerah. Total luas lahan pertanian tembakau di Indonesia mencapai 228.448 hektare (Elfarsina, 2014). Tembakau terkonsentrasi di tiga provinsi yang meliputi 89 persen dari total luas wilayah pertanian tembakau di seluruh Indonesia. Jawa Timur dengan luas 108 ribu hektar atau 55 persen dari total luas lahan pertanian tembakau seluruh Indonesia, Jawa Tengah seluas 44 ribu hektare atau 22 persen luas lahan tembakau, dan Nusa Tenggara Barat seluas 24 ribu hektare atau 12 persen (Elfarsina, 2014). Sebagian kecil sisanya tersebar di Sumatera dan Jawa Barat.

Penyebab tidak tersebarnya tanaman tembakau di seluruh wilayah Indonesia karena tanaman ini sangat rentan terhadap kondisi lingkungan. Bibit tembakau tidak bisa hidup dan tumbuh di daerah yang sangat kering dengan curah hujan rendah, tidak bisa tumbuh di lingkungan yang basah dengan curah hujan tinggi. Tembakau hidup di daratan menengah bukan pegunungan atau tidak mendekati laut.

Tembakau sebagai komoditas memiliki nilai ekonomi tinggi, pengelolaannya melibatkan banyak tenaga kerja sejak pembibitan hingga pembuatan menjadi rokok dan cerutu. Masyarakat yang terlibat dalam bisnis tembakau sebanyak 6.414.000 jiwa terdiri dari petani tembakau sebanyak 2,3 juta, petani cengkeh sebanyak 1,9 juta, tenaga kerja di pabrik rokok 164 ribu, pengecer rokok atau pedagang asongan sebanyak 1,15 juta, serta percetakan dan transportasi 900 ribu orang (kompak.co).

Lingkungan yang berbeda akan menghasilkan jenis dan kualitas tembakau yang berbeda. Ada empat jenis tembakau yang terkenal yakni tembakau Madura yang dihasilkan oleh 64.442 hektare, tembakau Temanggung dihasilkan oleh 33.079 hektare, tembakau Weleri dan Kendal dari 9.043 hektare lahan, tembakau Mranggen dari 11.928 hektare, serta tembakau Paiton yang dihasilkan 12.527 hektare lahan (www.kompak.co). Tembakau tersebut sebagian besar dipasok untuk pabrik rokok kretek, sebagian kecil lain untuk rokok lintingan dan diekspor. Industri tembakau menghasilkan orang terkaya di Indonesia seperti Budi, Michael Hartono dari Djarum dan Putera Sampoerna mantan pemilik PT. H.M Sampoerna yang kemudian menjualnya kepada pabrik tembakau besar dari Amerika Serikat, Philip Morris.

Penelitian Lembaga Demografi Universitas Indonesia dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (2008) menunjukkan ironi tembakau karena kesejahteraan pemilik pabrik tak berbanding lurus dengan petani tembakau. Dilihat dari kondisi rumah petani, sebanyak 42 persen petani pengelola (pemilik, penyewa, dan bagi hasil) tinggal di rumah berlantai tanah, sebanyak 44 persen tinggal di rumah berlantai semen, dan hanya delapan persen yang memiliki rumah dengan lantai keramik. Keadaan tersebut tak berbeda dengan kondisi buruh tani. Sebanyak 58 persen buruh tinggal di rumah berlantai tanah, 35 persen di rumah berlantai semen dan empat persen memiliki rumah berlantai keramik, terdapat lima resiko usaha yang dialami sektor pertanian tembakau diantaranya perubahan cuaca, perubahan harga, hama tanaman, turunnya pembelian dan modal usaha yang besar. Kecilnya penghasilan usaha pertanian tembakau mengakibatkan sebanyak 65 persen buruh tani tembakau menyatakan ingin mencari pekerjaan lain atau pengalihan usaha.

Berdasar data informasi yang diperoleh dari Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), terdapat empat kota yang menjadi wilayah penghasil utama tembakau, cengkeh

dan kretek diantaranya adalah Temanggung, Minahasa, Kudus dan Kediri. Kota yang berada persis di tengah Pulau Jawa ini sangat terkenal dengan tembakau jenis ‘srinthil’.

Menurut sejarahnya, proyek penanaman tembakau dilakukan oleh pemerintah Belanda bersamaan dengan proyek penanaman kopi robusta pada tahun 1630. Proyek tersebut menyebar ke berbagai lahan kecamatan di Temanggung. Setidaknya ada 14 wilayah kecamatan yang menjadi lahan pertanian tembakau. Pada tahun 1811 produksi tembakau di Temanggung sudah mencapai 1.500 ton. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung mencatat di tahun 2009 jumlah produksi tembakau di wilayahnya mencapai 6.786 ton dari lahan seluas 13.088 hektar. (okezone.com, 2015).

Data 2010-2014, di Temanggung luas lahan yang ditanami tembakau berkisar 12.000-15.000 hektar. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Temanggung bidang Statistik dan Litbang, masyarakat perkebunan mencapai 51.958 jiwa (Mongabay, 2016). Buktinya terdapat empat perusahaan produsen rokok terbesar yang membeli tembakau dari Temanggung, diantaranya PT Djarum, OT Nojorono, PT Bentoel dan PT Gudang Garam.

Data tersebut menjelaskan bahwa pertanian tembakau di Temanggung merupakan salah satu yang berperan besar dalam perindustrian tembakau di Indonesia. Penelitian ini hendak mencari sejauh mana modal sosial petani tembakau di Temanggung berperan dalam pengembangan usaha pertanian tembakau sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat.

Menurut para ahli, modal sosial dapat didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, demi mencapai tujuan bersama, dalam berbagai kelompok dan organisasi (Coleman, 1999). Burt (1992) mendefinisikan, modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting bukan hanya bagi kehidupan

ekonomi akan tetapi juga setiap aspek eksistensi sosial yang lain. Putnam (2000) mendefinisikan modal sosial adalah penampilan organisasi sosial seperti jaringan dan kepercayaan yang memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama.

Fukuyama (1995) mendefinisikan, modal sosial sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalannya kerjasama diantara mereka. Cox (1995) mendefinisikan, modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antarmanusia yang ditopang oleh jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebaikan bersama.

Fukuyama, Cox, Partha (1999) mendefinisikan modal sosial sebagai hubungan yang tercipta dan norma yang membentuk kualitas serta kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spektrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama. Pada jalur yang sama Solow (1999) mendefinisikan, modal sosial sebagai serangkaian nilai atau norma yang diwujudkan dalam perilaku yang dapat mendorong kemampuan dan kapabilitas untuk bekerjasama dan berkoordinasi guna menghasilkan kontribusi besar terhadap keberlanjutan produktivitas.

Cohen dan Prusak (2001), menyatakan modal sosial adalah sebagai setiap hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu kepercayaan (*trust*), saling pengertian (*mutual understanding*), dan nilai bersama (*shared value*) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Sependapat dengan penjelasan dari Cohen dan Prusak, Hasbullah (2006) menjelaskan modal sosial sebagai segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kerja sama dalam masyarakat atau bangsa untuk mencapai kapasitas hidup yang lebih baik, ditopang oleh nilai dan norma yang menjadi unsur utama seperti *trust* (rasa saling mempercayai), hubungan timbal balik

dan aturan kolektif dalam suatu masyarakat atau bangsa dan sejenisnya.

Berdasar berbagai pengertian para ahli di atas, maka modal sosial (*social capital*) secara umum adalah hubungan yang tercipta berupa jaringan, nilai dan norma, hubungan sosial, kepercayaan dan institusi yang membentuk kualitas dan kuantitas serta efisiensi masyarakat yang bekerja sebagai buruh bangunan dengan memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi serta sebagai perekat sosial (*social glue*) yang menjaga kesatuan diantara anggota masyarakat luas secara bersama-sama. Modal sosial adalah sebuah potensi yang dapat meningkatkan kesadaran bersama tentang banyaknya kemungkinan peluang yang bisa dimanfaatkan dan kesadaran bahwa nasib bersama akan saling terkait dan ditentukan oleh usaha bersama yang dilakukan.

Chalid (2012) menyatakan bahwa peranan modal sosial sangat penting bagi kegiatan ekonomi. Dalam bisnis dibutuhkan kepercayaan yang kuat. Arianto dan Fitriana (2013) menyatakan bahwa berbagai kelompok sosial yang terbentuk untuk mengatasi permasalahan kesehatan merupakan perwujudan nyata dari modal sosial dan bentuk partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar utama dalam perwujudan *good governance*.

Kesejahteraan Sosial

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program terorganisir dan sistematis dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan sebuah konsep yang relatif baru berkembang. Kesejahteraan sosial memiliki arti kepada keadaan yang baik dan banyak orang yang menamainya sebagai kegiatan amal. Di Amerika Serikat kesejahteraan sosial juga diartikan sebagai bantuan publik yang dilakukan oleh pemerintah bagi keluarga miskin.

Para pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial menurut Rukminto (2005:17) adalah suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka

pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.

Pengertian tersebut menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pengelolaan masalah sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga masyarakat terdorong dan bisa mencapai ke arah kehidupan yang lebih baik. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang dikutip oleh Suharto (2009:153) kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.

Dari latar belakang yang telah diungkapkan maka masalah penelitian yang diajukan adalah bagaimana modal sosial petani tembakau yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani tembakau. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap modal sosial petani tembakau dalam mendukung kegiatan pertanian untuk peningkatan kesejahteraan, sedang manfaat penelitian ini diharapkan adanya model atau *prototype* penerapan modal sosial untuk pengembangan usaha sektor pertanian, khususnya pertanian tembakau.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pertimbangan pemilihan studi kasus karena lokasi penelitian merupakan penghasil tembakau jenis unggulan yaitu jenis "srintil". Lokasi penelitian di Dusun Lamuk Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung yang terletak di kaki Gunung Sumbing. Desa ini terletak di sisi timur lereng Gunung Sumbing sehingga mendapat pencahayaan sinar matahari yang baik dan konsisten. Kondisi inilah yang membuat Desa Legoksari cocok untuk penanaman tembakau.

Desa ini dikenal sebagai sentra penghasil ‘srinthal’ tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal, dimana ‘srinthal’ sendiri hanya bisa tumbuh di daerah ladang atau tegalan. Tidak semua ladang dapat ditanami ‘srinthal’. Melalui gambaran tersebut lokasi ini dipilih karena sebagai salah satu tempat di Kabupaten Temanggung yang memiliki kekhasan sebagai penghasil tembakau terbaik yaitu tembakau ‘srinthal’.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan strategi studi kasus. Studi kasus menyelidiki fenomena didalam konteks kehidupan nyata apabila batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan multi sumber buku dimanfaatkan (Yin, 1997:18).

Tujuan digunakannya strategi studi kasus ini adalah untuk melihat kekhasan di Dusun Lamuk Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung sebagai wilayah penghasil tembakau dengan kualitas terbaik di Kabupaten Temanggung. Eksplorasi struktur sosial digunakan untuk memperoleh gambaran secara utuh modal sosial petani tembakau di Dusun Lamuk.

Informan penelitian dipilih secara purposif, dengan alasan untuk mendapatkan informasi sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada tokoh masyarakat, petani tembakau, buruh petani dan masyarakat sekitar Desa Lamuk. Analisis data menggunakan analisis interaktif yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan (verifikasi).

C. Modal Sosial Petani Tembakau

Ada empat klasifikasi modal sosial yang dilakukan oleh petani tembakau.

Jaringan Sosial (*Social Networking*)

Gelombang gempuran dan suara gaduh berupaya mengguncang kemajuan produksi pengolahan tembakau di Indonesia. Guncangan tersebut tidak hanya digulirkan oleh kekuatan raksasa dunia yang diwakili oleh rezim kesehatan dunia dan perdagangan bebas, namun juga membawa

pengaruh terhadap berbagai organisasi dan barisan anti penggunaan tembakau di dalam negeri. Sekaligus untuk menekan pemerintah dan parlemen supaya dapat mengatur perdagangan dan konsumsi tembakau (Radjab, 2013).

Petani tembakau mengalami tekanan oleh pelaku industri tembakau sehingga petani tembakau mempunyai siasat untuk memperjuangkan hak ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu cara memperkuat solidaritas dengan membuat perkumpulan bernama Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI).

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI)

APTI awalnya bernama Persatuan Petani Tembakau Sindoro Sumbing (PPTSS). Kepala desa di masing-masing sentra tembakau membentuk asosiasi tembakau. Seluruh asosiasi yang kini ada semuanya berawal dari Temanggung. Kepala desa sekaligus ketua APTI cabang Legoksari, Subakir salah satu petani tembakau di Dusun Lamuk menjelaskan, bahwa latar belakang dibentuknya APTI karena ada wacana PP 81 membatasi kadar tar dan nikotin. Adanya wacana pembatasan kadar tar dan nikotin, APTI melakukan upaya advokasi untuk merubah PP 81 menjadi PP 19 yang menghasilkan tulisan peringatan dan dalam kemasan terdapat tulisan kandungan tar dan nikotin. Sebagaimana diungkap Subakir bahwa salah satu tujuan membentuk APTI adalah sebagai upaya advokasi terkait regulasi.

Upaya yang dilakukan APTI dalam advokasi regulasi meliputi masalah fatwa MUI yang menyatakan bahwa merokok adalah haram. Akibat yang ditimbulkan apabila rokok diharamkan maka akan menghilangkan pertanian tembakau.

Jejaring sosial APTI mencakup pemerintah, komunitas petani tembakau, kelompok tani sampai ke industri rokok. APTI telah membangun jaringan dengan Pemerintah Daerah (Temanggung) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahkan telah berjejaring dengan Kementerian Pertanian. Terkait dengan hak paten, tembakau

Temanggung yang terkenal dengan tembakau 'srinthil' telah didaftarkan ke hak kekayaan intelektual (HAKI). Dalam hal hak paten, APTI juga berperan dalam mewujudkan hak paten 'srinthil'. Hal itu dilakukan untuk menjaga kualitas tembakau dan telah diregulasikan dalam bentuk peraturan desa.

APTI berperan penting terhadap pemasaran tembakau Desa Legoksari, Temanggung. Sebelum masa tanam, APTI sudah mengetahui berapa banyak tembakau yang dibutuhkan dari pabrik, sehingga petani harus menanam dengan jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan pabrik. APTI juga mengurus terkait bantuan pupuk melalui kelompok tani. APTI dengan pemerintah daerah dan anggota dewan setiap tahun bila akan melakukan tanam tembakau atau akan panen tembakau mengundang pabrikan atau mendatangi pabrikan untuk menjaga hubungan baik dengan pabrik. APTI menjaga mutu tembakau dan keinginan pabrik. Riwayat historis yang menghubungkan antara Temanggung sebagai pertanian tembakau dan Kudus sebagai pabrik rokok dapat menjembatani antara petani dengan pabrikan.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Dalam kehidupan bermasyarakat kaitan dengan pemenuhan kebutuhan, terdapat relasi antar individu satu dengan yang lain. Relasi yang kemudian menjadi sebuah modal bagi masyarakat untuk menjalin kerjasama mencapai suatu tujuan bersama. Konteks masyarakat Desa Legoksari, terdapat suatu jejaring sosial salah satunya adalah gabungan kelompok petani (Gapoktan). Kegiatan yang dilakukan Gapoktan membangun jalan utama tani (JUT) menuju ladang untuk mempermudah akses petani ke ladang.

Jaringan sosial merupakan suatu jaringan tipe khusus, dimana ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik lain dalam jaringan adalah hubungan sosial (Agusyanto, 2007: 13). Dalam jaringan sosial Gapoktan, petani tembakau saling bertukar pikiran, pendapat, informasi satu sama lain terkait aktivitas pertanian tembakau

yang menjadi sentral ekonomi masyarakat desa. Gapoktan menjadi pengikat antara petani satu dengan petani lain dalam relasi sosial yang saling menguntungkan. Jika terdapat kesulitan yang dihadapi, maka petani dapat *sharing* hal yang menjadi kesulitannya pada petani lain dalam forum tersebut. Contoh kegiatan yang dilakukan oleh Gapoktan membangun JUT menuju ladang, supaya jalan yang dilewati menjadi lebih baik. Gapoktan selain menjadi ajang relasi antarpetani, juga digunakan oleh pemerintah desa setempat untuk menyosialisasikan informasi mengenai teknis bertani yang baik kepada para petani, informasi tersebut dapat membantu meningkatkan kapabilitas petani tembakau dalam menaikkan produksi. Kegiatan selapanan yang diadakan di balai RW setempat bermanfaat, karena kegiatan tersebut mengingatkan kepada petani tentang hal yang semestinya dilakukan oleh petani.

Jaringan sosial memberi dasar bagi kohesi sosial karena mendorong orang bekerjasama satu sama lain dan tidak sekedar hanya dengan orang yang mereka kenal secara langsung untuk memperoleh manfaat timbal balik (Field, 2011: 8). Melalui Gapoktan, pemerintah desa dengan petani dapat menjalin relasi kerjasama terkait pemberian bantuan teknis bagi petani dan kerjasama dalam bidang lain.

Pemerintah desa memberikan bantuan teknis pada petani dari Dinas Pertanian secara bergiliran dengan tujuan agar semua petani mendapatkan jatah bantuan secara merata. Jenis bantuan yang diberikan adalah bantuan pupuk dan bantuan alat pertanian. Kohesi sosial antarpetani tembakau terlihat dalam suasana bertetangga yang hidup rukun antaranggota masyarakat atau kelompok yang tinggal di dalamnya. Mereka berperan secara aktif kompak dalam berbagai kegiatan kultural kemasyarakatan seperti selamatan, *merti desa*, *selapanan* dan kegiatan kultural lain. Mereka juga kompak dalam berkoordinasi dan bekerjasama dalam perayaan kesenian desa seperti jathilan. Melalui berbagai kegiatan inilah ikatan kolektivitas masyarakat Desa Legoksari menjadi solid.

Bourdieu (1997) menyatakan konsep modal sosial tercermin dalam *social networking*. Jejaring sosial menjadi salah satu aspek penting dalam mengarungi kehidupan. Dalam konteks petani tembakau di Dusun Lamuk Temanggung, para petani membentuk Gapoktan. *Social networking* ini membantu para petani saling mengenal satu sama lain. Gapoktan sendiri membantu para petani mengetahui perbandingan harga tembakau satu dengan lain yang berbeda tiap *gradenya* serta mengetahui perkembangan harga setiap *gradenya*. Gapoktan juga menjadi ruang bagi para petani dalam mengembangkan pertanian yaitu dengan koperasi simpan pinjam.

Ditataran pekerja, *social network* terjalin di antara mereka. Umumnya mereka saling mengenal ketika bekerja di lahan garapan mereka. Percakapan biasanya dimulai dari pinjam meminjam rokok dan korek api, berlanjut membicarakan tempat tinggal (pemilik lahan) serta identitas yang lebih spesifik.

Norma Kepercayaan (*Norm of Trust*) Masyarakat Desa Legoksari

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Lamuk mayoritas beragama Islam. Kepercayaan tersebut adalah *hidup betul* dari Yogyakarta dan Pangestu dari Solo. Kepercayaan *hidup betul* merupakan kepercayaan Islam campuran yang berasal dari Yogyakarta, dalam kepercayaan tersebut penganutnya tidak melakukan shalat, sembahyang tetap diikuti termasuk kegiatan Islam yang lain seperti tahlilan. Kepercayaan ini dibawa oleh masyarakat luar itu sendiri, dimana akhirnya tercampur pada masyarakat di Dusun Lamuk legok. Kepercayaan *hidup betul* juga masih lekat dimana agama Islam tidak dapat dijauhkan dengan budaya-budaya *kejawan*, hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan ritual yang bersama dengan hal-hal keagamaan seperti memanjatkan doa kepada Tuhan. Kepercayaan masyarakat di Dusun Lamuk Legok dengan adanya kepercayaan *hidup betul* dan ritual keagamaan dapat menambah keyakinan kepada Tuhan. Ritual yang dilakukan tidak serta

merta hanya ritual sesaji saja tetapi semuanya ada maknanya dan tertuju pada Tuhan. Untuk menjalankan ritual tersebut tidak ada perbedaan antara kepercayaan satu dengan yang lain, masyarakat Dusun Lamuk Legok tetap melakukan ritual bersama-sama. Hal tersebut dilakukan lantaran ritual tersebut merupakan ritual kegiatan adat istiadat yang wajib dilaksanakan.

Ritual yang dilakukan untuk aktivitas menanam tembakau dianggap oleh petani tembakau di Dusun Lamuk tidak menyimpang dengan agama, karena dalam kegiatan ritual tersebut selalu ada unsur keagamaan seperti tahlilan. Budaya dan ritual yang dilakukan oleh petani tembakau dilakukan dari waktu ke waktu sesuai dengan masa bertanam. Masyarakat desa beranggapan bahwa ritual ini merupakan adat-istiadat yang sudah menjadi bagian pada diri mereka sehingga tidak mungkin ditinggalkan. Misalkan saja dalam kegiatan ritual setiap rumah menyediakan satu tumpeng dan dibawa ke balai desa untuk didoakan demi keselamatan desa dan keselamatan masyarakat desa, biasanya dilakukan setiap bulan. Ritual tanam tembakau masyarakat Dusun Lamuk adalah *selamatan* mengolah tanah, tembakau, awal panen dan tasyakuran. Ritual tasyakuran merupakan ritual sebagai rasa syukur karena sudah diberikan rejeki melimpah. Masyarakat tidak akan pernah lepas dari ritual tersebut, bila warga tidak melaksanakan merasa kurang tenang selama proses menanam. Hal ini merupakan budaya yang telah melekat pada diri setiap warga masyarakat.

Individu yang tidak mampu melaksanakan ritual akan dilakukan secara kolektif bersama dengan warga lain. Selain kegiatan ritual, kegiatan keagamaan juga banyak dilakukan di Dusun Lamuk, misalnya pengajian yang diikuti baik oleh kaum muda, ibu-ibu maupun bapak-bapak. Kegiatan pengajian dikelompokkan per RT dan dilakukan dari rumah ke rumah secara bergantian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Acara ritual dan keagamaan menjadi salah satu modal sosial untuk membentuk kesolidaritasan dan ikatan kuat pada masyarakat. Mereka berpar-

tisipasi disetiap acara dan secara bersama-sama melaksanakan, sehingga kesolidaritasan dan ikatan ini terbentuk secara alami pada proses kegiatan adat budaya dan keagamaan.

Tahapan untuk mengolah dan menanam tembakau cukup banyak dan dalam setiap tahapan terdapat ritual atau upacara adat sebagai wujud rasa syukur petani kepada sang pencipta. Ritual yang dilakukan yaitu bersih desa dengan *nyadran kali*. Masyarakat Dusun Lamuk menganggap *kali* (Indonesia: sungai) merupakan sumber mata air. Aktivitas yang dilakukan masyarakat yaitu mengumpulkan beras satu gelas untuk dijadikan satu, hal ini dimaksudkan supaya pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih mudah. Beras yang dikumpulkan kemudian dimasak dan dibuat tumpeng, kemudian ditambah dengan ayam berjumlah sebelas. Ayam yang berjumlah sebelas ini memiliki makna “*sewelas*” yaitu minta *kewelasan* atau kasih sayang dari yang maha kuasa (*Sangyang Agung*).

Kegiatan petani tembakau di Dusun Lamuk tidak dapat dipisahkan dengan upacara ritual baik untuk leluhur maupun untuk sang pencipta. Kepercayaan ini sudah dilakukan secara turun-temurun dan warga di Dusun Lamuk dalam menyelenggarakan ritual murni swadaya dari masyarakat. Swadaya dari masyarakat ini tidak bisa berjalan apabila tidak ada rasa kegotongroyongan yang kuat dari setiap warga. Struktur masyarakat di Dusun Lamuk seperti PKK, karang taruna, perangkat desa dan Gapoktan terlibat dalam ritual, tidak ada pembeda kelas serta struktur masyarakat.

Nilai kegotongroyongan lain, ketika ada warga Dusun Lamuk yang meninggal, warga secara sukarela memberi sumbangan, baik bapak, ibu, maupun anak meski masih satu keluarga, menariknya setiap anggota keluarga memberi sumbangan sendiri-sendiri. Kepercayaan itu dibangun masyarakat Dusun Lamuk karena sikap gotong-royong dapat meringankan beban penderitaan dan akan mendapat balasan lebih banyak dari Tuhan Yang Maha Esa, terutama diberi keberhasilan saat panen tembakau. Kepercayaan

seringkali dibanding dengan pelumas, yang melumasi roda dari berbagai transaksi sosial dan ekonomi terbukti sangat mahal, birokratis dan banyak makan waktu, dengan sendirinya jaringan kepercayaan tinggi akan berfungsi lebih baik dan lebih mudah daripada dalam jaringan dengan kepercayaan rendah. Siapapun yang mengalami pengkhianatan dari mitra dekat akan tahu betapa sulit bagi dua orang untuk bekerja sama ketika perilaku mereka tidak dilandasi kepercayaan.

Kepercayaan sebagai modal sosial usaha tani tembakau di Dusun Lamuk sudah ada secara turun menurun. Kemunculan modal sosial dimulai dengan kerjasama antarpetani dalam hal budi daya dan penanganan pasca panen tembakau. Penyebab kemunculan modal sosial dalam usaha tani tembakau adalah kondisi ekonomi dan sosial. Bentuk modal sosial petani dalam keberlanjutan usaha tani tembakau adalah *trust* (kepercayaan), *network* (jaringan), resiprositas dan norma. Peran modal sosial dalam keberlanjutan usaha tani tembakau di Dusun Lamuk utamanya memfasilitasi kelancaran budidaya tembakau dari masa tanam sampai panen.

Hubungan Timbal Balik (*Reciprocity*)

Tembakau merupakan salah satu komoditi pertanian andalan Dusun Lamuk Legok, Desa Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung. Tembakau mulai menjadi tanaman berharga bagi masyarakat Dusun Lamuk Legok sejak tahun 1912. Pada masa kemerdekaan tanaman tembakau yang berasal dari Kabupaten Temanggung merupakan salah satu tembakau terbaik pada masa itu. Petani tembakau merupakan generasi ketiga yang ada di Dusun Lamuk Legok. Sejak jaman dulu Dusun Lamuk Legok merupakan salah satu dusun yang menjadi tempat tujuan para pencari kerja. Pekerja tersebut berasal dari daerah yang berada di Jawa Tengah. Kurun waktu lima tahun terakhir tenaga kerja yang bekerja di Dusun Lamuk berasal dari Magelang. Ada juga beberapa pekerja yang berasal dari Wonosari, Pekalongan, Langgeng (Temanggung) dan Banjarnegara. Seiring berjalannya waktu

tenaga kerja tersebut banyak yang merantau keluar Dusun Lamuk. Kendati demikian silaturahmi petani tembakau dengan mantan pekerja tetap terjalin cukup erat, hal ini dapat dilihat dari seringnya mantan pekerja mengunjungi petani tembakau untuk sekedar silaturahmi terutama pada saat Lebaran Idul Fitri.

Hubungan petani tembakau dengan para pekerja cukup harmonis. Hal ini dapat dilihat dari antusiasnya para pekerja menerima pekerjaan yang diberikan petani tembakau di Dusun Lamuk. Petani tembakau memiliki hubungan yang erat dengan para pekerja seperti layaknya hubungan dalam sebuah keluarga. Modal sosial ini dapat dikatakan sebagai sebuah hubungan *reciprocity* artinya ada hubungan timbal balik antara petani tembakau dan para pekerja yang ada di Dusun Lamuk Legok.

Keuntungan Bersama (*Mutual Benefit*)

Ancaman petani tembakau datang dari pihak luar yaitu mengenai fatwa haram merokok yang dikeluarkan oleh MUI. Fatwa haram yang dikeluarkan oleh MUI tidak memberi pengaruh terhadap masyarakat Dusun Lamuk yang mayoritas mengkonsumsi rokok. Masyarakat mempercayai bahwa tembakau yang ada di Dusun Lamuk dibawa oleh wali Allah sebagai sarana syiar dalam berdakwah. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat merasa tenang ketika ada pemberitaan bahwa merokok adalah haram hukumnya, dan yang membuat fatwa bahwa merokok itu haram adalah organisasi masyarakat bukan larangan Allah yang ada di Al Quran. Masyarakat Dusun Lamuk tidak begitu khawatir dengan pemberitaan tersebut.

Berbagai fasilitas umum yang ada di Dusun Lamuk seperti mushola, sekolah dasar, balai desa dan jalan raya dibangun menggunakan dana dari uang tembakau hasil iuran atau yang biasa disebut dengan jimpitan *sewu selawe* (seribu dualima). *Jimpitan sewu selawe* artinya ketika petani panen maka setiap keuntungan seribu disumbangkan dua puluh lima rupiah ke kas desa. Masyarakat meyakini jika tembakau adalah

tanaman haram maka hasilnya tidak mungkin dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti tempat ibadah, bangunan sekolah dan jalan.

Hubungan yang bersifat *mutual benefit* antara petani tembakau dan para pekerja dapat dilihat dari cara mereka membagi hasil panen yang diperoleh. Petani tembakau di Dusun Lamuk dalam membagi hasil panen, keuntungan satu keranjang tembakau yang dijual merupakan keuntungan bersih yang didapat oleh petani. Keuntungan penjualan satu keranjang tembakau untuk membayar tenaga kerja, membeli pupuk kandang, dan membeli bibit.

Penjelasan dan kutipan wawancara tersebut menggambarkan secara jelas modal sosial yang tergambar dalam bentuk hubungan yang saling menguntungkan (*mutual benefit*) antara petani tembakau dan para pekerja terjalin erat di Dusun Lamuk Legok. Modal sosial lain tergambar dari hubungan saling menguntungkan (*mutual benefit*) dapat dilihat dari hubungan antarsesama petani tembakau di Dusun Lamuk.

Modal sosial petani tembakau di Dusun Lamuk cukup kuat. Hal ini tercermin dari adanya kepercayaan diantara mereka untuk saling meminjamkan tenaga kerja yang dimiliki. Hal ini menjelaskan bahwa hubungan yang bersifat saling menguntungkan antarsesama petani tembakau di Dusun Lamuk jelas ada. Ikatan solidaritas mereka membungkus modal sosial yang mereka miliki. Kegiatan petani tembakau yang berlangsung di Dusun Lamuk, Desa legoksari, Kecamatan Tlogomulyo tidak hanya bertani di lahan pertanian masing-masing. Dalam upaya mengembangkan usaha pertanian, petani di Desa Legoksari membentuk Gapoktan. Ada lima kelompok tani, dua diantaranya terdapat di Dusun Lamuk Gunung yakni kelompok Jati mulya dan Taruna Tani. Dua lainnya terdapat di Dusun Lamuk Legok yakni kelompok Abadi dan Srinthil Lestari. Satu kelompok tani lain terdapat di Desa Losari yakni merupakan kelompok tani khusus perempuan. Ada Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) yang mengawal Rancangan

Perundang-Undangan (RUU) tembakau. Hal ini dilakukan agar usaha pertanian tembakau tidak dimusnahkan begitu saja oleh para kepentingan kelompok tertentu.

APTI juga berperan dalam peningkatan kesejahteraan anak petani tembakau dalam bidang pendidikan. APTI dan *Djarum Foundation* bekerjasama untuk menyediakan beasiswa bagi anak petani tembakau di seluruh Indonesia. Program ini dicoba selama 10 tahun. Sekitar Rp 39.000.000 per tiga tahun meliputi biaya seragam sekolah, uang SPP, uang les dan *study tour*.

Tabel 1. Analisis Modal Sosial Petani Tembakau Di Desa Legoksari

Modal Sosial	Analisis
<i>Social Networking</i>	APTI, GAPOKTAN berjejaring dengan pemerintah daerah, provinsi, hingga kementerian
<i>Norm of Trust</i>	Kepercayaan Hidup Betul: ritual <i>selamatan ngolah tanah, ngolah tembakau</i> , tasyakuran
<i>Reciprority</i>	Relasi sistem kerja
<i>Mutual Benefit</i>	<i>Jimptan Sewu-Selawe</i> , saling pinjam tenaga kerja, pembagian hasil panen, mengawal RUU, beasiswa <i>Djarum Fondation</i>

Sumber: Wawancara

Modal sosial menurut Pierre Bourdieu (1990) adalah sebuah modal yang didalamnya terdapat sebuah jaringan sosial yang bisa digunakan untuk memobilisasi modal lain seperti modal ekonomi, budaya dan modal simbolik. Akibat adanya berbagai ancaman tersebut justru dapat meningkatkan ikatan solidaritas yaitu *solidaritas mekanik* sebagai petani tembakau dan merupakan salah satu bentuk modal sosial untuk melawan oknum yang bertentang dengan mereka. Ancaman tersebut akan berdampak pada pendapatan mereka dari segi penjualan tembakau (modal ekonomi).

Penelitian ini memfokuskan kepada ikatan solidaritas petani tembakau sebagai bentuk modal sosial di dalam melawan para oknum yang bertentang. Solidnya ikatan solidaritas petani

tembakau di Dusun Lamuk dapat dilihat ketika mereka bersama-sama ke Jakarta pada tanggal 4 Desember 2016 untuk menyampaikan aspirasi mereka mengenai ancaman yang mereka hadapi tentang permasalahan pembatasan atas pengendalian tembakau oleh pemerintah.

Ikatan solidaritas serta dasar kesamaan kultur senasib dan sepenanggungan (*solidaritas mekanik*) tergambar begitu kokoh dan solid sebagai modal sosial petani tembakau (petani tembakau Dusun Lamuk). Sesuai pendapat Pierre Bourdieu, bahwa modal sosial merupakan titik awal bagi seorang aktor untuk mendapatkan modal lain. Konteks dalam kasus ini modal sosial digunakan sebagai bentuk alat perjuangan petani tembakau di Dusun Lamuk guna mempertahankan kehidupan dan mata pencaharian mereka sebagai petani tembakau dari berbagai ancaman. Ancaman seperti ini lambat laun akan berdampak kepada penghasilan petani tembakau (modal ekonomi) dan menurunnya kualitas produksi tembakau di Dusun Lamuk (modal simbolik).

Ancaman yang dialami oleh petani tembakau di Dusun Lamuk Legok ini dapat memunculkan sebuah perlawanan dari petani tembakau yang ada di seluruh Indonesia tidak terkecuali di Dusun Lamuk. Ancaman ini sangat berdampak pada modal yang dimiliki petani tembakau di Dusun Lamuk seperti berkurangnya pendapatan mereka dari hasil penjualan tembakau (modal ekonomi) dan sebagai pemicu semakin menurunnya kualitas tembakau di Dusun Lamuk akibat kalah saing dari tembakau impor (modal simbolis). Modal simbolis bagi masyarakat petani tembakau di Dusun Lamuk adalah kualitas tembakau 'srintil' yang merupakan satu-satunya varian tembakau terbaik dan termahal di Indonesia dan di dunia. Jika hal diatas telah terjadi maka dengan sendirinya modal sosial petani tembakau di Dusun Lamuk terbentuk menjadi sebuah ikatan solidaritas yang kuat dan solid untuk melawan berbagai ancaman yang mereka hadapi dari oknum yang tidak sepaham dengan mereka.

D. Penutup

Kesimpulan: Temuan penelitian menunjukkan bahwa terbentuknya APTI dan Gapoktan sebagai *social networking*; modal sosial petani tembakau berupa ritual *selamatan* mengolah tanah, tembakau dan tasyakuran sebagai *norm of trust*; relasi sistem kerja sebagai *reciprocity*; dan *jimpitan sewu-selawe*, saling pinjam tenaga kerja, pembagian hasil panen, kesetiakawanan sosial, adanya CSR beasiswa *Djarum Foundation* sebagai *mutual benefit* untuk keluarga petani tembakau guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Legoksari.

Ujung tombak kelangsungan hidup petani tembakau adalah industri rokok. Industri rokok sering mendapat kecaman baik dari organisasi kesehatan maupun kelompok agama. Petani tembakau menempati posisi pokok (sentral) dalam keberlangsungan industri rokok, namun kesejahteraannya sangat tergantung pada harga tembakau dan kondisi iklim. Temanggung terkenal dengan sentra tembakau memiliki modal sosial yang kuat di kalangan petani tembakau. *Social Networking, Norm of Trust, Reciprocity dan Mutual Benefit* yang dimiliki petani tembakau di Desa Legoksari menjadi kekuatan utama dalam keberlangsungan pertanian tembakau.

Norm of Trust dapat mendorong hubungan kerjasama dan memudahkan petani tembakau dalam melakukan kegiatan pertanian. Peran *social networking*, jaringan kekerabatan memberi kemudahan dalam mendapatkan informasi dan memperluas hubungan kerjasama. Peran *reciprocity* menjaga hubungan kerjasama dengan tidak merugikan kedua belah pihak dan saling tukar kebaikan diantara petani tembakau, dan peran *mutual benefit* merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, tidak merugikan satu atau kedua belah pihak. Kekuatan modal sosial dapat menyelesaikan masalah pada petani tembakau sehingga menjaga eksistensi industri tembakau di Indonesia.

Rekomendasi: Kementerian Sosial RI agar memberdayakan warga masyarakat, seperti petani tembakau dengan memanfaatkan modal

sosial untuk kesejahteraan petani, sesuai dengan kearifan lokal atau tradisi setempat karena modal sosial merupakan aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian dan Pemerintahan Desa diharapkan dapat memberdayakan petani tembakau dengan memanfaatkan sumber dana serta sumber daya alam yang ada. Para petani tembakau diharapkan dapat bekerja secara optimal dan menjalin kerjasama dengan semua pihak berkaitan dengan petani tembakau.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih peneliti ucapkan kepada kepala Desa Legoksari yang telah memberi informasi untuk kelancaran kegiatan penelitian tentang modal sosial, penduduk utamanya petani di Dusun Lamuk dan semua informan yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Pustaka Acuan

- Adi, Isbandi Rukminto. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial : Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*. Jakarta: UI- Press.
- Agusyanto, Ruddy. (2007). *Jaringan Sosial dalam Organisasi*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Arianto, Kurniawan dan Fitriana, Nur Eliza. *Modal Sosial dalam Kemandirian Masyarakat di Bidang Kesehatan*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol 17, No 2 tahun 2013
- Bourdieu, Pierre. (1990). *In Other Words: Essay Toward a Reflexive Sociology*, Cambrige UK: Polity Press.
- Bourdieu, Pierre. (1997). *Outline of a Theory Practise*, London, Cambrige University Press.
- Burt. R.S. (1992). *Excerpt from The Sosial Structure of Competition, in Structure Holes: The Sosial Structure of Competition*. Cambridge, MA and London: Harvard University. In Elinor Ostrom and T.K. Ahn. 2003. *Foundation of Sosial Capital*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
- Chalid, Pheni. (2012). *Peranan Modal Sosial dalam Kegiatan Ekonomi*, Jurnal Signifikan Vol 1, No. 1, April 2012
- Coleman, J. (1999). *Social Capital in the Creation of Human Capital*, Cambridge Mass: Harvard University Press
- Cohen, S., dan Prusak L. (2001). *In Good Company: How Sosial Capital Makes Organization Work*. London: Harvard Business Pres
- Cox, Eva. (1995). *A Truly Civil Society*. Sydney: ABC Book.

- Elfarsina. 2014. *Adaptasi Kedelai Terhadap Naungan: Studi Morfologi dan Anatomi*. Thesis Magister Program Pascasarjana IPB, Bogor.
- Field, John. (2011). *Modal Sosial*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- Halim, Abdul. *Politik Lokal: Pola, Aktor dan Dramatikanya*, Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa (LP2B) Yogyakarta.
- Hasbullah, J., (2006). *Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR-United Press
- Partha D., dan Ismail S. (1999). *Social Capital A Multifaceted Perspective*. Washington DC: The World Bank
- Putnam, R.D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and a Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.
- Radjab, Suryadi. (2013). *Dampak Pengendalian Tembakau: Terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti)*
- Sjaf, Sofyan, (2014). *Politik Etnik: Dinamika Politik Lokal Kendari*, Buku Obor, Jakarta
- Solow, R. M. (1999). *Notes Social Capital and Economic Performance*. In Partha D., dan Ismail S., 1999. *Social Capital A Multifaceted Perspective*. Washington DC: The World Bank
- Suharto, Edi, Ph.D. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditma
- Yin, Robert K. (2012), *Studi Kasus, Desain dan Metode*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- “Daftar Kota Penghasil Utama Tembakau Terbesar” <http://amti.id/daftar-kota-penghasil-utama-tembakau-terbesar/> (diakses pada 13 Januari 2017)
- “Lahan Pertanian Tembakau di Indonesia Terus Berkurang” <http://jogjakartanews.com/baca/2016/08/12/3778/lahan-pertanian-tembakau-di-indonesia-terus-berkurang> (diakses pada 13 Januari 2017)
- “Pertanian Tembakau” <http://www.kompak.co/pertanian-tembakau/> (diakses pada 13 Januari 2017)
- “Tembakau Temanggung, Andalan Daerah tetapi Sebagian Tanam di Hutan Lindung” <http://www.mongabay.co.id/2016/06/03/tembakau-temanggung-andalan-daerah-tetapi-sebagian-tanam-di-hutan-lindung> (diakses pada tanggal 13 Januari 2017)

Ketahanan Sosial dan Perubahan Ekologi Hutan: Studi pada Masyarakat Sekitar Hutan di Kabupaten Simalungun

Social Resilience and Forest Ecology Change: A study on around forest society in Simalungun District

Robert Siburian

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. 9 Jl. Jenderal Gatot Subroto 10 Jakarta
Email: robertsdes1970@gmail.com

Diterima 18 April 2017, diperbaiki 11 Juli 2017, disetujui 5 November 2017

Abstract

People who live around and depend on forest resources are susceptible to change of forest ecology, especially on the impact of forest degradation. Forest provides environment service and irreplaceable economic resources. This is why forest ecology change brings much impact to forest function capacity which implies to the decreasing of its function capacity in providing environment service and economic resources. The life of around forest society can continue if their social resilience is able to cope with the change. This research is aimed to study forest area condition in Simalungun District and that of its society's dependency level on forest resources. It used a qualitative approach and the technique of collecting data was conducted by using indepth interview, focus group discussion (FGD) and observation. The result of the research shows that the society involvement in managing forest resources has not been significant though the government has opened the scheme of doing so as an effort to improve the forest society welfare and to enhance their social resilience.

Keywords: *forest ecology; social resilience; around forest society*

Abstrak

Masyarakat yang bergantung pada sumberdaya hutan sangat rentan terhadap perubahan ekologi hutan, terutama akibat terjadinya degradasi kawasan hutan. Hutan menyediakan jasa lingkungan dan sumberdaya ekonomi yang tidak tergantikan. Oleh sebab itu, perubahan ekologi hutan sangat berdampak terhadap daya dukung hutan itu sendiri yang berimplikasi kepada menurunnya kemampuan hutan untuk menyediakan jasa lingkungan dan sumberdaya ekonomi. Kehidupan masyarakat sekitar hutan dapat terus berlanjut apabila ketahanan sosial yang mereka miliki dapat mengikuti terjadinya perubahan ekologi hutan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji kondisi kawasan hutan di Kabupaten Simalungun dan tingkat ketergantungan masyarakat di sekitar hutan terhadap sumberdaya hutan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*), *focus group discussion* (FGD), dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa keterlibatan masyarakat untuk mengelola sumberdaya hutan belum signifikan meskipun pemerintah sudah membuka skim sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan agar ketahanan sosial mereka turut meningkat.

Kata kunci: *ekologi hutan; ketahanan sosial; masyarakat sekitar hutan*

A. Pendahuluan

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana ketahanan sosial masyarakat yang bergantung pada sumberdaya hutan mengalami perubahan di Kabupaten Simalungun. Menurut Adger dan Kelly (2001), ketahanan sosial akan tinggi apabila individu ataupun kelompok masyarakat mampu beradaptasi pada kondisi

sosial dan ekologi yang berubah. Sebaliknya, apabila kerentanan sosial justru lebih tinggi daripada ketahanan sosial, itu berarti kelompok masyarakat yang dimaksud memiliki pilihan-pilihan untuk beradaptasi sangat terbatas. Kata 'ketahanan' merujuk tulisan Braatz (2012), digunakan untuk terminasi kemampuan untuk mengatasi tekanan, kemampuan untuk pulih

dari dampak gangguan, dan kemampuan beradaptasi terhadap tekanan dan perubahan yang terjadi. Dalam tulisan ini, hal yang mengalami perubahan ke arah kerusakan itu adalah ekosistem hutan.

Kelompok masyarakat dengan ketahanan sosial rendah ataupun kerentanan sosial tinggi bukan berarti individu, kelompok masyarakat, ataupun institusi yang ada pada mereka tidak aktif dalam proses perubahan lingkungan. Akan tetapi, capaian itu sangat ditentukan oleh tempat dari proses sosial yang kompleks dan faktor-faktor ekonomi, mulai dari akses terhadap sumberdaya alam melalui keamanan sosial, baik formal maupun informal, jaminan sosial, dan juga modal sosial. Ketahanan sosial sangat tergantung pada hak dan akses pada sumberdaya (Adger dan Kelly 2001).

Masyarakat sekitar hutan yang bergantung pada sumberdaya hutan akan terpengaruh dengan terjadinya perubahan ekologi hutan, baik melalui kebakaran hutan, *illegal logging*, konversi hutan, baik untuk perkebunan maupun lahan pertanian, dan pengelolaan hutan untuk kepentingan industri seperti izin usaha pengambilan hasil hutan tanaman industri (HTI). Dalam konteks yang lebih luas, Samuelson *et. al* (2015) menyatakan, bahwa degradasi dan hilangnya tutupan hutan merupakan ancaman utama global, didorong terutama oleh tekanan manusia yang disebabkan perluasan kegiatan pertanian. Jika masyarakat sekitar hutan mampu beradaptasi terhadap tekanan yang mereka alami lewat perubahan ekologi hutan, berarti masyarakat sekitar hutan mempunyai ketahanan sosial dengan respon positif. Sebaliknya, jika masyarakat sekitar hutan tidak mampu merespon, maka mereka menjadi rentan terhadap perubahan ekologi hutan itu (Adger, Kelly, dan Ninh 2001). Perubahan ekologi hutan dengan kata lain, berpengaruh pada ketahanan ekologi dan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan, terutama masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumberdaya hutan. Dalam hal itu, kapasitas individu untuk dapat menyesuaikan diri dan tetap bertahan

menghadapi tekanan dari perubahan ekologi hutan menjadi penting (Ungar, 2012).

Hutan adalah sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik yang bermukim di sekitar hutan maupun di belahan bumi lain. Hal ini disebabkan karena sumberdaya hutan terutama kayu sudah menjadi bagian dari komoditi global, dengan ciri pertukaran komoditas kayu antara produsen dan konsumen berada di negara berbeda (McMichael 2004). Dengan adanya kebutuhan kayu, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun mancanegara, hutan rentan terhadap kerusakan apabila pemanfaatan sumberdaya alam itu tidak dilakukan secara berkelanjutan yang mengakibatkan ekologi hutan berubah. Akibatnya, kondisi hutan di suatu negara, sangat terpengaruh dengan adanya globalisasi, sebab globalisasi mengakibatkan terjadinya intensifikasi hubungan sosial seluruh dunia yang jaraknya sedemikian jauh, sehingga sesuatu yang terjadi di tingkat lokal dibentuk atau dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di suatu tempat dengan jarak bermil-mil (Giddens 1990). Artinya, globalisasi mendorong terjadinya pengembangan dari koneksi sosial yang melampaui ruang dan waktu. Kehadiran perusahaan-perusahaan besar di sektor kehutanan merupakan salah satu bukti koneksi sosial yang melampaui ruang dan waktu itu.

Kayu sebagai salah satu komunitas global mengakibatkan proses produksi di tingkat lokal sangat dipengaruhi permintaan pasar global. Terkoneksinya masyarakat di sekitar hutan dengan masyarakat global, berarti kerusakan hutan dalam satu kawasan dapat terjadi akibat pengaruh masyarakat global itu meskipun pelaku penebangan pohon dalam kawasan hutan dilakukan oleh masyarakat lokal. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa penebangan terhadap pepohonan dalam kawasan hutan tidak lepas dari permintaan masyarakat yang berada di bumi lain terhadap kebutuhan kayu Indonesia.

Sumberdaya hutan yang dapat dimanfaatkan secara umum dibagi dua, yaitu kayu dan bukan kayu. Sumberdaya hutan berupa berbagai

jenis kayu yang tumbuh menutupi permukaan tanah dalam kawasan hutan, misalnya meranti, ulin, mahoni, dan matoa. Jenis kayu-kayu itu kemudian dieksploitasi untuk diolah dan dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pengeksploitasian sumberdaya hutan sering tidak terkontrol sehingga menimbulkan dampak negatif pada kehidupan manusia itu sendiri. Hutan tidak sekedar sumberdaya kayu semata, sebab hutan juga mengandung sumberdaya bukan kayu yang pemanfaatannya lebih berkelanjutan, seperti tumbuh-tumbuhan penghasil obat-obatan; berbagai jenis hewan yang hidup dalam kawasan hutan; sumber penghasil makanan berupa umbi-umbian, buah-buahan, madu hutan; jasa lingkungan (udara bersih, air bersih, dan ekowisata). Akan tetapi, untuk dapat memanfaatkan sumberdaya hutan harus ada syarat, yaitu kawasan hutan dengan tutupan pepohonannya mesti terpelihara baik. Pemanfaatan sumberdaya kayu dalam kawasan hutan dengan kata lain, harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal itu disebabkan kawasan hutan yang sudah mengalami kerusakan sebagai dampak dari eksploitasi sumberdaya kayu yang berlebihan atau di luar daya dukung untuk memelihara kelestarian suatu kawasan hutan, akan mengakibatkan sumberdaya hutan bukan kayu menjadi hilang.

Robbin (1985 dikutip Mather 1990) menyebutkan, bahwa ada keterkaitan antara karakter politik dan ekonomi dari kapitalisme industri dengan kehancuran sumberdaya alam, seperti hutan. Karakter politik Indonesia terutama pada masa pemerintahan Presiden Suharto, hutan dilihat sebagai sumberdaya ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara total pada pembangunan ekonomi Indonesia. Karakter politik demikian mendorong dibukanya investasi besar-besaran untuk mengeksploitasi kayu berupa izin perusahaan hutan (HPH). Menurut Tim Studi Walhi (1992, dikutip oleh Sudiyono 2016: 63), jumlah HPH pada tahun 1968 sekitar 25 unit saja. Jumlah HPH meningkat menjadi 574 unit pada tahun 1967. Hadirnya HPH berdampak hutan Indonesia

berkurang secara signifikan. Pada tahun 1950, sesuai peta vegetasi Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Indonesia, disimpulkan hampir 84 persen atau sekitar 162 juta hektar, luas daratan Indonesia pada masa itu tertutup hutan primer. Namun 59 tahun kemudian, hasil kajian *Forest Watch Indonesia* (FWI) menunjukkan, bahwa pada tahun 2009 luas daratan Indonesia adalah 190,31 juta hektar, sementara luas tutupan hutannya melorot menjadi 88,17 juta hektar atau sekitar 46,33 persen dari luas daratan Indonesia (*Forest Watch Indonesia* 2011). Sampai tahun 2013, luas tutupan hutan alam di Indonesia tinggal 82 juta hektare atau sekitar 46 persen dari luas daratan Indonesia (*Forest Watch Indonesia* 2014). Luas tutupan hutan Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun, yang berarti juga telah terjadi perubahan ekologi hutan signifikan.

Zhang (2000) menyatakan, bahwa tuntutan pertumbuhan penduduk yang membutuhkan lahan untuk kegiatan pertanian dan kebutuhan kayu secara luas diakui sebagai penyebab paling penting dari kerusakan hutan (*deforestation*). Senada dengan Zhang, Blaikie (1985) juga menjelaskan bahwa kepadatan penduduk yang tinggi mengakibatkan perluasan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan sehingga lereng perbukitan dan lembah sekali pun tidak luput dari sasaran untuk dijadikan sebagai kawasan pertanian yang semua itu mempercepat terjadinya degradasi. Pertanyaan yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah sejauh mana perubahan ekologi hutan yang terjadi di Kabupaten Simalungun? Bagaimana perubahan ekologi hutan berdampak pada ketahanan sosial masyarakat yang bermukim di sekitar hutan di kabupaten itu?

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan subjek penelitian masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dan memanfaatkan sumberdaya hutan untuk menopang kehidupannya. Data yang diperoleh pada penelitian ini

terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada narasumber yang memahami isu penelitian. Wawancara didasarkan pada pedoman wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya. Informan yang diwawancarai, diantaranya staf di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Simalungun serta Badan Konservasi Sumberdaya Alam di Simalungun, petani, pedagang hasil hutan non-kayu, perajin dan pedagang *tuak*, staf PT. Pulp Toba Lestari. Informan diwawancarai dalam bentuk pertemuan kelompok ataupun secara perorangan. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara menelusuri data tertulis terkait isu yang diteliti. Penelusuran data tertulis dilakukan dengan cara menghubungi instansi terkait selaku instansi yang menerbitkan data yang dibutuhkan dan yang sudah diterbitkan oleh pihak lain dalam bentuk tulisan serta laporan, seperti jurnal dan surat kabar.

Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi grup terfokus atau *Focus Group Discussion* (FGD) di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun. Metode fokus grup diskusi dilakukan untuk mengumpulkan data, baik dilakukan sebagai cara menginvestigasi konsensus maupun perbedaan di antara peserta diskusi (Makura-Paradza 2010). Peserta FGD selain perwakilan dari dinas terkait, juga berasal dari petani dan kelompok peduli lingkungan. Pengamatan secara langsung terhadap kondisi kawasan hutan di Kabupaten Simalungun juga dilakukan. Data sekunder merupakan data tertulis yang diperoleh dari Dinas Kehutanan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun.

Data yang dikumpulkan baik melalui wawancara mendalam, observasi, FGD maupun studi literatur dianalisis dan dijelaskan secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian untuk mengumpulkan data lapangan dilaksanakan pada bulan April Tahun 2016.

C. Kondisi Kabupaten Simalungun sebagai Daerah Penelitian

Secara geografis, wilayah Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, terletak di antara 2°36' - 3°18' Lintang Utara dan 98°32' - 99°35' Bujur Timur. Wilayah itu berbatasan dengan Kabupaten Karo di sebelah barat, Kabupaten Asahan di bagian timur, Kabupaten Deli Serdang sebelah utara, dan Kabupaten Toba Samosir di bagian selatan. Kabupaten Simalungun terbagi menjadi 31 wilayah kecamatan dengan ibukota kabupaten berada di Kecamatan Raya. Kecamatan paling jauh dari Raya sebagai pusat pemerintahan kabupaten adalah Kecamatan Ujung Padang dengan jarak sekitar 113 kilometer. Wilayah kecamatan terdekat dengan Raya adalah Kecamatan Panei, hanya 18 kilometer.

Topografi Kabupaten Simalungun adalah berbukit-bukit dengan tingkat ketinggian dari permukaan laut yang beraneka ragam. Luas wilayah dengan ketinggian mulai dari 0-50 meter hingga lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut, dan tingkat kemiringan 0-2 persen mencapai 236.176 hektar. Wilayah dengan tingkat kemiringan lebih dari 40 persen seluas 27.845 hektar dan sisanya pada kemiringan 2-40 persen atau 75 persen berada pada kemiringan 0-15 persen.

Luas Kabupaten Simalungun mencapai 4.372,50 km², terbagi menjadi 31 kecamatan dan 413 desa (nagori) dan kelurahan. Wilayah kecamatan paling sempit adalah Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi dengan luas 38,97 km² atau sekitar 0,89 persen, dan yang terluas adalah Kecamatan Raya dengan luas 331,83 km² atau 7,59 persen dari seluruh luas kabupaten (BPS, 2015). Wilayah Kabupaten Simalungun dihuni penduduk sekitar 844.033 jiwa pada 2014, dengan rincian 420.591 jiwa laki-laki dan 423.442 jiwa perempuan. Penduduk berdasar jenis kelamin menghasilkan *sex ratio* 0,99 persen, atau setiap 100 orang perempuan terdapat 99 orang laki-laki (BPS, 2015). Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan dengan kata lain lebih banyak dibanding jenis kelamin laki-laki.

Sejarah Pembentukan Kawasan Hutan

Pemetaan kawasan hutan di Kabupaten Simalungun dimulai sejak pemerintah kolonial Belanda menjajah Indonesia. Pengesahan atau dikenal dengan register pertama terhadap kawasan hutan di kabupaten itu diawali pada tahun 1936. Pada register itu, luas kawasan hutan di Kabupaten Simalungun disahkan pemerintah kolonial Belanda mencapai ± 68.000 hektar. Pemerintah Belanda ketika menetapkan suatu kawasan menjadi kawasan hutan tidak mudah, penentuan itu sudah menggunakan indikator yang tepat baik dalam hal struktur maupun tekstur tanah.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian No: 923/Kpts/Um/12/1982, luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada tahun 1982 adalah $\pm 3.780.132,02$ hektar. Dalam SK itu, luas kawasan hutan di Kabupaten Simalungun meningkat menjadi ± 105.000 hektar. Luas kawasan hutan dibandingkan pada masa kolonial Belanda bertambah sekitar ± 37.000 hektar. Perluasan kawasan hutan yang begitu signifikan mengokupasi lahan masyarakat, bahkan jumlah daerah *enclave* berada di kawasan hutan di Kabupaten Simalungun pun berkurang. Kendati penetapan kawasan hutan Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian No: 923/Kpts/Um/12/1982, tidak saja menetapkan kawasan hutan tetapi juga menata kawasan hutan menurut fungsinya, termasuk mengakomodasi kebutuhan sektor lain dalam areal yang disebut hutan produksi yang dapat dikonversi, penetapan kawasan hutan di kabupaten itu lebih berpihak pada pemilik modal.

Perluasan kawasan hutan di Kabupaten Simalungun didasarkan pada surat keputusan Menteri Kehutanan, terus berlanjut. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005, luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara $\pm 3.742.120$ hektar. Pada tingkat provinsi, luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara berkurang sekitar ± 38.012 hektar dibandingkan luas kawasan hutan berdasarkan

SK No. 923/1982. Namun tidak demikian dengan luas kawasan hutan di Kabupaten Simalungun, karena yang terjadi justru penambahan luas kawasan, yaitu menjadi ± 138.741 hektar, atau bertambah sekitar ± 33.000 hektar dari SK No. 923/1982 itu. Luas kawasan hutan yang sudah diregistrasi menjadi ± 70.000 hektar. Akibatnya, Pematang Raya yang merupakan ibukota Kabupaten Simalungun pada bulan Juni 2008 adalah bagian dari kawasan hutan negara. Pematang Raya sebelumnya pusat Kerajaan Raya dengan pemimpin terakhir sebagai raja ke-17, yaitu Tuan Yan Kaduk Saragih Garingging berakhir pada tahun 1946. Keberadaan kerajaan itu sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Pematang Raya tidak luput dari penetapan sebagai kawasan hutan negara.

Setelah Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005 terbit, ternyata SK itu mendapat perlawanan dari masyarakat di Provinsi Sumatera Utara, termasuk dari masyarakat Simalungun sendiri. Penyebabnya adalah penetapan luas kawasan hutan di Sumatera Utara menimbulkan banyak permasalahan, terutama menyangkut lahan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Banyak lahan masyarakat yang sudah dikelola puluhan tahun dan diwariskan oleh generasi terdahulu, terokupasi menjadi kawasan hutan. Dengan gejala seperti itu, beberapa pihak mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung terkait SK.44/Menhut-II/2005. Pihak yang mengajukan uji materi itu adalah Ir. Sintong Maruap Tampubolon (Ketua Forum Peduli Bonapasogit), Torang Lumbantobing (Bupati Tapanuli Utara) dan Mangindar Simbolon (Bupati Samosir) melalui kantor penasehat hukum Dr. Lintong Siahaan. Hasil dari uji materi itu adalah Mahkamah Agung RI melalui keputusan Nomor 47/P/HUM/2011 tanggal 23 Desember 2013 akhirnya membatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 44/Menhut-II/2005, sekaligus memerintahkan Menteri Kehutanan menerbitkan SK Menhut baru tentang penunjukan kawasan hutan di Sumatera Utara sesuai ketentuan hukum yang ber-

laku dengan memperhatikan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) kabupaten/kota.

Adanya uji materi ke Mahkamah Agung dengan keputusan pembatalan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005, menandakan bahwa penentuan luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara secara umum dan Kabupaten Simalungun secara khusus, tidak dilakukan dengan hati-hati dan tidak melihat kondisi riil di lapangan. Hal ini karena setelah SK.44/Menhut-II/2005 direvisi dengan SK Menhut No. 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara berkurang 686.325 hektar menjadi 3.055.795 hektar. Kawasan hutan di Kabupaten Simalungun berdasarkan SK Menhut No. 579/Menhut-II/2014 pun berkurang ± 39.741 hektar menjadi ± 99.000 hektar. Wilayah yang dikeluarkan dari kawasan hutan berada di beberapa tempat, yaitu; 1) Di daerah Pematang Raya, yaitu Ibukota Kabupaten Simalungun berdasarkan PP 79 tahun 1992; 2). Di daerah Marjandi, Banbirong Ulu, dan Sidamanik berupa kawasan hak guna usaha (HGU) milik PT. Perkebunan Nusantara IV; 3) Di daerah Tapan Dolok terdapat konsesi HGU perusahaan penanaman modal asing (PMA) PT. Bridgeston; dan 4) Di daerah Tongkoh merupakan konsesi HGU milik PT. Perkebunan Nusantara III.

Dinamika Permukiman dalam Kawasan Hutan

Kendati kawasan hutan sudah dipilih dengan struktur dan tekstur tanah sedemikian rupa, tetap saja ada daerah-daerah tertentu dalam kawasan yang sudah dijadikan permukiman sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan, termasuk kawasan hutan di Kabupaten Simalungun. Oleh karena itu, pemerintah Belanda pada masa kolonial, menetapkan 12 titik permukiman yang ada di kawasan hutan Sibatuloting, Kabupaten Simalungun sebagai daerah (kampung) *enclave*. Kedua belas kampung *enclave* itu adalah: Huta Tonga, Pondok Bulu, Dolok Saribu, Sitahoan,

Sihaporas, Sihaporas Bayu, Tulpang, Aek Nauli, Moria, Marihat Dolok, Dolok Parmonangan, dan Talun Sungkit. Artinya, sebagai *enclave* pemerintah Belanda mengakui keberadaan permukiman masyarakat itu sehingga dikeluarkan dari kawasan hutan. Pemerintah Belanda tidak mengganggu keberadaan masyarakat di daerah *enclave* dengan segala aktivitasnya, tetapi justru dibiarkan hidup harmonis dengan kawasan hutan tempat mereka tinggal.

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan kedua belas daerah *enclave* yang diakui dan diakomodir pemerintah kolonial Belanda ketika menetapkan kawasan hutan di Kabupaten Simalungun, sebagian dianulir oleh Pemerintah Indonesia dengan tidak mengakui keberadaan daerah *enclave* itu. Akibatnya, sebagian daerah *enclave* dimaksud tetap dijadikan sebagai bagian dari kawasan hutan, padahal penduduk yang mendiami daerah itu sudah puluhan tahun dan turun-temurun. Sinaga (45 tahun) misalnya, salah satu keluarga yang bermukim di daerah *enclave* yang diakui pemerintah, merupakan generasi ketiga dari garis keturunan yang bermukim di kampung itu. Apabila keberadaan permukiman di kampung *enclave* dimulai sejak pengakuan pemerintah kolonial Belanda, maka permukiman yang ada di *enclave* Dolok Saribu sudah berusia 80 tahun sampai tahun 2016, yang dihuni sebanyak 10 kepala keluarga. Luas *enclave* yang diakui pemerintah di Dolok Saribu mencapai 100 hektar dari keturunan tiga bapak.

Kendati warga yang bermukim di daerah *enclave* sudah puluhan tahun, daerah *enclave* yang diakui pemerintah Indonesia hanya tujuh kampung dari 12 kampung *enclave* yang ada di kawasan hutan Sibatuloting yang pernah diakui Belanda. Ketujuh kampung yang diakui sebagai daerah *enclave* itu adalah Huta Tonga, Pondok Bulu, Dolok Saribu, Tulpang, Dolok Parmonangan, Mariah Dolok, Sitahoan, dan Talun Sungkit. Artinya, lima kampung lain yang berada di dalam kawasan hutan di Kabupaten Simalungun belum dikeluarkan dari kawasan hutan, atau kalaupun ada yang diakui pemerintah tetapi tidak untuk

seluruh lahan yang sudah dikuasai masyarakat yang bermukim di *enclave* itu. Misalnya *enclave* Sitahoan, luas lahan yang dikuasai masyarakat sekitar yang diakui pemerintah kolonial Belanda dulu adalah 500 hektar, tetapi oleh Pemerintah Indonesia hanya mengakui 50 hektar, sisanya merupakan kawasan hutan. Konsekuensi bahwa lahan mereka berada di kawasan hutan sehingga saat mereka menebang kayu dapat dipidanakan karena penebangan yang dilakukan itu dikategorikan sebagai tindakan pencurian kayu (*illegal logging*). Menurut Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, menyebutkan bahwa *enclave* adalah lahan yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum di dalam kawasan hutan berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena masyarakat di delapan kampung masih tetap bermukim di dalam kawasan hutan di daerah *enclave* yang dianulir pemerintah Indonesia, mengakibatkan pembangunan kawasan hutan relatif sulit dilakukan di sekitar perkampungan, termasuk untuk menentukan batas kawasan.

Dalam perkembangan penetapan kawasan hutan di Kabupaten Simalungun, terutama kawasan hutan Sibatuloting, pada masa kolonial Belanda telah ditetapkan daerah *enclave* sebanyak 12 titik. Pada masa Indonesia merdeka hingga sekarang (2016), daerah *enclave* yang sudah ditetapkan oleh Belanda tidak seluruhnya diakui oleh pemerintah Indonesia. Berdasar informasi dari Simamora, Staff Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun, daerah *enclave* yang diakui pemerintah di kawasan hutan Sibatuloting hanya empat, yaitu Huta Tonga, Pondok Bulu, Talun Sungkit, dan Dolok Saribu. Kendati sudah ditetapkan sebagai daerah *enclave*, dalam arti daerah itu dikeluarkan dari kawasan hutan, tetapi ada saja pihak-pihak yang mempersoalkan aktivitas masyarakat di daerah *enclave* itu. Salah satu contoh, pemicanaan Sahat Antony Napitupulu (37 tahun). Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara mendakwa Sahat Antony Napitupulu melakukan perambahan hutan lindung

seluas $\pm 1,5$ hektar di Dusun II Desa Sitahoan. Padahal, aktivitas perambahan dilakukan di lahannya sendiri, karena sesuai data yang dimiliki Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun, bahwa Dusun II Sitahoan, bukan termasuk kawasan hutan lindung Sibatuloting. Sitahoan merupakan kawasan *enclave* sejak tahun 1994 lalu (<http://www.medanba-gus.com>), bahkan *enclave* sudah diakui ketika Belanda menetapkan kawasan hutan Simalungun. *Enclave* Sitahoan merupakan satu dari empat daerah *enclave* bentukan Belanda yang masih diakui oleh pemerintah Indonesia.

Perubahan Ekologi Hutan dan Kehidupan Masyarakat

Hutan bukan hanya sumberdaya kayu saja, tetapi hutan adalah sebuah ekosistem yang bersifat integral. Dalam kawasan hutan terdapat empat komponen dalam satu kesatuan ekosistem, yakni: flora, fauna, lingkungan, dan manusia. Keempat komponen itu saling berinteraksi satu sama lain, dan harus berada dalam keseimbangan agar fungsi hutan secara maksimal dapat dimanfaatkan. Namun dalam realitanya, interaksi yang terbangun di antara empat komponen itu sering menimbulkan permasalahan sehingga perlu pendekatan dalam merumuskan alternatif solusinya (Rizal 2012), dengan maksud agar komponen satu tidak meniadakan komponen lain. Oleh sebab itu, nilai guna ekonomi dari suatu kawasan hutan ada dua, yaitu nilai guna langsung (*direct use values*) dan nilai guna tidak langsung (*indirect use values*) (Pearce 2001).

Berdasarkan empat komponen itu, maka kawasan hutan pun tidak berfungsi tunggal tetapi memiliki empat fungsi yang dapat dimanfaatkan sekaligus, yaitu fungsi ekologi, ekonomi, sosial, dan estetika. Fungsi ekologi hutan adalah bagian dari komponen ekosistem hutan yang saling bergantung dan berperan sebagai pengatur tata air, pengatur kesuburuan tanah, dan penentu kualitas air. Fungsi ekonomi hutan adalah hutan merupakan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Masyarakat sekitar hutan banyak menjadikan hutan sebagi

sumber mata pencaharian utama. Fungsi sosial hutan adalah terkait hubungan masyarakat sekitar hutan dengan kawasan hutan. Pada beberapa masyarakat sekitar hutan, nenek moyang mereka dipercaya berasal atau berdiam dalam kawasan hutan sehingga hutan harus dipelihara. Masyarakat Androy di Madagaskar misalnya, mereka mengonservasi kawasan hutan karena tabu untuk dirusak (Tengo dan Heland:2012). Hutan juga dianggap sebagai milik bersama. Fungsi estetika bahwa kawasan hutan memberikan keindahan terhadap suatu daerah, sehingga dengan keindahannya itu hutan dapat dijadikan sebagai kawasan ekowisata.

Salah satu penyebab perubahan ekosistem hutan adalah kerusakan hutan, yang mengakibatkan hutan tidak berfungsi maksimal. Apabila pohon sebagai komponen utama yang dapat menjaga ekosistem hutan terpelihara dengan baik, akan berdampak pada komponen-komponen lain. Hutan yang rusak berakibat fauna tidak lagi menemukan habitatnya, sehingga yang mungkin dilakukan fauna adalah bermigrasi ke kawasan hutan lain yang lebih baik. Kemungkinan kedua adalah fauna itu mati atau punah. Demikian halnya dengan lingkungan, hutan yang tidak mempunyai tutupan pepohonan berakibat kawasan itu menjadi gersang, panas, dan terjadinya banjir bandang. Manusia pun demikian. Kerusakan ekosistem hutan telah mengganggu keberlangsungan hidup manusia, terutama mereka yang bermukim di sekitar hutan.

Indikator perubahan ekosistem hutan tampak dari tingkat tutupan hutan dalam suatu kawasan. Semakin luas hutan yang direhabilitasi berarti semakin luas pula hutan yang rusak, sebab rehabilitasi merupakan mekanisme untuk menurunkan luas lahan kritis. Di Sumatera Utara kegiatan rehabilitasi telah mampu menurunkan luas lahan kritis. Pada tahun 2015, kawasan hutan tergolong kritis di provinsi itu sekitar 1.561.756,81 hektar, meliputi kritis adalah 1.397.708,50 hektar dan sangat kritis mencapai 164.048,31 hektar. Luas kawasan hutan kritis pada 2015 sudah menurun dibanding pada tahun 2014 yang mencapai

1.688.620,47 (kritis 1.397.708,50 hektar dan sangat kritis 308.911,97 hektar), atau turun sekitar 7,51 persen (Dinas Kehutanan, 2015).

Suatu kawasan hutan mengalami kritis apabila hutan tidak lagi dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai fungsi utamanya yaitu ekologi, sosial, ekonomi, dan estetika. Fungsi hutan tidak lagi dapat dimanfaatkan ketika hutan sudah mengalami kerusakan, baik akibat alih fungsi kawasan hutan, bencana alam, penebangan legal dan ilegal yang sudah di atas daya dukung kawasan hutan itu sendiri, maupun akibat hama dan penyakit yang menyerang pepohonan dalam kawasan hutan.

Hutan selain kaya akan sumberdaya kayu juga bukan kayu. Kedua sumberdaya hutan itu dikenal dengan sumberdaya bernilai ekonomi langsung dan tidak langsung, dan merupakan nilai ekonomi total (*total economic value*) dari sumberdaya hutan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Oleh karena pemanfaatan sumberdaya ekonomi tidak langsung sangat bergantung pada kearifan manusia ketika memanfaatkan sumberdaya ekonomi langsung, maka nilai ekonomi total itu dapat diperoleh apabila pemanfaatan sumberdaya ekonomi langsung, terutama kayu harus dilakukan dengan pengelolaan berkelanjutan (*sustainable*).

Masyarakat Sekitar Hutan dan Sumberdaya Hutan

Memanfaatkan sumberdaya hutan bukan berarti harus merusak hutan. Hutan dalam kondisi baik pun dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar hutan. Masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Simalungun sudah merasakan manfaat sumberdaya hutan. Hutan sebagai sumber air bersih adalah salah satunya. Selain untuk menyiram tanaman palawija, air juga digunakan sebagai bahan untuk air minum. Kawasan hutan Sibatuloting misalnya, kawasan itu memberi kontribusi menjaga pasokan air untuk Danau Toba, sebab hutan Sibatuloting menjadi kawasan yang mengelilingi Danau

Toba sehingga kawasan hutan itupun merupakan bagian dari daerah aliran sungai (DAS) Danau Toba. Manfaat ekonomi langsung yang dapat dinikmati masyarakat sekitar hutan adalah sumberdaya hutan bukan kayu. Tanaman hutan yang memiliki nilai ekonomi adalah jenis paku pohon pakis, dalam bahasa Batak Toba disebut *tandiang*. Pohon jenis *tandiang* ini diambil dari dalam hutan untuk ditanam di pekarangan rumah sebagai tanaman hias. Selain pohonnya ditanam, bagian batang dari pohon *tandiang* dapat juga dijadikan sebagai media tempat tumbuhnya bunga angrek. Terdapat beberapa penjual tanaman pohon *tandiang* dan produk olahan di jalan Siantar-Parapat (Danau Toba). Produk olahan dari pohon *tandiang* menjadi cinderamata para wisatawan yang melintas di jalan Siantar-Parapat itu. Produk pohon *tandiang* ukuran 10 cm x 20 cm dengan ketebalan dua sentimeter dijual seharga Rp.10.000,00 per unit. Berbagai produk dapat dihasilkan dari pohon *tandiang* sebagai tempat menanam bunga. Hasil cincangan *tandiang* dapat digunakan sebagai media pengganti tanah untuk menanam angrek. “Limbah” *tandiang* dijual seharga Rp.12.000,00 per karung. Selain *tandiang*, bambu merupakan sumberdaya hutan bukan kayu yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Manfaat bambu bermacam-macam, salah satu produk bambu yang diperjualbelikan adalah kurungan ayam dan burung.

Hasil hutan bukan kayu, seperti *tandiang*, bunga angrek, ijuk, dan bambu, diperjualbelikan oleh sekitar delapan rumah tangga di jalan yang menghubungkan Pematang Siantar dengan Parapat. Jalan itu merupakan jalur padat yang dilalui oleh kendaraan pariwisata karena menjadi lintasan para wisatawan dari Medan yang hendak ke Parapat. Oleh karena itu, ada saja wisatawan yang berhenti di tempat penjualan hasil hutan bukan kayu dan membeli untuk dijadikan sebagai cinderamata. Tidak seluruh sumberdaya hutan bukan kayu didatangkan dari kawasan hutan Kabupaten Simalungun, karena ada juga yang didatangkan dari kawasan hutan di wilayah lain seperti Tarutung dan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara.

Sumberdaya hutan lain yang dimanfaatkan masyarakat sekitar hutan adalah pohon aren atau dalam bahasa Batak Toba dan Simalungun disebut *bagot*. Pohon aren ini hampir seluruhnya dapat dimanfaatkan, baik batang, daun, ijuk, dan buahnya. Ijuk aren dapat diolah menjadi sapu rumah ataupun atap rumah. Rumah adat Batak masih tetap menggunakan ijuk sebagai atap, sementara pemanfaatan untuk atap rumah sudah digantikan oleh seng dan genteng. Buah pohon enau dapat dijadikan sebagai kolang-kaling. Buah enau diambil setelah tidak lagi menghasilkan *tuak* untuk tidak mengurangi kualitas *tuak* yang dihasilkan. Menurut Saragih, petani yang mengambil buah enau untuk dijadikan kolang-kaling tidak terlalu banyak, sebab harga setandan (*janjang*) buah enau hanya Rp 30.000,00 dan maksimal Rp 70.000,00/tandan, itu pun hanya pada saat lebaran saja.

Hasil lain dari pohon aren yang memiliki makna sosial bagi orang Batak adalah *tuak*. *Tuak* berbentuk cairan yang merupakan hasil sadapan yang diambil dari mayang enau atau aren (*Arenga pinnata*) (Ikegami 1997). *Tuak* adalah minuman tradisional orang Batak. Pohon aren awalnya merupakan tanaman liar, baik di kawasan hutan maupun di tanah-tanah rakyat. Dewasa ini, pohon aren sudah banyak yang dibudidayakan oleh petani di lahan mereka. *Tuak* yang dihasilkan petani *tuak* (dalam bahasa Batak disebut *paragat*) melalui sebuah proses. *Tuak* dapat dipanen dua kali sehari (pagi dan sore) dan hasilnya dalam sekali panen sekitar lima liter. Masa produksi satu pohon *tuak* paling lama tiga tahun.

Minum *tuak* menjadi tradisi orang Batak yang dilakukan sepanjang sore hari setelah aktivitas keseharian selesai dilakukan. Tradisi minum *tuak* berlangsung di kedai-kedai (*lapo*) *tuak* dan tempat itu menjadi arena interaksi sesama orang Batak dan mendiskusikan berbagai hal sebagai sisi positif. Tetapi minum *tuak* juga memiliki sisi negatif karena peminum *tuak* sering tidak mengontrol diri ketika meminum dalam volume besar. Sebagai minuman beralkohol

meski kadarnya rendah *tuak* dapat mengakibatkan mabuk.

Saragih, pemilik *lapo tuak* di Ujung Nauli menjelaskan, bahwa keluarganya dapat hidup dari menjual *tuak*. Pohon enau milik Saragih ada empat pohon, sehingga *tuak* yang diproduksi mencapai 20 liter setiap hari. *Tuak* dijual seharga Rp 2.000,00 per gelas (300 cc). Dalam satu hari, Saragih dapat menjual *tuak* sekitar 36 gelas atau sekitar 11 liter, sehingga pendapatan dari menjual *tuak* mencapai Rp 72.000,00. *Tuak* yang tersisa sebanyak sembilan liter dapat disuplai ke pemilik *lapo tuak* lain yang tidak mempunyai pohon enau. Saragih mengelola pohon aren sebanyak lima. Dalam sehari mulai dari pagi hingga sore hari, *tuak* yang dihasilkan satu pohon aren mencapai lima liter. Saragih merupakan mitra Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun membantu pengamanan hutan terutama kawasan hutan lindung Sibatuloting. *Tuak* sebagai salah satu sumberdaya hutan sudah memberikan sumber ekonomi alternatif kepada pemiliknya.

Begitu pentingnya pohon enau penghasil *tuak* bagi masyarakat di Kabupaten Simalungun, pengelola sumberdaya hutan mencoba bermitra dengan petani *tuak* agar hutan dapat terpelihara baik dan petani dapat mengambil sumberdaya ekonomi bukan kayu dari dalam kawasan. Pengelola sumberdaya hutan merangkul petani *tuak* (*paragat*) yang mengambil *tuak* dari kawasan Cagar Alam Martelu Purba yang terletak di dua desa, yaitu Desa Tiga Runggu dan Desa Purba Tongah, Kecamatan Purba. Tujuan dari kemitraan ini agar tanggung jawab pada kelestarian kawasan hutan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat sekitar. Kemitraan ini juga memperkenalkan bahwa sumberdaya hutan tidak sebatas kayu semata tetapi juga sumberdaya hutan non kayu. Berdasar daftar penerima ketentuan atau norma dalam rangka penyesuaian tumbuhan aren/*paragat* di Cagar Alam Martelu Purba seluas 195 hektar, jumlah petani *tuak* mencapai 18 orang. Salah satu di antara petani *tuak* dalam isian profil *paragat* yang diterima Kantor Cagar Alam Martelu Purba

menyebutkan bahwa jumlah pohon aren yang dikelola sebanyak tujuh pohon.

Kemitraan yang dibangun oleh pengelola Cagar Alam Martelu Purba dengan masyarakat sekitar hutan konservasi dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat sekitar, bahwa upaya menjaga kelestarian kawasan hutan merupakan tanggung jawab semua pihak. Melalui petani *paragat* yang masuk-keluar hutan sebanyak dua kali dalam sehari, menjadi sumber informasi bagi pengelola cagar alam tentang kondisi hutan dan aktivitas di kawasan cagar alam yang tidak sesuai peruntukannya agar pihak pengelola dapat segera mengambil tindakan. Masyarakat juga dididik bahwa sumberdaya hutan yang bernilai ekonomi tidak hanya kayu semata, tetapi juga sumberdaya bukan kayu yang dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar hutan. Oleh sebab itu, kemitraan seperti itu perlu diperluas pada masyarakat kawasan hutan lain di Kabupaten Simalungun agar mereka dapat terlibat dalam pemeliharaan kawasan hutan.

Hasil hutan lain adalah madu yang dihasilkan lebah. Kualitas madu sangat dipengaruhi jenis bunga yang dimakan oleh lebah. Hutan yang terpelihara baik merupakan kawasan tempat lebah mencari bunga untuk dimakan. Lebah tidak mau memakan bunga yang sudah terkontaminasi oleh pestisida, dan hutan merupakan tempat bunga yang tidak terkontaminasi oleh pestisida tersebut. Kalau hutan rusak maka lebah akan semakin jauh mencari bunga, dan sarang yang dibangun lebah pun tidak lagi di kawasan hutan yang tumbuh di sekitar permukiman masyarakat. Oleh karena itu, petani yang mengambil madu sebagai salah satu sumber ekonomi keluarga merasa penting untuk menjaga agar kawasan hutan tetap terpelihara baik. Petani madu dari Kabupaten Simalungun pernah menjadi juara satu pengolahan madu tingkat nasional.

Alternatif Meningkatkan Ketahanan Sosial

Kawasan hutan yang ada di Kabupaten Simalungun seluas 138.838,46 hektar, sekitar 109.039,84 hektar (hutan produksi seluas

98.200,48 hektar dan hutan produksi terbatas seluas 10.839,36 hektar) atau 78,54 persen dari luas hutan di wilayah itu adalah hutan produksi. Sebagian kawasan hutan itu diusahakan oleh PT. Toba Pulp Lestari (TPL, dulu bernama PT. Inti Indorayon Utama) untuk memenuhi kebutuhan kayu agar perusahaan pulp yang berada di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, tetap beroperasi. Kondisi itu menunjukkan, bahwa kawasan hutan di Kabupaten Simalungun khususnya di Sibatuloting sudah mengalami perubahan ekosistem. Kawasan hutan yang tadinya ditumbuhi beranekaragam jenis pepohonan, berubah menjadi monokultur. Tanaman monokultur itu tidak berlangsung lama, yaitu hanya lima sampai enam tahun saja. Tanaman monokultur itu kemudian dipanen menjadi bahan baku industri PT. TPL. Setelah tanaman monokultur itu dipanen dan kawasan itu menjadi gundul, selanjutnya kawasan itu kembali ditanami dengan tanaman monokultur yang sama untuk dipanen lima sampai enam tahun berikutnya. Demikian seterusnya sampai izin PT. TPL berakhir.

Kehadiran PT. TPL di satu sisi dapat memberi manfaat misalnya menyediakan tenaga kerja bagi masyarakat lokal dan menggerakkan ekonomi lokal lain. Manfaat yang diberikan perusahaan yang beroperasi di sebuah daerah merupakan salah satu dari dua level pengaruh sebuah perusahaan, yaitu level lokal. Luas konsesi hutan milik PT. TPL di Sibatuloting mencapai 33.000 hektar. Menurut Aminah, konsesi hutan PT. TPL ketika bernama PT. Inti Indorayon Utama dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik itu, tetapi dalam kenyataan perusahaan ini menjual kayu pinus dari konsesinya untuk bahan baku tiga perusahaan: pengolahan tusuk gigi, korek api, dan sumpit. Oleh karena penebangan kayu dari konsesi perusahaan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku perusahaan dimaksud, akibat yang terjadi adalah pembabatan hutan tidak terkendali volume mencapai 500 ton per hari. Akibat pembabatan hutan di Sibatuloting Kabupaten Simalungun tidak terkendali, maka sembilan dari 12 sungai

yang ada di daerah aliran sungai (DAS) Bah Bolon mengalami kekeringan dan tidak lagi dapat menyuplai air ke sembilan sungai lain. Tiga sungai yang masih berfungsi pada waktu itu adalah Simbolon, Lotung, dan Onanrunggu (Aminah 1995).

Masyarakat sekitar hutan ada yang berkolaborasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun untuk meningkatkan ketahanan sosial mereka. Masyarakat di Sileutu misalnya, memanfaatkan lahan bekas HTI yang pernah memproduksi korek api tetapi sejak tahun 1987 tidak beroperasi lagi. Keberadaan warga di Nagori Sibaganding itu dimulai pada tahun 1969, ketika perkampungan mereka di Sigaol-gaol yang berada di tepi pantai Danau Toba mengalami longsor. Akibat peristiwa tanah longsor itu, sebagian warga naik ke atas (Sileutu) membuka lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka menelusuri jalan terjal dengan tingkat kemiringan 45 sampai 60 derajat untuk naik ke atas dari Sigaol-gaol ke Sileutu,. Beratnya medan yang harus dilewati setiap ingin berangkat ke lahan pertanian menjadi keluhan tersendiri bagi petani. Mereka membangun permukiman sederhana di Silaotu. Sidabutar juga mengikuti jejak warga terdahulu. Akibat longsor yang terjadi di Sigaol-gaol lahan pertanian yang mereka usahakan yang berada di permukaan tanah longsor dengan kemiringan 45 sampai 60 derajat. Masyarakat tidak lagi dapat berharap untuk menjadikan sebagai lahan pertanian, karena jika hujan turun tanaman tergerus ke bawah. Oleh sebab itu, Sidabutar memutuskan naik ke atas (Sileutu) ke tempat yang lebih datar.

Kampung Sigaol-gaol berada di bagian atas oleh Dinas Kehutanan masyarakat dianjurkan untuk dapat menanam dengan tanaman keras. Menurut Sidabutar, warga yang bermukim di Nagori Sibaganding, pihak Dinas Kehutanan pernah memberikan bantuan bibit pada tahun 2006 seperti bibit pete, jengkol, *ingul*, dan durian. Pada tahun 2009, Dinas Kehutanan kembali memberikan bantuan bibit untuk ditanami warga. Pinus jarang diterima petani karena tidak

menguntungkan bagi tanaman warga, sebab jika pinus yang ditanam tanah menjadi kering. Pinus adalah jenis tanaman yang membutuhkan air dalam volume besar. *Ingul* dapat menjadi pelindung bagi tanaman petani dan pada musim kemarau *ingul* menggugurkan daunnya yang dapat berfungsi menjadi pupuk bagi tanaman di bawahnya setelah membusuk. Pohon *ingul* juga dapat menjadi bahan obat nabati untuk menyembuhkan luka dan dapat dimakan sebagai sayur lalapan. Keberadaan masyarakat yang bermukim di sekitar dan dalam hutan Sileutu, Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun pada tahun 2009 mencadangkan kawasan itu sebagai hutan kemasyarakatan. Usulan itu sudah pernah diteruskan ke Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) selaku badan yang bertanggung jawab menangani program hutan kemasyarakatan. Usulan itu berhenti sampai pada tingkat pencadangan saja. Hingga penelitian ini dilakukan (2016), skim hutan kemasyarakatan tidak pernah ada di Kabupaten Simalungun. Pemerintah Kabupaten Simalungun belum merespon model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang ditawarkan oleh pemerintah pusat.

Pada tahun 2011, pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara pernah menandatangani perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan terkait pemberdayaan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan. Empat kawasan hutan yang berada di Kabupaten Simalungun yang menjadi target kerja sama itu adalah Kawasan Hutan (KH) Dusun Kampung Baru, KH Dusun Bintang Mariah, KH Dusun Juma Harangan, dan KH Dusun Repa Sileutu. Kerja sama yang dimaksud adalah mendorong kelembagaan masyarakat di sekitar hutan agar dalam memanfaatkan sumberdaya hutan, kemampuan dan kemandirian masyarakat sekitar hutan dapat lebih optimal dan adil tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan. Berdasar penjelasan Sidabutar implementasi dari kerja sama yang pernah ditandatangani itu belum ada hingga penelitian dilakukan. Peningkatan kemampuan dan

kemandirian masyarakat sekitar hutan melalui program pemberdayaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat agar mereka lebih tanggap merespon perubahan eksosistem hutan yang terjadi (Adger, Kelly, dan Ninh 2001).

Selain Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun, PT. TPL sebagai satu-satunya perusahaan pemegang izin usaha pengusahaan hasil hutan kayu-hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI), juga bermitra dengan masyarakat lokal. Perusahaan pulp yang berada di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba-Samosir, dalam memenuhi kebutuhan bahan baku kayu perusahaan menjalin kemitraan dengan pemilik-pemilik tanah di sekitar lahan konsesi perusahaan. Kemitraan yang dibangun oleh PT. TPL dengan masyarakat pemilik lahan bukan program kemitraan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. Dalam peraturan menteri kehutanan disebutkan, bahwa kemitraan kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan, pemegang izin usaha industri primer hasil hutan, dan atau kesatuan pengelolaan hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Lokasi areal seperti tertuang pada pasal 11 dalam peraturan dimaksud berada di wilayah kerja IUPHHK-HTI; di areal konflik dan yang berpotensi konflik di areal pengelola hutan, pemegang izin atau KPH; dan atau di areal yang memiliki potensi dan menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. TPL selaku perusahaan pemegang IUPHHK-HTI berada di luar izin konsesi PT. TPL yaitu di lahan masyarakat.

Perusahaan PT. TPL dalam membangun kemitraan dengan masyarakat membuat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi pemilik yang menginginkan lahannya dimanfaatkan oleh PT. TPL melalui sistem bagi hasil. Perusahaan selektif menentukan lokasi-lokasi yang dimitra-

kan. Lahan yang dimitrakan tidak terlalu sempit, minimal dua hektar dalam satu lokasi dan tidak jauh dari jalan hauling untuk memudahkan akses ke lahan masyarakat yang dimitrakan. Status tanah harus jelas dan tidak dipersengketakan, sehingga dokumen tanah harus diperlihatkan ketika kemitraan akan dilaksanakan. Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun dilibatkan dalam proses pembentukan kemitraan untuk mengetahui status kawasan yang dimitrakan oleh masyarakat.

Salah satu pemilik tanah yang bermitra dengan PT. TPL adalah keluarga Sinaga, dimulai sejak tahun 2006. Nama kemitraan ketika itu adalah HTR (Hutan Tanaman Rakyat), sekarang jadi PKR (Perkebunan Kayu Rakyat) sejak tahun 2011. Sampai tahun 2016, lahan yang dimitrakan dengan PT. TPL sektor Aek Nauli seluas 16 hektar. Lahan yang dimitrakan biasanya lahan kritis yang tidak dikelola masyarakat. Lokasi kemitraan berada di sekitar kawasan konsesi PT. TPL, antara lain Dolok Saribu, Sihaporas, Sibaganding, dan Negeri Dolok. Dalam kemitraan pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sementara yang mengerjakan lahan mulai dari *land clearing*, penanaman, dan pemanenan hasil dilakukan oleh perusahaan sendiri. Pemilik lahan dengan kemitraan itu harus ikut mengawasi lahan yang sudah ditanami *eucalyptus*, misalnya dari bencana kebakaran apabila lahan yang sudah dimitrakan mengalami musibah kebakaran, pemilik lahan ikut menerima kerugian karena tidak memperoleh apa-apa.

Awal kemitraan yang dilakukan Sinaga diinisiasi oleh perusahaan dengan sistem bagi hasil. Perbandingan bagi hasil itu adalah 60:40 (60% untuk perusahaan dan 40% untuk pemilik tanah), setelah sebelumnya biaya produksi seperti pembelian bibit, *land clearing*, dan upah menanam dikeluarkan. Dengan perbandingan demikian, pemilik lahan tidak lagi mengeluarkan biaya apapun selama kemitraan berlangsung. Pada tahun 2011, harga kayu adalah Rp 37.500,00 per ton. Tahun 2016 masa panen untuk kedua kali dalam skim PKR, ada upaya dari PT. TPL untuk menaikkan bagi hasil dari perusahaan menjadi Rp 60.000,00 per ton.

Harga kayu yang ditawarkan perusahaan pada pemilik tanah bukan hasil kesepakatan kedua belah pihak, karena harga kayu itu ditentukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, ruang negosiasi antara pemilik lahan dengan pihak perusahaan tidak ada, termasuk soal persentase bagi hasil. Pihak perusahaan ketika menawarkan kemitraan pada pemilik tanah sudah dengan besarnya persentase pembagian, sehingga tawar-menawar antara pemilik lahan dengan pihak perusahaan tidak ada. Perbandingan itu sama untuk seluruh mitra yang menyediakan lahan untuk ditanami oleh perusahaan. Sebelum Sinaga bermitra dengan PT. TPL, lahan yang dimiliki keluarga besarnya pernah ditanami pinus. Bibit pinus merupakan bantuan dari Dinas Kehutanan pada tahun 1997. Ketika tanaman pinus belum besar (usia masih sekitar lima tahun), ada pengusaha menawarkan kerja sama penanaman jahe sampai tahun 1999. Sinaga menerima tawaran itu dengan konsekuensi sebagian lahan yang ditanami pinus ditebang untuk ditanami jahe. Setelah kerja sama menanam jahe tidak berlanjut dengan pengusaha dimaksud, usaha penanaman jahe dilanjutkan oleh Sinaga sendiri. Akibat tanaman jahe diserang penyakit, usaha tanaman jahe tidak lagi berlanjut. PT. TPL membuka skim kemitraan dengan pemilik tanah di sekitar konsesi hutan milik PT. TPL terkait pemanfaatan lahan kritis milik masyarakat agar ditanami *eucalyptus* sebagai bahan baku pulp. Salah satu petani yang merespon skim kemitraan itu adalah Sinaga.

Jenis tanaman yang dimitrakan dengan lahan masyarakat adalah *ecualiptus*, yaitu jenis pohon yang dibutuhkan sebagai bahan baku (*raw material*) perusahaan. *Eucalyptus* dapat dipanen setelah berumur 4,5 tahun. Luas lahan yang di-*enclave* sekitar 100 hektar, tetapi tidak semua lahan itu dimitrakan dengan perusahaan. Warga yang bermukim di *enclave* menanam lahannya dengan tanaman kopi sebagai tanaman utama. Menurut Sinaga, hasil yang diperoleh petani jika membandingkan antara bermitra dengan PT. TPL dan penanaman jahe, hasil yang diperoleh lebih menguntungkan berasal dari penanaman

jahe. Hasil produksi jahe dari satu rante lahan sekitar satu ton.

Panen pada tahun 2011, dari luas 16 hektar lahan yang ditanami kayu yang dimitrakan oleh Sinaga, diperoleh kayu bulat berdiameter ± 15 centimeter seberat 1.750 ton. Pada saat itu, pendapatan yang diperoleh dari hasil kemitraan dengan TPL itu mencapai Rp 26.250.000,00 ($1.750 \text{ ton} \times \text{Rp } 37.500,00 \times 40\%$). Bagi hasil yang diterima Sinaga dari luas 16 hektar selama tujuh tahun, tergolong kecil, sebab jumlah pendapatan bila dirata-rata hanya Rp 234.375,00/hektar/tahun. Surat perjanjian kemitraan berlaku untuk dua daur yaitu sekitar 14 tahun. Jika petani menganggap masih menguntungkan, petani dan perusahaan dapat memperpanjang kontrak kemitraan itu. Bagi pemilik lahan yang luasnya satu sampai dua hektar, kemitraan yang digagas oleh PT. TPL tidak dapat menyejahterakan masyarakat yang ikut bermitra, sebab bagi hasil yang diterima begitu kecil. Kalau rata-rata produksi kayu setiap hektar lahan yang dimitrakan hanya 110 ton (diperoleh dari 1.750 ton dibagi 16 hektar), maka jumlah bagi hasil yang diterima pemilik tanah selama tujuh tahun adalah Rp 1.650.000,00 saja atau Rp 236.000,00 per tahun. Dengan jumlah bagi hasil yang begitu kecil, model kemitraan yang dibangun oleh PT. TPL tidak cocok dijadikan sebagai model pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Model kemitraan ini lebih pada upaya memanfaatkan lahan-lahan kritis atau tidak produktif semata daripada lahan itu terlantar dan dibiarkan.

Menurut Sinaga, bagi hasil yang diterima petani dengan perhitungan yang didasarkan pada berat kayu (dalam satuan ton) kurang menguntungkan pemilik lahan dibandingkan jika perhitungannya berdasarkan volume (meter kubik). Jika bagi hasil dihitung berdasarkan berat maka berat kayu yang ditebang jika tidak langsung ditimbang akan berkurang. Berat kayu berkurang karena kadar air dalam kayu menguap setelah dibiarkan di tempat penampungan sementara sebelum ditimbang. Biasanya, kayu

baru ditimbang setelah kadar air tinggal 40 persen dan berat kayu sudah susut. Perhitungan bagi hasil didasarkan pada volume kayu (meter kubik), berkurangnya kadar air dalam kayu tidak mengurangi volume kayu sehingga kapan pun kayu diangkut tidak masalah dan tidak mengurangi jumlah bagi hasil yang akan diterima pemilik tanah. Kayu yang ditumpuk pada saat baru dipanen, beratnya ditaksir Sinaga sekitar 2.000 ton tetapi karena sudah dibiarkan terkena sinar matahari selama itu sehingga kandungan air dalam kayu menguap, pengurangan terhadap berat kayu pun menjadi signifikan.

Kayu yang dihasilkan dari tanah kemitraan tidak perlu mengurus legalitas kayu karena Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun dilibatkan dalam proses pembuatan kemitraan antara masyarakat pemilik lahan dengan PT. TPL. Pemasaran kayu dari lahan masyarakat terkait legalitas kayu ada dua kemungkinan. Pertama, jika kayu yang akan dipasarkan itu lebih tua daripada surat tanah (sertifikat dan surat keterangan tanah), maka pemilik kayu diwajibkan mengurus legalitas kayu agar memperoleh sertifikat legalitas kayu (SKT). Pemerintah ragu akan legalitas kayu yang ditebang di atas tanah apabila sertifikat ataupun surat keterangan tanah tempat kayu tumbuh lebih muda dari usia kayu itu sebab ada kemungkinan kayu dimaksud diperoleh secara ilegal, misalnya diambil dari kawasan hutan negara yang pengelolaannya tidak berijin. Kedua, jika usia sertifikat tanah ataupun SKT lebih tua dibanding dengan usia kayu, maka pemilik kayu tidak perlu mengurus dokumen terkait sertifikat legalitas kayu. Pemerintah yakin, bahwa kayu yang beredar ataupun diperdagangkan itu berasal dari tanah masyarakat.

D. Penutup

Kesimpulan: (1) Kendati Kabupaten Simalungun memiliki kawasan hutan relatif luas, keterlibatan masyarakat sekitar hutan terhadap program pemberdayaan yang mungkin dilakukan di dalam kawasan hutan, sebagai mekanisme untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sekitar hutan masih rendah. Hal itu terbukti dengan sedikitnya kelompok tani dalam skim pemberdayaan yang sudah digagas oleh Kementerian Kehutanan, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan hutan kemitraan. Keterlibatan perusahaan yang memiliki izin usaha pengusahaan hasil hutan tanaman industri dalam bentuk kemitraan dengan sistem bagi hasil yang digagas oleh PT. Toba Pulp Lestari tidak terlalu menguntungkan petani. Harga kayu yang ditentukan pemerintah sebagai dasar untuk membagi hasil dari lahan yang dimitrakan oleh petani relatif kecil. Bentuk kemitraan yang digagas perusahaan sebenarnya mampu untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat yang bermukim di sekitar hutan; (2) Luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara termasuk di Kabupaten Simalungun tercapai melalui proses politik yang panjang, sejak masa kolonial Belanda hingga era reformasi. Penetapan suatu kawasan menjadi kawasan hutan tidak didasarkan pada kondisi riil yang ada di sekitar hutan, kendati penetapannya dilakukan melalui tata guna. Hal itu mengakibatkan luas kawasan hutan yang telah ditetapkan pemerintah mendapat ‘perlawanan’ dari masyarakat umum, karena beberapa lahan yang sudah dimiliki masyarakat dari puluhan sampai ratusan tahun, termasuk kawasan-kawasan yang sudah menjadi hak guna usaha (HGU) masih ditetapkan sebagai kawasan hutan. Oleh sebab itu, suatu daerah yang berada dalam kawasan hutan yang sudah diakui oleh kolonial Belanda sebagai daerah *enclave*, justru dianulir pada masa pemerintahan Indonesia meskipun aktivitas kehidupan masyarakat yang bermukim di daerah *enclave* yang dianulir itu tetap berlangsung; (3) Pengenalan terhadap sumberdaya hutan bukan kayu sudah lama berlangsung pada masyarakat di Kabupaten Simalungun. *Tuak* merupakan salah satu di antaranya. Hasil hutan bukan kayu itu sudah lama dinikmati oleh masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Simalungun pada khususnya dan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya dan sudah melegenda. Selain *tuak*, masyarakat di sekitar kawasan hutan banyak memanfaatkan

sumberdaya hutan bukan kayu menjadi sumber pendapatan keluarga. Hasil hutan lain yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Simalungun adalah madu, *tandiang*, angrek hutan, dan ijuk. Hutan dengan ekosistem yang terpelihara sudah memberikan pendapatan ekonomi alternatif pada masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan.

Saran: Masyarakat yang bergantung pada sumberdaya hutan di Kabupaten Simalungun masih sangat signifikan. Hasil sumberdaya hutan non-kayu yang dapat dimanfaatkan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan beraneka ragam. Sumberdaya itu bila dimanfaatkan sedemikian rupa dan masyarakat diberi akses untuk mengelolanya, maka tingkat kesejahteraan sekaligus ketahanan sosial mereka terdorong untuk meningkat. Oleh sebab itu, saran dari penelitian ini adalah: 1) Sosialisasi kepada masyarakat bahwa hutan tidak hanya sekedar kayu harus terus dilakukan. Hal itu penting untuk membuka wawasan masyarakat terkait manfaat sumberdaya hutan secara holistik; 2) Melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan perlu terus dilakukan sembari memberi pemahaman terkait manfaat sumberdaya hutan. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, kepedulian mereka terhadap keberlanjutan sumberdaya hutan yang ada di sekitar mereka terus ditingkatkan; 3) Menjadikan masyarakat yang mengantungkan hidup pada sumberdaya hutan melalui skim pemberdayaan yang menjadi program Kementerian Kehutanan agar pengelolaan hutan berkelanjutan dapat terlaksana sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercapai.

Ucapan Terima Kasih

Kepada seluruh informan dan berbagai pihak yang telah memberikan informasi terkait penelitian tentang “Ketahanan Sosial dan Perubahan Ekologi Hutan: Studi pada Masyarakat Sekitar Hutan di Kabupaten Simalungun” disampaikan terima kasih

Pustaka Acuan

- Adger, W. N., N. Kelly, N., dan Ninh, N. H. (2001). "Environment, Society, and Precipitous Change". Dalam W. N. Adger, N. Kelly, dan N. H. Ninh (Editors) *Living with Environmental Change: Social Vulnerability, Adaptation, and Resilience in Vietnam*. London and New York: Routledge. Hlm.: 3-18.
- Aminah (1995). *Analisis Dimensi Sengketa dan Dinamik serta Identifikasi Strategi Penyelesaiannya (Kasus PT. Inti Indorayon Utama)*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Adger, W. N., dan Kelly, N. (2001). "Social Vulnerability and Resilience". W. N. Adger, N. Kelly, dan N. H. Ninh (Editors) *Living with Environmental Change: Social Vulnerability, Adaptation, and Resilience in Vietnam*. London and New York: Routledge. Hlm.: 19-34.
- Braatz, S. (2012). "Building Resilience for Adaptation to Climate Change through Sustainable Forest Management". Dalam A. Meybeck, J. Lankoski, S. Redfern, N. Azzu, dan V. Gitz (Editors) *Building Resilience for Adaptation to Climate Change in the Agriculture Sector. Proceedings of a Joint FAO/OECD Workshop 23-24 April 2012*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) or the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hlm.: 117-127.
- Blaikie, P. (1985). *The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries*. London and New York: Longman.
- Dishut (2015). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara 2015.
- Forest Watch Indonesia (2014). *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2009-2013*. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia
- Forest Watch Indonesia (2011). *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009*. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia.
- Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- IKEGAMI, S. (1997). "Tuak dalam Masyarakat Batak Toba: Laporan Singkat tentang Aspek Sosial-budaya Penggunaan Nira" (Tuak in the Toba Batak Society: A Preliminary Report on the Socio-cultural Aspect of Palm Wine Consumption). *Annual Report of the University of Shizuoka*, Hamamatsu College No.11-3, 1997, Part 5.
- Makura-Paradza, G. G. (2010). *Single Woman, Land and Livelihood Vulnerability in a Communal Area in Zimbabwe. African women leaders in agriculture and the environment AWLAE SERIES No. 9*. The Nederland: Wageningen Academic Publishers.
- Mather, A. S. (1990). *Global Forest Resources*. Portland, Oregon: Timber Press, Inc.
- McMichael, P. 2004. *Development and Social Change: a Global Perspective. 3rd Edition*. Thousand Oaks, California: Pine Forge Press.
- Pearce, D. W. (2001). "The Economic Value of Forest Ecosystems". Dalam *Ecosystem Health* 7(4). Hlm.: 284-296.
- Rizal HB., A. (2012). "Sosiologi Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan". Dalam *InfoTeknis EBONI* Vol.9 No.1, Oktober 2012. Hlm.: 1-15.
- Samuelson, L., Bengtsson, K., Celander, T., Johansson, O., Jägrud, L., Malmer, A., Mattsson, E., Schaaf, N., Svending, O., Tengberg, A. (2015). *Water, Forests, People – building resilient landscapes. Report Nr. 36*. Stockholm: Stockholm International Water Institute (SIWI).
- Sudiyono (2016). "Pengalaman Penelitian Bersama John Haba". Dalam R. Siburian (Editor) *Beta Orang Kupang: Mengenal John Haba Lewat Para Sahabat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm.: 61-80.
- Tengo, M. dan Heland, J. V. (2012). "Adaptive Capacity of Local Indigenous Institution: the Case of the Taboo Forests of Southern Madagascar". Dalam E. Boyd dan C. Folke (Editors) *Adapting Institution: Governance, Complexity and Social-Ecological Resilience*. Cambridge: Cambridge University Press. Hlm.: 37-74.
- Ungar, M. (2012). "Social Ecologies and Their Contribution to Resilience". Dalam M. Ungar (Editor) *The Social Ecology of Resilience A Handbook of Theory and Practice*. New York, Dordrecht Heidelberg, London: Springer Hlm.: 13-31.
- Zhang, Y. (2000). "Deforestation and Forest Transition: Theory and Evidence in China". Dalam M. Palo and H. Vanhanen (eds.), *World Forests from Deforestation to Transition?* Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. Hlm.: 41-65.

Website:

- <http://www.medanbagus.com/read/2014/02/14/21796/Kadishut-Simalungun:-Sitahoan-Bukan-Kawasan-Hutan>. 2014. "Kadishut Simalungun: Sitahoan Bukan Kawasan Hutan". (Akses 14 Juni 2016).
- <http://www.hariansib.co/view/Headlines/14394/-MA-Batalkan-SK-Menhut-No--44-2005-Tentang-Penunjukan-Kawasan-Hutan-di-Sumut.html>. Akses 11 Mei 2016.

Footnotes

- Presiden Suharto berkuasa selama 32 tahun, mulai tahun 1966 sampai 1998.
- Hasil wawancara dengan Simamora, 28 April 2016.
- Sumber: <http://www.hariansib.co/view/Headlines/14394/-MA-Batalkan-SK-Menhut-No--44-2005-Tentang-Penunjukan-Kawasan-Hutan-di-Sumut.html>. Akses 11 Mei 2016.

Sumber: Bahan Kata Sambutan Gubernur Sumatera Utara pada Rapat Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam Indonesia Sektor Kehutanan dan Perkebunan pada 2015.

- 1) Tradisi ini tidak berlangsung hanya di kampung halaman di Provinsi Sumatera Utara, tetapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia tempat komunitas orang Batak berada. Pengalaman saya di Desa Kerta Buana, Kabupaten Tenggarong, Provinsi Kalimantan

Timur, saya juga menemukan kedai orang Batak yang menyediakan tuak. Mereka yang minum tuak di kedai itu tidak saja orang Batak, tetapi juga penduduk setempat, yaitu Bali (transmigran) dan Dayak.

Hasil wawancara dengan Saragih di Nagori Ujung Nauli, 28 April 2016).

- 2) Wawancara dengan Sinaga, kampung Dolok Saribu, 28 April 2016.

Keluarga Kurang Mampu di Banda Aceh dan Pidie

Poor Families In Banda Aceh and Pidie

Daud Bahransyaf

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta

Jl. Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu Yogyakarta

Email: daudbram@gmail.com, HP. 081392703955

Diterima 27 September 2017, diperbaiki 10 Agustus 2017, disetujui 5 Desember 2017

Abstract

Based on the research conducted randomly to 600 heads of poor category families in five sub-districts (that of Syiah Kuala, Banda Raya, Lueng Bata, Ulle Kareng and Baiturrahman Sub-District) of Banda Aceh City, and also by identifying 599 people representing poor families in five sub-districts (that of Glumpang Tiga, Mutiara, Tiro/Truseb, Tangse and Muara Tiga Sub-District) of Pidie District, it was known that there were some socio-economic fundamental changes in their income and expenditure as well as ownership of the goods. Their income and expenditure of households level in both locations concerned had already achieved more than Rp.600.000,- per month. Goods which was previously used to be a secondary need and owned only by middle and upper class society, it had turned out to be primary need for life and their livelihood. Most people possessed mobile phones and motorcycles. Majority of respondents had each a TV of over 14" size and a refrigerator. Electricity for lighting had been utilized by most of the poor families in both two research sites. Electricity program had reached and been enjoyed by citizens in Banda Aceh City and by that of Pidie District. These empirical facts need to be observed and studied as an input to make adjustment on the aspects or criteria of families in poverty, either done by the related bodies or institutions, or by the authorities concerned in making Government Regulations or Local Government Regulations and Minister Regulations.

Keywords : *poverty; ownership; assets*

Abstrak

Berdasar pada penelitian yang dilakukan secara acak/random di Kota Banda Aceh pada lima kecamatan (Syiah Kuala, Bandar Raya, Lueng Bata, Ulle Kareng dan Kecamatan Baiturrahman) terhadap 600 kepala keluarga kategori miskin, dan Kabupaten Pidie pada lima kecamatan (Glumpang Tiga, Mutiara, Tiro/Truseb, Tangse dan Kecamatan Muara Tiga), dengan mendata 599 orang yang mewakili keluarga miskin, diketahui bahwa terdapat beberapa perubahan sosial ekonomi yang mendasar dalam penghasilan dan pengeluaran serta kepemilikan barang mereka. Penghasilan dan pengeluaran rumah tangga pada kedua lokasi dimaksud lebih dari Rp.600.000,- per bulan. Barang yang dahulu merupakan kebutuhan sekunder dan dimiliki oleh kalangan masyarakat menengah ke atas telah menjadi kebutuhan primer bagi kehidupan dan penghidupan mereka. Masyarakat memiliki HP dan sepeda motor. Sebagian besar responden memiliki TV ukuran diatas 14 " dan kulkas. Listrik sebagai alat penerangan sudah dimanfaatkan oleh sebagian besar responden keluarga miskin di kedua lokasi penelitian ini. Program listrik telah menjangkau dan dinikmati oleh warga masyarakat baik di Kota Banda Aceh maupun di Kabupaten Pidie. Fakta empirik tersebut perlu dicermati dan ditelaah sebagai bahan masukan untuk melakukan penyesuaian terhadap aspek atau kriteria keluarga kurang mampu, baik oleh instansi/lembaga terkait, oleh pihak berwenang dalam pembuatan Peraturan Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun Peraturan Menteri terkait.

Kata kunci : kemiskinan; kepemilikan; aset

A. Pendahuluan

Keberadaan keluarga kurang mampu di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sampai dengan tahun 2017 jumlahnya masih cukup besar. Berdasar data Biro Pusat Statistik (BPS), keluarga kurang mampu berjumlah 28,01 juta

atau 10,86 persen pada Maret 2016, berkurang dibanding September 2015 yang tercatat 28,51 juta orang atau 11,13 persen.

Menurut BPS pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiski-

nan) mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen), berkurang sebesar 0,50 juta orang dibanding dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2015 sebesar 8,22 persen, turun menjadi 7,79 persen pada Maret 2016. Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 14,09 persen pada September 2015 menjadi 14,11 persen pada Maret 2016. Selama periode September 2015 sampai Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,28 juta orang (dari 10,62 juta orang pada September 2015 menjadi 10,34 juta orang pada Maret 2016), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 0,22 juta orang (dari 17,89 juta orang pada September 2015 menjadi 17,67 juta orang pada Maret 2016). Peran komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibanding peran komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2016 tercatat sebesar 73,50 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2015 yaitu sebesar 73,07 persen. Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, gula pasir, mie instan, bawang merah dan roti. Komoditi bukan makanan yang besar pengaruhnya adalah biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Banda Aceh sering dianggap provinsi berprestasi rendah, kendati bermandikan rupiah berupa dana otonomi khusus dan pendapatan asli daerah yang nyaris mencapai 2 triliun rupiah, provinsi paling barat Indonesia ini masih mencatat 859 ribu penduduk miskin. Aceh juga tercatat sebagai provinsi ketujuh paling miskin di Indonesia versi Badan Pusat Statistik. Kota Banda Aceh adalah salah satu wilayah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh. Kota ini memiliki luas tidak terlalu besar yakni hanya

61,36 km² dengan batas daerah sebelah utara Selat Malaka, sebelah selatan Kabupaten Aceh Besar, sebelah timur Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat Samudera Indonesia. Kota Banda Aceh memiliki sembilan kecamatan, 17 mukim, 70 desa dan 20 kelurahan (gampong). Kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Kecamatan Ulee Kareng. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Syiah Kuala, dengan luas 14,24 km² dan kecamatan terkecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Jaya Baru yaitu 3,78 Km². Dari sembilan kecamatan tersebut, Kota Banda Aceh memiliki 90 gampong (20 kelurahan dan 70 desa), dan terbanyak berada di Kecamatan Meuraxa yakni memiliki 16 gampong, dan jumlah gampong terkecil berada di Kecamatan Kuta Raja ada 6 gampong.

Jarak kecamatan ke Ibu Kota Banda Aceh terjauh hanya lima km. Jangkauan wilayah kecamatan dengan kota provinsi relatif dekat, berarti pembinaan, pengawasan dan koordinasi kegiatan program pemerintah daerah dan lainnya juga relatif mudah penjangkauannya.

Berikut ini tentang Kabupaten Pidie, jumlah kecamatan di Kabupaten Pidie sebanyak 23, sedang jumlah gampong/desa secara keseluruhan terdiri atas 735 gampong/desa. Kecamatan yang memiliki gampong/desa terbanyak adalah Kecamatan Pidie dan Padang Tiji, sedang kecamatan yang memiliki gampong/desa paling sedikit adalah Kecamatan Gempang. Kabupaten Pidie memiliki 23 Kecamatan tersebar dari kecamatan yang terdekat sampai yang terjauh dengan kota Kabupaten Pidie. Di lokasi penelitian Kabupaten Pidie ada lima lokasi kecamatan terpilih dengan nama ibu kota dan jarak jangkauan sebagai berikut. Kecamatan Glumpang Tiga ibukotanya Glumpang Minyeuk, jarak jangkau ke kabupaten 17 km dan ke kota provinsi berjarak 220 km. Lokasi berikut Kecamatan Mutiara ibukotanya Beureunuen dengan jarak ke kabupaten sejauh 11 km dan ke provinsi 123 km. Kecamatan Tiro/Truseb ibukotanya adalah Tiro, dengan

jarak tempuh dari kabupaten sejauh 19 km dan 131 km dari Provinsi Aceh. Kecamatan Tangse ibukotanya Tangse, dengan jarak jangkauan dari kabupaten sejauh 53 km dan ke provinsi sejauh 165 km. Kecamatan terakhir yakni Muara Tiga, ibukotanya Laweung, jarak ke Kabupaten Pidie sejauh 24 km dan ke Provinsi Aceh sejauh 98 km. Ditinjau dari letak lokasi terjauh dari Kota Kabupaten Pidie adalah Kecamatan Tangse. Jalan menuju kecamatan tersebut cukup baik beraspal, namun ada lokasi penelitian jalannya berada di sisi tebing atau gunung, dikhawatirkan terjadi longsor apabila turun hujan deras. Lokasi Banda Aceh dan Pidie memiliki daya jangkauan yang berbeda satu dengan lain. Jangkauan lokasi penelitian terjauh terdapat di Kabupaten Pidie diperlukan waktu lebih lama untuk menuju lokasi penelitian ini, berbeda dengan lokasi penelitian di Kota Banda Aceh letaknya relatif berdekatan. Ditinjau dari korban tsunami tahun 2004, korban warga dan harta terbanyak berada di Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi keluarga kurang mampu di kedua lokasi dimaksud.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan (Istiana Hermawati dkk, 2015) yaitu penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*). Penggabungan beberapa metodologi ini menurut terminologi sebelumnya disebut '*triangulasi*'. *Triangulasi* oleh Denzin (1970) dikembangkan tidak sekedar penggabungan metode dan data saja, melainkan juga penggabungan para peneliti dan teori-teorinya. Denzin memandang bahwa penggabungan strategi penelitian sebagai cara mengkaji masalah penelitian yang sama akan memperkuat klaim yang menyangkut kesahihan kesimpulan yang dapat dicapai melalui data. Menurutnya, asumsi bahwa data diperoleh dari pendekatan yang diasumsikan berfokus pada masalah penelitian yang sama, konsisten dan terintegrasi dengan data yang lain. Sebaliknya, data yang berbeda tidak diharapkan konsisten tetapi data itu dipandang saling melengkapi.

Dalam konteks penelitian ini, kedua pendekatan digunakan dan diberikan kedudukan yang setara. Artinya, kedua metode digunakan secara simultan atau saling bertalian sejak masa survei lapangan, analisis data dan dalam penulisan laporan akhir. Pada saat survei lapangan, data ditekankan pada deskripsi obyektif dan penjelasan statistik tentang kondisi kemiskinan di lapangan. Data diperoleh dengan teknik observasi dan studi dokumenter sehingga diperoleh gambaran umum tentang masalah kemiskinan yang terjadi baik secara konseptual maupun empiris. Teknik ini didukung dengan daftar wawancara sehingga dapat digali informasi yang sangat spesifik. Melalui wawancara dapat dikumpulkan berbagai jenis data, yaitu data yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Kedua jenis data yang diperoleh kemudian dijadikan dasar untuk membangun model dan merumuskan hipotesa penelitian.

Dalam penelitian ini komponen kuantitatif dan kualitatif saling berproses dan memiliki bobot yang seimbang. Kedua pendekatan menuju pada pertanyaan-pertanyaan yang berbeda tetapi saling berhubungan sehingga kedua jenis data yang dihasilkan dapat saling melengkapi. Pendekatan *mixed method* yang peneliti gunakan, berupaya memadukan dua pendekatan dan data (kuantitatif dan kualitatif). Dengan memadukan pendekatan dan data, diharapkan dapat diperoleh data yang komprehensif.

Menentukan lokasi penelitian menurut Mo-leong (1990) mempertimbangkan teori substantif yaitu dengan pergi dan menjajagi lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian antara teori dengan kenyataan lapangan. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Sunyoto Usman (2015) menambahkan, bahwa pembahasan masalah kemiskinan harus memperhatikan *community setting* (lokasi). *Community setting* bisa dikategorikan berdasar wilayah, sektor dan modernitas. Kategori wilayah memperhatikan wilayah administratif (desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi), wilayah

geografis (misalnya *upland/low land* atau pesisir/pedalaman), dan wilayah demografis (misalnya padat penduduk dan jarang penduduk).

Community setting dengan kategori wilayah administrasi, yaitu dengan mengambil *setting* daerah perkotaan dan perdesaan. Dalam penelitian ini setiap provinsi diambil satu sampel daerah perkotaan dan perdesaan yaitu Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie sebagai representasi wilayah perkotaan dan perdesaan. Kota Banda Aceh ditetapkan lima kecamatan sebagai sampel penelitian yaitu Kecamatan Syiah Kuala, Bandar Raya, Lueng Bata, Ule Kareng dan Kecamatan Baiturrahman. Kabupaten Pidie ditetapkan lima kecamatan sebagai sampel penelitian yaitu Kecamatan Glumpang Tiga, Mutiara, Tiro/Truseb, Tangse dan Kecamatan Muara Tiga. Berdasar penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang kemiskinan yang lebih komprehensif, dalam skope lokal dan atau regional.

Populasi penelitian adalah seluruh keluarga fakir miskin yang teregister (penerima layanan program pemerintah seperti Raskin, Kartu Indonesia Sejahtera/KIS, Kartu Indonesia Sehat/KIS, Kartu Indonesia Pintar/KIP, Jamkesda) dan yang tidak teregister. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *Multi Stage Cluster Random Sampling* (ditentukan lima kecamatan sebagai sampel penelitian). Setiap kecamatan dilibatkan enam petugas pengumpul data dan masing-masing petugas akan mengumpulkan data dengan melibatkan 20 responden (keluarga miskin), dengan catatan 18 orang adalah responden yang teregister dan dua responden yang tidak teregister. Berdasar perhitungan tersebut, di Kota Banda Aceh ditetapkan 600 responden dan di Kabupaten Pidie 599 responden. Dari 600 responden terdiri dari 540 responden teregister dan 60 responden tidak teregister per lokasi. Sampel penelitian (responden) ditentukan secara acak/random. Data dan informasi yang terkumpul melalui angket akan diolah dan dianalisis secara kuantitatif (persentase) dan kualitatif untuk dinarasikan berdasarkan ragangan yang telah dibuat.

Kajian tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan di dua lokasi penelitian yakni di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie, ternyata sepaham dengan pandangan Andre Harsono (VOA 2016), seorang peneliti dari *Human Right Watch* kepada VOA menilai perubahan besar di Aceh 10 tahun setelah peristiwa tsunami, masih menyisakan pekerjaan rumah berupa kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Infrastruktur di Aceh bagus sekali, jalan, jembatan, kota bahkan taman-taman berkembang dengan baik, airport bagus. Dari segi kemiskinan Provinsi Aceh merupakan salah satu yang termiskin di Indonesia, ranking ke enam sehingga cukup menyedihkan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho (29 Desember 2016), menyatakan sebagian besar bencana alam tahun ini, terjadi di lokasi rawan bencana yang menjadi tempat tinggal masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Akibat 2.342 bencana yang terjadi di Indonesia pada 2016, diperkirakan dampak ekonomi terjadi beragam peristiwa yang mencapai Rp. 4,96 triliun. Ia mengatakan, dampak ekonomi bencana tahun ini lebih rendah dibandingkan 2015, meski jumlah peristiwa tahun ini lebih banyak.

Dampak ekonomi besar akibat bencana antara lain terjadi pada peristiwa banjir bandang di Garut, Jawa Barat, yang mencapai Rp 295,8 miliar. Gempa bumi di Pidie Jaya, Pidie, dan Bireun, Aceh, mencapai Rp 2,94 triliun. Banjir di Bima Rp1,04 triliun, banjir di Pangkal Pinang Rp 94 miliar, banjir Bengawan Solo meliputi Bojonegoro, Tuban, Lamongan, hingga Gresik sekitar Rp100 miliar. Hal ini membuat jumlah keluarga miskin meningkat, akibat mereka gagal panen, kehilangan aset produksi, dan terganggu kehidupan sehari-hari. Penyakit pun bermunculan, utang meningkat, kehidupan para keluarga miskin menjadi lebih sengsara karena mengalami proses pendalaman kemiskinan.

Ada kaitan sangat signifikan antara bencana, pembangunan, dan kemiskinan. Bencana dapat

langsung menyebabkan masyarakat jatuh miskin. Masyarakat yang miskin menjadi lebih miskin. Keluarga miskin yang setiap tahun selalu terkena bencana, akan kesulitan untuk memulihkan kembali kondisi ekonomi mereka. Sebab, sebelum mereka bisa pulih sudah kembali terkena bencana. Sutopo ingin masalah bencana menjadi perhatian bersama semua pihak. Tujuannya agar bisa mengupayakan langkah pencegahan, demi mengurangi dampak banjir terhadap masyarakat.

Pandangan berikut dari Muslahuddin Daud (dalam Ranny Virginia Utami CNN Indonesia, 2014), pengamat pembangunan Aceh, menyatakan pembangunan di Aceh pasca tsunami secara fisik memang bagus, namun pembangunan tersebut dirasa sia-sia karena tidak diselaraskan dengan pembangunan reguler. Muslahuddin menilai ada beberapa faktor yang membuat pembangunan di Aceh dinilai tidak maksimal dan hanya bagus secara fisik. Dia menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan pembangunan di Aceh dinilai tidak maksimal dan hanya bagus secara fisik.

Faktor pertama, menurut Muslahuddin, adalah segi dana yang masuk untuk pembangunan Aceh sebesar Rp. 80 triliun, sementara yang dibutuhkan untuk proyek rekonstruksi pasca bencana hanya Rp. 50 triliun. Jumlah dana lebih besar ini membuat pembangunan di Aceh menjadi sangat bagus, namun hanya secara fisik, misalnya pembangunan jalan, perumahan, pelabuhan dan perbaikan bandara.

Faktor kedua masalah penyerahan aset yang sudah dibangun dan diperbaiki oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh Nias. BRR Aceh-Nias adalah badan khusus yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bergerak menjadi ‘pusat’ keluar masuk dana berbagai pihak. Dana berasal dari APBN dan lembaga donor baik multilateral dan bilateral, Palang Merah Indonesia, internasional maupun negara lain, termasuk dari dunia usaha. Total 900 lembaga dengan dana sekitar US\$ 7,2 miliar dua per tiga bantuan dari luar negeri. Setelah

lebih dari lima tahun berdiri tahun 2009 BRR menyelesaikan tugas. Dari alokasi dana sekitar US\$6,7 juta, setidaknya telah terbangun lebih 140.000 rumah, 1.759 sekolah, 363 jembatan dan 13 airport.

Menurut pandangan Muslahuddin Daud, sejumlah aset tersebut tidak dirawat pemerintah lokal. “Pertanyaannya, siapa yang merawat? Tidak ada perawatan dan akhirnya tidak berfungsi dengan baik. Kondisi tersebut tidak selaras dengan pembangunan reguler, sebagai contoh program dari UNDP sudah dibangun tempat pembuangan sampah air tetapi tidak dipakai.

Muslahuddin juga menyoroti iklim investasi di Aceh yang dinilai kurang bersahabat karena permasalahan stabilitas daerah. Aksi kekerasan dan mentalitas keberpihakan oleh pejabat daerah setempat kerap menghambat masuknya investasi di Aceh. “Siapa yang masuk ke Aceh harus bayar ke beberapa pihak,” ujar Muslahuddin. “Ada 170 kesepakatan investasi yang saya ketahui masuk ke Aceh namun gagal, hanya tiga atau empat yang berhasil,” ujar Muslahuddin menambahkan. Ada ketidaksinambungan antara rekonstruksi pasca tsunami dengan pembangunan normal di Aceh. Rekonstruksi tidak mendorong perekonomian di Aceh. Para pebisnis tidak melihat Aceh sebagai peluang yang menarik karena mereka belum melihat adanya stabilitas di Aceh. Aceh masih mengimpor ekonomi, barang keluar aceh jumlahnya tidak signifikan. Ada beberapa hal yang dipandang berkontribusi dalam masalah ini. Selama lima tahun belakangan, warga Aceh termanjakan dengan bantuan. Kondisi inipun berlaku di level pemeritah yang nyatanya tidak berfungsi sebagai fasilitator. Ia bahkan menuturkan, investasi kurang maju di Aceh ada hubungannya dengan penerapan hukum syariah di sana. Para pengusaha besar berpikir ulang untuk masuk ke Aceh karena banyaknya batasan dalam hukum syariah. Rekonstruksi tak terlalu mendorong perekonomian di Aceh. Para pebisnis tak melihat Aceh sebagai peluang yang menarik karena mereka belum melihat adanya stabilitas di Aceh.

Pandangan Kuntoro (dalam Nurina Savitri, 2014), anggaran 7,2 milyar dolar, BRR (pimpinan Profesor Kuntoro) telah menjalankan salah satu program kemanusiaan terbesar dalam sejarah. Anggaran besar itu ternyata dinilai tak mampu mendongkrak perekonomian Aceh. “Belum ada investasi besar di Aceh yang masuk. Belum ada kebun baru, pertambangan baru,” ujar Profesor Kuntoro. Aceh masih mengimpor barang dari luar Aceh jumlahnya tidak signifikan. Berbicara dalam sebuah forum jurnalis asing di Jakarta beliau mengungkapkan salah satu penyesalan ketika purna tugas dari BRR. Beliau menyesalkan sistem yang sudah dibangun di Aceh tidak lagi digunakan. Masyarakat kurang diberi pemahaman terhadap sistem yang bisa membantu mereka untuk berkembang lebih jauh.

Pembangunan ekonomi yang berjalan lambat di Aceh justru berpangkal dari program pemulihan pasca bencana itu sendiri. Di Aceh yang terjadi adalah sebuah proses normal pasca konflik berdarah. Paling tidak dibutuhkan waktu 10 tahun untuk mereka belajar memerintah dengan baik. Profesor ini pun menimpali, apa yang terjadi di Aceh adalah sebuah proses normal pasca konflik berdarah, dibutuhkan waktu 10 tahun untuk belajar memerintah dengan baik. Kuntoro dan Muslahuddin mencontohkan sektor pariwisata sebagai bidang yang paling terdampak akibat penerapan hukum syariah. Potensi konflik berdarah seperti era sebelum perdamaian, diperkirakan tidak akan kembali menghantui Tanah Rencong.

Pandangan Sydney Jones (Direktur Institut Analisa Kebijakan Konflik) seorang peneliti terorisme di Asia Tenggara pada forum ‘10 Tahun Tsunami’ menyampaikan, “Kemungkinan untuk kembali ke situasi konflik sangat kecil, karena kelompok GAM sangat mahir memainkan peran mereka dalam politik Aceh. Setidaknya saya tak melihat adanya potensi konflik dalam jangka pendek dan menengah.”

Provinsi NAD memiliki otonomi khusus untuk melaksanakan syariat Islam yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Otonomi tersebut mencakup ketentuan pelaksanaan syariat Islam yang kemudian secara khusus diatur dengan Qanun Aceh.

Kota Banda Aceh pasca tsunami tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 sudah memiliki kemajuan yang sangat pesat dari segala aspek. Berdasar pengamatan parsial yang ‘penulis’ lakukan beberapa waktu yang lalu (bulan November dan Desember 2015 lalu), di Kota Banda Aceh sudah dilengkapi sarana, prasarana dan infrastruktur, baik secara sosial, ekonomi maupun teknologi. Ketersediaan kebutuhan primer dan sekunder secara sosial, ekonomi dan teknologi sudah terpenuhi. Salah satu yang menarik sudah tersedia jaringan internet dan terjangkau dari segala penjuru sudut kota, bahkan hampir semua warung kopi dan warung mie Aceh menyediakan *wifi*. Warga masyarakat di Kota Banda Aceh memiliki *laptop*, HP android dan sejenisnya sehingga dapat menikmati jendela informasi secara nasional dan internasional.

C. Kondisi Keluarga Kurang Mampu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan jenis kelamin, di Kota Banda Aceh laki-laki berjumlah 447 orang (74.50 persen) perempuan ada 153 orang (25.50 persen), di Kabupaten Pidie, laki-laki ada 445 orang (74.29 persen) dan perempuan ada 154 orang (25.71 persen). Ditinjau dari status perkawinan secara berurut di Kota Banda Aceh, kawin 430 orang (71.67 persen), cerai mati 121 orang (20.17 persen), cerai hidup 34 orang (5.67 persen), dan belum kawin ada lima orang (2.50 persen). Di Kabupaten Pidie, status kawin ada 439 orang (73.29 persen), cerai mati 104 orang (17.36 persen), cerai hidup ada 7.35 persen dan belum kawin ada 12 orang (2.00 persen) saja. Dari data tersebut diketahui bahwa hampir tidak ada perbedaan di antara kedua lokasi penelitian, dimana responden laki-laki lebih dominan jumlahnya dan 70 persen lebih berstatus kawin.

Pendidikan terakhir yang ditamatkan, responden di Kota Banda Aceh, yang menamatkan SMA/SMK/MA/ sederajat terdapat 235 orang (39.17 persen), untuk SMP/MTs/ Sederajat ada 131 orang (21.83 persen), dan SD/MI/ Sederajat ada 138 orang (23.00 persen), sedangkan di Kabupaten Pidie yang menamatkan SD/MI/ Sederajat 227 orang (37.90 persen) jumlahnya terbesar, disusul berikutnya tamat SMP/MTs/ Sederajat ada 138 orang (23.04 persen) dan tamat

SMA/SMK/MA/ Sederajat sebesar 75 orang (12.52 persen). Dari tampilan data diketahui bahwa responden di Kota Banda Aceh berpendidikan SLTA dan sejenisnya serta SLTP sejenis terbanyak ditamatkan oleh responden, sedang di Kabupaten Pidie terbanyak responden menamatkan pendidikan SD dan sejenisnya serta SLTP dan sejenisnya. Artinya dari sektor pendidikan kondisinya lebih baik di Kota Banda Aceh, bisa dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan

No	Pendidikan Terakhir	Banda Aceh		Pidie	
		f	%	f	%
1	Tidak Sekolah	26	4.33	60	10.02
2	Belum/Tidak Tamat SD/ Sederajat	60	10.00	97	16.19
3	SD/MI/ Sederajat	138	23.00	227	37.90
4	SMP/MTs/ Sederajat	131	21.83	138	23.04
5	SMA/SMK/MA/ Sederajat	235	39.17	75	12.52
6	Diploma I/II	1	0.17	1	0.17
7	Diploma III/ Sarjana Muda	5	0.83	0	0.00
8	Diploma IV/ S1	3	0.50	1	0.17
9	S2/ S3	1	0.17	0	0.00
Jumlah		600	100.00	599	100.00

Sumber Data : Data Primer 2015; N : 1.199

Kategori umur responden di kedua lokasi penelitian cukup variatif. Kategori umur terbesar berada pada rentang 40 – 49 tahun (Banda Aceh 210 orang atau 35.00 persen dan Kabupaten Pidie 237 orang atau 39.57 persen) dan urutan berikut pada umur 50 – 59 tahun (Banda Aceh 153 orang atau 25.50 persen dan Kabupaten Pidie 167 orang atau 27.88 persen), selanjutnya umur 30 – 39 tahun (Banda Aceh 146 orang atau 24.33 persen dan Kabupaten Pidie 121 orang atau 20.20 persen). Responden lain berusia antara 20 -29 tahun (Banda Aceh 6 orang atau 1.00 persen dan Kabupaten Pidie 11 orang atau 1.84 persen) dan umur >60 tahun (Banda Aceh 85 orang atau 14.17 persen dan Kabupaten Pidie 63 orang atau 10.52 persen). Dari data tersebut diketahui bahwa responden di kedua lokasi terbesar dengan kategori umur 40 – 49 tahun, diikuti kategori umur 50 – 59 tahun.

Pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan yang dilakoni responden di kedua lokasi pe-

nelitian terlihat sangat variatif sekali. Di Kota Banda Aceh pekerjaan utama, terbesar adalah buruh tidak tetap non pertanian yakni 195 orang (32.50 persen), disusul berikutnya usaha sendiri yakni 140 responden (23.33 persen), dan usaha dengan buruh tetap/tidak tetap ada 61 orang (10.17 persen). Pekerjaan sampingan di Kota Banda Aceh diketahui sebagian besar tidak bekerja yaitu 499 orang (83.17 persen). Di Kabupaten Pidie untuk pekerjaan utama terbanyak buruh pertanian tidak tetap ada 379 orang (63.27 persen) dan buruh tidak tetap non pertanian sebesar 111 orang (18.53 persen). Pekerjaan sampingan diketahui terbesar tidak bekerja yakni 379 orang (63.27 persen). Memiliki pekerjaan sampingan di Kabupaten Pidie adalah buruh pertanian tidak tetap diisi oleh 93 orang (15.53 persen) dan buruh tidak tetap non pertanian 65 orang (10.85 persen), dan pekerjaan sampingan lain 24 orang (4.01 persen). Tampilan data yang ada diketahui bahwa pada kedua lokasi penelitian

ini, pekerjaan utama terbesar sebagai buruh tidak tetap non pertanian, usaha sendiri (Kota Banda Aceh), buruh pertanian tidak tetap dan buruh tidak tetap nonpertanian (Kabupaten Pidie). Pekerjaan sampingan di Kota Banda Aceh ham-

pir semua responden menyatakan tidak memiliki pekerjaan sampingan dan di Kabupaten Pidie (63.27 persen) mengaku tidak memiliki (tidak bekerja) pekerjaan sampingan. Secara lengkap data tersaji pada tabel 2.

Tabel 2. Jenis Pekerjaan Utama dan Sampingan

No	Jenis Pekerjaan	Banda Aceh				Kabupaten Pidie			
		Utama		Sampingan		Utama		Sampingan	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Usaha Sendiri	140	23.33	42	7.00	15	2.50	5	0.83
2	Usaha degan buruh tetap/tidak tetap	61	10.17	8	1.33	21	3.51	30	5.01
3	Buruh/Karyawan/Pegawai tetap	43	7.17	9	1.50	9	1.50	3	0.50
4	Buruh Pertanian tidak Tetap	9	1.50	1	0.17	379	63.27	93	15.53
5	Buruh tidak tetap non Pertanian	195	32.50	20	3.33	111	18.53	65	10.85
6	Pensiun	4	0.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	Tidak Bekerja	86	14.33	499	83.17	42	7.01	379	63.27
8	Lainnya	62	10.33	21	3.50	22	3.67	24	4.01
Jumlah		600	100.00	600	100.00	599	100.00	599	100.00

Sumber Data : Data primer 2015; N: 1.199

Penghasilan keluarga perbulan di kedua lokasi penelitian terlihat ada perbedaan akan penerimaan yang diperoleh oleh responden. Responden di Kota Banda Aceh terbesar menerima penghasilan antara Rp.1.201.000 sampai Rp. 1.800.000,- per bulan yakni 192 orang (32.00 persen). Responden di Kabupaten Pidie terbesar yakni 214 orang (35.73 persen) menerima penghasilan antara Rp.601.000 sampai Rp. 1.200.000,- per bulan. Berikutnya, 143 orang (23.83 persen) responden di Kota Banda Aceh berpenghasilan antara Rp.601.000 sampai Rp.1.200.000,- dan di Kabupaten Pidie ada 154 orang (25.71 persen) berpenghasilan antara

1.201.000 sampai Rp.1.800.000,- Ada puluhan orang di kedua lokasi yang berpenghasilan lebih dari Rp.3.001.000,- (9.17 persen di Banda Aceh dan 4.67 persen di Kabupaten Pidie) dan juga dibawah atau sama dengan Rp.600.000,- (Banda Aceh 1.83 persen dan Kabupaten Pidie 8.51 persen).

Perbedaan penerimaan penghasilan tersebut memang wajar, karena lokasi responden bermukim dan bekerja/berusaha di perkotaan, sedang lainnya di daerah perdesaan, sehingga secara normatif tampak ada perbedaan penghasilan yang diterima. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Penghasilan Keluarga per Bulan

No	Penghasilan Keluarga/Bulan	Banda Aceh		Pidie	
		f	%	f	%
1	< Rp.600.000,-	11	1.83	51	8.51
2	Rp.601.000 – Rp.1.200.000,-	143	23.83	214	35.73
3	Rp.1.201.000 – Rp.1.800.000,-	192	32.00	154	25.71
4	Rp.1.801.000 – Rp.2.400.000,-	128	21.33	114	19.03
5	Rp.2.401.000 – Rp.3.000.000,-	71	11.83	38	6.34
6	>Rp.3.001.000,-	55	9.17	28	4.67
Jumlah		600	100.00	599	100.00

Sumber Data : Data Primer 2015; N : 1.199

Data selanjutnya adalah mengenai pengeluaran keluarga responden perbulan baik di Kota Banda Aceh maupun di Kabupaten Pidie. Dari data yang ada diketahui bahwa pengeluaran keluarga per bulan responden di Kota Banda Aceh hampir sama jumlahnya yakni untuk konsumsi antara Rp.601.000,- sampai 1.200.000,- yakni 272 orang (45.33 persen) dan Rp. 1.210.000,- sampai Rp.1.800.000,- yakni 214 orang (35.67 persen). Ada juga responden yang pengeluaran antara Rp.1.801.000,- sampai Rp.2.400.000,- yaitu 114 orang (19.00 persen). Pengeluaran non konsumsi terbesar antara Rp.601.000,- sampai Rp.1.200.000,- yaitu 428 orang (71.33 persen).

Pengeluaran responden di Kabupaten Pidie terbesar pada pengeluaran antara Rp.601.000,- sampai Rp.1.200.000,- yakni 431 orang (71.95

persen), dan untuk pengeluaran non konsumsi hampir sama jumlahnya antara pengeluaran Rp. 1.801.000,- sampai Rp.2.400.000,- yaitu 214 orang (35.73 persen) dan pengeluaran antara Rp.1.201.000,- sampai Rp.1.800.000,- yaitu 210 orang (35.06 persen). Namun demikian untuk pengeluaran non konsumsi >Rp.3.000.000,- juga ada sebesar 68 orang (11.35 persen). Perbedaan pengeluaran ini karena perbedaan domisili responden, ada yang bertempat tinggal di daerah perkotaan, dan ada responden yang bermukim di daerah perdesaan, sehingga secara wajar terdapat perbedaan pengeluaran untuk kebutuhan hidup responden dan keluarganya. Gambaran pengeluaran keluarga per bulan ini dapat diketahui pada tabel 4.

Tabel 4. Pengeluaran Keluarga per Bulan

No	Pengeluaran Keluarga/ Bulan	Banda Aceh				Kabupaten Pidie			
		Konsumsi		Non Konsumsi		Konsumsi		Non Konsumsi	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	<Rp.600.000,-	0	0.00	7	1.17	0	0.00	0	0.00
2	Rp.601.000 – Rp.1.200.000,-	272	45.67	428	71.33	431	71.95	6	1.00
3	Rp.1.201.000 – Rp.1.800.000,-	214	35.67	136	22.67	163	27.21	210	35.06
4	Rp.1.801.000 – Rp.2.400.000,-	114	19.00	24	4.00	2	0.33	214	35.73
5	Rp.2.401.000 – Rp.3.000.000,-	0	0.00	2	0.33	3	0.50	101	16.86
6	> Rp.3.000.000,-	0	0.00	3	0.50	0	0.00	68	11.35
Jumlah		600	100.00	600	100.00	599	100.00	599	100.00

Sumber Data : Data Primer 2015; N : 1.199

Status kepemilikan rumah di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie, sebagian besar merupakan milik sendiri. Kondisi ini ditunjukkan responden di Kota Banda Aceh ada sebesar 423 orang (70.50 persen), dan lebih besar jumlahnya dari kepemilikan rumah di Kabupaten Pidie yakni 483 orang (80.63 persen). Status kepemilikan lain adalah kontak/sewa dan bebas

sewa/menumpang. Kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari responden telah memiliki rumah sendiri yang digunakan bersama dengan keluarga.

Responden di kedua lokasi bebas sewa/menumpang dengan keluarga besar. Data ini dapat diperhatikan pada tabel 5.

Tabel 5. Status Kepemilikan Rumah

No	Status Kepemilikan	Banda Aceh		Pidie	
		f	%	f	%
1	Milik Sendiri	423	70.50	483	80.63
2	Kontrak/Sewa	64	10.67	13	2.17
3	Bebas Sewa/Menumpang	111	18.50	103	17.20
4	Rumah Dinas	0	0.00	0	0.00
5	Lainnya	2	0.33	0	0.00
Jumlah		600	100.00	599	100.00

Sumber Data : Data Primer 2015; N : 1.199

Jenis lantai rumah terluas yang ditempati baik di Kota Banda Aceh maupun Kabupaten Pidie, lebih dari 500 (lima ratus) responden berlantai semen/papan/kayu berkualitas rendah/bambu (504 orang atau 84.00 persen di Banda Aceh, 523 orang atau 87.31 persen di Kabupaten Pidie). Sisanya berlantai tegel/keramik/marmer/kayu berkualitas tinggi dan berlantai tanah.

Data terkait atap rumah terluas yang digunakan oleh responden di kedua lokasi penelitian, terbesar atap berupa seng/asbes, 586 orang atau 97.67 persen digunakan responden di Kota Banda Aceh dan 441 orang atau 73.62 persen digunakan responden di Kabupaten Pidie. Jenis atap lain hanya sedikit yang menggunakan (beton/genteng/sirap) dan ijuk/rumbia. Kecuali di Kabupaten Pidie atap ijuk/rumbia digunakan oleh 155 orang (25.88 persen).

Jenis dinding terluas yang digunakan responden di kedua lokasi terbanyak adalah tembok tanpa plester/kayu berkualitas rendah/seng (392 orang atau 65.33 persen di Banda Aceh dan 519 orang atau 86.64 persen di Kabupaten Pidie). Rumah dengan dinding tembok di plester/kayu berkualitas tinggi khusus di Kota Banda Aceh cukup banyak, yakni 168 orang atau 28.00 persen, sedangkan di Kabupaten Pidie relatif sedikit yakni hanya 23 orang atau 3.84 persen. Rumah dengan jenis dinding bambu dan lainnya relatif sedikit yang menggunakan di kedua lokasi ini.

Jenis lantai, jenis atap yang digunakan dan jenis dinding baik di Kota Banda Aceh maupun di Kabupaten Pidie terlihat sama pemanfaatannya. Kondisinya dikarenakan perekonomian

responden di kedua lokasi hampir sama (seperti yang termaktub dalam beberapa tabel diatas), hanya sebagian saja responden di Kota Banda Aceh kondisinya lebih bagus karena mereka dapat bantuan perbaikan rumah dari pemerintah atau non pemerintah pasca bencana beberapa waktu yang lalu.

Berikutnya adalah sumber penerangan utama yang dimanfaatkan oleh responden di kedua lokasi baik apakah itu di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie. Dari data yang diperoleh bahwa sebagian besar responden telah menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utama. 580 orang atau 96.67 persen di Kota Banda Aceh dan 557 orang atau 92.99 persen di Kabupaten Pidie. Sebagian kecil saja responden yang memanfaatkan listrik non PLN dan lampu minyak sebagai sumber penerangan utama. Kondisi ini menggambarkan bahwa listrik PLN telah digunakan oleh sebagian besar responden sebagai sarana penerangan dan sarana lain yang memanfaatkan listrik.

Sumber air yang dimanfaatkan oleh responden di kedua lokasi penelitian terbesar menggunakan sumur yakni 427 orang atau 71.17 persen di Banda Aceh dan 516 orang atau 86.14 persen di Kabupaten Pidie. Khusus di kota Banda Aceh cukup banyak yang menggunakan ledeng sebagai sumber air (165 orang atau 27.50 persen). Sumber air lain seperti air hujan/air sungai dan lainnya baik di Banda Aceh maupun di Pidie jumlahnya sedikit. Kondisi ini menginformasikan bahwa sumber air dari sumur masih banyak digunakan oleh responden dan keluarga sebagai kebutuhan air bersih sehari-hari.

Sumber air minum yang dimanfaatkan responden di kedua lokasi sangat variatif jumlahnya. Kota Banda Aceh terbanyak menggunakan air kemasan sebagai sumber air minum (277 orang atau 46.17 persen), sedang di Kabupaten Pidie terbanyak menggunakan sumur sebagai sumber air minum (492 orang atau 82.14 persen). Terdapat perbedaan dalam penggunaan sumber

air minum di kedua lokasi penelitian ini. Hal ini menunjukkan tentang pemanfaatannya, dan kemungkinan juga sumber air yang ada (khusus di Kota Banda Aceh kurang layak diminum karena mengandung zat tertentu atau lokasi rumah mereka dekat dengan laut). Secara lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Status Kepemilikan Rumah

No.	Sumber Air Minum	Banda Aceh		Kabupaten Pidie	
		f	%	f	%
1	Kemasan	277	46.17	22	3.67
2	Ledeng	78	13.00	50	8.35
3	Sumur	69	11.50	492	82.14
4	Air Hujan/Sungai	0	0.00	23	3.84
5	Lainnya	176	29.33	12	2.00
Jumlah		600	100.00	599	100.00

Sumber Data : Data Primer 2015; N : 1.199

Bahan bakar utama yang digunakan khusus untuk Kota Banda Aceh hampir seluruh responden yaitu 523 orang (87.17 persen) menggunakan listrik/gas (dalam hal ini hasil pengamatan peneliti di lapangan, responden menggunakan gas sebagai bahan bakar utama). Di Kabupaten Pidie hanya 337 orang atau 56.26 persen saja yang menggunakan listrik/gas, terbesar kedua mereka menggunakan kayu/arang sebagai bahan bakar utamanya. Sisanya di kedua lokasi menggunakan minyak tanah dan lain sebagai bahan bakar utama.

Fasilitas MCK yang digunakan khusus untuk Kota Banda Aceh, hampir seluruh responden 516 orang (86.00 persen) merupakan milik sendiri. Di

Kabupaten Pidie fasilitas MCK sangat variatif, terbesar 219 orang (36.56 persen) merupakan fasilitas MCK umum, 116 orang (19.37 persen) fasilitas MCK nya milik sendiri dan 108 orang (18.03 persen) fasilitas MCK bersama. Jumlah responden di Kabupaten Pidie cukup besar yang tidak punya fasilitas MCK yaitu ada 156 orang (24.04 persen).

Kondisi tempat tinggal keluarga kurang mampu di kedua lokasi ini bertumpu pada kondisi sedang, yakni 374 orang (62.33 persen) di Kota Banda Aceh dan 426 orang (71.12 persen) di Kabupaten Pidie. Responden lain tersebar pada kondisi tempat tinggal baik dan rusak. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel 7.

Tabel 7. Kondisi Tempat Tinggal

No	Kondisi Tempat Tinggal	Banda Aceh		Kabupaten Pidie	
		f	%	f	%
1	Baik	121	20.17	17	2.84
2	Sedang	374	62.33	426	72.12
3	Rusak	105	17.50	156	26.04
Jumlah		600	100.00	599	100.00

Sumber Data : Data Primer 2015; N : 1.199

Data berikut pada tabel 8 menyajikan tentang kepemilikan aset baik responden di Kota Banda Aceh maupun di Kabupaten Pidie. Dari data yang terkumpul menunjukkan responden di Kota Banda Aceh yang memiliki HP cukup besar jumlahnya (487 orang atau 81.17 persen), sepeda motor (445 orang atau 74.17 persen), lemari es (396 orang atau 66.00 persen) dan TV>21” (316 orang atau 52.67 persen). Kepemilikan aset di

Kabupaten Pidie sebarannya hampir sama dengan Kota Banda Aceh. Dari data yang terkumpul kepemilikan sepeda motor dimiliki oleh 275 orang (45.91 persen), kemudian HP dimiliki oleh 198 orang (33.06 persen), sepeda oleh 160 orang (26.71 persen) dan ternak dimiliki oleh 153 orang (25.54 persen) serta kepemilikan TV>21” dimiliki oleh 135 orang (22.54 persen).

Tabel 8. Kepemilikan Aset

No	Kepemilikan Aset	Banda Aceh		Kabupaten Pidie	
		f	%	f	%
1	Tanah/Sawah/Kebun/Tambak	37	6.17	141	23.50
2	Perhiasan	54	9.00	14	2.34
3	Tabungan	64	10.67	27	4.51
4	Ternak	77	12.83	153	25.54
5	Perahu Motor	0	0.00	2	0.33
6	Sepeda Motor	445	74.17	275	45.91
7	Tempat usaha	51	8.50	23	3.84
8	Sepeda	138	23.00	160	26.71
9	Perahu /Sampan	8	1.33	2	0.33
10	Lemari Es	396	66.00	47	7.85
11	Mesin Cuci	40	6.67	0	0.00
12	TV > 21”	316	52.67	135	22.54
13	HP	487	81.17	198	33.06
14	Lainnya	6	1.00	4	0.67
Jumlah		600	100.00	599	100.00

Sumber Data : Data Primer 2015; N : 1.199

Data diatas menjelaskan tentang kondisi dan keberadaan responden keluarga kurang mampu terhadap kehidupan dan penghidupannya di masyarakat, baik responden di Kota Banda Aceh maupun responden di Kabupaten Pidie. Terjadi pergeseran tentang asumsi keluarga kurang mampu di Aceh terhadap kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada kepemilikan aset responden, sepeda motor, HP dan TV >21” ternyata dimiliki oleh keluarga kurang mampu di kedua lokasi penelitian ini. Artinya sudah ada pergeseran tentang persepsi terhadap kepemilikan barang bukan menjadi kebutuhan sekunder tetapi sudah mengarah pada kebutuhan primer yang responden gunakan sehari-hari bersama keluarga.

Faktor keluarga kurang mampu di kedua lokasi penelitian dilihat dari penghasilan responden yang diterima setiap bulan baik dari hasil usaha

maupun lain, yang berubah secara signifikan sesuai peraturan yang dibuat pemerintah. Jumlah penghasilan yang mereka terima baik di Kota Banda Aceh maupun Kabupaten Pidie antara Rp.1.200.000.- sampai dengan Rp. 2.400.000,- per bulan. Pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga responden di Kota Banda Aceh antara Rp.1.200.000.- sampai dengan Rp.2.400.000,- dan sedikit berbeda dengan responden di Kabupaten Pidie yakni Rp.1.200.000,- sampai dengan Rp.1.800.000,- per bulan.

Berdasarkan data yang tersaji kiranya perlu ada pemikiran yang komprehensif akan perubahan persepsi tentang keluarga kurang mampu atau keluarga miskin khususnya di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie terhadap kepemilikan barang dan penghasilan serta pengeluaran per bulan.

D. Penutup

Berdasar uraian analisa dan interpretasi data yang tersaji dapat disimpulkan bahwa di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie masih terdapat warga masyarakat yang hidup kekurangan atau keluarga kurang mampu. Khusus di Kota Banda Aceh cukup besar responden dan keluarga yang memperoleh bantuan perbaikan rumah dari pemerintah, NGO, masyarakat peduli keluarga korban gempa dan tsunami. Khusus untuk kota kriteria kemiskinan ditinjau dari rumah, tidak serta merta dapat mengkategorikannya. Diperlukan pengamatan lapangan untuk dapat menentukan keluarga miskin di daerah ini.

Ditinjau dari penghasilan kepala keluarga per bulan ditemukan datanya jauh diatas penghasilan keluarga miskin yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp. 600.000,-/bulan. Pada umumnya atau sebagian besar penghasilan responden baik di Kota Banda Aceh maupun Kabupaten Pidie antara Rp.1.200.000.- sampai dengan Rp. 2.400.000,- per bulan. Pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga responden di Kota Banda Aceh antara Rp.1.200.000.- sampai dengan Rp.2.400.000,- dan sedikit berbeda dengan responden di Kabupaten Pidie yakni Rp.1.200.000,- sampai dengan Rp.1.800.000,- per bulan.

Kepemilikan barang yang beberapa tahun terdahulu merupakan barang sekunder dan tergolong mewah/mahal, di kedua lokasi penelitian ini barang tersebut sudah merupakan kebutuhan primer dan menjadi keperluan atau kebutuhan keseharian. Barang yang dimaksud adalah HP, sepeda motor, TV diatas 14 inci dan kulkas. Harga dan kondisi barang dimaksud merupakan barang bekas dengan harga yang relatif murah. Terkait dengan kepemilikan barang dimaksud, sebagian besar mereka telah menggunakan listrik PLN sebagai sarana penerangan dan kegiatan/kemanfaatan lainnya. Dari sisi lain bahwa upaya pemerintah (pusat dan daerah) meluaskan jangkauan kelistrikan di masyarakat sudah cukup berhasil, sudah digunakannya listrik PLN sebagai penerangan dan terkait kegiatan lain yang

menggunakan listrik, khususnya pasca tsunami di Kota Banda Aceh.

Rekomendasi: penelitian ditinjau dari aspek atau kriteria kemiskinan yang ada dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri terkait dengan kemiskinan perlu disesuaikan atau ditinjau kembali dengan kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakat kurang mampu (masyarakat miskin), khusus di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie. Penghasilan perbulan dan kepemilikan barang (yang dahulu merupakan kebutuhan sekunder), telah berubah menjadi kebutuhan primer. Termasuk di dalamnya penggunaan dan pemanfaatan listrik PLN untuk mendukung kegiatan/kemanfaatan listrik lain.

Aspek atau kriteria tersebut perlu ditinjau agar sesuai dengan kenyataan di kehidupan dan penghidupan masyarakat di era sekarang, khususnya di lokasi penelitian ini yaitu Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie dan umumnya di Provinsi Aceh.

Ucapan Terima Kasih

Dengan selesainya tulisan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie, tenaga pengumpul data, aparat pemerintah setempat dan lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang telah membantu terlaksananya penelitian ini, kami ucapkan terima kasih sehingga hasil penelitian ini dapat tersaji. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

Pustaka Acuan

- Andrea Harsono, (2016). *Pasca 10 Tahun Tsunami, Masyarakat Aceh Kini Berhadapan Dengan Formalisasi Islam*, Voice Of America, Berita/Indonesia.
- Abdul Ghani Salleh, (2005). *Perencanaan Kota Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami*, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang Malaysia, Jurnal Arsitektur "Atrium" Vol. 02.No.01 April 2005.
- Aryo Wicaksono, Moh.Nadlir, (2016). *Jumlah Keluarga Miskin di Indonesia Meningkat Akibat Bencana, Belum Selesai Recovery Mereka Kena Bencana Lagi*, Viva. Co.Id,29 Desember 2016.

-, *Dampak Ekonomi Akibat Bencana Capai Rp.4.96 Triliun Paling Banyak Dialami Gempa Bumi di Aceh Desember ini*, Viva.Co.Id, 29 Desember 2016.
- Brithe Mikkelsen, (2001). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan, Sebuah Buku Pegangan Bagi Para praktisi Lapangan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Biro Pusat Statistik dan Departemen Sosial RI, (2000). *Analisa data makro penyanggah masalahkesejahteraan sosial hasil susenas 2000*. Jakarta: BPS RI dan Depsos RI.
- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, (2015). data PMKS dan PSKS Kota Banda Aceh.
- Departemen Sosial, (2006). *Pemetaan kemiskinan Kecamatan di Indonesia tahun 2006*. Jakarta: Badiklit Kesos dan Pusdatin Kesos Depsos RI
- Gunawan Sumodiningrat, (2005). *Strategi Pembangunan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta.
- Istiana Hermawati dkk, (2015). *Proposal Penelitian Pengkajian Konsep dan Indikator kemiskinan*, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Rani Virginia Utami, (2014). *Satu Dekade Tsunami Aceh, Pembangunan Aceh Hanya Unggul Secara Fisik*, CNN Indonesia. (19.12.2014)
- Sunyoto Usman, (2015). *Tanggapan Pakar terhadap Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan*. Kementerian Sosial RI. Yogyakarta: tidak dipublikasikan.
- Mubyarto, (2003). *Penanggulangan kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: artikel dalam jurnal Pemberdayaan Rakyat, tahun ke II no 2, April 2003
- Munandar.S, (1986). *Ilmu Sosial dasar*, Bandung, Eresco.
- Nurina Savitri, (2014). *Satu Dekade Tsunami, Pembangunan Ekonomi Di Aceh Masih Lambat*, Radio Australia (12.12.2014).
- Jawa Post, *Inovasi Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal* (1), 21/03/2015,04.30 WIB.
- Oscar Lewis, Scientific American, Oktober 1966, dikutip dalam Ryan,1976.
- Undang-undang No 11 tahun 2009 *tentang Kesejahteraan sosial*
- Undang-undang No 13/2011 *tentang Penanganan Fakir Miskin*
- United Nation, (2001). *World development report 2000/2001: Attacking Poverty*. Washington Dc: Oxford University Press.
- Publikasi Elektronik :**
- Sapariah Saturi, *Melihat Pembangunan Aceh Pasca tsunami*, Desember 28,2014.MONGABAY.CO.ID
- Fajar Weiz, (2011). *Makalah kemiskinan* (Sosiologi), fajarweiz.blogspot.co.id/2011 diunduh tgl 8-04-2016.
- Paulus Wirotomo, (2013). *Konsep Pembangunan Sosial Sudut Pandang Sosiologi*, Paulus Wirotomo.blogspot.co.id (26-10-2013), diunduh 7-04-2016
- Teuku Rahmat Danil Cotseurani, *Seharusnya Pemerintah Aceh Terapkan E-Government dan E-Budgeting*, Kompasiana, diunduh 27-4-2016.
- Voice of America, *Berita Indonesia, Pasca 10 tahun Tsunami, Masyarakat Aceh Kini Berhadapan Dengan Formalisasi Islam*, diunduh 23-03-2016.

Pendampingan Women Crisis Center ‘Aisiyiyah’ pada Anak Korban Inses

Assistance of “Aisiyiyah” Women Crisis Center to Children of Incest Victims

Tateki Yoga Tursilarini

Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta

Email: tursilarini@gmail.com HP. 08121584184

Diterima 30 Oktober 2017, diperbaiki 24 November 2017, disetujui 3 Desember 2017

Abstract

Bodies and institutions that handle sexual violence cases, particularly incest case, still need more holistic effort in doing so by involving various bodies or institutions of children care. This study is aimed to describe the process of handling incest violence and the form of assistance for victims of incest violence. Data sources are WCC staffs, volunteers/ companions, victims and victim's parents, Trauma Center Protection Home (Rumah Perlindungan Trauma Center = RPTC). Techniques of data collecting were carried out through interview and observation, descriptive qualitative data analysis on such cases and through interventions conducted by WCC Aisiyiyah to the victims. The research's findings showed that there were some stages of service process as follows: Doing initial introduction; Making contact to the victims and providing contract of handling; Assessing the victims; Undertaking an intervention plan; Implementing the intervention stages; Conducting evaluation and termination. Forms of assistance undertaken by WCC Aisiyiyah include these followings: legal consultations; referring to a psychologist; litigation assistance / legal assistance; approach to victims and assistance for victims; referring victims to come to the assigned shelters for trauma healing; reporting to the legal side; motivating victims; social assistance according to the needs of victims; referring the victims to attend the shelter of Social Bodies (Dinas Sosial) or RPTC to get the psychological services, religious advices, and health service; providing UEP assistance for victims for the sake of their survival effort; offering assistance in undergoing the authority's investigation (BAP), or that of visum et repertum and trial process. This research recommends several points as follows: 1) the need of top-down socialization activities on Child Protection Act No. 23/2002 to the lowest level of society's authorities (RT / RW), to families, to schools and religious leaders and to community. 2) preferences of taking side for legal authorities to violence victim children, 3) the need of assistance for victims by the time of reporting the case to the police / authorities, so that children's rights are protected as the victims of sexual violence/ incest. 4) the need of increasing the involvement of related foundation or social institutions to provide any necessary possible solution for the sexual violence/ incest victims children.

Keywords: *assistance; WCC Aisiyiyah; victim children; incest*

Abstrak

Lembaga dan institusi yang menangani kasus kekerasan seksual khususnya inses masih memerlukan upaya menyeluruh dengan melibatkan berbagai instansi atau lembaga peduli anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penanganan kekerasan inses dan bentuk pendampingan bagi korban kekerasan (inses). Sumber data adalah pengurus, relawan atau pendamping, korban, dan orangtua korban, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC). Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, analisis data deskriptif kualitatif tentang kasus-kasus serta intervensi yang dilakukan WCC Aisiyiyah terhadap korban. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan proses pelayanan sebagai berikut: pengenalan awal, melakukan kontak dan kontrak, assesmen korban, melakukan rencana intervensi, melaksanakan tahapan intervensi, evaluasi, dan terminasi. Bentuk pendampingan yang dilakukan WCC Aisiyiyah meliputi hal-hal berikut: konsultasi hukum; merujuk ke psikolog; pendampingan litigasi atau bantuan hukum; pendekatan dan pendampingan korban; korban dirujuk ke shelter guna penyembuhan trauma; pelaporan ke pihak hukum; memberi motivasi; pendampingan sosial sesuai kebutuhan korban; merujuk korban ke shelter Dinas Sosial atau RPTC untuk mendapatkan pelayanan psikologis, agama, kesehatan; memberikan bantuan UEP untuk korban guna keberlangsungan hidup korban; pendampingan BAP, visum dan di pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan: 1) Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sampai ke level paling bawah tingkat RT/RW, keluarga, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat. 2) Keberpihakan penegak hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan, 3) Pendampingan pada saat korban melakukan pengaduan kepada pihak berwajib atau kepolisian, sehingga anak terlindungi haknya sebagai anak yang menjadi korban kekerasan seksual (inses). 4) Peningkatan keterlibatan yayasan atau panti sosial untuk memberikan solusi meskipun bersifat sementara bagi anak hasil kekerasan seksual (inses).

Kata kunci: *pendampingan; WCC Aisiyiyah; anak korban; inses*

A. Pendahuluan

Kasus tindak kekerasan terhadap anak seolah-olah tidak ada habisnya, bahkan ada kecenderungan semakin mengawatirkan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak sebagai individu yang memiliki hak untuk hidup. Pemberitaan di berbagai media massa dan elektronik tentang kekerasan anak di beberapa kota di Indonesia, seperti berita tentang kasus kekerasan anak (YY) di Bengkulu media Kompas, Rabu 4 Maret 2016, "Kasus YY Puncak Gunung Es", Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Terus Meningkat. Data kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin mengkhawatirkan, terbukti hasil Susenas BPS, bahwa pada tahun 2014 jumlah anak korban kekerasan mencapai 247.610 jiwa. Dari jumlah tersebut diperkirakan 74.283 jiwa diantaranya adalah korban kekerasan seksual. Menurut catatan KPAI, dari seluruh kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dari tahun 2011 hingga 2016, diperkirakan 30 persen diantaranya atau sekitar 1.965 kasus adalah kekerasan seksual terhadap anak.

Harian Republika, Senin 16 Januari 2017 "Kekerasan Seksual Marak", kasus kekerasan anak tahun 2016 sebanyak 254 kasus terdiri dari 134 kasus korban, 149 kasus pelaku, 30 kasus penyelidikan, 161 kasus penyidikan, 28 kasus berkas lengkap, 12 kasus dihentikan (Sumber: Direktorat Pidum Bareskrim Polri). Sejumlah kasus kekerasan seksual anak dan remaja yang kembali terjadi di tahun 2017 menggambarkan, bahwa kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Kasus kekerasan seksual dapat terjadi baik di ranah domestik maupun publik. Kekerasan domestik dimaksudkan adalah kekerasan seksual dimana pelaku masih memiliki hubungan kekerabatan dengan korban, misal ayah, kakak kandung, adik kandung, saudara yang tinggal dalam satu rumah.

Pengertian lain tentang kekerasan seksual yang mana pelaku masih ada hubungan darah atau kerabat dinamakan inses. Inses termasuk

dalam golongan perkosaan, tindakan perkosaan atau kejahatan seksual ini secara umum dialami oleh perempuan yang masih anak-anak atau remaja, pelaku dan korban berasal dari stratifikasi sosial yang rendah. Kekerasan seksual ini dapat terjadi karena faktor lingkungan, latar belakang psikis pelaku di masa lalu yang dapat mempengaruhi perilaku pelaku sehingga terjadi kekerasan seksual. Kekerasan interpersonal, termasuk kekerasan fisik dan seksual seperti pemerkosaan, inses dan pembunuhan sangat umum terjadi pada wanita (Stenius dan Veysey, 2005).

Menurut Mulyanah Kusumah (1981: 4), dilihat dari bentuk atau jenis perkosaan yang terjadi di Indonesia, perkosaan dapat diklasifikasikan ke dalam lima jenis bentuk perkosaan, yakni: 1) Perkosaan sadis (*sadistic rape*), dalam hal ini pelaku melaksanakan perkosaan dengan menggunakan kekuatan fisik, dan melakukannya dengan terlebih dahulu menyakiti si korban, seperti memukul, menyiksa korban dan sebagainya. Pada tipe ini, seksualitas dan agresi berpadu dalam bentuk kekerasan yang merusak. Pelaku tidak menikmati kesenangan melalui persetubuhan yang dilakukan tetapi melalui penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan terhadap alat kelamin dan tubuh korban. 2) *Anger rape*, yakni penganiayaan seksual yang bercirikan perasaan geram dan amarah yang tertahan. Menurut para ahli, tindakan ini dilakukan karena adanya rasa jengkel, frustrasi, kelemahan dan kekecewaan dalam hidup akibat adanya peningkatan harkat martabat seorang perempuan, di tengah-tengah masyarakat. Perbuatan biasanya dilakukan dengan beramai-ramai oleh sekelompok orang (*gang rape*). Pelaku ingin menunjukkan kemaskulinannya terhadap seorang perempuan. Tindakan ini juga dilakukan dengan kekerasan yang bersifat fisik. 3) Perkosaan karena adanya dominasi (*domination rape*), merupakan bentuk perkosaan dimana pelaku mempergunakan kekuasaannya dari segi sosial ekonomi dan mendominasi bagian penting kehidupan korban dari aspek keuangan. Pelaku mengadakan hubungan sek-

sual dengan korban dengan ancaman kehilangan pekerjaan atau tidak akan diberi gaji atau uang tertentu bila tidak bersedia melakukan persetubuhan dengan pelaku. Misalnya seorang pembantu yang dipaksa melayani kebutuhan biologis majikannya karena diancam akan dihentikan dari pekerjaannya apabila tidak mau melakukan senggama. Pelaku menyakiti korban dari segi batiniah dan sekaligus menikmati kepuasan seksual dari persetubuhan yang dilakukan. 4) *Exploitation rape*, yang mana pelaku dalam hal ini hampir sama dengan *domination rape*, yakni melakukan perkosaan dengan mempergunakan suatu kekuasaan yang dimilikinya. Korban sangat tergantung kepada pelaku dari segi ekonomi, sosial dan emosional. Pelaku melakukan penekanan dalam setiap kesempatan yang ada untuk dapat melakukan hubungan seksual dengan korban, dengan mengambil kesempatan yang ada dari posisi rawan perempuan memilih pemikiran rasional untuk menyelamatkan kebutuhan perekonomian hidupnya meskipun untuk itu harus mengorbankan dirinya dalam melakukan hubungan seksual. 5) *Seductive rape*, adalah merupakan salah satu bentuk perkosaan dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik oleh korban dan terjadi pada situasi-situasi tertentu yang diciptakan oleh kedua belah pihak. Pada awalnya kedua belah pihak tidak terpikir akan melakukan hubungan badan, tetapi karena suatu hal yang tidak terduga, pelaku merasa terangsang secara spontanitas untuk melakukan perkosaan terhadap korban. Perbuatan tersebut dapat terjadi karena paksaan, dan dapat juga terjadi karena pelaku menimbulkan rangsangan-rangsangan yang dapat menimbulkan birahi sang korban. Misalnya dua sejoli yang sedang bermesraan, perempuan tidak menyadari, bahwa rangsangan yang dilakukan oleh sang pria adalah untuk menimbulkan birahinya, sehingga tidak menyadari, bahwa pada dasarnya telah melakukan perkosaan tanpa disadari korban.

Pemahaman tentang kekerasan seksual berdasarkan pelaku, *The nation center on child abuse and neglect* 1985, (Tower, 2002) menyebutkan

beberapa jenis kekerasan seksual berdasarkan pelakunya, yaitu: 1) Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga. 2) Kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga. 3) Kekerasan Perspektif Gender paham gender memunculkan perbedaan laki-laki dan perempuan, yang sementara diyakini sebagai kodrat Tuhan sehingga tidak dapat dirubah. Oleh karena gender bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berfikir dan berperilaku dalam masyarakat. Perbedaan perempuan dan laki-laki akibat gender ternyata melahirkan ketidakadilan dalam bentuk sub-ordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, *stereotype*. Bentuk ketidakadilan tersebut merupakan sumber utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan khususnya pada anak perempuan.

Inses berasal dari kata bahasa latin *Cestus* yang berarti murni. Jadi, *insesus* berarti tidak murni. Hubungan sedarah (Inggris: *incest*) adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah, misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Pengertian inses menurut para ahli diantaranya menurut Sawitri Supardi Sadarjoen adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat seperti ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-lakinya atau antar sesama keluarga kandung. Bahwa inses juga memiliki pemahaman yang lebih luas lagi yaitu terkait hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali, dan perbuatan inses tersebut bertentangan dengan adat dan budaya suatu masyarakat.

Menurut Kartini Kartono (1989: 225), inses adalah hubungan seks diantara laki-laki dan perempuan di dalam atau di luar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dengan hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali. Menurut Supatrik (1995: 101), taraf *koitus* antara anggota keluarga misalnya antara kakak lelaki dengan adik perempuannya yang dimaksud hubungan seksual, atau antara ayah dengan

anak perempuannya yang dilarang oleh adat dan kebudayaan. Salah satu ahli berpendapat inses akan berdampak terhadap kehancuran suatu keluarga, bahkan generasi ataupun suku bangsa tertentu. Menurut Freud (dalam Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005: 74) dasar tabu inses adalah apabila inses dibenarkan maka akan terjadi persaingan, perebutan pasangan dalam lingkungan, antara ayah-ibu-saudara. Jadi persaingan atau perbuatan semacam itu akan membawa kehancuran keluarga dan suku bangsa sendiri.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari 535 kasus kekerasan seksual dapat diperinci jenis kekerasan seksual berupa sodomi (52 kasus), perkosaan (280 kasus), pencabulan (182 kasus), dan inses (21 kasus). Data tersebut menunjukkan, bahwa saat ini bangsa Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan anak khususnya seksual. Komnas Perempuan dan Anak mencatat kasus inses di Indonesia banyak ditemukan sejak tahun 2008 lalu. Dilihat dari korban inses sebesar 73 persen anak perempuan, dan 27 persen anak laki-laki. Dari data kasus inses yang terungkap di tahun 2008 dan tahun 2013, perempuan sebagai korban terbanyak dibanding laki-laki. Data KPAI dan beberapa media massa memuat tindak kekerasan anak dilihat dari hubungan pelaku dengan korban yaitu, ayah kandung, ibu kandung, ayah tiri, abang ipar. Tindak kekerasan tersebut dikategorikan sebagai inses yaitu hubungan seksual sedarah dan kerabat dekat diranah domestik. Kasus inses di beberapa provinsi yaitu Jambi, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara sebagai korban anak kandung, adik, anak tiri dan pelaku ibu kandung, ayah kandung, ayah tiri, abang ipar.

Regulasi berkait perlindungan bagi anak korban kekerasan berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap korban kekerasan, pasal 59 tertulis: "Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan

dengan hukum, anak dari keluarga minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik, dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Penanganan kekerasan terhadap anak menjadi tanggungjawab seluruh elemen masyarakat, tanpa keterlibatan mereka kasus kekerasan anak semakin kompleks serta sulit tertangani. Permasalahan kekerasan anak khususnya inses merupakan kasus kekerasan yang sangat sulit terungkap karena pelaku dan korban masih memiliki hubungan darah atau kekerabatan dalam satu keluarga. Akibatnya, kasus inses menjadi sulit untuk ditangani tanpa adanya kesadaran dari pihak keluarga dan masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan tersebut. Hal ini dipertegas oleh Rita Serena Kalibonso, Direktur Eksekutif Mitra Perempuan, Yayasan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan sebagai berikut: "Jika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, apalagi ia adalah ayah korban sendiri, makin sulit untuk menjangkau korban apalagi memprosesnya secara hukum, ibu korban juga sulit diharapkan membantu karena takut kepada suami dan keluarga. Padahal dalam proses hukum seorang anak yang berusia kurang dari 12 tahun harus didampingi orang tua atau wali." Menurut Harkristuti Harkrisnowo "Situasi diperparah dengan ideologi *jaga praja*, atau menjaga ketat kerahasiaan keluarga, khususnya dalam budaya Jawa "membuka aib dalam keluarga berarti membuka aib sendiri" situasi demikian dalam berbagai kesempatan menyebabkan tingginya *the dark number* karena tidak dilaporkan.

Peran serta masyarakat dan lembaga pemerhati masalah kekerasan anak menjadi sesuatu hal yang sangat vital dalam melakukan pendampingan bagi korban kekerasan. *Woman Crisis Center*

(WCC) 'Aisyiyah Kota Bengkulu merupakan Yayasan 'Aisyiyah yang dijadikan *shelter* atau rumah perlindungan bagi anak korban kekerasan atau anak yang bermasalah. Sebagai *shelter* atau rumah perlindungan sementara melakukan pendampingan bagi korban kekerasan. Untuk mengetahui tentang penanganan WCC 'Aisyiyah dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan maka kajian ini dilakukan. Pada kajian ini akan mengungkap tentang bagaimana proses penanganan kekerasan terhadap anak khususnya inses dan bagaimana bentuk pendampingan bagi korban dan keluarga. Tujuan kajian untuk mendeskripsikan proses penanganan kekerasan terhadap anak khususnya inses dan untuk mendeskripsikan bentuk pendampingan bagi korban dan keluarga.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang digunakan untuk mendeskripsikan penanganan WCC Aisyiyah dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual (inses). Menurut Travers (1978) dan Gay (1976) dalam Consuelo G Savila (1993: 70), penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu masalah pada saat penelitian sedang dilakukan, melihat sebab-sebab dari masalah dan menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan masalah tersebut. Guna mendapatkan informasi berkaitan tentang pendampingan oleh lembaga sosial bagi korban kekerasan (inses) dengan menggali berbagai informasi pada lembaga sosial/WCC 'Aisyiyah Kota Bengkulu, korban, orangtua, dan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu yang membidangi kekerasan anak dan perempuan.

Sumber data penelitian ini adalah korban atau seseorang yang pernah mengalami kekerasan seksual, memiliki kemampuan dan kemauan untuk menceritakan kembali pengalaman pribadinya, telah terhindar dari trauma serta korban sudah dapat berfungsi sosial di masyarakat. Informan lain adalah keluarga atau orangtua, lembaga perlindungan anak sebagai pihak ter-

dekat yang tahu akan permasalahan korban, dan lembaga yang melakukan intervensi berupa pendampingan terhadap korban. Karakteristik informan lain adalah orang terdekat bagi korban dan mengetahui kehidupan sehari-hari, bersedia diwawancarai, serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memberikan informasi sesuai tujuan penelitian. Informan utama penelitian ini pengurus, relawan dari WCC 'Aisyiyah. Informan lain yaitu korban, orangtua dan Dinas Sosial dalam hal ini pengurus Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), jumlah informan enam orang.

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap informan penelitian yang terpilih, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu menyajikan data dengan menarasikan, beberapa kasus kekerasan dan menginterpretasikan data hasil wawancara dengan korban dan orang terdekat serta proses pendampingan dan upaya penanganan korban dari lembaga sosial anak WCC 'Aisyiyah.

C. Women Crisis Center (WCC) 'Aisyiyah.

'Aisyiyah Bengkulu merupakan organisasi perempuan yang berada dari tingkat provinsi sampai pada 10 pimpinan daerah dan di tingkat kabupaten/kota. Di setiap kabupaten dan kota terdapat cabang Aisyiyah yang berada di tingkat kecamatan dan ranting 'Aisyiyah berada di tingkat kelurahan. Di Provinsi Bengkulu telah terbentuk 46 cabang 'Aisyiyah dan 147 ranting 'Aisyiyah, dan masing-masing tingkatan didukung oleh tujuh majelis yaitu Majelis Kesejahteraan Sosial, Majelis Hukum dan HAM serta Majelis Kesehatan. Tingkatan majelis memiliki peran dan fungsi yang berbeda, terkait masalah kekerasan seksual anak yang bertanggungjawab melakukan pelayanan yaitu Majelis Kesehatan berfungsi melaksanakan program yang terintegrasi mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Majelis Pendidikan dan Majelis Kesejahteraan Sosial memiliki amal usaha pendidikan (TK/PAUD) dan Panti Asuhan. Di Provinsi Bengkulu 'Aisyiyah mengelola TK 'Aisyiyah ada 15 TK/PAUD, dan tujuh panti sosial. Berdirinya TK/PAUD dan Panti Asuhan Anak/LKSA sangat dirasakan kemanfaatannya bagi masyarakat Bengkulu, terbukti ada dua Panti Asuhan Anak terakreditasi dengan nilai B. Panti Asuhan Anak dikelola oleh Majelis Kesejahteraan Sosial. Sejak adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dan penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak paradigma panti berubah dari tempat penitipan dan pengkaderan anak yatim, piatu dan yatim piatu yang tinggal di panti sampai tamat sekolah menjadi tempat alternatif terakhir dalam pengasuhan anak (termasuk anak korban kekerasan) dan wajib menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Model pengasuhan ini memberikan peluang yang sangat luas untuk dijadikan *shelter* atau rumah perlindungan bagi anak korban kekerasan atau anak yang bermasalah.

Pada Majelis Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah Wakil Ketua I, memiliki struktur organisasi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Majelis Kesejahteraan Sosial meliputi tiga divisi yaitu divisi pelayanan dan rehabilitasi, divisi pengembangan masyarakat, dan divisi pertolongan umat. WCC 'Aisyiyah berada di divisi pelayanan dan rehabilitasi. Selain itu, divisi ini memberikan pelayanan dalam panti yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi anak yatim piatu, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kekerasan di ranah domestik dan publik sehingga anak-anak mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan aksesibilitas sebagai warga negara yang dilindungi hukum.

Upaya penanganan terhadap korban sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan pelayanan sosial bagi korban kekerasan/inses, yaitu melalui serangkaian tahapan atau proses penanganan dari persiapan, pelaksanaan penan-

anganan dan terminasi atau pemutusan hubungan antara korban dengan lembaga WCC 'Aisyiyah setelah dinyatakan proses penanganan dirasakan cukup atau selesai. Dalam melakukan upaya penanganan, proses penanganan yang dilakukan WCC 'Aisyiyah terhadap korban kekerasan melalui beberapa tahapan, yaitu: a) Perkenalan awal, hal ini dapat terjadi karena korban dirujuk atau diantar sendiri oleh orangtua korban; b) Melakukan kontak dan kontrak, yaitu melakukan kesepakatan antara pihak WCC 'Aisyiyah dengan korban untuk melakukan penanganan dan pendampingan kasus; c) Assesmen korban. Hal ini dilakukan untuk menggali permasalahan yang dialami oleh korban sehingga bisa membuat kronologis yang runtut tentang peristiwa yang dialami oleh korban; d) Melakukan rencana intervensi, setelah kronologis tertulis secara runtut yaitu membuat rencana intervensi agar kegiatan intervensi bisa berjalan dengan lancar dan terarah; e) Melaksanakan tahapan intervensi, intervensi dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan korban dan lembaga bukan sepihak sehingga hal-hal yang diinginkan bisa tercapai dengan saling kerjasama; f) Evaluasi, evaluasi dilakukan untuk melihat kekurangan-kekurangan yang terjadi sehingga bisa memperbaiki dan jika permasalahan tidak dapat selesai sampai tuntas oleh lembaga maka melakukan rujukan kepada pihak yang terkait; g) Terminasi atau pengakhiran dalam setiap penanganan dan pendampingan korban sangat diperlukan, karena jika perlu rujukan maka penanganan akan berpindah kepada pihak yang dituju, namun jika masalah telah teratasi maka penanganan dan pendampingan akan selesai.

Kemitraan atau jaringan kerja Aisyiyah cukup luas untuk mendukung potensi yang ada termasuk proses pendampingan korban, diantaranya *shelter* atau rumah aman RPTC Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu, LKBH Universitas Bengkulu, Psikolog, Polresta dan Polda Provinsi Bengkulu.

Upaya Penanganan WCC 'Aisyiyah Bagi Korban Inses

Amanah Bangsa Indonesia, yang dijalankan sebagaimana tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Ketentuan tersebut mengindikasikan antara perempuan dan laki-laki, antara orang dewasa dan anak-anak tidak ada diskriminasi dalam perlindungan sebagai warga Negara RI. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, diamanatkan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pada tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres 36/1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 dimana substansi inti dari KHA adalah adanya hak asasi yang dimiliki anak dan ada tanggung jawab Negara-Pemerintah-masyarakat dan orang tua untuk kepentingan terbaik bagi anak sehingga efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak secara optimal dapat ditingkatkan.

Tindak lanjut dari KHA adalah terbitnya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak yang dimaksud adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Selain perlindungan, juga terdapat perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dalam situasi khusus, dalam hal ini anak korban perlakuan salah dan tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual, eksploitasi secara fisik dan atau seksual serta ekonomi, anak yang diperdagangkan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak komunitas adat terpencil dan kelompok minoritas, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika

dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak yang menyandang cacat, serta penelantaran.

Mengacu pada undang-undang, ratifikasi Konvensi Hak Anak, Keputusan Presiden tersebut, maka upaya lingkungan sosial, masyarakat terutama orang tua dan keluarga, kerabat, pemerintah bertanggung jawab melindungi anak dari tindak kekerasan dan perlakuan salah agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dengan baik. Kenyataan menunjukkan, bahwa sebagian anak yang karena berbagai faktor memerlukan perlindungan khusus perlu diupayakan sehingga dapat diwujudkan pemenuhan hak-haknya. Dalam konteks penelitian ini, hak perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual di dalam keluarga.

Kekerasan seksual di dalam keluarga yang dimaksud adalah kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh anggota keluarga, kerabat dekat (hubungan seksual sedarah) yang disebut inses. Hubungan tersebut berada dalam hubungan *abusive* dimana terdapat tindakan yang mengancam (fisik dan emosi) dan kekerasan seksual, intimidasi, pengucilan, pemaksaan dan adanya ancaman secara fisik. Dalam hukum pidana pada draf revisi KUHP, istilah inses sudah dimasukkan. Konsep inses dari revisi KUHP dijadikan dasar dalam penelitian ini, dimana inses adalah hubungan seksual yang dilarang antara ayah, baik kandung, angkat maupun tiri dengan anaknya, antara saudara sedarah baik ke atas, ke samping maupun ke bawah, pertalian sesusuan dan pertalian semenda (sebab perkawinan).

Penanganan kekerasan terhadap anak membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, keterlibatan masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974. Keikutsertaan lembaga sosial masyarakat dalam pembangunan ternyata memberikan berbagai dampak dalam pandangan tentang penempatan peran antara LSM dan pemerintah dalam bidang kerja dan tugas sehingga terjadi pro dan kontra.

Menurut Hasyim (2004), perubahan mengenai pandangan tersebut disebabkan antara lain LSM atau pemerintah mempunyai cara yang berbeda untuk membangun bangsa. Pemerintah dalam pencapaian tujuan bertitiktolak dari dalam sistem, sedangkan LSM di luar sistem, namun keduanya masih dalam batas-batas untuk kepentingan negara. Baik pemerintah maupun LSM dapat menjadi pejuang dan menjadi institusi yang dapat saling mengontrol.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 72 secara tegas menyatakan, bahwa peran masyarakat yang dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa. Peranserta masyarakat sebagai upaya yang tumbuh dan dibentuk oleh masyarakat, menurut Sugiyanto (2002), yang melatarbelakangi turut aktifnya lembaga non pemerintah ikut berpartisipasi dalam pembangunan adalah pendekatan teknokratis dengan birokrasi yang didominasi oleh pemerintah, sangat menekankan arus *top down* dan adanya keterbatasan memberikan peluang berpartisipasi masyarakat. Lembaga sosial adalah organisasi sosial atau suatu perkumpulan sosial dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

Pihak masyarakat atau swasta dengan pemerintah saling melengkapi, menurut Saragih, S (1995) menyatakan, bahwa LSM dan pemerintah adalah dua institusi yang saling melengkapi, mendukung dan mengontrol. Artinya, kedua institusi ini harus berani mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semakin meningkat jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diibaratkan seperti deret ukur yang tidak diimbangi upaya penanganan masalah tersebut yang diibaratkan seperti deret hitung. LSM menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pasal 9, didefinisikan sebagai satu wadah partisipasi masyarakat dalam bentuk

kelembagaan. Keikutsertaan menangani permasalahan sosial anak LSM di wilayah Indonesia ini, semakin dirasakan manfaatnya.

Kekerasan terhadap anak dapat dicegah atau dikurangi jumlahnya apabila masyarakat bersedia bersikap proaktif dan selalu berusaha secara dini mencegah kemungkinan terjadinya perlakuan salah pada anak. Menurut Irwanto (Bagong Suyanto, 2002) ada tiga faktor yang menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam mencegah terjadinya *child abuse* atau tindak kekerasan terhadap anak, yaitu: 1) Masyarakat pada umumnya masih kurang memiliki pengetahuan tentang apa yang dimaksud dengan tindak kekerasan pada anak yang dikategorikan *abuse* atau *maltreatment*. Banyak orangtua melakukan itu dengan dalih kepatuhan dan proses pendidikan anak seperti keluarga memperkerjakan anak di bawah 13 tahun adalah melatih mandiri sekaligus berbakti pada orangtua. 2) Tidak ada tolok ukur yang jelas yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan tindakan mana yang dikategorikan keras dan melanggar hak anak dan tindakan mana yang ditoleransi bahkan dianjurkan. Tentunya hal ini dipengaruhi adanya ketentuan-ketentuan normatif suatu keluarga dan masyarakat. 3) Adanya mitos dari masyarakat, bahwa keluarga adalah institusi yang harmonis, niscaya tidak ada satupun orangtua yang tega berbuat jahat kepada anak-anaknya, tetapi kenyataannya mitos tersebut tidak selalu benar. Walaupun masih banyak masyarakat yang menganggap, bahwa perlakuan kasar dan keras terhadap anak sebagai masalah intern keluarga, sebagai proses mendidik anak dan melatih kemandirian anak.

Sebagai upaya preventif guna mencegah terjadi kekerasan terhadap anak maka menurut Miwa Patnani (1999) perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut: 1) Masyarakat harus ikut proaktif terhadap kasus-kasus *child abuse* atau tindak kekerasan terhadap anak baik secara preventif maupun secara kuratif. 2) Melaporkan kasus *child abuse* atau tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi kepada lembaga-lembaga

yang terkait menangani kasus tersebut seperti kepolisian dan lembaga sosial agar memberikan perlindungan sosial kepada anak yang membutuhkan perlindungan tersebut. 3) Adanya kesulitan untuk mendeteksi dan menangani kasus *child abuse* atau tindak kekerasan terhadap anak, dikarenakan ruang kejadian ada di wilayah keluarga yang sangat *privacy*, maka perlu memanfaatkan dan meminta dukungan lembaga atau pihak-pihak terkait yang fungsional dan eksis di lingkungannya seperti ibu-ibu PKK, kelompok dasa wisma, pengurus RT, RW dan lainnya yang mengenal dan mengetahui keluarga tersebut untuk mencari solusi atau pemecahannya.

WCC 'Aisyiah sebagai organisasi perempuan yang peduli terhadap masalah kekerasan anak selama ini telah melakukan upaya penanganan tindak kekerasan anak meliputi: a) Upaya Preventif (pencegahan), yaitu melakukan sosialisasi Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Anak dan juga terkait penguatan ekonomi ketahanan keluarga dengan melakukan sosialisasi penguatan ekonomi kelompok-kelompok perempuan dampingan' Aisyiah. WCC 'Aisyiah juga melakukan sosialisasi tentang hak-hak yang merupakan kewajiban orang tua. b) Upaya Kuratif (penyembuhan) yang dilakukan pada korban meliputi penyembuhan trauma bekerjasama dengan psikolog, penyembuhan luka fisik bekerjasama dengan klinik UMC, penyembuhan psikis dengan memberikan rasa aman bekerjasama dengan RPTC Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. c) Upaya Hukum (represif), pendampingan hukum bagi korban kekerasan/inses bekerjasama dengan LKBH Universitas Muhamadiyah Bengkulu di Kota Bengkulu. d) Upaya pemulihan korban, yaitu melakukan assesmen untuk memulihkan keberfungsian sosial korban dan keluarga di masyarakat.

Upaya preventif sangat diperlukan karena faktanya dalam menanggapi masalah kekerasan seksual/inses terhadap anak, belum seluruh masyarakat memiliki respon yang sama, sehingga cara menyikapinya beragam. Kondisi ini

karena kekerasan seksual/inses terjadi di ruang domestik atau ruang privat dalam keluarga, sehingga pihak luar tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Beberapa kasus inses terungkap karena adanya laporan dari ibu, istri dan keluarga besar, meskipun ada beberapa kasus yang dilaporkan masyarakat ke pihak berwajib setelah ketahuan korban melahirkan anak.

Kekerasan seksual/inses begitu kompleks karena menyangkut keberlangsungan keluarga korban, pelaku/ayah, istri/ibu korban dan keluarga besar, sehingga upaya penanganannya memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak, diantaranya keluarga korban, instansi pemerintah, kepolisian, masyarakat, pemuka masyarakat/RT, RW, serta lembaga swasta penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan/anak. Tanpa adanya keterlibatan seluruh elemen masyarakat masalah kekerasan inses sulit terungkap dan korban tidak mendapatkan perlindungan hukum maupun sosial psikologis.

Beragamnya respon masyarakat dalam menyikapi kekerasan seksual/inses disebabkan minimnya informasi terkait pemahaman masyarakat akan kekerasan tersebut. Dari perspektif gender, ada kekurangpahaman masyarakat akan kekerasan terhadap perempuan/anak merupakan kekerasan yang terjadi karena perbedaan jenis kelamin secara sosial. Hal ini menyebabkan masyarakat memandang perempuan/anak yang mengalami tindak kekerasan sebagai kasus kriminal yang dapat terjadi pada siapa saja. Pembagian wilayah domestik dan publik dalam kekerasan terhadap perempuan, akan merugikan bagi korban. Korban merasa sendiri menghadapi kekerasan yang dialami karena kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya berada di wilayah domestik atau privat.

Penanganan korban kekerasan seksual/inses selama ini terkendala oleh data atau informasi karena masih banyak kasus yang belum dilaporkan sehingga mengalami kesulitan di dalam melakukan upaya penanganan. Instansi pemerintah maupun beberapa lembaga perempuan

telah melakukan berbagai upaya penanganan terhadap korban kekerasan inses. Demikian halnya dengan WCC Aisyiyah, juga telah melakukan upaya-upaya pendampingan terhadap korban inses. Upaya penanganan yang dilakukan oleh WCC 'Aisyiyah bagi korban inses meliputi, 1) Konsultasi hukum; 2) Rujukan ke psikolog; 3) Pendampingan litigasi/bantuan hukum; 4) Pendekatan dan pendampingan korban; 5) Rujukan korban ke *shelter* guna penyembuhan psikopist/trauma korban; 6) Pelaporan ke pihak hukum; 7) Pemberian motivasi; 8) Pendampingan sosial sesuai kebutuhan korban; 9) Rujukan korban ke *shelter* dinsos/Rumah perlindungan trauma center untuk mendapatkan pelayanan psikolog, agama, kesehatan; 10) Pemberian bantuan UEP untuk korban guna keberlangsungan hidup korban; 11) Pendampingan korbaan saat BAP, visum dan di pengadilan.

WCC 'Aisyiah selama kurun waktu tahun 2006-2015 telah menangani kasus korban inses sebanyak enam kasus, **Kasus pertama**, tahun 2006 korban E.Ssn, 10 tahun. Pelaku Azs, usia 21 tahun hubungan dengan korban adalah kakak kandung. Kronologi kasus, korban diperkosa kakak kandungnya sejak berusia 10 tahun dan melapor pada WCC 'Aisyiyah setelah berusia 15 tahun. Pelaku mahasiswa salah satu sekolah tinggi di Bengkulu. Pelaku pada saat akan melakukan perkosaan korban melakukan penolakan sehingga sering mendapatkan kekerasan berupa disulut rokok dan diancam (bekas sultutan rokok masih ada).

Intervensi yang diberikan untuk korban berupa pendampingan sehingga korban mendapatkan hak-haknya. WCC 'Aisyiyah melakukan pendampingan dimulai pada saat masalah yang terjadi dilaporkan keluarga. WCC 'Aisyiyah memberikan dukungan, motivasi, dampingan hukum proses penyidikan dan penyelidikan, menyiapkan saksi serta bantuan psikolog untuk pemulihan trauma yang dialami korban. Proses panjang untuk mengembalikan trauma korban dilakukan beberapa kali intervensi psikologis bagi korban agar tumbuh kepercayaan diri sehingga dapat menghilangkan trauma yang dialaminya.

Permasalahan inses sangat kompleks karena korban dan pelaku ada dalam satu keluarga sehingga penanganan yang tepat harus melibatkan keluarga korban, pekerja sosial, relawan WCC 'Aisyiyah sehingga korban mendapatkan penanganan yang terbaik. Pada kasus ini pihak keluarga tidak melibatkan aparat hukum agar kasusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan WCC 'Aisyiyah sebagai lembaga yang dapat memberikan upaya penanganan serta perlindungan bagi korban. Solusi bagi korban dari hasil kesepakatan pihak keluarga besar dengan WCC 'Aisyiyah adalah korban dirujuk pada satu lembaga di Jakarta, dan keputusan tersebut atas keinginan korban dan keluarga besar. Keputusan ini dipandang yang terbaik bagi kelangsungan masa depan korban agar tidak mengalami trauma yang berkepanjangan.

Kasus kedua, tahun 2008 korban Rn, usia 9 tahun. Pelaku Ayah tiri dan didukung oleh ibu kandung. Kronologi kasus, korban oleh pemuka masyarakat dilaporkan ke WCC 'Aisyiyah. WCC 'Aisyiyah dalam penanganan kasus melakukan pendampingan selama pemeriksaan visum di rumah sakit dan pendampingan selama proses pemeriksaan di Polres berupa penyusunan BAP. Melakukan pendampingan akibat trauma dengan mendatangkan psikolog, proses pendampingan hukum dilakukan oleh LBH agar korban terlindungi secara hukum. selain itu WCC 'Aisyiyah juga memberikan motivasi guna menumbuhkan semangat agar anak tetap memiliki kepercayaan diri dengan memberikan keterampilan ekonomis produktif yang nantinya dapat menjadi bekal dalam kehidupannya. Pelaku yakni ayah dan ibu korban divonis untuk menjalani hukuman selama sembilan tahun. Ibu korban divonis karena secara sengaja memberikan peluang bagi pelaku, ayah tiri untuk melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anaknya.

Kasus ketiga, tahun 2010 korban Pell A, usia 16 tahun, pelaku ayah kandung, usia 40 tahun. Kasus ini terungkap setelah keluarga melapor pada kepala desa dan membawa kasus tersebut pada WCC 'Aisyiyah untuk mendapatkan pe-

nanganan. Proses pendampingan yang diberikan kepada korban sesuai dengan tahapan intervensi yang menjadi kebijakan lembaga ini seperti pemeriksaan visum, pendampingan di Polsek, penguatan kepribadian anak oleh psikolog bersama-sama dengan relawan sosial yang ada di lembaga ini.

Secara hukum korban terlindungi dan mendapatkan hak hidupnya, intervensi lainnya diberikan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan korban. Diharapkan bekal bimbingan keterampilan membuat makanan kecil, kue dan kerajinan tangan, membuat korban memiliki kesibukan sehingga mental dan kepribadiannya menjadi kuat. Proses hukum terhadap pelaku tetap berlanjut, keputusan pengadilan memvonis pelaku selama 13 tahun kurungan.

Kasus keempat, tahun 2012 korban Rn P usia 13 tahun, pelaku bapak tiri usia 37 tahun. Kasus ini terungkap dari laporan masyarakat pada WCC 'Aisyiyah. Korban mendapatkan pendampingan psikologis, pendampingan medis dan hukum baik selama di Polres maupun di pengadilan. WCC 'Aisyiyah di dalam melakukan penanganan pada korban melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga lain. Dalam kasus ini bekerjasama dengan *shelter* Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Rumah Perlindungan Trauma Center. Korban untuk sementara dititipkan di *shelter* tersebut sampai proses melahirkan anak. Kasus ini terungkap karena adanya kecurigaan masyarakat korban hamil tanpa memiliki suami, pada akhirnya ibu korban mengaku kalau anaknya dihamili oleh ayah tiri. Pelaku ditangkap dan diproses secara hukum, hasil putusan pengadilan pelaku divonis selama tujuh tahun kurungan.

Kasus kelima, tahun 2013 korban S, berusia 17 tahun, pelaku sepupu ibu korban berusia 45 tahun. Kasus ini terungkap dengan adanya laporan dari ibu korban pada WCC 'Aisyiah. Penanganan yang dilakukan berupa konsultasi, pendampingan selama proses pelaporan di Polsek, visum dokter di rumah sakit, pendampingan psikis oleh psikolog untuk memulihkan trauma korban dengan melakukan kerjasama dengan psikolog.

Setelah korban mulai pulih dari trauma, lembaga melakukan bimbingan keterampilan kerja untuk bekal korban di kemudian hari. Diharapkan korban dapat pulih kepribadiannya serta memiliki bekal keterampilan agar bisa mandiri. Untuk kasus ini pelaku tidak dapat diproses atau dilepas oleh polisi karena bukti tidak lengkap.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya inses, yang mendapatkan pendampingan dari WCC 'Aisyiyah Kota Bengkulu, yang dapat peneliti wawancarai yaitu **kasus keenam** Ds S, usia 14 tahun. Kasus ini terjadi tahun 2014 dan tempat tinggal korban berada di Kota Bengkulu. Upaya penanganan yang dilakukan WCC Aisyiyah dalam melakukan pendampingan terhadap korban (Ds S, 14 tahun), diawali 1) Adanya laporan dari keluarga/kakak korban yang mengantarkan Ds S ke WCC Aisyiyah untuk mendapatkan pertolongan atau pendampingan; 2) Dilakukan kontak dan kontrak sehingga terjadi kesepakatan antara Aisyiyah dengan korban terlapor untuk melakukan penanganan; 3) Assesmen korban dilakukan untuk mengungkap kronologis tentang peristiwa kejadian yang dialami korban secara lengkap dan rinci dan kebutuhan apa yang dirasakan korban untuk menyelesaikan kasus ini; 4) Pendamping, relawan Aisyiyah melakukan pendalaman kasus berdasar laporan dari korban dan pihak keluarga untuk menentukan langkah selanjutnya atau merencanakan intervensi yang relevan sehingga kegiatan dapat dilakukan dengan lancar dan terarah.

Kasus Ds pada awalnya dirasakan oleh pihak pendamping, relawan Aisyiyah cukup rumit, karena tidak ada orang yang mau menjadi saksi bagi korban. Kejadian perkara kasus ini di Pantai Panjang, setelah korban ditinggal pelaku, Ds ditolong oleh penjual jagung yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Pihak Aisyiyah mendatangi penjual jagung agar mau menceritakan yang diketahui pada saat kejadian tersebut. Pada awalnya penjual tidak mau ikut campur terkait masalah tersebut dan ia mengatakan tidak tahu menahu. Dengan beberapa kali pertemuan, pendamping Aisyiyah berusaha mendekati dan

membujuk penjual jagung untuk mau menjadi saksi kasus ini sehingga pada akhirnya penjual mau membantu jadi saksi dengan datang ke kepolisian/Polresta Bengkulu. Pihak Aisyiyah mendampingi korban untuk melakukan pelaporan, visum dan pembuatan BAP. Berkas-berkas berupa data kasus, saksi dan hasil visum dari RS sudah terpenuhi sesuai dengan SOP pihak kepolisian. Kasus ini tidak bisa menjerat pelaku karena kepolisian sampai sekarang belum bisa menangkap pelaku.

Kasus Ds, klien WCC 'Aisyiyah korban inses dari sepupu kakak ipar, upaya penanganan belum selesai karena penanganan kasus berbelit-belit dan masih belum adanya keberpihakan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan inses, pihak kepolisian belum bisa menangkap pelaku, meskipun satu orang saksi sudah cukup untuk menjerat pelaku. Dari informasi pendamping WCC Aisyiyah, (Ibu W, relawan WCC Aisyiyah), menceritakan:

“Suatu kenyataan selama menangani kasus kekerasan inses, respon lingkungan sosial kadangkala memberatkan perempuan dalam menghadapi kekerasan. Pada saat perempuan/korban dalam situasi sangat sulit serta membutuhkan pertolongan dari pihak lain, ternyata respon dari pihak lain tidak seperti yang diharapkan, perlu penyadaran gender bagi semua pihak. Pernah terjadi saat melaporkan kasus inses ke polresta, korban tidak mendapatkan respon yang positif, investigasi yang berulang kali atau diulang-ulang dan bertele-tele membuat korban stress fisik dan psikis. Pembuatan BAP yang berulang kali kurang dan salah disebabkan tidak cermatnya petugas dalam menyusun BAP, membuat korban dan pendamping lelah fisik dan psikis. Ditambah dengan pemeriksaan visum dari RS, biaya dikeluarkan dari korban sendiri sebesar Rp. 180.000,- “.

Dari kasus tersebut membuktikan korban membutuhkan respon positif berupa sikap empati, keberpihakan semua elemen masyarakat baik keluarga korban, masyarakat sekitar mau-

pun aparat penegak hukum, lembaga peduli anak dalam penanganan kekerasan seksual inses, karena tanpa itu semua korban merasa sendiri menghadapi kekerasan yang dialaminya. Dampak kekerasan yang dialami korban berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian dan kejiwaan korban. Menurut informasi ibu korban (Rs, 50 tahun), “Ds, mengurung di kamar selama sehari-hari, setelah ibu bujuk, kita minta nasehat pada WCC 'Aisyiyah untuk dapat penyelesaian”. Korban dan keluarga pada saat diwawancarai menyatakan: “kami merasa takut karena pelaku belum tertangkap, Ds sampai takut ke luar rumah, Ds hanya di rumah sama adiknya selama ibu tinggal untuk berjualan ke luar kota selama satu minggu”.

Dampak trauma yang dirasakan korban akan berlangsung seumur hidup, sementara aparat hukum, kepolisian belum sepenuhnya berpihak pada korban. Beban berat harus ditanggung korban dan keluarga karena selama pemeriksaan polisi yang terjadi berulang-ulang menumbuhkan luka batinnya tersakiti lagi. Korban harus menceritakan kronologis peristiwa yang menyebabkan trauma muncul kembali. Demikian juga kelengkapan untuk proses penyelidikan berkait dengan satu orang saksi dirasakan oleh relawan WCC 'Aisyiyah sangat memberatkan perkara ini. Karena tidak ada saksi yang mau memberikan keterangan disebabkan orang-orang di sekitar Pantai Panjang dimana kejadian itu terjadi tidak melihat secara langsung peristiwa kekerasan seksual, pemerkosaan. Berkat kegigihan relawan sosial dari WCC 'Aisyiyah pada akhirnya si penjual jagung yang berada di tempat kejadian perkara mau memberikan kesaksian pada polisi. Akan tetapi kasus ini belum dapat menjerat pelaku ke tahap penyidikan, pihak keluarga dan WCC 'Aisyiyah belum mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian mengapa pelaku belum segera ditangkap.

Upaya penanganan korban kekerasan yang dilakukan WCC 'Aisyiyah berupa pendampingan saat pelayanan medis dan *medicolegal* (VCT, *Visum et Psikiatrikum*, laboratorium, persalinan,

obat, *rongent*), pelayanan hukum. Dalam upaya pemulihan kondisi korban, berkerjasama dengan LSM bantuan hukum/LBH Bintang Keadilan, dan advokasi hukum apabila pelaku mengalami proses hukum, melakukan pemberian pendampingan sosial bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Upaya penanganan korban kekerasan selain memberikan pendampingan proses BAP, WCC 'Aisyiyah juga melakukan intervensi berupa penguatan pada korban dengan memberikan bimbingan mental, sosial dan bimbingan keterampilan usaha ekonomis produktif.

Intervensi yang dilakukan WCC 'Aisyiyah untuk korban ditujukan agar korban memiliki kepercayaan diri atau bangkit kembali setelah peristiwa yang dialaminya. Bimbingan mental untuk menumbuhkan semangat hidup, motivasi diri sehingga tumbuh kepercayaan diri agar korban dapat menerima dengan ikhlas dan berusaha bangkit kembali untuk menatap masa depannya. Bimbingan keterampilan diberikan untuk bekal korban dibidang usaha ekonomis produktif, diharapkan dengan pemberian bimbingan psikis mental, keterampilan berusaha korban akan memiliki bekal untuk melanjutkan kehidupannya.

Keberlanjutan pendampingan pada anak korban kekerasan inses setelah tahap terminasi, WCC 'Aisyiyah melakukan monitoring terhadap kondisi korban. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan korban agar anak dalam situasi dan kondisi yang benar-benar pulih setelah mengalami trauma kekerasan inses. Dalam memantau perkembangan korban WCC 'Aisyiyah melakukan kunjungan ke rumah korban, atau dengan menelpon korban yang berada di luar kota sehingga diketahui bagaimana kondisi korban setelah mendapatkan intervensi dari WCC Aisyiyah. Dengan demikian intervensi yang dilakukan oleh WCC 'Aisyiyah benar-benar memberikan dampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan fisik, psikis, dan sosial anak serta keberlangsungan kehidupan keluarga korban, dan pelaku.

D. Penutup

Tindak kekerasan seksual pada anak yaitu inses merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensi, karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup anak sebagai korban ataupun keluarga besar korban yang mana pelaku adalah ayah atau saudara sedarah. Upaya penanganan memerlukan keterlibatan semua pihak, baik orangtua, kerabat keluarga, lingkungan sekitar maupun lembaga atau instansi yang membidangi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual/inses. Penanganan anak korban inses melibatkan berbagai pihak diantaranya Kepolisian, RS Bayangkara, orangtua atau kerabat keluarga, lembaga seperti WCC, instansi Dinas Sosial melalui RPTC, jaksa, yayasan atau panti sosial. Kerjasama antar instansi dan lembaga belum maksimal, keberpihakan terhadap anak sebagai korban inses belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak kepolisian, aparat penegak hukum. Pada saat penyusunan BAP yang berulang-ulang dan memakan waktu lama menyebabkan anak secara psikologis mengalami trauma karena harus menceritakan kembali kejadian kekerasan yang dialami, dan kesulitan menghadirkan saksi menjadi kendala dalam mengungkap serta menjerat hukum pelaku.

Pendampingan terhadap korban inses yang dilakukan WCC 'Aisyiyah Bengkulu melewati beberapa tahapan. Proses pendampingan tersebut meliputi: a) Perkenalan awal; b) Pelaksanaan kontak dan kontrak; c) Assesmen korban; d) Pelaksanaan tahapan intervensi; f) Evaluasi; g) Terminasi atau pengakhiran dalam setiap penanganan dan pendampingan korban. Pendampingan WCC 'Aisyiyah terhadap korban inses meliputi, konsultasi hukum; merujuk ke psikolog; pendampingan litigasi/bantuan hukum; pendekatan dan pendampingan korban; pembuatan rujukan bagi korban ke *shelter* guna penyembuhan psikopist/trauma korban; pelaporan ke pihak hukum; pemberian motivasi; pendampingan sosial sesuai kebutuhan korban; pembuatan rujukan bagi korban ke *shelter* Dinsos yakni rumah perlindungan trauma center untuk menda-

patkan pelayanan psikolog, agama, kesehatan; pemberian bantuan UEP untuk korban guna keberlangsungan hidup korban; pendampingan BAP, visum dan di pengadilan.

Dari hasil penelitian disampaikan rekomendasi sebagai berikut: 1) Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sampai ke level paling bawah tingkat RT/RW, keluarga, sekolah, dan tokoh agama, dan masyarakat. 2) Keberpihakan penegak hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan, yang tentunya sangat berbeda dalam memperlakukan anak selama proses hukum, baik pada proses tuntutan di kepolisian maupun proses persidangan di pengadilan sebagai saksi. 3) Perlu pendampingan pada saat korban melakukan pengaduan kepada pihak berwajib dalam hal ini Kepolisian, sehingga anak terlindungi hak-haknya sebagai anak yang menjadi korban kekerasan seksual/inses. 4) Perlu ditingkatkan keterlibatan yayasan, panti sosial untuk memberikan solusi meskipun bersifat sementara bagi anak hasil kekerasan seksual/inses, karena tidak memungkinkan bagi perkembangan anak untuk diasuh oleh orangtua korban.

Ucapan Terima Kasih

Diucapkan terima kasih kepada semua pihak diantaranya Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, WCC Aisyiyah, RPTC, Orangtua korban, korban yang telah bersedia untuk memberikan informasi hingga naskah penelitian ini dapat diselesaikan.

Pustaka Acuan

Bagong Suyanto. (2002). *Tindak Kekerasan terhadap Anak Masalah dan Upaya Pemantauannya*. Surabaya: LPA Jatim dan UNICEF.

-, dkk. (2002). *Faktor Budaya Dibalik Kasus "Child Abuse"*. Kompas 23 Juli 2002.
- Consuelo G, Sevilla, dkk. (1993). *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press.
- Hasyim .(2004). *Mengakhiri Konflik LSM dan Pemerintah*, Jakarta: Harian Kompas Sabtu 5 Juni 2004.
- Kartini Kartono .(1989). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Jakarta: Mandar Maju.
- Rita, S. Kalibonso. (2002). Kejahatan itu Bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Perempuan* No. 26. H. 7-20.
- Miwa Patnani. .(1999). *Kekerasan Fisik terhadap Anak dan Strategi Coping yang Dikembangkan Anak*, Yogyakarta: Fakultas psikologi UGM.
- Mulyanah Kusumah. (1981). *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni.
- Stenius, V.M.K & Veysey, B.M. (2005). "It's the little things": Women, trauma, and strategies for healing. *Journal of Interpersonal Violence*, 20, 1155-1174.
- Stenius, V.M.K & Veysey, B.M. (2005). "It's the little things": Women, trauma, and strategies for healing. *Journal of Interpersonal Violence*, 20, 1155-1174.
- Supatrik. (1995). *Mengenai Perilaku Abnormal*. Jakarta: Kanisius.
- Sawitri Supardi Sadarjoen. (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refina Adhita.
- Sugiyanto. (2002). *Lembaga Sosial*, Yogyakarta: UGM.
- Saragih, S. (1995). *Membedah Dasar LSM*, Jakarta: Puspa Suara.
- Tower, C. (2002). *Understanding Child Abuse and Neglect* (5 th ed). Boston: Allyn & Bacon, A Pearson Education Company.
- Kementerian Sosial. (2002). Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Republik Indonesia. (1979). Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Harian Republika, Senin 16 Januari 2017 "Kekerasan Seksual Marak",
- Harian Kompas, Rabu 4 Maret 2016, "Kasus YY Puncak Gunung Es", www.kpai.go.id diunduh 13 Juli 2017

Pengentasan Kemiskinan melalui Bantuan Sosial Non Tunai

Poverty Reduction through Non-Cash Social Assistance

Soetji Andari

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta

Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta

Email: soetjiandari@gmail.com, HP. +6285643916275

Diterima 17 April 2017, diperbaiki 12 Agustus 2017, disetujui 4 November 2017

Abstract

The Ministry of Social of the Rep. of Indonesia launched a non-cash assistance program in liaise with Joint Business Groups (KUBE) and Hope Family Program (PKH) in the context of reducing poor society effort. It was a further step and the government's commitment to reduced poverty in Indonesia. The distribution of non-cash social assistance system is to prevent the one that is inappropriate in its quality and quantity. Some beneficiaries of Hope Family Program and a Through non-cash Welfare Rice Program (Rastra) attended to gather in a small shop / stall that was appointed as an electronic service provider stall (e-warong). This system is a way to prevent mala-practices of social assistance distribution and to ensure its effectiveness in reaching the target, the amount and the time allocation. This research used a qualitative approach as it was conducted to know the implementation of the non-cash social assistance in Kediri District and that of in Madiun District. The result of the research showed that it needed either legality in its implementation of e-warong, and some technical managerial assistance for the e-warong managers, and also it needed some support of internet network facility and its infra-structures.

Keyword: *alleviation; non-cash assistance; poverty*

Abstrak

Kementerian Sosial meluncurkan program bantuan non tunai Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya pengentasan masyarakat miskin. Hal tersebut merupakan langkah lanjut dan komitmen pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Sistem penyaluran bantuan sosial non tunai bertujuan untuk mencegah distribusi yang tidak tepat secara kualitas dan kuantitas. Beberapa penerima program keluarga harapan (PKH) dan beras sejahtera (Rastra) melalui bantuan pangan non tunai (BPNT) terlihat berkumpul di salah satu warung yang ditunjuk sebagai penyedia layanan elektronik warung. Sistem tersebut mencegah penyimpangan penyaluran bantuan sosial agar tepat guna, sasaran, jumlah dan tepat waktu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, karena ingin mengetahui penyelenggaraan bantuan non tunai sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kediri dan Madiun. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan e-warong perlu ada legalitas, pengelola perlu mendapat bimbingan teknis terutama keterampilan managerial, perlu dukungan sarana dan prasarana berupa jaringan internet.

Kata kunci: *bantuan non tunai; kemiskinan; pengentasan*

A. Pendahuluan

Kediri merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin tahun 2015 sebanyak 23.770 jiwa dengan persentase 8,51 persen. Tahun 2016 turun menjadi 23.640 jiwa dengan persentase 8,40 persen. Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2015 untuk Kota Kediri sebesar 1,4 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,43. Tahun 2016 indeks

kedalaman kemiskinan sebesar 0,96 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,20. Apabila jarak antara indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan semakin kecil dapat dikatakan perekonomian stabil. (BPS Kota Kediri, 2016). Berdasar data yang dirilis BPS tersebut menunjukkan, bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Kediri mengalami penurunan sebesar 0,11 persen.

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan (BPS, 2016).

Turunnya jumlah penduduk miskin tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri untuk terus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Berkaitan upaya pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kota Kediri membagi dalam empat kluster. Kluster pertama, pemerintah memberi bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Kluster kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Kluster ketiga yakni pemberdayaan usaha mikro kecil (UMK). Kluster keempat adalah peningkatan dan perluasan program pro rakyat.

Kecamatan Mojoroto memiliki jumlah UMK terbanyak yaitu 14.511 usaha, selanjutnya Kecamatan Kediri Kota Kediri dengan 13.721 usaha dan Kecamatan Pesantren dengan 10.574 usaha. Perusahaan yang termasuk unit menengah besar (UMB), jumlah usaha terbanyak di Kecamatan Kota yaitu 658 usaha, Kecamatan Mojoroto 250 usaha dan Kecamatan Pesantren 218 usaha. Rata-rata tenaga kerja di Kecamatan Kota untuk UMK 2,62 orang dan UMB 62,33 orang. Kecamatan Mojoroto untuk UMK 2,03 orang dan UMB 62,33 orang. Kecamatan Pesantren UMK 1,88 orang dan UMB 43,33 orang. Hasil gula dan padi yang melimpah di Kediri belum membawa kemakmuran menyeluruh bagi masyarakat, meskipun jumlah penduduk miskin tahun 2015 sebanyak 23.770 jiwa dengan prosentase 8,51 persen, mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 23.640 jiwa dengan prosentase 8,40 persen.

Pemerintah sudah mengupayakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, melalui usaha ekonomi produktif,

Kelompok Usaha Bersama (Kube), program keluarga harapan (PKH), BPNT, rumah tinggal layak huni (Rutilahu), lumbung ekonomi desa, rumah kita, dan kartu elektronik yang diterbitkan oleh lembaga perbankan (BRI dan BNI), terakhir program pengentasan kemiskinan diluncurkan dalam program warong elektronik (e-warong), merupakan program bantuan dari Kementerian sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat miskin secara non-tunai. (BPS Kota Kediri, 2016)

Kota Madiun adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, terletak 169 km sebelah barat Kota Surabaya, atau 114 km sebelah timur Kota Surakarta. Madiun memiliki julukan Kota Gadis singkatan dari Perdagangan dan Industri. Pemerintah Kota Madiun memberi nama Madiun Kota Gadis karena pemerintah setempat berupaya mengembangkan sektor industri dan perdagangan. Industri dan perdagangan yang sudah ada di Kota Madiun adalah PT. INKA atau Industri Kereta Api Indonesia, lima pabrik gula yang tersebar di Kota Madiun atau kabupaten, di bidang perdagangan terdapat lima pasar swalayan yaitu Sri Ratu, Matahari, Presiden Plaza, Giant dan Carrefour, serta pasar tradisional seperti Pasar Besar Madiun, dan Pasar Sleko.

Secara geografis Kota Madiun terletak pada 111° BT – 112° BT dan 7° LS – 8° LS, berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun di sebelah utara, sebelah selatan dengan Kecamatan Geger, sebelah timur dengan Kecamatan Wungu, dan sebelah Barat dengan Kecamatan Jiwan. Wilayah Kota Madiun mempunyai luas 33,23 km² terbagi menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Manguharjo, Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Luas masing-masing adalah Kecamatan Manguharjo 10,04 km², Kecamatan Taman 12,46 km², dan Kecamatan Kartoharjo 10,73 km². Setiap kecamatan terdiri sembilan kelurahan sehingga terdapat 27 kelurahan di Kota Madiun.

Perbandingan kelompok usia penduduk Kota Madiun dapat digolongkan dalam kelompok penduduk usia produktif dan tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah kelompok pen-

duduk usia 15 - 65 tahun, sedang penduduk usia tidak produktif adalah kelompok penduduk usia <15 tahun dan ≥ 65 tahun. Pada kelompok penduduk usia tidak produktif, proporsi penduduk usia <15 tahun lebih besar dari pada penduduk usia ≥ 65 tahun.

Tabel Kelompok Usia Tidak Produktif
Kota Madiun Tahun 2009 – 2013

Usia	2009	2010	2011	2012	2013
<15 tahun	35.758	37.639	41.149	42.497	43.892
≥ 65 tahun	17.265	18.026	17.399	16.939	17.683

Sumber data : BPS Kota Madiun 2014

Kondisi masyarakat miskin di Kota Madiun dapat dilihat dari angka kemiskinan yang mengalami penurunan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 kecuali pada tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami kenaikan 0,18 persen. Pada tahun 2011, angka kemiskinan di Kota Madiun berada pada titik 5,66 persen atau menurun sebesar 0,45 persen. Di tahun 2012 angka kemiskinan adalah sebesar 5,35 persen atau menurun sebesar 0,31 persen berdasarkan data BPS yang dipublikasikan. Tahun 2013 dikarenakan belum ada data resmi dari lembaga yang berwenang maka hanya memproyeksikan angka kemiskinan dari tahun sebelumnya. Berdasar analisa data proyeksi, angka kemiskinan di Kota Madiun pada tahun 2013 adalah sebesar 5,22 persen, diproyeksikan turun sebesar 0,13 persen dari tahun 2012.

Dalam upaya pengentasan masyarakat miskin, program penanganan kemiskinan dilakukan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan lembaga terkait dengan peluncuran perdana bantuan non tunai Kube PKH merupakan langkah tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk terus menekan angka kemiskinan di Indonesia. E-warong Kube PKH merupakan salah satu program Kementerian Sosial yang bertujuan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) non tunai kepada masyarakat kurang beruntung secara tepat, cepat, dan mudah melalui kartu keluarga sejahtera (KKS). Program ini merupakan program Kementerian Sosial yang bertujuan untuk

memudahkan transaksi ekonomi kepada warga penerima PKH. Bantuan non tunai merupakan arahan presiden untuk merumuskan bantuan subsidi non tunai kepada masyarakat. Bantuan non tunai menyediakan kebutuhan pokok yang lebih murah dibanding warung sekitar. Penerima bantuan BPNT dapat mengkonversikan bantuan menjadi beberapa kebutuhan pokok, bukan hanya beras. Program bantuan non tunai memungkinkan para penerima raskin untuk mengkonversikan bantuan BPNT raskin Rp 110 ribu per bulan, dengan memilih membeli beras, gula, minyak goreng dan tepung, empat item itu bisa dikonversikan dari bantuan raskin. Pelaksanaan e-warong bekerjasama dengan bank milik negara yang terhimpun dalam Himpunan Bank Negara (Himbara). Keterlibatan perbankan (BRI dan BNI), Bulog, dan koperasi adalah program yang dilakukan melalui pemberian bantuan non tunai yang disalurkan melalui e-warong, pembelian dilakukan dengan sistem non-tunai menggunakan kartu elektronik. Masyarakat penerima dana bantuan sosial dapat mencairkan bantuan di e-warong Kube PKH. Sistem e-warong menjadikan masyarakat lebih fleksibel mencairkan dana karena tidak perlu datang ke bank. E-warong menampung bantuan sosial dari Kube, PKH, dan BPNT.

Menteri Sosial menargetkan hingga akhir tahun 2016 terdapat 300 bantuan non tunai dan pada tahun 2017 target ditambah menjadi 3000 e-warong. Peluncuran pertama bantuan non tunai telah dilakukan pada Juni 2016 di Kota Malang, sampai bulan September telah diluncurkan 21 e-warong. B2P3KS Yogyakarta melakukan kajian bantuan non tunai yang diluncurkan di Kediri dan Madiun. Rumusan masalah yang diajukan dalam kajian ini adalah bagaimanakah penyelenggaraan bantuan non tunai yang dilakukan di Kediri dan Madiun. Berdasar rumusan masalah tersebut, tujuan kajian adalah diketahui penyelenggaraan bantuan non tunai di Kediri dan Madiun. Hasil kajian diharapkan dapat memberi masukan pada Kementerian Sosial melalui Direktorat Penanggulangan Fakir Miskin dalam program

penyelenggaraan bantuan non tunai guna pemberdayaan masyarakat miskin.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, objek penelitian penyelenggaraan bantuan non tunai yang dilihat melalui *Context, Input, Process dan Product* (CIPP) untuk mengetahui penyelenggaraan bantuan non tunai di Kediri dan Madiun (Prastowo, 2011). Lokasi pengkajian ditentukan berdasarkan purposive dengan pertimbangan lokasi yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Sosial sebagai tempat penyelenggaraan e-warong. Informasi dari pelaksana adalah untuk mengetahui pelaksanaan e-warong di Kota/Kabupaten Kediri dan Kota Madiun di Jawa Timur.

Penelitian bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan bantuan non tunai meliputi aspek kelembagaan, sosialisasi, ketepatan sasaran, dan penyaluran dana bagi penerima manfaat PKH dan BPNT. Penelitian juga mengkaji beberapa aspek dari sisi penerima (*beneficiary assessment*), khususnya untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang *launching* e-warong yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH, BPNT, berdasar sudut pandang masyarakat miskin penerima manfaat (Syawie, 2011).

Wawancara dilakukan kepada pengurus dan anggota di empat e-warong yang diluncurkan yaitu E-warong Harapan Kita Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, E-warong Sanjaya, Kota Kediri, E-warong Sinar Mulyo Lirboyo Kota Kediri, E-warong PKH Sinar Mulya, Kota Madiun, serta lembaga kerjasama dalam pelaksanaan e-warong yakni BNI, BRI, Kementerian Koperasi melalui Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS), Bulog, pengurus e-warong, penerima manfaat bantuan pangan non tunai dan masyarakat sekitar e-warong. Teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada pengelola e-warong, penerima manfaat, pemangku kepentingan (bank, bulog, dan KMIS) dan observasi dalam hal sarana dan prasarana yang disediakan, ketersediaan sembako dan alat perlengkapan lain

seperti dukungan jaringan internet, alat transaksi, aktivasi pencairan dana.

C. Upaya Pengentasan Kemiskinan melalui Bantuan Sosial Non Tunai

Dasar pemikiran dan tujuan didirikan e-warong pada dasarnya mewujudkan sistem keuangan nasional yang inklusif yang dapat menyalurkan semua bantuan sosial dan subsidi oleh pemerintah secara nontunai dengan menggunakan sistem perbankan sehingga memudahkan kontrol, pemantauan, dan mengurangi penyimpangan. Pada peluncuran e-warong telah dipersiapkan beberapa lokasi yaitu: 1) E-warong Kube Harapan Kita, Jalan Tentara Zen Kelurahan Telung Rejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri; 2) E-warong Kube Sanjaya, Jalan Banjaran Gang I/67- RT 117 Kediri; 3) E-warong Kube Sinar Mulya, Jalan Sitihiinggil No 1 RT 03. Rw 3 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri; 4) E-warong Kube Cahaya Harapan, Jalan Imam Bonjol No 26 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Keempat lokasi telah sesuai dengan prinsip dasar pemikiran pendirian yakni kemudahan pencairan bantuan sosial non tunai bagi masyarakat miskin, khusus bantuan sosial peserta PKH dan BPNT. Sistem tersebut mencegah terjadinya penyimpangan artinya sistem ini membuat penyaluran bantuan sosial dapat tepat guna, sasaran, jumlah dan tepat waktu. Penyelenggaraan terintegrasi dengan semua pihak yang terlibat yakni pemerintah daerah terkait, perbankan, KMIS dan Bulog. E-warong dipersiapkan bagi pemasaran hasil Kube atau UEP di wilayah tersebut, salah satu lokasi sudah memasarkan hasil produk Kube mandiri terutama lokasi e-warong Harapan dalam bentuk roti, keset, tas, dan makanan kecil.

Sasaran e-warong mengacu basis data terpadu (BDT) yang dikelola Kementerian Sosial berdasar aturan Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2011, ada 40 persen orang yang paling bawah tingkat ekonomi, dari 40 persen tersebut diambil 10 sampai 11 persen yang terbawah. Jumlahnya ada enam juta keluarga menjadi

target penerima PKH tahun 2016, sedang untuk penerima BPNT ada 25 persen sekitar 15,5 juta keluarga, jadi jumlah penerima BPNT lebih besar. Sasaran e-warong menerima bantuan sosial PKH sebesar 950 ribu sampai 2,3 juta rupiah dan BPNT yang merupakan penerima PKH mendapat 15 kg per keluarga per bulan.

Target penerima manfaat mendapat bantuan non tunai adalah dapat tercukupi kebutuhan pangan, target ideal yang dianjurkan setiap bantuan non tunai adalah 500 sampai 1000 PM. Target pelayanan yang diberikan di E-warong Kube Harapan Kita 527 PM; target di E-warong Kube Sanjaya 600 PM; target di E-warong Kube Sinar Mulya 384 PM dan di E-warong Kube Cahaya Harapan baru mencapai 357 PM. Target pendirian bantuan non tunai untuk tahun 2016 sebanyak 300 e-warong dan tahun 2017 sebanyak 3000 e-warong di seluruh Indonesia. Satu kecamatan diharap memiliki satu e-warong dan idealnya melayani 1000 PM. Berdasar hasil wawancara diperoleh informasi bahwa kedudukan hukum e-warong masih dalam proses legalisasi.

Penerima manfaat mendapatkan pelayanan berupa pencairan dan pengaktifan kartu untuk mengakses kebutuhan pokok berdasar besar bantuan sosial yang ditetapkan melalui agen bank. E-warong dapat menampung dan memasarkan hasil karya anggota Kube. Pemasaran hasil Kube baru ada di satu lokasi yaitu di Kube Cahaya Harapan Madiun berupa keset, tas, snack, dan camilan.

Jangkauan anggota di empat lokasi telah mempertimbangkan jarak dengan penerima manfaat yakni kurang lebih lima kilometer dari tempat tinggal peserta. Hal ini sesuai dengan prinsip bantuan non tunai dekat dengan masyarakat sehingga memudahkan dalam pencairan dan tidak perlu mengantri, penerima manfaat dapat mengakses ketersediaan bahan pokok sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Berdasar hasil temuan tersebut direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI dalam hal ini Direktorat Penanggulangan Fakir Miskin, melalui kegiatan e-warong perlu dilakukan

antara lain: (1) Penerima bantuan sosial ke depan tidak hanya penerima manfaat PKH dan BPNT, tetapi juga keluarga disabilitas dan keluarga miskin yang perlu bantuan; (2) Dasar pemikiran untuk bantuan sosial non tunai diperluas dari berbagai sumber, lembaga terkait lain seperti PM Rutilahu, usaha ekonomi produktif (UEP) atau Kube, dll; (3) Jenis barang yang dijual ditambah sesuai kebutuhan masyarakat, seperti: alat tulis, perlengkapan sekolah, kebutuhan ibu hamil dan bayi; (4) Target ideal 500-1000 PM belum semua terpenuhi, perlu penambahan disesuaikan *database* yang sudah ditentukan, sehingga PM yang belum mendapat bantuan segera mendapat haknya; (5) Bantuan non tunai sebagai embrio koperasi perlu dipercepat legalitasnya agar berbadan hukum.

Variabel input akan dilihat dalam legalitas, pendampingan, bantuan, sarana dan prasarana, SDM, organisasi, keterlibatan pemangku kepentingan dan jejaring. Temuan lapangan akan dijelaskan sebagai berikut: Legalitas pelaksanaan bantuan non tunai di empat lokasi didukung semua pihak yakni pemerintah setempat seperti bupati/ walikota, Himbara, KMIS, dan Bulog. Dukungan berbagai pihak mempunyai peran masing-masing dalam pelaksanaan e-warong. Perbankan menyiapkan rekening bagi setiap peserta PKH berikut aplikasi dan koneksi internet, Bulog menyiapkan kebutuhan pokok yang akan dibeli oleh peserta PKH dengan sistem non tunai, KMIS sebagai koordinator bantuan non tunai koperasi yang mengendalikan aturan main bantuan non tunai termasuk berbicara dengan bank, bulog, retail, sehingga perkembangan kebutuhan pokok bisa dipantau, harga terjangkau dan lebih murah. Keempat lokasi telah mempunyai legalitas dan mekanisme penyelenggaraan e-warong.

Pendampingan pelaksanaan bantuan non tunai di empat lokasi dengan memberdayakan pendamping PKH, pekerja sosial dan anggota PKH. Pendamping PKH minimal sarjana sehingga mempunyai keterampilan bidang informasi teknologi (IT) yang baik. Keempat lokasi telah menunjuk ketua. Pengelola, agen bank dan

ketua e-warong adalah salah seorang penerima manfaat PKH. Hal tersebut untuk menghindari adanya pemotongan bantuan oleh pendamping atau pihak yang tidak bertanggungjawab.

Bantuan sosial non tunai terbatas untuk penerima manfaat PKH dan BPNT (anggota PKH), bantuan untuk penguatan SDM pengelola e-warong belum maksimal. Pengelola baru ada satu orang yakni bendahara yang telah mendapatkan pelatihan tentang penyelenggaraan bantuan non tunai di empat lokasi sebelum pelaksanaan e-warong. Bantuan modal usaha belum ada karena masih diperlukan legalitas agar lebih mudah mengakses segala bantuan untuk pengembangan e-warong. Pengadaan sarana dan prasarana e-warong cukup representatif karena berada di tengah masyarakat miskin dan dapat terjangkau. E-warong membutuhkan aplikasi berbasis internet untuk memudahkan transaksi secara *online*. Keberadaan pendamping sangat penting untuk keberlangsungan e-warong karena membantu masyarakat yang belum mengerti tentang internet.

Keberadaan e-warong sebagai pusat penyaluran bantuan non tunai atas inisiatif pendamping atau anggota PKH, artinya anggota masyarakat peduli terhadap program ini dan bersedia rumahnya sebagai tempat e-warong. E-warong dilengkapi sarana penunjang lain seperti etalase, rak, dan mesin *EDC* (*Electronic Data Capture*). Mesin *EDC* berfungsi tidak hanya sebagai alat gesek tunai tetapi juga sebagai alat transaksi pembayaran belanja di seluruh lokasi.

Sumber daya manusia pada bantuan non tunai harus dapat mengajarkan orang miskin akan teknologi. SDM yang menangani e-warong adalah pendamping PKH yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 15 ribu orang yang melayani 6 juta orang penerima PKH. Jumlah pendamping hingga saat ini 26 ribu artinya satu orang mendampingi 250 sampai 300 penerima PKH. Pendamping PKH adalah sarjana yang memiliki keterampilan di bidang IT, sehingga pendamping mampu bekerja dengan baik dan dapat menularkan keterampilannya kepada pe-

ngelola e-warong. Di empat lokasi, ketua adalah pendamping PKH artinya sudah sesuai dengan mekanisme pembentukan e-warong.

Keberadaan organisasi bantuan non tunai sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di empat lokasi. Pemerintah daerah dan perbankan berperan aktif mengedukasi penerima bantuan sosial non tunai. Hal ini guna menyukseskan program penyaluran bantuan dan meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan bantuan non tunai. Di semua lokasi susunan organisasi terdiri ketua, wakil, bendahara, sekretaris dan anggota (berjumlah sepuluh orang).

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyalurkan bantuan sosial secara non tunai memanfaatkan layanan sistem pembayaran Himbara. Kegiatan tersebut sebagai upaya pemerintah bersinergi dan mendukung transformasi pembayaran penyaluran bantuan sosial yang semula tunai menjadi non tunai. KMIS memayungi e-warong dan memberi izin usaha mikro kecil kepada e-warong Kube PKH. Izin usaha mikro kecil dibutuhkan e-warong agar memiliki legalitas dan dapat berkembang lebih baik. Berdasar hasil temuan lapangan direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI dalam hal ini Direktorat Penanggulangan Fakir Miskin, bahwa kegiatan e-warong perlu dilakukan: (1) Legalitas e-warong secara tertulis (berbadan hukum) dalam penyelenggaraan penyaluran bantuan non tunai (2) Pengelola e-warong merupakan agen bank dan penerima manfaat perlu mendapat bimbingan teknis dalam pengelolaan bantuan non tunai terutama keterampilan managerial, untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan berfikir para anggota. Pengelola dituntut untuk mengelola usaha yang sedang dijalankan, berupaya menggali dan memanfaatkan sumber yang tersedia. Selain itu, diharapkan dalam berorganisasi dapat menumbuhkan sikap dan rasa kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, kepedulian dan kesetiakawanan sosial baik kepada keluarga binaan sosial maupun masyarakat luas. (3) Sarana dan prasarana dukungan jaringan terkoneksi internet yang baik sehingga dapat

mengakses basis data secara *online* dengan cepat pada waktu transaksi. Mesin *EDC* sebagai alat untuk transaksi menggunakan kartu debit yang diberikan oleh bank. Mesin dikeluarkan oleh pihak bank untuk para penerima manfaat yang telah bekerjasama dengan hampir seluruh e-warong. (4) Struktur organisasi, pembagian tugas dan uraian tugas jelas. (5) Keterlibatan pemangku kepentingan dan jejaring perlu diperluas dengan pihak terkait sesuai kebutuhan bantuan yang akan diberikan atau dicairkan.

Variabel proses akan dilihat dari kelayakan, sosialisasi, analisis kebutuhan, analisis potensi dan sumber, serta penyelenggaraan e-warong. Temuan lapangan dapat dijelaskan sebagai berikut. Kelayakan program bantuan non tunai sangat strategis dalam pengentasan dan pemberdayaan keluarga miskin, karena bantuan non tunai merupakan agen bank artinya orang miskin tidak lagi menjadi penonton akan tetapi menjadi pelaku karena bantuan non tunai adalah milik orang miskin dan dikelola mereka dan pendamping dengan kebijakan langsung didukung teknologi. Hal ini dilakukan agar penyaluran bantuan menjadi lebih transparan, memudahkan pengontrolan bantuan dan memperluas inklusi keuangan di masyarakat.

E-warong merupakan tempat pendistribusian bantuan non tunai dan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan. E-warong bagian dari koperasi, tempat menjual sembako murah dan memberikan kemudahan bagi penerima manfaat untuk terpenuhi kebutuhan secara cepat. Keempat e-warong sebagai lokasi penelitian dianggap layak karena mempunyai nilai strategis dalam pengentasan dan pemberdayaan keluarga miskin. Anggota pengelola e-warong adalah peserta PKH artinya orang miskin telah menjadi pelaku pengentasan kemiskinan. Salah satu penerima manfaat, menuturkan bahwa dirinya baru pertama kali menggunakan kartu elektronik tanpa memegang uang *cash*, dan merasakan uang yang tersimpan aman.

Sosialisasi penyelenggaraan bantuan non tunai dilakukan bertujuan agar masyarakat menge-

tahui cara pencairan bantuan dari tunai menjadi non tunai. Keempat lokasi sudah melakukan sosialisasi kepada PM PKH dan BPNT. Analisis kebutuhan bantuan non tunai adalah tempat penyaluran dana bantuan sosial bagi PM, program ini sudah dirintis oleh Presiden Joko Widodo sejak November 2014 atau sebulan setelah dilantik sebagai presiden. Kementerian Sosial telah berkomunikasi dengan 18 Kementerian atau Lembaga Negara lain yang memiliki program bantuan sosial. Penyelenggaraan bantuan non tunai di empat lokasi telah melibatkan perbankan negara (BRI, BNI, BTN dan Mandiri), Bulog, dan KMIS.

Analisis potensi dan sumber penyelenggaraan bantuan non tunai dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Hal tersebut karena pengurus dan penerima manfaat program bantuan non tunai mampu mengikuti kegiatan melalui jaringan kerja sama antar kelompok lokal dalam peningkatan usaha kesejahteraan sosial. Selain itu dengan menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan peranserta masyarakat. Warga penerima PKH dan Rastra, mendapat kartu sebagai bukti penerima program tersebut. Mereka cukup datang ke warong yang ditunjuk untuk memilih barang yang ingin dibeli, dengan berbekal kartu program dan nomor pin, transaksi bisa dilayani.

Pelaksanaan di lapangan sudah ada jejaring dari pemerintah daerah setempat seperti Himbara, Bulog, KMIS dan Kube di wilayah tersebut. Pengelola bantuan non tunai di empat lokasi melibatkan pendamping sosial. Bantuan non tunai diharapkan melibatkan keterampilan kerja dan usaha masyarakat miskin yang ada (Kube). Dari empat lokasi penelitian, ada satu lokasi yang melibatkan pemasaran hasil Kube yaitu Kube Cahaya Harapan di Madiun dalam bentuk tas, keset, dan camilan. Tempat penyelenggaraan bantuan non tunai di empat lokasi adalah inisiatif dari pendamping PKH, artinya ada kepedulian terhadap program pengentasan kemiskinan. Tempat penyelenggaraan bantuan non tunai perlu ada legitimasi yang jelas seperti

sewa atau kontrak, pinjam atau milik sendiri. Sistem penyaluran bantuan sosial berbasis non tunai bisa dikonversi ke gula, minyak goreng, dan tepung terigu, bansos sedang diupayakan untuk bisa dikonversi dengan gas elpiji 3 kg. Beberapa ibu penerima PKH dan Rastra terlihat berkumpul di salah satu warong yang ditunjuk sebagai penyedia layanan elektronik warong.

Penyelenggaraan e-warong pada bantuan non tunai didukung ketersediaan sarana, tempat, dan keberadaan e-warong. Empat lokasi penelitian telah memiliki tempat untuk penyelenggaraan bantuan non tunai yaitu E-warong Harapan Kita di Jalan Tentara Zen, Kelurahan Telung Rejo Kecamatan Pare, Kabupten Kediri, E-warong Sanjaya di Jalan Banjaran Gang I/67- RT 117 Kediri, E-warong Sinar Mulya di Jalan Sitihiinggil No 1 RT 03. Rw 3 Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojojoto Kota, E-warong Cahaya Harapan di Jalan Imam Bonjol No 26 Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Sistem distribusi berbasis *online*, memerlukan aktivasi KKS, sistem pencairan dana dan administrasi dalam penyelenggaraan bantuan non tunai perlu disiapkan secara terorganisir, jelas dan mudah diterapkan. Dari hasil pengamatan dan wawancara di empat lokasi ternyata kesiapan untuk penyelenggaraan bantuan non tunai belum seluruhnya berjalan baik, masih ada yang belum terorganisir jelas, memerlukan pendampingan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Pemerintah daerah perlu turun tangan mengawasi dan mengevaluasi kegiatan tersebut sehingga pencapaian yang diharapkan dapat terwujud. Mekanisme pengaduan belum teridentifikasi di empat lokasi e-warong.

Hasil temuan penelitian lapangan direkomendasikan kepada Direktorat Penanggulangan Fakir Miskin, melalui kegiatan e-warong perlu dilakukan antara lain: anggota dan pengelola e-warong perlu melibatkan lebih banyak PM, artinya mereka adalah pelaku dalam mengentaskan dirinya sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Sosialisasi perlu dilakukan kepada PM PKH dan BPNT serta masyarakat

miskin sesuai sumber bantuan yang akan diberikan pihak terkait. Pemangku kepentingan dapat melakukan jejaring secara luas dengan berbagai instansi untuk memudahkan pelaksanaan pemberian bantuan sosial. Pelaksanaan secara terpadu memudahkan program bantuan non tunai dalam satu kartu kombo yang berfungsi untuk menampung berbagai bantuan sosial. Pemerintah pusat dan daerah memerlukan pengembangan analisis sumber yang sesuai dengan ragam dan bentuk bantuan sosial yang akan diberikan kepada PM. Penyelenggaraan bantuan non tunai memerlukan sistem pengaduan penyelenggaraan e-warong secara terpadu sehingga memudahkan apabila ada keluhan. Sosialisasi mekanisme pengaduan berkaitan dengan bentuk dan jenis bantuan non tunai, yang mudah, cepat, dan responsif. Pelaksanaan e-warong perlu pengawasan secara reguler dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan agar hasilnya dijadikan sebagai rujukan untuk perbaikan program selanjutnya.

Variabel *product* dapat dilihat dalam *output* dan *outcome*. *Output* dilihat dari ketercukupan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. *Outcome* dapat dilihat dalam perubahan perilaku warga miskin, terjamin hak hidup, rasa percaya diri, tanggung jawab terhadap kehidupan, ketahanan sosial, meluasnya partisipan dan pengelolaan keuangan keluarga. Temuan di lapangan dapat di gambarkan sebagai berikut.

Dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan ternyata bantuan sosial yang diberikan anggota PKH dan BPNT, ketercukupan pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan di empat lokasi pada saat ini belum seluruhnya terpenuhi karena masih ada kendala seperti penyaluran, transportasi, serta sosialisasi yang tumpang tindih. Kebutuhan papan perlu bantuan sosial lain yang dapat mendukung pembangunan rumah seperti bahan bangunan yang relatif terjangkau. Masyarakat miskin perlu subsidi untuk bahan bangunan. E-warong diharapkan dapat memfasilitasi bahan bangunan untuk mencukupi kebutuhan papan.

Indikator penelitian *outcome* dilihat dari perubahan perilaku warga miskin. Perubahan perilaku penerima manfaat miskin diharapkan tidak konsumtif, artinya walaupun mereka dapat bantuan sosial belanja sesuai kebutuhan, sisanya dapat menabung di rekening bank. Hasil wawancara dengan beberapa penerima manfaat, mereka merasa senang dengan adanya e-warong, karena dapat menyimpan uang secara aman di bank dan memudahkan transaksi bila perlu.

Penerima manfaat terjamin hak hidupnya karena ketercukupan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Tingkat pendidikan yang tinggi disertai kesehatan yang baik akan membentuk SDM yang berkualitas, diharapkan ke depan dapat memutus rantai kemiskinan. Mereka tumbuh kepercayaan diri atas dasar kepemilikan penghasilan melalui pemberdayaan masyarakat miskin. Mereka dapat memasarkan hasil Kube di e-warong, merasa mandiri, berdaya dan tumbuh rasa percaya diri. PM di empat lokasi diarahkan memasarkan hasil Kube di e-warong, tetapi baru satu lokasi yaitu E-warong Cahaya Harapan memasarkan hasil kelompok usaha bersama berupa tas, keset dan makanan ringan.

Penerima manfaat memiliki tanggungjawab terhadap kehidupan, mampu memenuhi kebutuhan dasar dan sosial melalui bantuan sosial non tunai yang disatukan dalam satu kartu kombo. Mereka dapat mencairkan sesuai kebutuhan dan harus mengatur keluar masuknya bantuan serta memakai bantuan secara tepat, artinya bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan tersebut. Mereka berhati-hati dalam menyairkan dana dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan, sikap ini menunjukkan tanggungjawab terhadap bantuan yang diterima.

Penerima manfaat memiliki ketahanan sosial berupa ketangguhan serta keuletan dan kemampuan mengembangkan potensi diri setelah mendapatkan bantuan non tunai sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Melalui bantuan non tunai masyarakat miskin dapat tercukupi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kemandirian usaha.

BPNT sebagai salah satu cara menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan daerah. Kondisi tersebut dapat mencegah terjadinya kejahatan dan kriminalitas dalam masyarakat sehingga tercipta lingkungan aman dan akhirnya ada ketahanan sosial dalam masyarakat. Masyarakat miskin dapat mengelola keuangan sesuai yang diharapkan dan mencukupi kebutuhan dasar artinya melalui kartu kombo yang multi fungsi keluarga miskin dapat menggunakan bantuan sosial sesuai kebutuhan dan kepentingan keluarga.

Berdasar hasil temuan lapangan direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI dalam hal ini Direktorat Penanggulangan Fakir Miskin dalam kegiatan e-warong perlu ada buku pedoman tentang pelaksanaan BPNT agar lebih efisien dan efektif bagi pengelola dan penerima manfaat. Memiliki indikator keberhasilan di setiap tahap agar dapat terukur kinerja dan capaiannya atau keterjaminan hak hidup bagi masyarakat miskin, kepercayaan diri, pengelolaan keuangan keluarga dan tanggungjawab terhadap kehidupannya. Bantuan pangan non tunai Kube dan PKH dikembangkan oleh PT BNI untuk daerah perkotaan dan PT BRI untuk daerah perdesaan agar penyaluran bantuan sosial pemerintah lancar.

D. Penutup

Penerima manfaat mendapat bantuan non tunai Kube PKH di Kota Kediri dan Kota Madiun bernaung di bawah Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS), dukungan aplikasi layanan bantuan sosial dan subsidi dari pemerintah di wilayah perkotaan oleh BNI sedang di perdesaan oleh BRI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan persiapan pelaksanaan e-warong belum matang, karena belum ada kelengkapan regulasi program seperti pedoman umum, petunjuk teknis operasional dan kejelasan kerja sama antarpihak. Selain kelengkapan regulasi, pelaksanaan e-warong Kube PKH ke depan memerlukan beberapa prasyarat terkait pembangunan dan pemantapan organisasi, pengelolaan yang berfungsi sebagai titik distribusi bantuan

sosial non tunai, agen bank, penerima manfaat, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif. Kendala lain yang dihadapi pengurus bantuan non tunai dan e-warong antara lain: belum seluruhnya mendapat pelatihan manajemen pengelolaan bantuan non tunai sehingga kegiatan pelaksanaan memerlukan bimbingan dan pelatihan manajerial. Koordinasi pengurus dilakukan oleh beberapa lembaga sudah dilakukan pada awal pendirian bantuan non tunai, namun perlu pendampingan dan bimbingan secara berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga e-warong dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Perlu pembiasaan masyarakat untuk menggunakan kartu debit sehingga bantuan non tunai dapat berjalan dengan baik. Pelaksana bantuan non tunai memerlukan pendamping yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

Keberadaan bantuan non tunai mendukung citra Kota Kediri sebagai *the service city* yang memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat dan Kota Madiun sebagai kota perdagangan, pendidikan, perindustrian. Faktor pendukung program bantuan non tunai karena antusias masyarakat yang mendukung program e-warong, keterlibatan dan kerjasama antarlembaga terkait yakni Bank BRI, BNI, Bulog, koperasi, peran pendamping dalam mensukseskan pendirian e-warong. Bank BRI sudah menciptakan layanan satu atap melalui *e-wallet* yang menampung berbagai macam bantuan dan layanan perbankan dalam satu kartu, sehingga transparansi pelaksanaan dan pengguna dapat terlihat langsung dari alat pembayaran elektronik yang digunakan dalam satu kartu. Di masa mendatang penerima manfaat bantuan sosial dapat melihat berbagai nilai bantuan yang diberikan, penggunaan serta saldo tabungan dalam kartu tersebut. Beberapa pengurus bantuan non tunai dan penerima manfaat sudah dilatih untuk menggunakan kartu debit, namun masih perlu pendampingan agar mekanisme yang dilakukan bantuan non tunai dapat berjalan lancar.

Harapan ke depan e-warong mampu menampung hasil produksi garapan kelompok usaha ber-

sama dan memasarkannya. Bank penyelenggara dapat melakukan kerjasama untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara langsung kepada penerima manfaat. E-warong dapat berbentuk koperasi yang berbadan hukum. Penggunaan *e-wallet* dapat dilakukan di seluruh bantuan non tunai karena dapat menampung berbagai bantuan dari pemerintah secara transparan, tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan. Bantuan non tunai diharapkan menyediakan kebutuhan masyarakat miskin tidak hanya menyediakan barang yang dikonsumsi tetapi juga barang produksi yang dibutuhkan untuk pengembangan Kube. Penerima bantuan sosial tidak hanya PM PKH dan BPNT tetapi juga diberikan kepada keluarga miskin yang perlu bantuan. Perlu ada legalitas formal untuk setiap e-warong. Pada akhirnya bantuan non tunai dapat memberdayakan masyarakat miskin memiliki tanggung jawab, percaya diri dan terjamin kebutuhan dasar.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Kediri, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun, aparat pemerintah setempat serta lainnya yang tidak dapat kami sebut satu persatu telah membantu penelitian ini.

Pustaka Acuan

- George Ritzer, (2002), *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Michael Huberman, (2009). *Analisi Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexi, (2014) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Pintowati, W., & Otok, B. W. (2012). *Pemodelan Kemiskinan di Propinsi Jawa Timur dengan Pendekatan Multivariate Adaptive Regression Splines Ensemble*. Jurnal Sains Dan Seni ITS. Retrieved from http://www.ejournal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/2072
- Prastowo. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam perspektif Rancangan Penelitian)*. In *Metode Peneli-*

- tian Kualitatif (Dalam perpektif Rancangan Penelitian)* (pp. 8–22).
- Rahardjo, (1999), *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Edisi Pertama, Gadjah Mada University Press.
- Riska dkk. (2007). *Makalah Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan*. Universitas Indraprasta Jakarta.
- Suryawati, C. (2005). *Memahami kemiskinan secara multidimensional*. Jmpk, 8(3), 121–129.
- Syawie, M. (2011). *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial*. Informasi, 16, 213–219. Retrieved from <http://puslit.kemosos.go.id/upload/post/files/21f67d035eb50eff518309e438be4c8b.pdf>
- Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- Kedirikota, *Angka Kemiskinan di Kota Kediri Menurun*, <https://kedirikota.go.id>
- BPS Kota Kediri, *Sosialisasi Sensus Ekonomi 2016* <https://www.kedirikota.go.id>

Index Penulis

A

Andayani Listyawati 33
Anwar Sitepu 101
Arif Sofianto 185

C

Chatarina Rusmiyati dan Etty Padmiati 119

D

Daud Bahransyaf 43, 399

E

Elly Kuntjorowati 209
Elly Kuntjorowati dan Sri Prastyowati 345

F

Fatwa Nurul Hakim dan Gunawan Wibisono 369

G

Gunanto Surjono 151

H

Hari Harjanto Setiawan dan Bambang Pudjianto 311
Husmiati, Nurdin Widodo, Alit Kurniasari, Ivo Noviana, dan M. Belanawe S. 21

I

Ikawati 57, 333
Irmawan 359
Istiana Hermawati 223

K

Kissumi Diyanayati dan Retnaningdyah Weningtyastuti 173

M

Murdiyanto 75

R

Ratih Probosiwi 133
Robert Siburian 381
Ruaida Murni dan Mulia Astuti 295
Rukmini, Ristrini, dan Oktarina 239

S

Soetji Andari 195, 427
Sunit Agus Tri Cahyono 281

T

Tateki Yoga Tursilarini 413
Teuku Murdani 11
Trilaksmi Udiati dan Sri Yuni Murtiwidayanti 265
Tyas Eko Raharjo Florentius 323

U

Uji Hartono 89

W

Warto dan Chatarina Rusmiyati 251

Y

Yanuardi, Kurnia Nur Fitriana, dan Marita Ahdiyana 1

Ucapan Terima Kasih

Dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) Volume 16 Nomor 4 Desember 2017, *review* dan proses cetak artikel melibatkan empat mitra bestari, dewan redaktur mengucapkan terima kasih kepada mitra bestari yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Prof. Dr. Phil. Janianton Damanik, M.Si. (Pembangunan Sosial, UGM)
2. Drs. Latiful Khuluq, M.A., B.Sw., Ph.D. (Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga)
3. Dr. Harmona Daulay, S.Sos., M.Si. (Sosiologi, USU)
4. Dr. Tukino (Kesejahteraan Sosial, STKS Bandung)

Semoga kerjasama dengan mitra bestari tersebut dapat mengontrol kualitas sajian tulisan di JPKS, dapat lebih membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat yang memiliki kepedulian dalam permasalahan sosial pada umumnya, dan masalah kesejahteraan sosial pada khususnya.

Dewan Redaktur JPKS